

UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK HUKUM PELAYANAN JASA BANK MELALUI
INTERNET BANKING
STUDI KASUS PADA BANK CENTRAL ASIA**

SKRIPSI

Oleh:

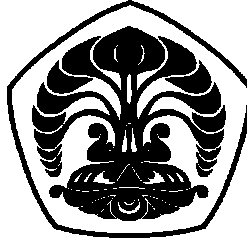
DESSI SYAFRI

0598230556

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN IV**

DEPOK

JUNI 2010



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK HUKUM PELAYANAN JASA BANK MELALUI
INTERNET BANKING
STUDI KASUS PADA BANK CENTRAL ASIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

**Oleh:
DESSI SYAFRI
0598230556**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN IV**

**DEPOK
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dari semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama: Dessi Syafri

NPM: 0598230556

Tandatangan:

Tanggal:

Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Dessi Syafri
NPM : 0598230556
Program Kekhususan : IV (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)
Judul Skripsi : Aspek Hukum Pelayanan Jasa Bank melalui *Internet Banking* Studi Kasus pada Bank Central Asia (BCA)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi **Kekhususan IV**, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : **Aad Rusyad, SH., MKn.** (.....)

Pembimbing II: **Suharnoko, SH., MLI.** (.....)

Penguji : **Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.** (.....)

Penguji : **Purnawidhi Whardana, SH., MH.** (.....)

Ditetapkan di: **Depok**

Tanggal: **Juni 2010**

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT., yang telah memperkenankan selesainya penulisan skripsi ini setelah tertunda sekian lama.

Sejak semula saya berencana menulis skripsi tentang hukum perbankan dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi di bidang perbankan. Sebabnya adalah: **pertama**, penggunaan teknologi dalam layanan perbankan di Indonesia masih relatif baru, sehingga seringkali menimbulkan pertanyaan sejauhmana kehandalan sistem ini baik dari kemungkinan kegagalan sistem itu sendiri maupun dari berbagai upaya kejahatan? **Kedua**, berkaitan dengan yang pertama, bagaimana hukum dan ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan mengatur masalah penerapan teknologi di bidang perbankan ini?

Topik mengenai *internet banking* ini merupakan topik kedua yang saya pilih, sebelumnya saya ingin menulis tentang *mobile banking*. Sedangkan pilihan atas Bank BCA yang melaksanakan *internet banking* dalam bentuk “Klik BCA” sebagai studi kasus, melulu karena bank ini terbilang sangat maju dalam penerapan teknologi sistem informasi di bidang perbankan.

Studi ini dimaksudkan sebagai skripsi yang menjadi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI).

Untuk itu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-bapak yang telah memungkinkan saya menulis dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, yakni: Bapak Aad Rusyad, SH., MKn. selaku Pembimbing I; Bapak Suharnoko, SH., MLI. sebagai Pembimbing ke II dan Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M, Ph.D., yang bertindak selaku Penasihat Akademik.

Secara khusus, saya ingin menyampaikan pula ucapan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.; dan Bapak Purnawidhi Whardana, SH., MH., yang bersama para Pembimbing saya telah bertindak sebagai penguji skripsi ini.

Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Surini Ahlan Syarief, SH., MH., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan FH-UI; Koordinator Mata Kuliah Program Kekhususan Hukum Ekonomi; dan Ketua

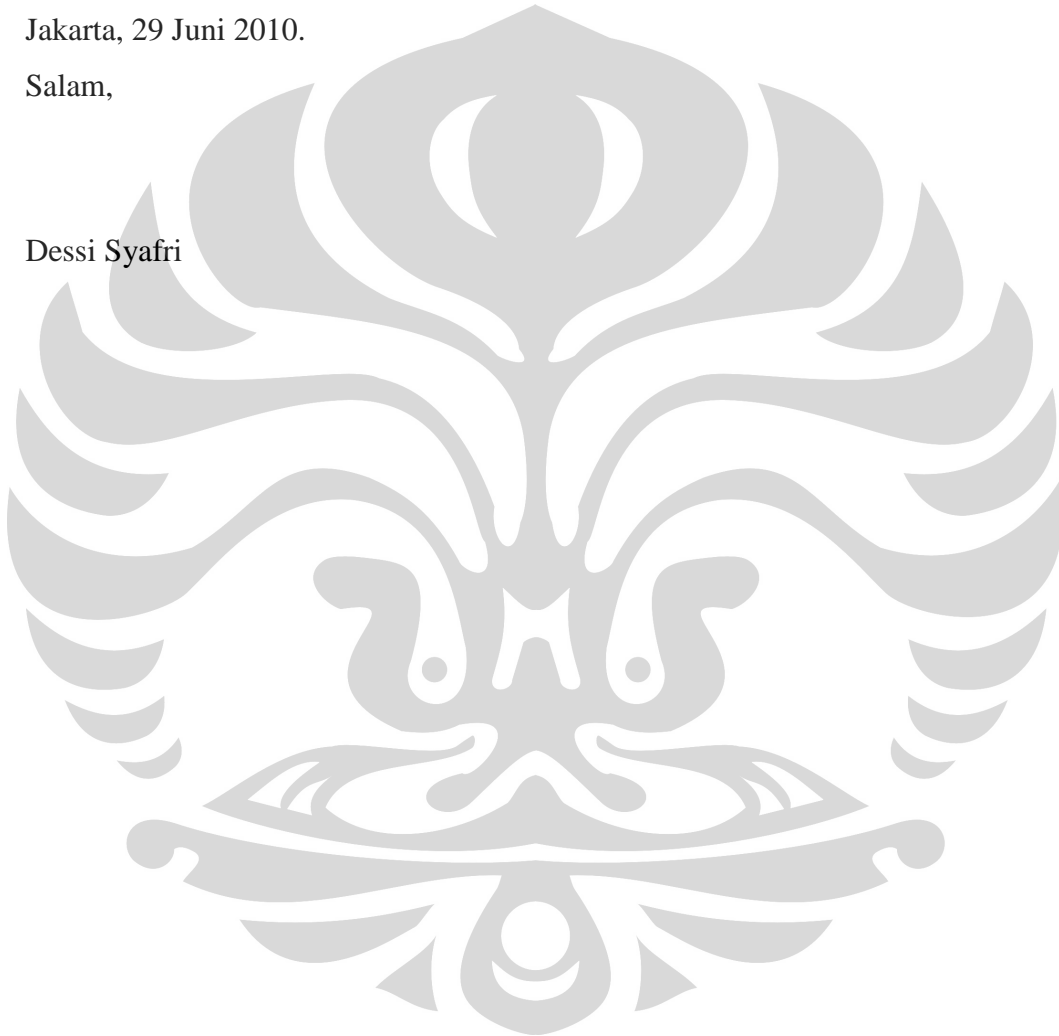
Program Ekstensi FH-UI serta kepada seluruh staf pengajar FH UI yang pernah mendidik saya sebagai peserta didik.

Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para kolega saya di BIS, yang di sela-sela kesibukan kerja menyemangati saya menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih tak terhingga kepada Ayah saya (almarhum), Ibu, Kakak serta adik saya. Tanpa dukungan mereka mustahil studi ini dapat selesai.

Jakarta, 29 Juni 2010.

Salam,

Dessi Syafri



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Dessi Syafri
NPM: 0598230556
Program Studi: Program Kekhususan IV
Fakultas: Hukum
Jenis Karya: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Aspek Hukum Pelayanan Jasa Bank melalui *Internet Banking* Studi Kasus pada Bank Central Asia (BCA).

Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, serta mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Depok
Juni 2010

(.....)

ABSTRAK

Nama: Dessi Syafri
Program Studi: Hukum tentang Kegiatan Ekonomi; FH UI
Judul: Aspek Hukum Pelayanan Jasa Bank melalui Internet Banking
Studi Kasus pada Bank Central Asia

Skripsi, 2010, x + 68

Pemanfaatan teknologi sistem informasi (TSI), termasuk *internet banking*, merupakan keniscayaan bagi dunia perbankan. Selain sangat membantu dalam pengembangan berbagai produk baru perbankan, juga akan meningkatkan fasilitas pelayanan bank kepada nasabah.

Pokok permasalahan skripsi ini adalah bagaimana Bank Indonesia (BI) mengatur manajemen risiko dalam penggunaan TSI oleh Bank Umum melalui Peraturan BI No 9/15/PBI/2007 (30 Nop 2007); dan, bagaimana penerapan Peraturan BI (PBI) ini di Bank Central Asia (BCA)?

Metode penulisan yang digunakan deskriptif-analitis, mendeskripsikan data yang terkait dengan permasalahan skripsi ini, kemudian menganalisisnya berdasar data yang ada tersebut.

Kesimpulan: *pertama*, PBI No 9/15/PBI/2007 sudah cukup komprehensif. PBI ini merupakan penyempurnaan dari PBI No. 5/8/PBI/2003 (19 Mei 2003), yang memperbaiki Surat Keputusan Direksi BI (SKDBI) No 27/164/KEP/DIR dan Surat Edaran BI (SEBI) No 27/9/UPPB tentang Penggunaan TSI Perbankan (31 Maret 1995). *Kedua*, PBI No. 9/15/PBI/2007 telah dijalankan oleh Bank BCA dalam melaksanakan *internet banking*.

Abstract

Name: Dessi Syafri
Programme: Economic Law; FH UI
Title: Services Legal Aspects of the Bank through Internet Banking:
A Case Study on the BCA Bank

Thesis, 2010, ix + 121

Utilization of information systems technology (TSI), including internet banking, is a necessity for the world of banking. In addition to extremely helpful in developing a variety of new banking products, will also improve bank service facilities to customers.

The main problem of this thesis is how BankIndonesia (BI) manage risk management in the use of TSI by commercial banks through BI Regulation No. 9/15/PBI/2007 (30 Nov 2007); and, how the application of BI Regulation (PBI) in the BCA Bank?

Writing method used descriptive-analytical, describing the data related to the problems of this thesis, and then analyze it based on these existing data.

Conclusion: first, PBI No. 9/15/PBI/2007 already quite comprehensive. PBI is an improved version of the PBI No. 5/8/PBI/2003 (May 19, 2003), which improve the Decree of the Board of Directors of BI (SKDBI) Circular No 27/164/KEP/DIR and BI (SEBI) No 27/9/UPPB about the use of TSI Banking (March 31 1995). Second, PBI No. 9/15/PBI/2007 has been executed by the BCA Bank in the implementation of internet banking.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk Kepentingan Akademis.....	vi
Abstrak.....	vii
Daftar Isi.....	viii
1. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Pokok Masalah.....	2
3. Tujuan Penelitian.....	3
4. Kerangka Pemikiran.....	3
5. Metode Penelitian.....	6
6. Sistematika Penulisan.....	7
2. INTERNET BANKING, PENGATURAN DAN PENGAWASANNYA OLEH BANK INDONESIA	
2.A. Internet Banking.....	9
2.A.1. Pengertian dan Dasar Hukum Internet Banking.....	9
2.A.2. Beberapa Layanan Internet Banking.....	12
2.B. Pengaturan dan Pengawasan oleh Bank Indonesia.....	15
2.B.1. Pengaturan (Regulasi).....	17
2.B.2. Pengaturan Tidak Langsung (<i>off-site supervision</i>).....	18
2.B.3. Pengaturan Langsung (<i>on-site supervision</i>).....	19
2.B.4. Kontak Dan Komunikasi Teratur Dengan Bank.....	19
2.B.5. Tindak Remedial dan/atau Penerapan Sanksi.....	19
2.B.6. Kerjasama Dengan Otoritas Pengawasan Bank Di Negara Lain.....	20
3. BANK CENTRAL ASIA (BCA) DAN INTERNET BANKING DI BANK CENTRAL ASIA (Klik BCA)	
3.A. Bank Central Asia (BCA).....	21
3.B. Internet Banking BCA (Klik BCA).....	24
3.B.1. Syarat dan Ketentuan Internet Banking BCA.....	25
3.B.2. Kebijakan Privacy dan Pengamanan.....	32
4. PENERAPAN PBI NOMOR 9/15/PBI/2007 TENTANG MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TI DI BANK CENTRAL ASIA (BCA)	
4.A. Hal-hal yang diatur PBI No. 9/15/PBI/2007.....	38

4.A.1. Pengawasan Aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi.....	38
4.A.2. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Penggunaan Teknologi informasi di Bank.....	39
4.A.3. Proses Manajemen Risiko Terkait Teknologi Informasi.....	49
4.A.4. Sistem Pengendalian dan Audit Intern Atas Penyelenggaraan Teknologi Informasi.....	55
4.B. Dampak Penerapan PBI No. 9/15/PBI/2007	
4.B.1. Dampak Penerapan PBI No. 9/15/PBI/2007 bagi Bank Dalam Kegiatan Internet Banking.....	56
4.B.2. Dampak Penerapan PBI No. 9/15/PBI/2007 terhadap Nasabah..	63
5. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	64
5.2. Saran.....	65
Daftar Pustaka	67
Daftar Lampiran	
1. Daftar pertanyaan terhadap Bank BCA.	
2. Peraturan Bank Indonesia No 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/30 DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	
4. Kebijakan Privasi dan Pengaman Internet Banking BCA	

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Latar Belakang:

Pemanfaatan teknologi sistem informasi (TSI) merupakan keniscayaan bagi dunia perbankan, karena sangat membantu dalam pengembangan berbagai produk baru perbankan, yang selanjutnya akan meningkatkan fasilitas pelayanan bank kepada nasabah

Electronic Fund Transfer (EFT) adalah salah satu contohnya. Produk ini antara lain meliputi: *Automated Teller Machine* (ATM), *Point of Sales* (POS), *Electronic Home Banking* (biasa disebut sebagai *Internet Banking*), dan *Money Transfer Network* (dikenal sebagai *Mobile Banking*).

Dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin timbul dalam pemanfaatan TSI tersebut, Bank Indonesia (BI) menerbitkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKDBI) Nomor 27/164/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 27/9/UPPB tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Perbankan, keduanya tanggal 31 Maret 1995.

Bersamaan dengan itu, BI juga mengeluarkan buku Panduan Pengamanan Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank sebagai lampiran dari SKDBI dan SEBI tersebut. Dinyatakan penggunaan TSI mengandung risiko yang bersifat teknis dan khusus, yang berbeda dengan penggunaan sistem manual.

Risiko yang dimaksud adalah: (1) risiko yang dapat terjadi dalam tahap perencanaan dan pengembangan sistem; (2) risiko kekeliruan pada tahap pengoperasian; (3) risiko akses oleh pihak yang tidak berwenang; (4) risiko kerugian akibat terhentinya operasi TSI secara total atau sementara sehingga mengganggu kelancaran operasional bank; (5) risiko kehilangan/kerusakan data. Karenanya dilakukan kontrol dan pengamanan, baik pada tahap identifikasi, verifikasi, transfer dana maupun pada tahap penyelesaian (*settlement*).

Pemberian identifikasi kepada nasabah dilakukan dalam bentuk karakteristik personal (sidik jari, suara), sesuatu yang diingat (*password*, nomor rahasia/PIN, sandi-sandi lain) dan atau dalam bentuk fisik yang dapat dimasukkan ke dalam

sistem (Kartu Plastik yang dilengkapi dengan pita magnetis/Kartu Magnetis, Kunci Khusus, atau identitas fisik lain).

Sehubungan dengan semakin berkembangnya pelayanan jasa bank melalui internet (*internet banking*), maka pada 19 Mei 2003, BI menerbitkan Peraturan BankIndonesia (PBI) Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dalam penggunaan TSI,¹ yang ketentuan pelaksanaannya diatur dalam SEBI Nomor 6/18/DPNP, tanggal 20 April 2004.

Terbitnya PBI itu sedikit banyak didorong oleh pengalaman penggunaan *internet banking* Bank Central Asia (BCA), yang berani mengoperasikan *e-Banking* secara masif di Indonesia melalui situs <https://ibank.klikbca.com/>. Situs ini secara teknis diamankan dengan enkripsi SSL 128 bit dan fasilitas firewall pada situsnya.

Situs KlikBCA sendiri relatif sukar di bobol. Namun pada tahun 2001, Steven Haryano berhasil membobolnya dengan memalsukan situs KlikBCA. Steven membeli sejumlah domain yang mirip dengan situs KlikBCA, yakni: WWW.KLIKBCA.COM; WWW.KILKBCA.COM; CLIKBCA.COM; KCLICKBCA.COM; KLIKBAK.COM.

Orang yang salah mengetik KlikBCA akan masuk ke domain tersebut yang di buat mempunyai tampilan yang sama persis dengan KlikBCA, sehingga pengguna KlikBCA terkecoh dan memasukan *username* dan *password*-nya. Beruntung Steven Haryanto bukan *hacker* yang jahat, beliau memberikan semua file *password* yang berhasil dia *capture* kembali ke BCA dan memohon maaf kepada publik.²

Sebagai penyempurnaan lebih lanjut dari PBI Nomor 5/8/2003 itu, pada 30 Nopember 2007, BI menerbitkan PBI Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan teknologi Sistem Informasi oleh Bank Umum.³ Penerapan PBI diatur dalam SEBI Nomor 9/30/DPNP (12 Desember 2007).

2. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan Manajemen Risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum?

¹ Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4292.

² Surat Permintaan Maaf Steven Kepada Manajemen BCA, dia sampaikan pada tanggal 6 Juni 2001.

³ Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4785

2. Bagaimana penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan *Internet Banking* di Bank Central Asia?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui hal apa saja yang telah diatur BI di dalam PBI Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum berkaitan dengan kegiatan *Internet Banking* di Indonesia.
2. Ingin mengetahui apa pengaruh dari penerapan Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum sehubungan dengan penggunaan *Internet Banking* oleh bank dan nasabahnya di Indonesia. Sedangkan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi atau acuan bagi para pembuat kebijakan serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum, dunia perbankan, maupun kedua-duanya.

Secara praktis, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi kepada khalayak umum, khususnya bank dan nasabah yang menggunakan fasilitas *internet banking*.

4. Kerangka Pemikiran

Banyak orang yang mengatakan bahwa dunia *cyber (cyberspace)* tidak dapat diatur. *Cyberspace* adalah dunia maya dimana tidak ada lagi batas ruang dan waktu.⁴ Padahal ruang dan waktu seringkali dijadikan acuan hukum.

Teknologi digital yang digunakan untuk mengimplementasikan dunia *cyber* memiliki kelebihan dalam hal duplikasi atau regenerasi. Data digital dapat direproduksi dengan sempurna seperti aslinya tanpa mengurangi kualitas data aslinya. Hal ini sulit dilakukan dalam teknologi analog, dimana kualitas data asli lebih baik dari duplikatnya. Sebuah salinan dari dokumen yang ditulis dengan tangan

⁴ Berasal dari kata *cybernetic*, yaitu sebuah bidang studi yang terkait dengan komunikasi dan pengendalian jarak jauh. Dicetuskan pertama kali oleh Norbert Wiener.

memiliki kualitas lebih buruk dari aslinya. Seseorang dengan mudah dapat memverifikasi keaslian sebuah dokumen. Sementara itu dokumen yang dibuat oleh sebuah *word processor* dapat digandakan dengan mudah, dimana dokumen “asli” dan “salinan” memiliki fitur yang sama.

Internet adalah sebuah jaringan komputer terbesar didunia pada saat ini digunakan oleh berjuta-juta orang yang tersebar di segala penjuru dunia. Internet membantu mereka sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, belajar bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan mudah.

Penggunaan internet untuk berbagai macam kegiatan ini sudah berbeda jauh dengan tujuan semula adanya jaringan ini. Internet secara de facto sudah menjadi landasan untuk melakukan bisnis. Internet telah berkembang sedemikian pesat terutama pengaruhnya terhadap dunia bisnis. Mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton mencermati perkembangan internet menyatakan sebagai berikut:⁵

“No single force embodies our electronic transformation more than evolving medium known as the internet Entrepreneurs are able to start new business more easily, with smaller up-front investment requirements., by accessing the internet’s world wide network of customer.”

(Tidak ada suatu kekuatan yang lebih aktual dari perkembangan transformasi elektronik kami yang lebih dikenal sebagai Wiraswasta internet yang mampu memulai bisnis baru lebih mudah, dengan mengakses jaringan dunia internet yang dilakukan oleh para penggunanya).

Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet.

Dunia Perbankan tidak berbeda dengan industri lainnya dimana teknologi internet mulai menjadi merasuk dan bahkan sebagian sudah menjadi standar de facto. *Internet Banking* mulai muncul sebagai salah satu bentuk pelayanan dari Bank. Bentuk pelayanan ini mulai menjadi tuntutan dari sebagian nasabah bank, sama halnya dengan ATM dan *phone banking*.

⁵ William J. Clinton, *A Framework for Global Electronic Commerce*, Washington, D.C., <http://www.white.house.gov>, (diakses 27 Juni 2008).

Tuntutan ini datangnya dari nasabah yang menginginkan pelayanan cepat, tersedia setiap saat (24 jam/hari, 7 hari/minggu), nyaman, dan murah, yang tidak dapat dilakukan oleh tenaga manusia. Namun hal ini dapat diberikan oleh layanan *Internet Banking*.

Namun dibalik kemudahan dan kenyamanan tersebut terdapat aspek keamanan. Dalam sebuah survey oleh Ernst & Young tentang *Information Security* diperoleh informasi bahwa 66% responden mengatakan *security* dan *privacy* merupakan penghambat lebih besarnya penggunaan *electronic commerce*.⁶

Dilain pihak, apabila sebuah bank tidak melakukan *Internet Banking*, maka dia mengambil risiko untuk tidak berpartisipasi dalam perkembangan kebutuhan dunia perbankan. *Internet Banking* memberikan beberapa keuntungan yang lebih besar dibandingkan risikonya. Adapun keuntungan tersebut antara lain:

1. *Business Expansion*. Dahulu sebuah bank harus memiliki sebuah kantor cabang untuk beroperasi di tempat tertentu. Usaha ini memerlukan biaya yang tidak kecil. Kemudian hal ini dipermudah dengan hanya meletakkan mesin ATM sehingga dia dapat hadir di tempat tersebut. Kemudian ada *phone banking* yang mulai menghilangkan batas fisik dimana nasabah dapat menggunakan telepon untuk melakukan aktivitas perbankannya. Sekarang ada *Internet Banking* yang lebih mempermudah lagi karena menghilangkan batas ruang dan waktu. Layanan perbankan sebuah bank kecil dapat diakses dari mana saja di seluruh Indonesia, dan bahkan dari seluruh dunia.
2. *Customer Loyalty*. Nasabah, khususnya yang sering bergerak (*mobile*), akan merasa lebih nyaman untuk melakukan aktivitas perbankannya tanpa harus membuka *account* di bank yang berbeda-beda di berbagai tempat. Dia dapat menggunakan satu bank saja.
3. *Revenue and Cost Improvement*. Biaya untuk memberikan layanan *Internet Banking* dapat lebih murah daripada membuka kantor cabang.
4. *Competitive Advantage*. Bank yang tidak memiliki mesin ATM akan sukar berkompetisi dengan bank yang memiliki banyak mesin ATM. Maukah anda membuka *account* di bank yang tidak memiliki mesin ATM? Demikian pula

⁶ Budi Rahardjo, *Aspek Teknologi dan Keamanan Internet Banking*, PT INDOSICS, <http://www.indosics.com>, (ditelusuri 5 Juni 2008).

bank yang tidak memiliki *Internet Banking*. Dalam waktu dekat, orang tidak ingin membuka *account* di bank yang tidak memiliki fasilitas *Internet Banking*.

5. *New Business Model. Internet Banking* memungkinkan adanya bisnis model yang baru. Layanan perbankan baru dapat diluncurkan melalui *web* dengan cepat.

5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis – normatif,⁷ yaitu mengkaji permasalahan pelaksanaan *internet banking* dan aspek-aspek hukum yang mendasarkan pada norma-norma hukum melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Untuk studi kepustakaan, bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data-data tersebut dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan. Dalam penelitian menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan norma hukum.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksud disini adalah badan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya dan tidak mengikat.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu badan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam kajian ini, dipakai kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

Penelitian Lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau para praktisi dalam bidang hukum, perbankan dan internet.

Metode Analisa Data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu pengumpulan data yang berasal dari studi dokumen dan wawancara yang kemudian akan diolah dan

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, Universitas Indonesia, 1986), hlm. 4.

dianalisa untuk menghasilkan data yang menggambarkan pelaksanaan *internet banking* di Indonesia.

Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu pembahasan atas permasalahan yang diteliti menggambarkan obyek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai obyek yang menjadi permasalahan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berkaitan dengan *Internet Banking*, yang kemudian berdasarkan data-data ini dilakukan analisis berdasarkan data yang telah ada dan kemudian menghubungkan dengan teori-teori yang ada hubungannya dengan tema penulisan ini. Pada akhirnya akan dipaparkan dampak yang timbul akibat aplikasi peraturan-peraturan yang ada bagi bank dan nasabah, khususnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan kegiatan *Internet Banking* di Indonesia.

6. Sistematika Penulisan

Guna lebih memudahkan dalam mencapai maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, maka pembahasan akan disistimatisir ke dalam lima bab, yakni sebagai berikut:

BAB I berjudul **Pendahuluan**. Dalam bab ini memuat: latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berjudul: **Tinjauan Umum *Internet Banking* Dalam Sistem Perbankan Indonesia** Bab ini akan menguraikan tentang Lembaga Keuangan Bank, kajian konseptual dari layanan *Internet Banking* dan kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral di dalam dunia perbankan.

BAB III berjudul: ***Internet Banking* di Bank Central Asia (KlikBCA)**. Bab ini akan mendiskripsikan berbagai aspek menyangkut kegiatan *internet banking* di BCA (KlikBCA).

BAB IV berjudul: **Aspek Hukum Pelayanan Jasa Bank Melalui *Internet Banking* Studi Kasus Pada Bank Central Asia**. Menganalisis apa dan bagaimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya.

BAB V berjudul: **Kesimpulan dan Saran**. Bab ini akan memberikan jawaban atas identifikasi masalah yang diajukan di dalam studi ini sekaligus mengajukan saran.



BAB 2

INTERNET BANKING, PENGATURAN DAN PENGAWASANNYA OLEH BI

A. Internet Banking

Di era informasi, lembaga keuangan memberikan layanannya tidak saja melalui model-model konvensional, kini mulai beralih pada pemanfaatan teknologi informasi. Kondisi ini dipacu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Dulu lembaga keuangan bank dalam memberikan layanannya lebih menekankan kepada model *face to face* dan didasarkan kepada *paper document*, kini model transaksi lebih mengedepankan para model *non-face to face* dan *paperless document*.⁸

1 Pengertian dan Dasar Hukum *Internet Banking*

Revolusi informasi yang ditandai dengan kemunculan internet telah berdampak hampir ke setiap sektor kehidupan manusia, yang dimulai dari sektor pertahanan dan keamanan hingga sektor perbankan. Pada sektor perbankan, hasil dari revolusi informasi ini adalah ditemukannya sebuah konsep baru yang disebut *internet banking*.⁹

Pengertian *internet banking*, menurut Karen Furst,¹⁰ *is the use of the internet as remote delivery channel for banking services, including traditional services, such as opening a deposit account or transferring funds among different account, as well as new banking services, such as electronic bill presentment and payment, which allow customers to receive and pay bill over bank website.*

Pengertian itu tidak jauh berbeda dengan pendapat Efraim Turban, meskipun ia memberikan istilah *internet banking* dengan istilah *online banking*. Turban menyatakan: “*online banking, includes various banking activities conducted from home, business, or on the road instead of at a physical bank location.*”¹¹

⁸ Budi Agus Riswandi, Op.Cit., hlm. 19.

⁹ Istilah ini dikenal juga dengan sebutan cyberbanking, electronic banking, virtual banking, *home banking*, dan *online banking*. Lihat Efraim Turban, et.al, *Electronic Commerce A Managerial Perspective* (New Jersey: Prentice Hall. Inc, 2000),. hlm. 173.

¹⁰ Karen Furst, et.al, *Internet Banking: Development and Prospect, Program on Information Resources Policy* (Harvard University, 2002).

¹¹ Efraim Turban, *Op. Cit.*, hlm. 173.

Dengan demikian secara sederhana dapat didefinisikan bahwa *internet banking* adalah suatu bentuk pemanfaatan media internet oleh bank untuk mempromosikan dan sekaligus melakukan transaksi secara online, baik produk yang sifatnya konvensional maupun yang baru.

Dasar hukum kegiatan layanan *internet banking* secara umum dapat dilihat di dalam Pasal 6 (huruf n) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan: “Melakukan kegiatan lain yg lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dgn UU ini dan peraturan perundang-undangan yg berlaku.” Sedangkan secara khusus layanan *internet banking* di Indonesia diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

Dalam telematika, layanan *internet banking* adalah bagian dari kegiatan *e-commerce*.¹² Karenanya baik dalam perikatan maupun menyangkut pembuktian dapat mengacu pada berbagai ketentuan yang sudah ada. Syarat sahnya perjanjian, saat terjadinya perjanjian dan hal-hal lain yang merupakan ketentuan dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berlaku juga bagi transaksi *e-commerce*. Ketentuan yang telah ada ini tetap berlaku bagi transaksi *e-commerce*, selain UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³

Sedangkan menyangkut pembuktian, perundangan kita telah mengakui keberadaan bukti elektronik. Di dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi, dengan tegas dinyatakan: “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.”¹⁴ Sebelumnya, di dalam UU No 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dimana pada bab III pasal 12 dikatakan bahwa dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam bentuk elektronik, yang tata cara pengalihannya diatur dalam PP No 88 tahun 1999. Dokumen yang

¹² Edmon Makarim, Kajian Aspek Hukum Perikatan, Bahan Ajar Hukum Telematika FHUI, LKHT FHUI, 2002.

¹³ Indonesia, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara No. 58 Tahun 2008.

¹⁴ *Ibidem*.

dialihkan ke dalam media elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang otentik.¹⁵

Secara konseptual, lembaga keuangan bank dalam menawarkan layanan *internet banking* dilakukan melalui dua jalan,¹⁶ yaitu:

1. Melalui bank konvensional (*an existing bank*) dengan *representasi* kantor secara fisik menetapkan suatu *website* dan menawarkan layanan *internet banking* pada nasabahnya dan hal ini merupakan penyerahan secara tradisional.
2. Suatu bank mungkin mendirikan suatu “*virtual*”, “cabang” atau “*internet*” bank. *Virtual* bank dapat menawarkan kepada nasabahnya kemampuan untuk menyimpan deposito dan tagihan dana pada ATM atau bentuk lainnya yang dimiliki.

Kehadiran layanan *internet banking* melalui *home banking* dan *wireless banking*, ternyata telah mengubah secara dramatis pola interaksi antara bank dengan nasabahnya. Dengan disediakannya fasilitas layanan *internet banking*, nasabah bank mendapatkan keuntungan berupa fleksibilitas untuk melakukan kegiatan setiap saat. Nasabah juga dapat mengakses layanan *internet banking* melalui *personal computer*, ponsel atau media *wireless* lainnya. Namun demikian, layanan *internet banking* di-*setting* sebagai sebuah *channel* baru dan *customer touchpoint*.

Untuk membuat layanan *internet banking* memberi keuntungan, bank harus menyediakan bagian integral dari strategi *multichannel* yang membolehkan nasabah bagaimanapun, kapanpun, di mana pun mereka dapat bertransaksi.¹⁷

Sebagai dasar untuk menciptakan strategi *multichannel*, bank harus menyediakan fasilitas layanan *internet banking* yang *a real time* dan *cross-channel view* dari semua informasi nasabah. Dengan pandangan demikian, bank dapat merespons dengan segera setiap kontak/transaksi dengan nasabah, memperbaiki layanan nasabah, membuka kesempatan keuntungan untuk penjualan secara silang, dan juga dengan layanan *internet banking* ini diharapkan lembaga keuangan mampu masuk pada generasi selanjutnya dari *retail banking*.¹⁸

¹⁵ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, Bahan Ajar Hukum Telematika FHUI, 2002.

¹⁶ Karen Furst, *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹⁷ <http://zle.nonstop.compaq.com> (ditelusuri tanggal 20 Juni 2008).

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

2 . Beberapa Layanan *Internet Banking*

Melalui beberapa tren yang berkembang dalam layanan *internet banking*, layanan *internet banking* juga menawarkan sejumlah peluang kepada bank untuk meningkatkan pendapatannya dan sekaligus memperbaiki layanannya terhadap nasabahnya. Layanan *internet banking* yang dapat ditawarkan adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Penyediaan tagihan elektronik dan pembayaran (*Electronic bill presentment and payment*) secara final menguntungkan dan populer pada tahun 2001. Menurut Kelompok Giga *Information*, 50% dari tagihan yang besar sampai menengah di Amerika Utara akan memulai menyediakan *invoice* melalui internet pada tahun 2001, 10% hingga 15% konsumen akan berpartisipasi pada penyediaan tagihan elektronik, dan pembayaran. Layanan kotak uang elektronik, yang didasarkan pada penyediaan tagihan secara online, menawarkan kesempatan pendapatan lain bagi lembaga keuangan. Lembaga keuangan dapat mengubah *fee* untuk layanan ini dan *fee* tersebut diatas pemrosesan pembayaran reguler.

2. Manajemen pembayaran *invoice* (*Invoice payment management*)

Meskipun lembaga keuangan tidak menjadi dominan dalam konsolidasi pernyataan tagihan dan pembayaran elektronik untuk nasabah, mereka menciptakan suatu peraturan baru dari pernyataan *invoice* dan pembayaran elektronik untuk bisnis kecil dan nasabah perusahaan. Dalam peraturan ini, lembaga keuangan akan menerima point untuk tagihan perusahaan, memperluas pemrosesan kotak uang (*lockbox*) tradisional mereka ke dalam abad *e-payment*.

3. Pembayaran kartu kredit online (*Online credit card payment*)

Menurut Kelompok Giga *Information*, kartu kredit sangat dominan dalam sistem pembayaran pada tahun 2001. Debet online dan elektronik cek dengan menggunakan *Automated Clearinghouse (ACH)* bagaimanapun akan tersingkirkan.

4. Cek Elektronik untuk pembayaran B2B (*Electronic checks for B2B payment*)

Elektronik cek akan menjadi lebih populer untuk penjualan *retail*, tetapi hingga sekarang sedikit sekali dampaknya terhadap pembayaran bisnis.

¹⁹ Karen Furst, *Loc. Cit.*

5. Aplikasi jaminan online (*online mortgage application*) Aplikasi online dibatasi dengan kartu kredit dan pinjaman kecil. Kini banyak orang menerapkan ini untuk jaminan online.

6. Pembayaran orang ke orang melalui e-mail (*Person to person e-mail payment*). Dengan solusi ini, individu dapat membuat pembayaran kartu kredit dan ACH transfer dalam waktu yang real (*real time*) untuk setiap orang dengan alamat e-mail.

3 Tipe-tipe Layanan *Internet Banking*

Sebagai dampak yang lebih khusus dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, industry perbankan juga mengalami dampaknya. Hal ini sangat dirasakan jika mencermati produk-produk layanan perbankan yang memanfaatkan sarana teknologi elektronik. Banyak bank nasional kini menawarkan layanan jasanya dan fasilitas melalui media elektronik, seperti melalui sarana telepon, personal computer, dan media elektronik lainnya.²⁰ Sejalan dengan keberadaan layanan jasa perbankan dengan media elektronik, disini dapat disampaikan tipe-tipe layanan jasa perbankan melalui media web, yaitu sebagai berikut.²¹

1. *Informational Web*

Tipe layanan jasa perbankan ini merupakan tingkat dasar. Dalam tipe ini, layanan jasa perbankan sudah melalui web, tetapi hanya menampilkan informasi saja. Risiko dari model layanan jasa perbankan seperti ini relatif lebih rendah. Server dan bank itu sendiri merupakan jaringan internal. Pada tingkatan ini, layanan *internet banking* dapat ditetapkan melalui bank atau pihak ketiga. Meskipun risiko relatif rendah, server dan *website* mungkin mudah diserang untuk diubah (*vulnerable to alteration*). Oleh karena itu, pengawasan dan pencegahan dari yang tidak berwenang terhadap server bank harus terus dimonitor.

2. *Transactional Web*

Pada tingkatan *electronic banking* ini, nasabah dibolehkan mengeksekusi transaksi dengan risiko yang cukup tinggi dibanding dengan *informational web*. *Transactional web* membolehkan nasabah untuk melakukan pembelian barang dan jasa serta transaksi perbankan secara *online*. Transaksi nasabah dapat berupa membuka dan

²⁰ Budi Agus Riswandi, *Op. Cit.*, hlm. 35.

²¹ *Ibidem*.

mengakses rekening, membeli produk dan jasa, mengajukan pinjaman, pembayaran dan transfer dana. Karena hubungan secara tipikal eksis antara *users* di luar dan bank atau penyedia layanan sistem komputer internal (*services provider's internal computer systems*), bentuk layanan *internet banking* seperti ini mengantarkan risiko yang sangat besar bagi informasi nasabah dan kemudian dibutuhkan kontrol internal yang sangat kuat.

3. *Wireless*

Teknologi ini mengizinkan bank untuk menawarkan kepada nasabah tradisional mengenai produk dan jasa baru dengan cara pengembangan channel yang lain. Bank menyediakan produk dan jasa nasabah melalui *wireless device*, seperti telepon seluler, pager dan *personal digital assistants* yang mempunyai akses *wireless* pada bank. Produk dan jasa ditawarkan mulai dari informasi, transaksi dan membawa *buyer* dan *seller* untuk membawa produk dan jasa bersama-sama. Karena produk dan jasa yang ditawarkan bersifat sensitif dan informasi rahasia, keamanan dan pengawasan merupakan hal yang esensial bagi bank yang menyediakan produk dan jasa melalui *wireless*.

4. *PC Banking*

Tipe electronic banking seperti ini membolehkan beberapa interaksi antara sistem bank dan nasabah. PC Banking ini menyediakan pengembangan channel secara tertutup melalui telepon – kadang-kadang sering disebut *home banking*. Transaksi dibatasi untuk komunikasi *e-mail*, transfer uang, meninjau dan menyeimbangkan rekening, dan pembayaran tanpa cek. Karena server ini menerobos dalam jaringan internal bank, risikonya sangat tinggi dalam transaksi. Kelayakan mengontrol harus ditempatkan untuk mencegah dan memonitor perubahan manajemen pada akses yang tidak berwenang dari jaringan internal bank dan sistem komputer.

B. Pengaturan dan Pengawasan oleh Bank Indonesia

Salah satu masalah regulasi hukum yang kini aktual dalam internet adalah hal yg mengatur perlindungan data pribadi dan publik atau dikenal juga di Amerika Serikat dengan sebutan *privacy*. Dalam konteks ini, ada dua model aturan yang dapat diterapkan untuk melindungi aspek *privacy*. Dua model itu dikenal dengan sebutan *self-regulation* dan *government regulation*.

Self-regulation, yakni aturan yang lazimnya dibentuk para pihak dalam mengantisipasi kekosongan hukum (*vacuum of law*) dalam upaya perlindungan data pribadi atau bank, sedangkan *government regulation*, yaitu aturan yang lazimnya dibentuk oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang atau keputusan untuk melindungi data pribadi dan bank.²²

Dalam konteks *internet banking*, keberadaan *self-regulation* mempunyai peranan yang sangat strategis dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi nasabah dan bank (*privacy*). Ada dua faktor yang mendorong bank menyediakan instrumen *self-regulation* ini. Faktor-faktor itu, antara lain: pertama, ketentuan hukum positif yang ada di wilayah negara tersebut tidak dapat menjangkau sistem transaksi yang dilakukan oleh layanan *internet banking* mereka; kedua, belum adanya suatu instrumen hukum yang mengatur sistem transaksi tersebut, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Industri perbankan yang menggunakan layanan *internet banking* menggunakan instrumen perlindungan data pribadi dan bank (*privacy*) melalui ketentuan *self regulation* yang digunakan melalui pengaturan terhadap *internet banking* yang dilakukan secara sepihak oleh industri perbankan. Wujud sepihak ini dapat dilihat, misalnya dalam kebijakan *privacy* yang dibuat oleh pihak penyelenggara *internet banking* Bank BCA. Di sana dikatakan sebagai berikut:

BCA dapat mengubah kebijaksanaan ini setiap saat untuk tetap menyesuaikan dengan situasi dan teknologi terbaru. Anda selalu dapat meninjau kebijakan BCA yang terbaru di <http://www.klikbca.com/privacy.html> atau anda dapat memintanya dengan mengirimkan email ke klikbca@bca.co.id

²² Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.*, hlm. 122.

Namun demikian, jika yang diandalkan itu hanya berdasarkan pada *self-regulation*, ada kekhawatiran yang sangat serius di mana industri perbankan cenderung akan melakukan pengalihan tanggung jawab seandainya ada permasalahan hukum dari penyelenggara *internet banking*. Hal ini terjadi mungkin juga dikarenakan subjektivitas dari penyelenggara, semisal dalam memahami kata 'teknologi baru'. Akibat dari keadaan ini, maka tujuan hukum untuk mencapai suatu keseimbangan dalam perlindungan hukum tidak tercapai.

Pada perkembangannya, ada beberapa usulan agar instrumen *self-regulation* ini dapat efektif dalam penegakannya. Salah satu usul itu anatara lain seperti yang dikemukakan oleh Paula Bruening. Ia menyatakan bahwa untuk efektifnya, rezim *self-regulation privacy* seharusnya meliputi mekanisme untuk menjamin komplain dengan peraturan dan sumber yang layak untuk pihak yang dirugikan ketika peraturan ini tidak diikuti, seperti mekanisme yang merupakan alat yang esensial yang memungkinkan konsumen menguji hak *privacy* mereka, dan seharusnya dengan cepat menyediakan dan memberikan ke konsumen. Ia kemudian merekomendasikan untuk sektor privat disediakan cara penegakan yang sangat baik, dimana penegakan itu merupakan kebutuhan dan dibutuhkan oleh konsumen. Beberapa rekomendasi itu adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Konsumen (*consumer resource*)

Perusahaan yang mengumpulkan dan menggunakan informasi yang dapat diidentifikasi secara personal seharusnya menawarkan mekanisme kepada konsumen yang mana komplain mereka dapat dipecahkan, seperti mekanisme *readily available and affordable*.

2. Verifikasi (*verivication*)

Verifikasi menyediakan pengesahan berupa pernyataan tegas dari perusahaan tentang praktik *privacy* mereka benar dan praktik *privacy* mereka telah sedang diimplementasikan sebagaimana ditunjukkan. Untuk verifikasi, tergantung kepada jenis informasi yang dimiliki perusahaan. Jika informasi itu sensitivitasnya tinggi, standar verifikasinya pun akan tinggi pula.

3. Konsekuensi (*consequencies*)

Agar *self-regulation* efektif, kegagalan menuruti pada praktik informasi yang *fair* seharusnya konsumuen. Diantaranya, pembatalan terhadap hak penggunaan tanda

atau logo, diskualifikasi dari keanggotaan dalam asosiasi industri perdagangan. Pada akhirnya, sanksi yang diterapkan secara tegas akan cukup menjamin konsumen. Selanjutnya, juga ketika perusahaan menyatakan dengan tegas bahwa terikat melalui praktik *privacy* dan kemudian gagal melaksanakannya, mereka harus bertanggung jawab untuk penipuan tersebut.

Dari penelaahan terhadap pengaturan *privacy* melalui *self-regulation* ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan *self-regulation* tidak menjadi instrumen yang betul-betul dapat memberikan perlindungan terhadap data pribadi nasabah dan bank kalau instrumen *government regulation* tidak segera dibentuk.²³

Secara umum, ada enam metode yang digunakan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia, termasuk dalam pemanfaatan *internet banking*.²⁴ Ke-enam metode ini dalam pelaksanaannya satu sama lain saling berkaitan, yakni:

B. 1. Pengaturan (Regulasi)

Cakupan pengaturan otoritas pengawasan bank dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar yaitu:

- a. Mengatur persyaratan dan tata cara perizinan bagi pendirian suatu bank termasuk jaringan kantornya
- b. Pengaturan yang berkaitan dengan usaha bank, mencakup pemberian arah dan pedoman bagi bank, yaitu: 1) Kegiatan yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh bank; 2) Manajemen bank berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang sehat; 3) Prinsip-prinsip manajemen risiko yang hati-hati dan dapat diandalkan; 4) Kewajiban untuk menyelenggarakan administrasi, dokumentasi, dan akuntansi yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik untuk kepentingan manajemen maupun untuk informasi yang diperlukan untuk pengawasan bank; 5) Penetapan sanksi terhadap penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketetapan-ketetapan; dan 6) Hal-hal lain yang dinilai penting dan mengandung risiko yang dapat merugikan masyarakat dan/atau kepentingan sistem perbankan yang sehat.

²³ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.*, hlm. 134

²⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

c. Pengaturan tentang informasi yang diperlukan bagi otoritas pengawasan bank. Untuk mengikuti dan menilai apakah bank memang sungguh-sungguh dan konsisten terhadap peraturan maupun prinsip usaha bank yang sehat, otoritas pengawasan bank meminta, agar bank menyampaikan berbagai laporan (returns), yang bentuk, susunan, formula, dan jadwal penyampaiannya ditetapkan oleh otoritas pengawasan bank. Jenis laporan pokok yang biasanya diminta adalah neraca dan laporan laba/rugi, laporan likuiditas dan laporan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Namun, laporan khusus yang terkait dengan manajemen risiko biasanya juga diminta.

B. 2. Pengawasan Tidak Langsung (*Off-site Supervision*).

Dengan jalur atau metode ini, otoritas moneter mengawasi kondisi bank secara individual, kelompok, maupun keseluruhan dengan menelaah berbagai laporan yang disampaikan oleh perbankan. Tujuannya adalah untuk menilai apakah peraturan/ketentuan yang ditetapkan, asas usaha bank, dan perkreditan yang sehat itu dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten, diidentifikasi penyimpangan dan pelanggarannya, serta kegiatan yang mengganggu kelangsungan usaha bank ataupun merugikan berbagai pihak. Penilaian itu menjadi dasar untuk menindaklanjuti, baik dengan memberikan koreksi, remedi ataupun sanksi. Mekanisme pengawasan tidak langsung tersebut meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian atas kepatuhan, ketetapan waktu, dan konsistensi materi laporan. Bila terdapat penyimpangan, pelanggaran, dan/atau keganjilan, pengawasan bank harus dapat mengklarifikasi untuk memperoleh kejelasan dan sebab-musababnya.
- b. Menganalisis setiap jenis laporan maupun kombinasi atas berbagai laporan yang diterima. Analisis horizontal dilakukan untuk menilai kewajaran perkembangan. Sedangkan analisis vertikal dilakukan untuk menilai kelayakan rasio komponen-komponen yang saling mempengaruhi, baik dalam rangka memenuhi peraturan atau menilai efisiensi dan potensi risiko. Biasanya juga dilakukan perbandingan kondisi antara bank sekelas (*Peer Group*).
- c. Mengkomunikasikan dan/atau mengklarifikasi berbagai pertemuan dari analisis, guna memperoleh kejelasan dalam menetapkan tindak lanjut yang diperlukan.

d. Bila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau pelanggaran mendasar, pengawas bank biasanya mengambil langkah korektif yang perlu. Pemeriksaan khusus dilakukan, bila terdapat masalah yang masih perlu diperjelas.

B. 3. Pengawasan Langsung/Pemeriksaan (*On-site Supervision*)

Dengan jalur metode ini, otoritas pengawasan bank ingin meyakini kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank, sekaligus menguji kebenaran dan konsistensi pembuatan laporan yang disampaikan kepada otoritas pengawasan bank. Pemeriksaan yang bersifat menyeluruh disebut pemeriksaan umum. Pemeriksaan ini dilakukan secara berkala 1 tahun sekali. Disamping pemeriksaan umum dapat pula dilakukan pemeriksaan khusus yang berfokus pada pemeriksaan kredit dan aset-aset berisiko lainnya atau bidang usaha lain yang menurut otoritas pengawasan bank perlu diperhatikan atau berpotensi menimbulkan masalah.

B. 4. Kontak Dan Komunikasi Teratur Dengan Bank

Melalui jalur metode ini, otoritas pengawasan bank berusaha untuk memahami alur pemikiran dan komitmen manajemen bank. Selain itu, juga berusaha untuk meyakini bahwa manajemen patuh dan konsisten dalam menjalankan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pengawasan bank maupun ketentuan dan pedoman pelaksanaan prinsip usaha bank, serta perkreditan yang sehat yang ditetapkan sebagai pedoman intern bank dan manajemen perbankan yang berlaku umum.

Kontak dan komunikasi dapat berjenjang sesuai dengan kadar masalahnya. Hal-hal teknis dilakukan oleh pejabat pengawas bank dan pejabat pelaksana yang bertanggung jawab pada bank. Sedangkan masalah-masalah yang lebih fundamental atau bersifat *policy* dilakukan bersama dengan pejabat yang lebih tinggi. Waktunya bisa setiap kali diperlukan. Pembahasan komprehensif tentang kondisi bank biasanya dilakukan oleh pejabat/pimpinan pengawasan bank bersama dengan pucuk pimpinan bank. Kesimpulan dan kesepakatan dalam pembahasan tersebut biasanya ditegaskan dalam surat dari otoritas pengawasan bank kepada bank yang bersangkutan. Adapun frekuensi pelaksanaannya umumnya setahun sekali.

B. 5. Tindak Remedial dan/atau Penerapan Sanksi

Dengan jalur atau metode ini, otoritas pengawasan bank berusaha mengendalikan dan mengamankan efektivitas dalam mencapai sasaran pengawasan bank. Setiap

penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh bank dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan sanksi administratif biasanya langsung dikenakan oleh otoritas pengawasan bank. Namun, penerapan sanksi yang berat dan fatal biasanya dilakukan melalui proses tertentu. Penelitian yang mendalam mengenai pokok masalah dan dampak dari pengenaan sanksi itu dilakukan untuk menemukan jalan keluar atau solusi terbaik dalam mengatasi masalah dengan dampak buruk yang sekecil mungkin. Dampak buruk itu bisa berupa penularan masalah kepada bank lain atau sistem perbankan secara lebih luas. Pencabutan izin usaha bank merupakan wewenang Pemerintah atau otoritas pengawasan bank. Umumnya, pencabutan izin usaha bank itu dilakukan, bila berbagai cara yang tersedia sudah tidak efektif lagi. Namun, ada pula negara yang cenderung menyarankan, agar bank dengan sukarela menyerahkan kembali izin usaha (*Surrender The License*) kepada otoritas moneter dan dengan suka rela pula menyelesaikan berbagai kewajibannya, serta melaporkan pelaksanaan kewajibannya itu dibawah pengawasan otoritas pengawasan bank. Salah satu instrument yang biasanya digunakan untuk melakukan upaya “remedial” adalah *Lender Of Last Resort* (LOLR). Instrumen ini tidak dimiliki oleh otoritas pengawasan bank, tetapi oleh bank sentral. Instrumen ini merupakan suatu *Safety Net* untuk memelihara sistem perbankan yang sehat.

B. 6. Kerjasama Dengan Otoritas Pengawasan Bank Di Negara Lain.

Dengan metode ini, otoritas pengawasan bank menjalin kerjasama dan saling bertukar informasi, baik mengenai permasalahan yang dihadapi oleh perbankan di negara masing-masing maupun mengenai strategi, kebijakan, dan teknik pengawasan bank yang efektif berdasarkan pengalaman masing- masing negara. Berdasarkan hal tersebut, otoritas suatu negara dapat mengambil manfaat, menyempurnakan strategi, kebijaksanaan dan teknik pengawasan bank, tanpa harus mengalami sendiri masalah berat di negara yang bersangkutan.

BAB 3

BANK CENTRAL ASIA (BCA) DAN INTERNET BANKING BCA (KLIKBCA)

A. Bank Central Asia (BCA)

NV Perseroan Dagang Dan Industrie Semarang Knitting Factory yang berdiri pada 1955 adalah cikal bakal Bank Central Asia (BCA). Pada 21 Februari 1957, BCA secara resmi berdiri sebagai bank dengan kantor pusat di Jakarta. Tahun 1977, BCA berkembang menjadi Bank Devisa.²⁵

Dalam tahun 1980, sejalan dengan deregulasi sektor perbankan di Indonesia, BCA mengembangkan jaringan kantor cabang secara luas dan mengembangkan berbagai produk dan layanan maupun penerapan teknologi informasi, seperti menerapkan on line system untuk jaringan kantor cabang, dan meluncurkan Tabungan Hari Depan (Tahapan) BCA. Pada 1990, BCA mengembangkan alternatif jaringan layanan melalui ATM BCA (Anjungan Tunai Mandiri atau Automated Teller Machine) yang pengembangan jaringan dan fitur-fitur ATM dilakukan secara intensif.²⁶

Pada 1997, terjadi krisis moneter di Indonesia. Krisis ini membawa dampak luar biasa pada keseluruhan sistem perbankan. Kondisi ini mempengaruhi aliran dana tunai di BCA dan bahkan sempat mengancam kelanjutannya. Banyak nasabah menjadi panik lalu beramai-ramai menarik dana mereka (rush). BCA terpaksa meminta bantuan likuiditas dari BI (BLBI). Akibatnya pada 1998 BCA menjadi *Bank Taken Over* (BTO) dan disertakan dalam program rekapitalisasi dan restrukturisasi yang dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).²⁷

Desember 1998, dana pihak ke tiga di BCA telah kembali ke tingkat sebelum krisis. Kepercayaan masyarakat pada BCA telah pulih, dan pada tahun 2000 BPPN

²⁵ BCA, Laporan Tahunan Mempertahankan Soliditas di Tengah Tantangan (Jakarta: 2009), hal. 2.

²⁶ *Ibidem.*

²⁷ *Ibidem.*

mengembalikan BCA ke BI. BCA lalu menjadi perusahaan publik, dengan menjual saham sebanyak 22,55% yang berasal dari divestasi BPPN. Setelah Penawaran Saham Perdana ini, BPPN masih menguasai 70,30% dari seluruh saham BCA. Juni-Juli 2001, BPPN mendivestasikan 10% lagi dari saham miliknya di BCA, sehingga kepemilikan BPPN atas BCA berkurang menjadi 60,30%.²⁸

Pada 2002, BPPN melepas 51% dari sahamnya di BCA melalui proses *tender strategic private placement*. Farindo Investment, Ltd. (berbasis di Mauritius), yang memenangkan tender ini. Tahun 2004, BPPN melakukan divestasi atas 1,4% saham BCA kepada investor domestik melalui penawaran terbatas, dan pada 2005 Pemerintah melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) melakukan divestasi seluruh sisa 5,02% saham BCA.²⁹

Pemegang Saham Per 31 Desember 2009

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
FarIndo Investments (Mauritius) Ltd qualitate qua (qq), Sdr. Bambang Hartono dan Sdr. Robert Budi Hartono *)	11,625,990,000	47.15 %
Anthony Salim	434,079,976	1.76 %
Masyarakat	12,305,173,024	49.91 %
Saham yang dibeli kembali oleh PT Bank Central Asia Tbk (treasury stock)	289,767,000	1.18 %
Jumlah	24,655,010,000	100%

*/ Sesuai dengan surat Bank Indonesia No. 12/21/DPB3/TPB3-7 tanggal 25 Februari 2010, Ultimate Shareholders FarIndo Investments (Mauritius) Ltd ("FarIndo") adalah Sdr. Robert Budi Hartono dan Sdr. Bambang Hartono³⁰

²⁸ *Ibid.*, hal. 3.

²⁹ *Ibidem.*

³⁰ *Ibid.*, hal. 244.

Catatan: Terdapat efek dilusi atas kepemilikan saham lama sehubungan dengan penerbitan saham baru dalam rangka program kompensasi manajemen berbasis saham, dimana periode eksekusi opsi dapat dilakukan dari November 2001 sampai dengan November 2006.

Di bawah manajemen BCA saat ini,³¹ BCA melayani lebih dari 8,5 juta rekening nasabah melalui beragam jaringan distribusi yang meliputi 875 cabang, 6.611 ATM dan 129.164 EDC serta melalui layanan Internet dan Mobile Banking. Volume transaksi yang dilayani BCA selama tahun 2009 mengalami pertumbuhan yang signifikan dimana nasabah BCA melakukan transaksi perbankan rata-rata 4,1 juta transaksi per hari. Pertumbuhan dana pihak pada tahun 2009 sebesar 17,0%, dimana dana tabungan meningkat sebanyak 14,6% sementara dana giro dan deposito berjangka tumbuh masing-masing sebesar 15,3% dan 23,4%.³²

Selama tahun 2009, permintaan terhadap kredit mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya sebagai dampak dari banyaknya nasabah bisnis yang menunda investasi belanja modal (*capital expenditure*) dan mengurangi persediaan barang (*inventory*). Namun untuk kredit konsumsi BCA tetap tumbuh sebesar 31,9%. Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor tumbuh 32,8% menjadi Rp 10,4 triliun, lebih tinggi dibanding perkiraan semula. Sementara itu kredit pemilikan rumah tumbuh 27,5% menjadi Rp 13,1 triliun sedangkan saldo pinjaman kartu kredit BCA meningkat 45,0% di tahun 2009. Meskipun rasio kredit bermasalah (NPL) pada semester pertama tahun 2009 meningkat menjadi 1,9% dari total kredit yang disalurkan, rasio NPL tersebut berangsurangsur turun menjadi 0,7% pada akhir tahun 2009.³³

Pada akhir tahun 2009, total cadangan terhadap kredit bermasalah tercatat sebesar 480,2%. BCA membukukan laba bersih sebesar Rp 6,8 triliun pada tahun 2009. Laba sebelum pajak tumbuh sebesar 15,9% menjadi Rp 8,9 triliun. Walaupun

³¹ Susunan manajemen BCA dewasa ini, Dewan Komisaris: Eugene Keith Galbraith (Presiden Komisaris, sejak 20 Mei 2002); Tonny Kusnadi (Komisaris); Cyrillus Harinowo (Komisaris Independen); Sigit Pramono (Komisaris Independen) dan Raden Pardede (Komisaris Independen). Sedangkan Dewan Direksi: Djohan Emir Setijoso (Presiden Direktur, sejak tanggal 29 Desember 1999); Jahja Setiaatmadja (Wakil Presiden Direktur); Dhalia Mansor Ariotedjo (Direktur); Anthony Brent Elam (Direktur); Subur Tan (Direktur); Suwignyo Budiman (Direktur); Renaldo Hector Barros (Direktur); Henry Koenafi (Direktur); Armand Wahyudi Hartono (Direktur)

³² *Ibid.*, hal. 15.

³³ *Ibid.*, hal. 16.

margin bunga bersih (NIM) terus mengalami tekanan yang dipicu oleh penurunan tingkat suku bunga dan tingginya tingkat persaingan pemberian kredit, BCA mencatat pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 20,6% menjadi Rp 14,9 triliun. Laba operasional BCA tumbuh 11,1% menjadi Rp 8,5 triliun. Tingkat pengembalian terhadap aktiva (ROA) tercatat sebesar 3,4%, sementara itu tingkat pengembalian terhadap ekuitas (ROE) adalah sebesar 31,8%. Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) saat ini berada pada posisi 50,3% sementara rasio kecukupan modal (CAR) dapat dipertahankan pada posisi 15,3%.³⁴

Dalam tahun 2008-2009, BCA telah menyelesaikan pembangunan *mirroring IT system* guna memperkuat kelangsungan usaha dan meminimalisasi risiko operasional. BCA kemudian memperkuat dan mengembangkan produk dan layanan, terutama perbankan elektronik dengan memperkenalkan Debit BCA, Tunai BCA, Internet Banking KlikBCA, Mobile Banking m-BCA, EDCBIZZ.

Frekuensi dan nilai transaksi melalui Internet Banking BCA dan jaringan elektronik lainnya terus menunjukkan pertumbuhan di tahun 2009. Total nasabah yang memiliki akses terhadap layanan berbasis internet baik KlikBCA Individu maupun KlikBCA Bisnis meningkat dari 1,2 juta nasabah di tahun 2008 menjadi 1,7 juta nasabah di tahun 2009. Total transaksi yang dilayani oleh sistem Internet Banking ini mencapai 230,5 juta transaksi dengan nilai transaksi Rp 1.356 triliun pada tahun 2009.³⁵

Pengembangan layanan perbankan BCA melalui internet di tahun 2009 meliputi serangkaian fitur baru dalam e-payment dimana kini terdapat pilihan pembelian pulsa isi ulang telepon selular untuk berbagai provider; pembelian tiket penerbangan; transaksi pembayaran melalui biro perjalanan dan pembelian barang ritel secara online. Layanan perbankan BCA melalui internet juga berfungsi sebagai platform untuk layanan *Cash Management*.³⁶

B. Internet Banking BCA (KlikBCA)

BCA merupakan bank yang memiliki jaringan elektronik terbesar dan paling tersebar luas di Indonesia. Salah satu produk perbankan elektronik yang ditawarkan

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ *Ibid.*, hal. 24.

³⁶ *Ibid.*, hal. 25.

BCA adalah berupa KlikBCA, yang diluncurkan pada Agustus 2000. Dengan KlikBCA, nasabah BCA dapat melakukan transaksi perbankan (kecuali penarikan tunai) tanpa harus datang ke ATM BCA atau Kantor Cabang BCA serta dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui internet.³⁷

KlikBCA dilengkapi dengan *security* untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan transaksi yang dilakukan. Untuk menambah keamanan, juga dilengkapi dengan [KeyBCA](#), yaitu alat pengaman tambahan untuk lebih mengamankan transaksi finansial di KlikBCA. Alat ini berfungsi untuk mengeluarkan *password* yang selalu berganti setiap kali melakukan transaksi finansial. Dengan demikian, keamanan bertransaksi makin terjaga.

Transaksi yang dilakukan melalui ATM BCA, dapat dilakukan melalui KlikBCA, kecuali penarikan tunai, yakni: 1. Pembelian (Pulsa Isi Ulang, Saham, Tiket); 2. Pembayaran (Kartu Kredit, Internet, Telepon, *Handphone*, *Pager*, Pendidikan, dan Lain-lain); 3. Transfer Dana baik Antar Rekening BCA (*Real Time*, berkala, tanggal tertentu) maupun ke Domestik Bank Lain (*Real Time*, tanggal tertentu). Dengan KeyBCA nasabah dapat melakukan pemindahan dana rekening di BCA hingga Rp100 juta setiap hari; 4. Informasi Rekening (Informasi Saldo, Mutasi Rekening, Tagihan *BCA Card*); 5. Transaksi Histori; 6. Administrasi (Ganti PIN, Ubah Bahasa, Ganti Alamat *E-mail*, Hapus Daftar Pembayaran, Hapus Daftar Transfer, Registrasi *KeyBCA*, Tambah Koneksi *KeyBCA*, Hapus Koneksi *KeyBCA*, Aktivasi *KeyBCA*, Registrasi Informasi *BCA Card*, Hapus Informasi *BCA Card*)

I. Syarat dan ketentuan *Internet Banking* BCA

a. Registrasi

1. Setiap Nasabah yang menyimpan dana di BCA ("Nasabah") dan mempunyai kartu yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan di ATM BCA ("Kartu ATM BCA") berhak untuk menikmati fasilitas *Internet Banking* BCA ("IB BCA").
2. Untuk dapat menggunakan fasilitas IB BCA, Nasabah harus memiliki

³⁷ Jawaban tertulis dari unit kerja terkait di BCA pada 23 Juni 2010, yang disampaikan melalui Bapak Amran Siahaan dari Aspek Hubungan Masyarakat (AHM) Sub Divisi Komunikasi Pemasaran Kantor Pusat BCA, Menara BCA, Grand Indonesia.

identitas pengguna IB BCA ("*User ID*") dan nomor identifikasi pribadi IB BCA ("*PIN*") yang diperoleh pada saat Nasabah melakukan registrasi di mesin ATM BCA.

3. Nasabah juga dapat melakukan registrasi fasilitas IB BCA di *Customer Service* kantor cabang BCA. Dalam hal Nasabah melakukan registrasi fasilitas IB BCA di *Customer Service* kantor cabang BCA, *User ID* akan dikirimkan melalui *e-mail* yang didaftarkan pada saat registrasi dan *PIN* yang digunakan pertama kali adalah *PIN* Kartu ATM BCA.

b. Transaksi

1. Untuk melakukan transaksi finansial melalui IB BCA, Nasabah harus memiliki *KeyBCA*.
2. Nasabah harus mengisi semua data yang dibutuhkan untuk setiap transaksi secara benar dan lengkap.
3. Pada setiap transaksi finansial, sistem akan selalu melakukan konfirmasi terhadap data yang diinput Nasabah dan Nasabah mempunyai kesempatan untuk membatalkan data tersebut dengan menekan tombol '*Cancel*' atau '*Batal*'.
4. Nasabah selain menginput *User ID* dan *PIN* wajib pula menginput angka yang dihasilkan dari *KeyBCA* sebagai tanda persetujuan atas instruksi transaksi finansial.
5. Setiap informasi yang mendapat konfirmasi '*Submit*' atau '*Kirim*' dari Nasabah yang tersimpan dalam pusat data BCA merupakan data yang benar yang diterima sebagai bukti atas instruksi dari Nasabah kepada BCA untuk melakukan transaksi yang dimaksud, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.
6. BCA menerima dan menjalankan setiap instruksi dari Nasabah sebagai instruksi yang sah berdasarkan penggunaan *User ID*, *PIN* dan *KeyBCA* dan untuk itu BCA tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki keaslian maupun keabsahan atau kewenangan pengguna *User ID*, *PIN* dan *KeyBCA* atau menilai maupun membuktikan ketepatan atau kelengkapan instruksi dimaksud, dan oleh karena itu instruksi tersebut sah mengikat

Nasabah dengan sebagaimana mestinya, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.

7. Untuk transaksi dengan tanggal efektif hari ini, Nasabah tidak dapat membatalkan semua transaksi yang telah diotorisasi oleh Nasabah dengan menggunakan *KeyBCA* dan mendapat konfirmasi “Kirim” atau “*Submit*” dari Nasabah, karena dalam waktu yang sama BCA langsung memproses instruksi tersebut.
8. Untuk transaksi dengan tanggal hari yang akan datang atau transaksi berkala, Nasabah masih dapat membatalkan transaksi tersebut dengan mengotorisasi pembatalan menggunakan *KeyBCA* selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari sebelum tanggal efektif/jatuh tempo transaksi yang bersangkutan.
9. Untuk transaksi dengan tipe tanggal hari yang akan datang atau transaksi berkala, transaksi akan diproses setiap awal hari. Dalam transaksi berkala, bila tanggal kedaluwarsa jatuh pada tanggal yang sama dengan tanggal efektif berkala yang ditentukan, maka transaksi tersebut tidak akan diproses pada hari tersebut.
10. Untuk transaksi transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri, jika tanggal efektif transaksi jatuh pada hari libur bank, maka transaksi akan diproses pada hari kerja bank berikutnya.
11. Untuk transaksi transfer dana dalam mata uang berbeda menggunakan kurs *Telegraphic Transfer (TT)* yang berlaku di BCA.
12. Untuk setiap instruksi dari Nasabah atas transaksi yang berhasil dilakukan oleh BCA, Nasabah akan mendapatkan bukti transaksi berupa nomor referensi sebagai bukti transaksi tersebut telah dilakukan oleh BCA.
13. Nasabah wajib memastikan bahwa saldo dalam rekening Nasabah mencukupi sebelum instruksi transaksi dilaksanakan oleh BCA.
14. BCA berhak untuk tidak melaksanakan instruksi dari Nasabah, jika saldo Nasabah di BCA tidak mencukupi.
15. Nasabah wajib dan bertanggung jawab untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan instruksi transaksi. BCA tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat apapun yang timbul karena ketidaklengkapan, ketidakjelasan data atau ketidaktepatan instruksi dari Nasabah.

c. Kurs

Penukaran valuta asing, suku bunga dan kurs yang lain termasuk (namun tidak terbatas pada) kutipan bursa yang disediakan di IB BCA hanya merupakan indikasi dari kurs, kutipan atau informasi yang sebenarnya dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh BCA tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

d. Pembuktian

- Setiap instruksi transaksi finansial dari Nasabah yang tersimpan pada pusat data BCA dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada catatan, *tape/cartridge*, *print out* komputer, komunikasi yang ditransmisi secara elektronik antara BCA dan Nasabah, merupakan alat bukti yang sah, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.
- Nasabah menyetujui semua komunikasi dan instruksi dari Nasabah yang diterima oleh BCA merupakan alat bukti yang sah meskipun tidak dibuat dokumen tertulis ataupun dikeluarkan dokumen yang ditandatangani.

e. *User ID*, PIN, *KeyBCA* dan Kewajiban Nasabah

1. Nasabah wajib tidak meninggalkan terminal dalam keadaan aktif (*log-on*), dengan kata lain harus melakukan *logout* setiap kali meninggalkan terminal.
2. Nasabah wajib mengamankan *User ID* dan PIN
3. *User ID* yang diberikan oleh BCA bersifat permanen dan tidak dapat diubah, kecuali rekening ditutup.
4. Nasabah diberikan kebebasan untuk membuat PIN-nya sendiri pada saat registrasi di mesin ATM BCA.
5. Nasabah dapat melakukan *inquiry User ID*-nya sendiri melalui fasilitas registrasi IB BCA di mesin ATM BCA, apabila Nasabah tidak mengingat *User ID*-nya.
6. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua instruksi transaksi yang terjadi berdasarkan penggunaan *User ID*, PIN dan *KeyBCA* yang dimiliki oleh Nasabah, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.

7. BCA berhak untuk memberikan *User ID* dengan kombinasi huruf dan angka tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah.
8. Nasabah wajib untuk segera memberitahukan kepada BCA apabila *User ID* dan atau PIN tersebut telah diketahui oleh orang lain. Segala instruksi transaksi berdasarkan penggunaan *User ID*, PIN dan *KeyBCA* yang terjadi sebelum pejabat yang berwenang dari BCA menerima secara tertulis laporan tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah.
9. Apabila Nasabah melakukan penggantian Kartu ATM BCA karena hilang/rusak, pada saat Nasabah mendapat Kartu ATM BCA baru, Nasabah dapat langsung melakukan *login* dengan menggunakan *User ID* yang lama. Selanjutnya pada saat pertama kali *login* Nasabah akan diminta untuk melakukan penggantian PIN *Internet Banking*.
10. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir E.9 Syarat dan Ketentuan ini tidak berlaku apabila Kartu ATM BCA yang hilang adalah kartu TAPRES atau kartu BCA Dollar. Dalam hal kartu TAPRES atau kartu BCA Dollar hilang, Nasabah harus melakukan penutupan terhadap rekening TAPRES atau BCA Dollar yang bersangkutan dan membuka rekening TAPRES atau BCA Dollar yang baru. Oleh karena itu Nasabah harus melakukan registrasi IB BCA kembali dengan menggunakan kartu TAPRES atau kartu BCA Dollar yang baru.

f. Limit Transaksi

Keterangan	Besar
Transfer dari Rupiah ke Rupiah	Rp. 100 juta per hari per <i>User ID</i> .
Transfer dari Rupiah ke Valas	Ekuivalen Rp. 15 juta per hari per <i>User ID</i> (merupakan bagian dari limit Rp. 100 juta)
Transfer dari Valas ke Rupiah	Ekuivalen Rp. 100 juta per hari per <i>User ID</i>
Transfer dari	

Valas ke Valas yang sama	
Pembayaran	Sesuai dengan tagihan
Pembelian Pulsa Isi Ulang	Rp. 1,1 juta per hari per <i>User ID</i> (termasuk PPN). Limit ini merupakan limit gabungan pembelian pulsa isi ulang di ATM/Mobile Banking/Pulsa Isi Ulang via SMS.

Limit transaksi tersebut merupakan limit yang terpisah dari limit Kartu ATM BCA yang digunakan untuk melakukan registrasi IB BCA di mesin ATM BCA, BCA atas pertimbangannya sendiri berhak setiap saat untuk mengubah besar limit untuk setiap transaksi.

g. *Electronic Mail (e-Mail)*

- a. Alamat *E-Mail* yang didaftarkan oleh Nasabah pada saat *login* pertama kali di IB BCA digunakan oleh BCA untuk mengirim informasi transaksi yang telah dilakukan oleh Nasabah melalui IB BCA.
- b. BCA hanya mengirimkan informasi kepada alamat *E-Mail* yang telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Nasabah kepada BCA dan BCA tidak bertanggung jawab atas kebenaran alamat *E-Mail* tersebut.
- c. BCA tidak menjamin keamanan informasi atau data yang dikirim kepada BCA melalui *E-Mail* yang tidak terdapat di IB BCA, yang tidak dalam format yang aman yang disetujui atau ditentukan oleh BCA.

h. Biaya dan Kuasa Debit Rekening

1. BCA berhak untuk mendebet biaya administrasi bulanan dan biaya transaksi yang dibebankan atas penggunaan fasilitas IB BCA dan transaksi yang dilakukan melalui IB BCA.
2. Bank berhak atas pertimbangannya sendiri untuk mengubah, menambah atau menarik biaya-biaya yang dibebankan kepada Nasabah atas penggunaan fasilitas IB BCA.

3. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk mendebet rekening Nasabah di BCA atas semua transaksi yang diinstruksikan Nasabah kepada BCA melalui IB BCA dan untuk pembayaran biaya administrasi bulanan serta biaya transaksi atas penggunaan fasilitas IB BCA.
4. Kuasa ini akan berakhir apabila segala kewajiban Nasabah kepada BCA sudah terpenuhi.

i. Pemblokiran *User ID* dan PIN *Internet Banking*

1. *User ID* dan PIN Nasabah akan diblokir jika melakukan hal berikut:
 - Salah memasukkan PIN sebanyak 3 kali berturut-turut pada saat *login*.
 - Salah memasukkan angka dari *KeyBCA* sebanyak 3 kali berturut-turut pada saat melakukan transaksi finansial.
 - Mengajukan penggantian Kartu ATM BCA dan atau dilaporkan Kartu ATM BCA hilang.
 - *User ID* dan atau PIN dilaporkan telah diketahui oleh orang lain.
 - Hasil penelitian BCA mengindikasikan adanya kemungkinan *User ID* dan PIN Nasabah telah diketahui oleh orang lain.
2. Apabila terjadi pemblokiran *User ID* dan PIN, Nasabah harus menghubungi Halo BCA dan melakukan registrasi ulang IB BCA di mesin ATM BCA.

j. Force Majeure

Nasabah akan membebaskan BCA dari segala tuntutan apapun, dalam hal BCA tidak dapat melaksanakan instruksi dari Nasabah baik sebagian maupun seluruhnya karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab diluar kekuasaan atau kemampuan BCA, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijaksanaan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan atau kemampuan BCA.

k. Pengakhiran Layanan

Layanan IB BCA akan berakhir jika Nasabah mengakhiri penggunaan Kartu ATM BCA atau menutup semua rekening yang terhubung di Kartu ATM BCA.

l. Ketentuan *Key*BCA

Nasabah dengan ini terikat dan tunduk pada ketentuan-ketentuan *Key*BCA yang diatur oleh BCA dan segala perubahannya dalam bentuk apapun yang akan diberitahukan kepada Nasabah melalui sarana apapun.

II. Kebijakan Privasi dan Pengamanan

Berikut ini adalah kebijakan dan praktek yang dilakukan PT Bank Central Asia, Tbk (“BCA”) untuk menunjukkan komitmen BCA di dalam menjaga dan memelihara privasi dan keamanan pada saat nasabah mengunjungi situs dan *internet banking* BCA³⁸

A. Kebijakan Privasi

BCA tidak menjual, menukar atau memperlihatkan segala informasi yang berkaitan dengan nasabah atau pengunjung situs dan *internet banking* BCA.

BCA tidak melacak pengunjung situs BCA. Selama nasabah *login* ke *internet banking* BCA, BCA akan menggunakan cookie yang akan berakhir pada saat nasabah *logout*.

Semua transaksi perbankan nasabah dan informasi rekening lainnya disimpan secara rahasia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta kebijakan internal BCA.

³⁸ Jawaban tertulis BCA, *Ibidem*. Juga, lihat, <http://www.klikbca.individual/silver/product.html?s=11>

B. Pengamanan

1. Sistem Pengamanan

BCA menggunakan 3 (tiga) lapis sistem pengamanan untuk melindungi akses dan transaksi Anda di *internet banking* BCA, yaitu:

- a. Secure Socket Layer (“SSL”). SSL adalah teknologi pengamanan yang ‘mengacak’ jalur komunikasi antar komputer sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak lain.
- b. *User ID* dan Personal Identification Number (“PIN”)
- c. *One Time Password* yang dihasilkan oleh *KeyBCA*. *One-time Password* adalah teknologi pengamanan yang selalu menghasilkan *password* yang berbeda setiap kali alat/token pengamannya digunakan.

Oleh karena banyaknya variasi browser internet yang ada, sulit untuk menyediakan *internet banking* yang mengikuti keamanan masing-masing browser. Saat ini BCA hanya menyediakan sarana *internet banking* yang lebih cocok diakses dengan menggunakan Microsoft Internet Explorer versi 6 atau yang terbaru. BCA mohon maaf atas ketidaknyamanan ini.

2. Proteksi Komunikasi *Internet Banking* BCA

BCA menggunakan teknologi enkripsi Secure Socket Layer (SSL) 128 bit untuk memproteksi komunikasi antara komputer nasabah dan server BCA selama nasabah mengakses *internet banking* BCA.

Untuk memastikan proteksi komunikasi selama nasabah mengakses *internet banking* BCA, nasabah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Periksa sertifikat SSL secara teratur untuk memastikan bahwa Anda menerima sertifikat SSL yang sah yang telah terdaftar untuk IBANK.KLIKBCA.COM.
- b. Apabila nasabah menerima pesan yang menjelaskan bahwa sertifikat tidak sah, dimohon nasabah tidak melanjutkan akses *internet banking*

BCA.

- c. Pastikan bahwa nasabah telah mengetik alamat yang benar yaitu <https://ibank.klikbca.com>.
- d. Pastikan bahwa pada browser nasabah terdapat gambar gembok/kunci yang mengindikasikan bahwa halaman yang nasabah akses saat ini dienkripsi dengan menggunakan SSL. Jika nasabah tidak melihat gambar gembok/kunci, dimohon nasabah untuk *logout* dan kemudian melakukan *login* kembali.
- e. Pastikan bahwa nasabah telah *logout* saat meninggalkan komputer meskipun hanya sesaat.
- f. Sebaiknya nasabah tidak mengakses *internet banking* BCA di warnet atau di jaringan yang tidak pasti keamanannya.

3. Proteksi Akses *Internet Banking* BCA

BCA mewajibkan nasabah untuk memasukkan *User ID* dan PIN sebelum nasabah dapat melakukan akses ke *internet banking* BCA.

Untuk memastikan proteksi bagi nasabah dalam melakukan akses ke *internet banking* BCA, nasabah diminta melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jagalah kerahasiaan *User ID* dan PIN, jangan diberitahukan kepada orang lain, kecuali untuk melakukan transaksi-transaksi tertentu yang mengharuskan nasabah untuk memberitahukan *User ID*, antara lain untuk transaksi pembelian barang secara on-line.
- b. Jangan memberitahukan PIN atau sebagian PIN kepada orang lain, walaupun orang tersebut mengaku sebagai karyawan BCA. BCA tidak pernah menanyakan PIN nasabah.
- c. Gantilah PIN secara periodik. Jangan menggunakan PIN yang mudah diterka seperti: 111111, 222222, 123456, 654321, tanggal lahir, nomor mobil, alamat dan lain-lain. Jangan menuliskan PIN di tempat dimana orang lain dapat membacanya.
- d. Gunakan PIN *internet banking* BCA yang berbeda dengan PIN yang Anda gunakan untuk mengakses situs lain.

- e. Hubungi Halo BCA jika Anda lupa PIN atau PIN Anda terblokir. Ikuti instruksi mereka bagaimana cara untuk mengaktifkan fasilitas *internet banking* Anda kembali.

4. KeyBCA dan Proteksi KeyBCA

BCA mewajibkan nasabah menggunakan *security token* yang dinamakan KeyBCA untuk menghasilkan *One Time Password* yang digunakan untuk mengotentikasi setiap transaksi finansial nasabah dan sebagai tanda persetujuan nasabah terhadap transaksi yang dilakukan.

Nasabah harus memasukkan *One Time Password* yang dihasilkan oleh KeyBCA jika nasabah melakukan transaksi finansial, seperti : transfer dana, pembelian dan pembayaran; dan transaksi non finansial, seperti : aktivasi KeyBCA, tambah koneksi, hapus koneksi dan registrasi *inquiry* tagihan kartu kredit BCA

Transaksi yang dapat dilakukan tanpa menggunakan KeyBCA adalah : informasi rekening, status transaksi, history transaksi, administrasi dan *E-mail*

5. Alamat *E-mail* dan Proteksi Informasi Transaksi

BCA mewajibkan nasabah untuk memberikan alamat *e-mail* kepada BCA. BCA akan menggunakan alamat *e-mail* untuk mengirimkan informasi atas transaksi finansial yang telah nasabah lakukan melalui *internet banking* BCA dan beberapa transaksi non finansial. yaitu saat *login* pertama kali, perubahan alamat *e-mail*, tambah koneksi, dan lain-lain.

Selain itu BCA juga menggunakan alamat *e-mail* nasabah untuk kepentingan promosi, undangan gathering dan informasi-informasi lainnya.

Untuk memastikan proteksi pengiriman informasi ke alamat *e-mail*, nasabah diminta melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berikan kepada BCA alamat *e-mail* pribadi. Jangan menggunakan alamat *e-mail* palsu.
- b. Ubahlah segera alamat *e-mail* di *internet banking* BCA jika nasabah mengganti alamat *e-mail*.
- c. Jika nasabah menghubungi BCA melalui *e-mail*, jangan mengirimkan informasi rekening yang sifatnya rahasia atau sensitif, termasuk PIN nasabah.

6. Situs BCA

Di dalam situs BCA, BCA menyediakan URL link ke situs lain yang tidak dikontrol oleh BCA. BCA tidak bertanggung jawab atas isi dan keamanan dari situs tersebut. Jika nasabah mengakses situs tersebut, silakan memeriksa kebijakan privasi dan pengamanan mereka.

Dalam hal nasabah mengakses situs atau *internet banking* BCA melalui URL link dari situs lain, pastikan kebenaran alamat yang nasabah akses yaitu <http://www.klikbca.com> atau <https://ibank.klikbca.com>.

BCA dapat mengubah kebijakan privasi dan informasi pengamanan ini setiap saat untuk tetap menyesuaikan dengan situasi dan teknologi terbaru. Anda selalu dapat meninjau informasi dan kebijakan privasi BCA yang terbaru di <https://ibank.klikbca.com/privacy.html> atau Anda dapat memintanya dengan mengirimkan *E-mail* ke klikbca@bca.co.id.

Adapun persamaan dan perbedaan KlikBCA dibandingkan dengan *internet banking* yang diselenggarakan oleh bank lain adalah: persamaannya, sama-sama merupakan transaksi yang dapat diakses via website dengan koneksi internet baik untuk transaksi finansial maupun non finansial. Sedangkan perbedaannya, terletak pada fitur-fitur *internet banking* yang cukup beragam dan pada proteksi sistem pengamanannya masing-masing, misalnya Key BCA yang merupakan *hard*

token. yang tidak dimiliki oleh semua bank penyelenggara *internet banking* di Indonesia.³⁹

Sampai saat ini, menurut pihak BCA,⁴⁰ belum pernah ada *hacker* yang dapat menjebol sistem KlikBCA. Sungguhpun demikian diakui bahwa problem jaringan di mana nasabah tidak dapat mengakses KlikBCA, masih sering terjadi.



³⁹ Jawaban tertulis BCA, *Ibidem*.

⁴⁰ *Ibidem*.

BAB 4

PENERAPAN PBI NO 9/15/PBI/2007 TENTANG MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TI DI BANK CENTRAL ASIA (BCA)

A. Hal-Hal Yang Diatur Dalam PBI No 9/15/PBI/2007

BI mewajibkan setiap bank yang menggunakan TI dalam melakukan layanan perbankan khususnya fasilitas pelayanan *internet banking*, menerapkan manajemen risiko secara efektif dan terintegrasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya TI.

A. 1. Pengawasan Aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Internet banking merupakan aset penting dalam operasional bank yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing suatu bank, namun dalam penyelenggaraannya mengandung berbagai risiko. Karenanya, bank perlu menerapkan *IT Governance* melalui penyelarasan Rencana Strategis TI dengan strategi bisnis bank, optimalisasi pengelolaan sumber daya, pemanfaatan TI (*IT value delivery*), pengukuran kinerja dan penerapan manajemen risiko yang efektif. Keberhasilan penerapan *IT Governance* sangat tergantung pada komitmen Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh satuan kerja di bank, baik penyelenggara maupun pengguna TI.

Di dalam Pasal 5 PBI No. 9/15/PBI/2007, disebutkan mengenai wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, yang setidaknya mencakup: (1) mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Rencana Strategis TI dan kebijakan Bank terkait penggunaan TI; (2) mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan TI.

Sedangkan wewenang dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan Pasal 6 PBI No. 9/15/PBI/2007, paling kurang mencakup:

1. menetapkan Rencana Strategis TI dan kebijakan Bank terkait penggunaan TI;
2. memastikan bahwa: (a) TI yang digunakan Bank dapat mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis Bank dan kelangsungan pelayanan kepada nasabah; (b) terdapat upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penggunaan TI; (c) penerapan

proses manajemen risiko dalam penggunaan TI dilaksanakan secara memadai dan efektif; (d) tersedianya kebijakan dan prosedur TI yang memadai dan dikomunikasikan serta diterapkan secara efektif baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna TI; (e) terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan TI yang paling kurang dapat: mendukung proses pemantauan terhadap implementasi strategi; mendukung penyelesaian proyek; mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan investasi pada infrastruktur; meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan TI dan kualitas layanan penyampaian hasil proses kepada pengguna.

Bank juga wajib memiliki Komite Pengarah TI (*IT Steering Committee*),⁴¹ sesuai dengan Pasal 7 PBI No. 9/15/PBI/2007, yang beranggotakan sebagai berikut: (1) direktur yang membawahi satuan kerja TI; (2) direktur yang membawahi satuan kerja Manajemen Risiko; (3) pejabat tertinggi yang membawahi satuan kerja penyelenggara TI; (4) pejabat tertinggi yang membawahi satuan kerja pengguna utama TI.

A. 2. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Penggunaan TI di Bank

BCA mendefinisikan Struktur Manajemen Risiko sebagai kerangka kerja manajemen risiko terintegrasi, yang menentukan kebijakan dan tanggung jawab atas penerapan manajemen risiko secara efektif di seluruh tingkatan operasional Bank.⁴²

Direksi menjadi penanggung jawab tertinggi dari seluruh hasil yang berhubungan dengan identifikasi, pengukuran dan mitigasi risiko Bank.

⁴¹ Komite Pengarah TI bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada direksi yang paling kurang terkait dengan:

1. Rencana Strategis TI yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
2. kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI;
3. kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*);
4. kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha Bank;
5. efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor TI agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
6. pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya; upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara, secara efektif, efisien dan tepat waktu.

⁴² *Ibid.*, hal. 46.

Direksi telah menunjuk Direktur Manajemen Risiko untuk melakukan pengawasan sehari-hari terhadap masing-masing unit bisnis agar sesuai dengan kebijakan risiko yang ada.

Direktur Manajemen Risiko menjalankan tanggung jawabnya melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yang beroperasi secara independen dari unit-unit bisnis Bank maupun Divisi Audit Internal.

Direksi juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko, Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), Komite Kebijakan Kredit, dan Komite Kredit. Masing-masing komite bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Selain itu, terdapat pula Komite Pemantau Risiko yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite-komite ini memainkan peran integral dalam mempertahankan *self-monitoring* dan *self-assesment system*.⁴³

Sesuai dengan pedoman BI, BCA mengategorikan risiko ke dalam delapan kategori, yaitu (1) risiko kredit, (2) operasional, (3) pasar, (4) likuiditas, (5) strategis, (6) reputasi, (7) hukum dan (8) kepatuhan.

Pemantauan kategori risiko saat di BCA menggunakan model *Enterprise Wide* yang memungkinkan penerapan strategi "*overall one view of risk*". SKMR menganalisa data yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Selanjutnya, hasil analisa digunakan sebagai pertimbangan untuk mengubah kebijakan-kebijakan dalam merespon perubahan kondisi ekonomi maupun peraturan yang berlaku.⁴⁴

Risiko Operasional, Risiko Hukum dan Risiko Kepatuhan adalah katagori risiko yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Dalam menhadapi risiko operasional, BCA memiliki sistem *Operational Risk Management Information System* (ORMIS) berbasis *web* yang dilengkapi dengan aplikasi *Key Risk Indicator* (KRI) menyediakan deteksi dini terhadap risiko operasional yang mungkin timbul. Sistem ORMIS ini meliputi *Risk Control Self Assessment* (RCSA) dan *Loss Event Database* (LED), yang memberikan informasi berguna untuk meminimalkan risiko operasional.⁴⁵

Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan (SKHK) bertanggung jawab untuk memantau semua hal yang terkait dengan risiko hukum dan kepatuhan. Risiko

⁴³ *Ibid.*, hal. 46.

⁴⁴ Jawaban tertulis BCA, *Ibidem*. Juga, BCA, Laporan Tahunan 2009.

⁴⁵ *Ibidem*.

Hukum terkait dengan sifat kontraktual produk dan jasa perbankan yang ditawarkan BCA. SKHK bertanggung jawab mengembangkan dan memantau standarisasi dokumen-dokumen hukum untuk semua aktivitas bisnis perbankan, termasuk yang diperlukan untuk perjanjian kredit dan produk lainnya serta kontrak-kontrak yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan *outsourcing*. SKHK juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa koordinasi internal yang sistematis berjalan secara efektif sehingga dapat memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh ketidakpatuhan terhadap pedoman hukum yang berlaku. BCA beroperasi sesuai dengan kerangka peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahan. Selain itu BCA juga mengelola serangkaian standar maupun pedoman internal yang menjamin profesionalisme dan integritas operasional Bank.⁴⁶

Risiko Kepatuhan muncul akibat adanya potensi penyimpangan dari kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. SKHK secara berkala melakukan kajian ulang terhadap kepatuhan di seluruh proses organisasi Bank. Kaji ulang secara teratur tersebut dilengkapi dengan tinjauan kepatuhan secara khusus, yang dilakukan sebelum peluncuran produk baru. Kaji ulang khusus juga dilakukan sebagai tanggapan terhadap transaksi yang mencurigakan atau aktivitas di luar kebiasaan. BCA memastikan kepatuhan terhadap UU Anti Pencucian Uang. Dalam rangka memenuhi PBI, BCA telah menerapkan prinsip-prinsip *Know Your Customer* (KYC).⁴⁷

Selama 2009, Manajemen Risiko BCA bekerja sama dengan unit TI dan Strategi Operasi melakukan kajian menyeluruh terhadap Rencana Kelangsungan Bisnis (*Business Continuity Plan* atau BCP) dan terhadap Manajemen Kelangsungan Bisnis (*Business Continuity Management* atau BCM) yang telah dimiliki oleh BCA.⁴⁸

Sistem-sistem itu membentuk suatu bagian integral dari Manajemen Risiko Operasional BCA secara keseluruhan dan secara efektif menentukan langkah-langkah yang perlu diambil jika terjadi bencana atau terdapat faktor-faktor eksternal lainnya di luar kendali BCA.⁴⁹

⁴⁶ BCA, Laporan Tahunan 2009, *Op. Cit.*, hal. 47.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 48.

⁴⁸ *Ibidem.*

⁴⁹ *Ibidem.*

Penerapan sistem teknologi informasi merupakan kunci keunggulan BCA dalam menyediakan layanan penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan sesuai kebutuhan nasabah. BCA senantiasa melakukan *upgrade* terhadap sistem yang digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas, menjamin keamanan dan keandalan sistem.⁵⁰

Untuk itu, BCA melakukan sejumlah inisiatif untuk memperkuat infrastruktur dalam mendukung transaksi-transaksi nasabah. BCA berhasil mempertahankan stabilitas sistem sekaligus mengoptimalkan kinerja dari *dual data center* yang dimilikinya. BCA memiliki dua *mainframe* yang berada di dalam negeri, yang masing-masing berlokasi di kantor pusat Menara BCA dan gedung Wisma Asia. Masing-masing *mainframe* memiliki kemampuan untuk menangani seluruh proses transaksi nasabah Bank. Kedua *mainframe* tersebut dirancang untuk memelihara *redundansi* (pengulangan) data yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan usaha apabila terjadi kegagalan sistem pada salah satu *mainframe* tersebut.

Selain dua *mainframe* yang berlokasi di dalam negeri, BCA juga memiliki sebuah *mainframe* yang berfungsi sebagai *Disaster Recovery Center* (DRC) di Singapura, yang dirancang untuk menjaga operasi-operasi dasar perbankan tetap berjalan seandainya terjadi bencana yang besar di Jakarta. Tingkat keamanan yang disediakan oleh sistem DRC yang berlokasi di Singapura membantu BCA dalam mengurangi risiko operasional.

Sepanjang 2009, BCA melakukan optimasi dan peningkatan kapasitas jaringan komunikasi data yang menghubungkan semua cabang utama dan sekitar 200 kantor cabang pembantu besar, untuk mengantisipasi peningkatan volume transaksi yang dilayani oleh cabang-cabang tersebut. BCA secara aktif terus memantau kinerja aplikasi-aplikasi yang vital seperti sistem cabang *on line*, *direct domestic delivery channels*, sentra operasi, sistem perbankan internasional dan sistem *treasury*.⁵¹

Pada 2009, BCA melaksanakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat tata kelola teknologi informasi (*IT Governance*) secara menyeluruh. Tujuannya meningkatkan kedisiplinan di BCA dengan memastikan bahwa seluruh kebijakan

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 58.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 59.

dan prosedur senantiasa diperbaharui dan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵²

BCA tengah menyusun panduan keamanan teknologi informasi yang komprehensif dan akan mulai disosialisasikan kepada para karyawan pada 2010. Salah satu bidang yang mendapat perhatian khusus di tahun 2009 adalah implementasi Manajemen Kelangsungan Bisnis (*Business Continuity Management* atau BCM).⁵³

Unit TI dan Strategi Operasi BCA terus memastikan bahwa infrastruktur yang diperlukan untuk mengukur berbagai jenis risiko (risiko operasional, kredit, dan pasar) di bawah BASEL II telah sejalan dengan semua peraturan yang berlaku.

Unit TI dan Strategi Operasi BCA mendukung BCA memenuhi prinsip standar akuntansi keuangan yang baru, PSAK 50 dan 55, yang akan diterapkan pada tahun 2010. Selain itu, melakukan kajian terhadap kapasitas beban operasional maupun kebutuhan *bandwidth* yang diperlukan BCA.

Dalam jangka pendek dan jangka menengah, fokus akan lebih diarahkan pada pengembangan *middleware* untuk meningkatkan kapasitas *mainframe* yang ada. Mengingat pertumbuhan transaksi yang terus terjadi, perhatian yang lebih akan senantiasa diberikan untuk memastikan bahwa kapasitas dan kecepatan dapat dipertahankan pada tingkat yang optimal, dengan menekankan pada kegiatan perbankan yang sehat dan aman. BCA berkeyakinan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* – GCG) merupakan kunci utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan usaha.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab memastikan efektivitas implementasi GCG dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. BCA mewujudkan lima prinsip dasar GCG yaitu: (1) Transparansi, (2) Akuntabilitas, (3) Pertanggungjawaban, (4) Independensi, dan (5) Kewajaran dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan GCG, terutama PBI, peraturan Bapepam-LK dan UU PT.

⁵² *Ibid.*, hal. 60.

⁵³ *Ibidem.*

Sesuai PBI tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum, pelaksanaan GCG di lingkungan BCA selama tahun 2009 adalah:

- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite penunjang Dewan Komisaris dan komite eksekutif di bawah Direksi.
- Kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
- Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.
- Laporan fungsi Sekretaris Perusahaan.
- Pengungkapan kondisi keuangan dan nonkeuangan bank.
- Hasil *self assessment* GCG selama periode 2009.

BCA melakukan *self assessment* secara berkala terhadap pelaksanaan GCG, yang meliputi sebelas aspek penilaian sebagaimana diatur di dalam PBI. Hasil *self assessment* tentang pelaksanaan GCG di lingkungan BCA selama periode tahun 2009 memberikan peringkat nilai komposit 1,35 atau sama dengan predikat “Sangat Baik”.

Dalam penyelenggaraan *internet banking*, bank diharapkan menguasai benar produk TI yang digunakannya. Keandalan bank mengelola TI menentukan keberhasilan bank dalam menghasilkan suatu informasi yang lengkap, akurat, terkini, utuh, aman, konsisten, tepat waktu dan relevan.

Dengan demikian informasi yang dihasilkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan operasional bisnis bank. Karenanya, bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur penggunaan TI. Bank juga diharapkan mengimplementasikan kerangka manajemen risiko ini dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku, standar nasional dan internasional serta *best practices* untuk memastikan bahwa manajemen risiko yang memadai telah diterapkan.

Kebijakan dan prosedur penggunaan TI sesuai Pasal 8 PBI No. 9/15/PBI/2007, paling kurang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Manajemen. Sehubungan dengan dengan penerapan *IT Governance*, maka diperlukan kebijakan yang memuat peran dan tanggung jawab dewan komisaris,

direksi dan pejabat tertinggi TI dalam memastikan diterapkannya manajemen risiko TI secara efektif.

2. Pengembangan dan pengadaan. Pengembangan dan pengadaan sistem mencakup pengelolaan sistem TI yang tepat melalui proses identifikasi, pengembangan pengadaan, implementasi dan pemeliharaan sistem TI yang digunakan dalam proses identifikasi, pengembangan/pengadaan, implementasi dan pemeliharaan sistem TI yang digunakan dalam proses bisnis bank. Pengembangan dan pengadaan sistem dimaksud dapat berupa pengembangan perangkat lunak secara internal atau pembelian perangkat lunak, perangkat keras dan jasa pengembangan. Bila pengadaan sistem lemah maka bank dapat menghadapi berbagai risiko akibat adanya kesalahan (*error*), kejahatan (*fraud*) maupun produk atau layanan yang tidak tepat.

3. Operasional Teknologi Informasi. Perkembangan TI, memungkinkan bank menjalankan kegiatan operasional yang semakin kompleks. Operasional TI tidak hanya terkonsentrasi di pusat data (*Data Center*) tetapi juga pada aktivitas lainnya yang terkait dengan penggunaan aplikasi yang terintegrasi, beragam media komunikasi, koneksi internet dan berbagai platform komputer. Sementara itu akses input dan output dapat dilakukan oleh banyak *user* dari berbagai lokasi. Demikian pula dengan pemrosesan, dapat dilakukan di berbagai lokasi yang berjauhan namun saling terkait, baik secara *online realtime* maupun *on-line off-line*. Karenanya diperlukan pengendalian yang memadai atas operasional TI agar bank dapat meminimalisasi risiko terganggunya kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi.

4. Jaringan komunikasi. Perkembangan teknologi jaringan komunikasi telah mengubah pendekatan usaha bank menjadi tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Bank dapat menyediakan layanan berbagai produk perbankan secara *on-line realtime* dari seluruh kantor dan *delivery channel* lainnya, seperti: *Automated Teller Machine (ATM)*, *internet banking*, *mobile banking* dan *Electronic Data Capture (EDC)*, baik milik bank itu sendiri maupun milik pihak penyedia jasa. Jaringan komunikasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak dan media transmisi yang digunakan untuk mentransmisikan informasi berupa data, suara (*voice*), gambar (*image*) dan video. Penyelenggaraan jaringan komunikasi sangat terpengaruh adanya perubahan dan rentan terhadap gangguan dan penyalahgunaan. Karenanya, bank

perlu memastikan bahwa integritas jaringan terpelihara dengan cara menerapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan jaringan dengan baik, memaksimalkan kinerja jaringan, mendesain jaringan yang tahan terhadap gangguan dan mendefinisikan layanan jaringan secara jelas serta melakukan pengamanan yang diperlukan.

5. Pengamanan informasi. Informasi adalah aset yang sangat penting bagi bank, baik informasi yang terkait dengan nasabah, keuangan, laporan maupun informasi lainnya. Kebocoran, kerusakan, ketidak aturan, ketidaktersediaan atau gangguan lain terhadap informasi tersebut dapat menimbulkan dampak yang merugikan baik secara financial maupun non-finansial bagi bank. Dampak dimaksud tidak hanya terbatas pada bank bersangkutan, juga nasabah serta bank lain dan bahkan terhadap sistem perbankan nasional. Mengingat pentingnya informasi, maka informasi harus dilindungi atau diamankan oleh seluruh personil di bank. Pengamanan informasi sangat tergantung pada pengamanan terhadap semua aspek dan komponen TI terkait, seperti perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, peralatan pendukung (misalnya sumber daya listrik, AC) dan sumber daya manusia (termasuk kualifikasi dan ketrampilan).

6. *Business Continuity Plan*. Kegiatan perbankan tidak dapat terhindar dari adanya gangguan/kerusakan yang disebabkan oleh alam maupun manusia misalnya terjadinya gempa bumi, bom, kebakaran, banjir, *power failure*, kesalahan teknis, kelalaian manusia, demo buruh, huru-hara dan sebagainya. Kerusakan yang terjadi tidak hanya berdampak pada kemampuan teknologi suatu bank, tetapi juga berdampak pada kegiatan operasional bisnis bank terutama pelayanan kepada nasabah. Bila tidak ditangani secara khusus, selain bank akan menghadapi risiko operasional, juga akan mempengaruhi risiko reputasi dan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan nasabah kepada bank. Untuk meminimalisasi risiko tersebut, bank diharapkan memiliki *Business Continuity Management (BCM)*, yaitu proses manajemen terpadu dan menyeluruh untuk menjamin kegiatan operasional bank tetap dapat berfungsi walaupun terdapat gangguan/bencana guna melindungi kepentingan para *stakeholder*.⁵⁴

⁵⁴ BCM merupakan bagian yang terintegrasi dengan kebijakan manajemen risiko bank secara keseluruhan, BCM yang efektif perlu didukung dengan hal-hal sebagai berikut: (a) adanya pengawasan aktif manajemen; (b) melalui Business Impact Analysis dan Risk Assesment; (c) penyusunan Business Continuity Plan yang memadai; (d) dilakukannya

7. *End User Computing* (EUC) adalah sistem aplikasi komputer yang menjalankan operasi bisnis bank di mana kendali terhadap pengembangan sistem aplikasi serta pengelolaannya dilakukan oleh satuan kerja pengguna akhir (*end user*) atau unit bisnis bank dan bukan oleh satuan kerja TI. Beberapa alasan yang melatarbelakangi penggunaan EUC pada suatu bank antara lain: (a) adanya proyek pengembangan sistem aplikasi yang tertunda pelaksanaannya (*backlog project*) oleh satuan kerja TI, sehingga EUC memungkinkan pengguna akhir untuk mengembangkan, memelihara dan mengoperasikan TI sendiri; (b) adanya kebutuhan spesifik dari pengguna, dengan jumlah pengguna yang sedikit dan volume yang rendah, sehingga kurang efisien jika melalui prosedur pengembangan sistem aplikasi secara umum oleh satuan kerja TI.

8. *Electronic Banking*. Perkembangan pesat TI dan globalisasi mendukung bank untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah secara aman, nyaman dan efektif, di antaranya melalui media elektronik atau dikenal dengan *e-banking*. Melalui *e-banking*, nasabah bank pada umumnya dapat mengakses produk dan jasa perbankan dengan menggunakan berbagai peralatan elektronik (*intelligent electronic device*) seperti *personal computer* (PC), *personal digital assistant* (PDA), anjungan tunai mandiri (ATM), kios atau telephone. *Electronic Banking* (*e-banking*) adalah layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik seperti *Automatic Teller Machine* (ATM), *phone banking*, *electronic fund transfer* (EFT),

pengujian terhadap BCP; dan (e) dilakukan pemeriksaan oleh Auditor Intern. *Business Continuity Plan* (BCP) merupakan suatu dokumen tertulis yang memuat rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinir mengenai langkah-langkah pengurangan risiko, penanganan dampak gangguan/bencana dan proses pemulihan agar kegiatan operasional bank dan pelayanan kepada nasabah tetap dapat berjalan. Rencana tidak tertulis tersebut melibatkan seluruh sumber daya TI termasuk sumber daya manusia yang mendukung fungsi bisnis dan kegiatan operasional yang krusial bagi bank. Komponen prosedur BCP yang harus dimiliki bank paling kurang meliputi *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Contingency Plan* (CP). *Disaster Recovery Plan* (DRP) lebih menekankan pada aspek teknologi dengan fokus pada data *recovery/restoration plan* dan berfungsinya sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang krusial. Sedangkan *Contingency Plan* (CP), menekankan pada rencana tindak untuk menjaga kelangsungan bisnisnya apabila terjadi gangguan atau bencana termasuk tindakan antisipatif menghadapi kondisi terburuk misalnya bila TI yang digunakan sama sekali tidak dapat dipulihkan untuk waktu yang cukup lama. *Contingency Plan* (CP) harus meliputi pula rencana untuk memastikan kelangsungan seluruh pelayanan bank termasuk yang dilaksanakan melalui *electronic banking*.

Electronic Data Capture (EDC)/ Point Of Sales, internet banking dan mobile banking.

Dalam memberikan pelayanan *e-banking*. Bank dapat menyediakan layanan yang bersifat *informational, communicative* dan/atau *transactional*. Penyediaan layanan *e-banking* hendaknya memperhatikan prinsip *prudential banking*, prinsip pengamanan dan terintegrasinya sistem TI, *cost effectiveness*, perlindungan nasabah yang memadai serta searah dengan strategi bisnis bank.

Mengingat *e-banking* hanya merupakan *alternative delivery channel* maka selain menghadapi risiko yang telah ada, terdapat juga penambahan dan peningkatan risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi yang berasal dari penggunaan Teknologi Informasi.

9. Penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan strategis, Bank dimungkinkan menggunakan pihak penyedia jasa TI. Yakni, penggunaan jasa pihak lain dalam menyelenggarakan kegiatan TI yang menyebabkan bank memiliki ketergantungan terhadap jasa yang diberikan secara berkesinambungan dan atau dalam periode tertentu. Penggunaan pihak penyedia jasa TI dapat mempengaruhi risiko bank, antara lain: risiko operasional, kepatuhan, hukum dan reputasi yang dapat timbul karena adanya kegagalan penyedia jasa dalam menyediakan jasa, pelanggaran terhadap pengamanan atau ketidakmampuan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk memastikan bank menjalankan usahanya secara sehat dan aman, operasional TI yang dilakukan oleh penyedia jasa TI juga menjadi objek pengaturan dan pengawasan dari otoritas pengawas bank. BI memiliki kewenangan mengawasi semua aktivitas dan catatan keuangan bank, baik yang dilakukan oleh bank sendiri atau oleh pihak lain. Pemeriksaan dan pengawasan bank tidak boleh terhambat dengan adanya pengalihan fungsi-fungsi operasional bank ke pihak lain.

Agar aspek-aspek tersebut diatas dapat berjalan dengan optimal, bank wajib menetapkan limit risiko yang dapat ditoleransi. Sesuai ketentuan Pasal 9 PBI No. 9/15/PBI/2007, bank juga wajib memiliki Rencana Strategis TI (*IT Strategic Plan*) yang mendukung rencana strategis kegiatan usaha Bank yang dijabarkan dalam Rencana Bisnis Bank.

A. 3. Proses Manajemen Risiko Terkait Teknologi Informasi

Kemampuan bank memitigasi risiko TI tergantung dari hasil identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko-risiko terkait TI yang berpotensi mengancam keamanan dan operasional bank. Ketentuan mengenai Proses Manajemen Risiko Terkait TI, diatur di dalam Pasal 10 sampai Pasal 14 PBI No. 9/15/PBI/2007, yang mencakup empat hal penting, yaitu:

1. Perencanaan Penggunaan TI. Sebagaimana dijelaskan di atas, bank wajib memiliki Rencana Strategis TI (*IT Strategic Plan*) yang mendukung rencana strategis kegiatan usaha bank. Selanjutnya Rencana Strategis TI yang akan diimplementasikan dalam satu tahun ke depan diungkapkan dalam Rencana Bisnis Bank, yaitu dalam bagian “Kebijakan dan Strategi Manajemen.” Disamping itu apabila terdapat bagian dari Rencana Strategis TI tersebut yang terkait dengan pengembangan produk dan aktivitas baru serta perubahan jaringan kantor bank, maka harus diungkapkan pula pada bagian “Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru” serta sub bab “Perubahan Jaringan Kantor Bank.” Setiap rencana pengeluaran terkait Rencana Strategis TI yang akan diimplementasikan pada tahun yang bersangkutan harus dimasukkan dalam proyeksi neraca di Rencana Bisnis. Mengingat rencana strategis TI bersifat jangka panjang, maka untuk menjaga kesesuaian dengan perkembangan usaha bank dan perkembangan TI maka bank sebaiknya melakukan evaluasi secara berkala yang mencakup, antara lain, kinerja TI bank serta tercapainya sasaran dan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian proyeksi neraca di Rencana Bisnis dapat lebih realistis dan berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Sesuai dengan PBI No.8/4/PBI/2006 (30 Januari 2006) sebagaimana telah diubah melalui PBI No.8/14/2006 (5 Oktober 2006), BCA telah membentuk komite-komite penunjang Dewan Komisaris yaitu (1) Komite Audit, (2) Komite Pemantau Risiko, serta (3) Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite-komite tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam fungsinya membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dengan mengacu kepada pedoman dan tata tertib kerja yang telah disusun untuk masing masing Komite.⁵⁵

Komite yang terkait langsung dengan pembahasan skripsi ini adalah Komite Pemantau Risiko BCA, yang susunan keanggotannya per Desember 2009 terdiri dari

⁵⁵ BCA, Laporan Tahunan 2009, *Ibid.*, hal. 64. Jawaban tertulis BCA.

Ketua yang juga adalah Komisaris Independen (Sigit Pramono) dan dua orang anggota dari pihak independen (Andreas E. Susetyo dan Endang Swasthika Wibowo) yang memiliki kapasitas, kompetensi, keahlian dan pengalaman di bidang Perbankan dan Keuangan, Teknologi Informasi serta Manajemen Risiko.⁵⁶

Komite Pemantau Risiko dibantu oleh seorang Sekretaris. Masa tugas Komite dan Anggota Komite Pemantau Risiko ini akan berakhir sampai dengan akhir masa tugas jabatan Dewan Komisaris BCA, yaitu sampai dengan saat ditutupnya RUPS yang akan diselenggarakan dalam tahun 2011.

Adapun Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko adalah:

11. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam hal keberadaan, operasi dan efektivitas program pengelolaan risiko BCA, kebijakan dan praktik-praktik BCA, termasuk dan tidak terbatas pada kepatuhan atas kebijakan BI terkait implementasi Basel II.
12. Memberi masukan atau rekomendasi atas toleransi risiko BCA.
13. Memastikan ketersediaan informasi dan implementasi dari standar, kontrol, batasan, pedoman dan kebijakan sehubungan dengan pengukuran dan pengelolaan risiko terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, risiko strategis, risiko hukum dan risiko kepatuhan.⁵⁷

Dalam menjalankan tugas pemantauannya, Komite Pemantau Risiko memiliki kewenangan dalam hal:

- a. Menerima dan memeriksa laporan dari manajemen BCA perihal langkah-langkah yang telah diambil untuk melakukan pengawasan dan *control exposure*.
- b. Melakukan pemeriksaan atas laporan tentang hal-hal signifikan yang disiapkan oleh grup pengelolaan risiko internal dan memberikan masukan bila diperlukan.
- c. Melakukan pemantauan atas proses *underwriting* dan kontrol serta kepatuhan atas kebijakan serta mengevaluasi kinerja manajemen terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa proses

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 73.

⁵⁷ *Ibidem*.

pengelolaan risiko telah berjalan efektif dan bahwa tanggung jawab pengelolaan risiko dari Direksi dan Manajemen yang terkait, dan karyawan BCA lainnya telah didefinisikan dengan jelas.

- d. Memantau dan mengevaluasi tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- e. Meminta manajemen untuk melakukan analisis atas risiko tertentu sesuai kebutuhan dan menetapkan batasan, kontrol dan prosedur tertentu yang disetujui Dewan Komisaris untuk memitigasi risiko.
- f. Menerima laporan dan rekomendasi dari Direksi dan manajemen BCA yang terkait sehubungan dengan masalah pengelolaan risiko yang signifikan dan menyiapkan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- g. Secara mandiri atau bersama Komite Audit, melakukan kaji ulang dan diskusi tentang regulasi perbankan.
- h. Melakukan aktivitas lainnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite ini.
- i. Membuat laporan aktivitas kepada Dewan Komisaris secara periodik tentang hal-hal
- j. material sehubungan dengan masalah-masalah pengelolaan risiko dan kepatuhan BCA.⁵⁸

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan BCA sedikitnya empat kali dalam setahun, sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite.

Hasil risalah rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*Dissenting Opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 74.

Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Berikut ini program kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya selama tahun 2009:

1. Melakukan pemantauan risiko melalui analisis terhadap dokumen:
 - d. Laporan Keuangan dan Indikator Kinerja
 - e. Laporan Profil Risiko
 - f. Laporan Portofolio Kredit
 - g. Laporan Kepatuhan
 - h. Laporan Risiko Operasional (Lost Event Database / LED dan ORMIS)
 - i. Laporan Hasil Audit
2. Melakukan pemantauan secara khusus baik terhadap kualitas aset dan *stress test* atas portofolio kredit maupun risiko pasar.
3. Melakukan review terhadap ketentuan GCG serta tugas dan kewajiban Komite Pemantau Risiko
4. Memberikan masukan atas pelaksanaan dan pengembangan proses Manajemen Risiko.
5. Melakukan evaluasi Pedoman dan Ketentuan yang terkait dengan proses Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa BCA memiliki infrastruktur yang baik untuk mengendalikan risiko.
6. Memantau kesiapan BCA atas Regulasi Baru Telah melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan regulasi di bidang IT yang harus dipenuhi pada awal tahun 2009
7. Menghadiri berbagai rapat dalam rangka pelaksanaan GCG Komite Pemantau.

Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi BCA dalam pelaksanaan GCG⁵⁹ dan penerapan manajemen risiko adalah:

5. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
6. Sehubungan dengan penerapan manajemen risiko, Direksi:
 - a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 75. Juga, Jawaban tertulis BCA.

- komprehensif.
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan *exposure* risiko yang diambil oleh BCA secara keseluruhan.
 - c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
 - d. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
 - e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.
 - f. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
 - g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - i. keakuratan metodologi penilaian risiko;
 - ii. kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
 - iii. ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.⁶⁰

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Direksi yang efektif dan efisien, Direksi telah membentuk tujuh Komite Eksekutif Penunjang Direksi, yaitu:

1. Komite Teknologi Informasi (KTI)
2. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)
3. Asset & Liability Committee (ALCO)
4. Komite Kredit (KK)
5. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK)
6. Komite Sumber Daya Manusia (KSDM)
7. Komite Manajemen Risiko (KMR)⁶¹

Komite yang relevan dengan pembahasan skripsi ini adalah Komite Teknologi Informasi (KTI). KTI dibentuk untuk memastikan keunggulan bersaing melalui pemanfaatan teknologi informasi. Fungsi pokok KTI antara lain memantau dan mengevaluasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh kegiatan yang

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 79.

⁶¹ *Ibidem.* Juga, Jawaban tertulis BCA,.

berdampak signifikan bagi BCA. KTI mempunyai wewenang untuk menetapkan arah dan kebijakan pengembangan teknologi informasi yang mendukung kinerja BCA.

2. Penilaian Risiko Yang Berkesinambungan. Kebijakan pengelolaan TI pada umumnya bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan TI dapat mendukung pencapaian rencana bisnis bank dan memastikan risiko yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan TI tersebut dapat diatasi. Dalam melakukan identifikasi dan penilaian risiko tersebut, manajemen terlebih dahulu harus memastikan adanya *risk awareness* di seluruh lini bank yaitu: (a) *risk awareness* dari pejabat eksekutif dan direksi; (b) pemahaman yang jelas mengenai *risk appetite* dari bank; (c) pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku; (d) transparansi dan terintegrasi tanggung jawab mengenai risiko-risiko yang signifikan dari setiap aspek terkait penyelenggaraan TI.

Untuk dapat memastikan hal-hal di atas, bank dapat menjalankan *risk awareness* program bagi seluruh pegawai dan pengurus bank atau menjalankan metode lain yang dapat meningkatkan kesadaran para pengguna TI akan risiko yang ada.

3. Jenis Risiko Terkait Teknologi Informasi. Bank wajib memiliki pendekatan manajemen risiko yang terpadu untuk dapat melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara efektif.⁶² Risiko terkait teknologi wajib

⁶² Untuk itu penilaian risiko yang dilakukan bank perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan suatu siklus yang minimal mencakup empat langkah penting sebagai berikut: A) pengumpulan data/dokumen pengumpulan data/dokumen atas aktivitas terkait TI yang berpotensi menimbulkan atau meningkatkan risiko baik dari kegiatan yang akan maupun sedang berjalan termasuk namun tidak terbatas pada: (1) Aset TI yang kritical, dalam rangka mengidentifikasi titik-titik akses dan penyimpangan terhadap informasi nasabah yang bersifat rahasia; (2) Hasil review rencana strategis bisnis, khususnya review terhadap penilaian risiko potensial; (3) Hasil due diligence dan pemantauan terhadap kinerja pihak penyedia jasa; (4) Hasil review atas laporan atau keluhan yang disampaikan oleh nasabah dan atau penggunaan TI ke Call Center dan atau Help Desk; (5) Hasil Self Assessment yang dilakukan seluruh satuan kerja terhadap pengendalian yang dilakukan terkait TI; (6) Temuan-temuan audit terkait penyelenggaraan dan penggunaan TI. B) Analisis risiko berkaitan dengan dampak potensial dari tiap-tiap risiko, misalnya dari fraud di pemrograman, virus komputer, kegagalan sistem, bencana alam, kesalahan pemilihan teknologi yang digunakan, masalah pengembangan dan implementasi sistem, kesalahan prediksi perkembangan bisnis bank. C) Penetapan Prioritas pengendalian dan langkah mitigasi yang didasarkan pada hasil penilaian risiko bank secara keseluruhan. Untuk itu bank harus membuat peringkat risiko berdasarkan kemungkinan kejadian dan besarnya dampak yang dapat ditimbulkan serta mitigasi risiko yang dapat dilakukan untuk menurunkan exposure risiko tersebut. D) Pemantauan kegiatan pengendalian dan mitigasi Pemantauan kegiatan pengendalian dan mitigasi yang telah dilakukan atas risiko yang diidentifikasi

dikaji ulang bersamaan dengan risiko-risiko lainnya yang dimiliki bank untuk menentukan *risk profile* bank secara keseluruhan. Adapun risiko terkait penyelenggaraan TI yang utama adalah: (a) Risiko Operasional. Risiko ini melekat di setiap produk dan layanan yang disediakan bank. Penggunaan TI dapat menimbulkan terjadinya risiko operasional yang disebabkan oleh antara lain ketidakcukupan/ketidaksesuaian *desain*, implementasi, pemeliharaan sistem atau komputer dan perlengkapannya, metode pengamanan, *testing* dan standar internal audit serta penggunaan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI; (b) Risiko Kepatuhan. Risiko ini dapat timbul apabila bank tidak memiliki sistem yang dapat memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku bagi bank seperti kerahasiaan data nasabah. Risiko kepatuhan dapat berdampak buruk terhadap reputasi serta citra bank, juga berdampak pada kesempatan berusaha dan kemungkinan ekspansi; (c) Risiko Hukum. Bank menghadapi risiko hukum yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah suatu kontrak; (d) Risiko Reputasi. Opini publik yang negatif dapat timbul antara lain karena kegagalan sistem yang mendukung produk, kasus yang ada pada produk bank dan ketidakmampuan bank memberikan dukungan layanan nasabah pada saat terjadi kegagalan sistem (*downtime*). Opini negatif ini dapat menurunkan kemampuan bank memelihara loyalitas nasabah dan keberhasilan produk dan layanan bank; (e) Risiko Strategis timbul karena ketidakcocokan TI yang digunakan bank dengan tujuan strategis bank dengan rencana strategis yang dibuat untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini karena kualitas implementasi maupun sumber daya yang digunakan TI kurang memadai. Sumber daya tersebut mencakup saluran komunikasi, *operating systems*, *delivery network*, serta kapasitas dan kapabilitas pengelola TI.

A. 4. Sistem Pengendalian dan Audit Intern Atas Penyelenggaraan TI

Sistem Pengendalian dan Audit Intern atas penyelenggaraan TI diatur didalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 PBI No. 9/15/PBI/2007. Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan

dalam periode penilaian risiko sebelumnya, yang antara lain mencakup rencana tindak lanjut perbaikan, kejelasan akuntabilitas dan tanggung jawab, sistem pelaporan, pengendalian kualitas termasuk *compensating control*.

menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. SPI yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Penggunaan sarana TI disamping meningkatkan kemampuan bank melaksanakan kegiatan operasional, juga mengandung risiko yang dapat mengakibatkan kerugian, baik yang bersifat finansial maupun non finansial. Karenanya, SPI perlu diterapkan sebagai salah satu upaya meminimalkan kerugian dimaksud. Fungsi audit intern sebagai salah satu bagian dari SPI, bertanggungjawab dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan TI secara independen dan objektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola yang baik.

Sistem pengendalian intern paling kurang mencakup: (a) pengawasan oleh manajemen dan adanya budaya pengendalian; (b) identifikasi dan penilaian risiko; (c) kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi; (d) sistem informasi, sistem akuntansi dan sistem komunikasi; (e) kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan, yang dilakukan oleh satuan kerja operasional, satuan kerja audit intern maupun pihak lainnya.

B. Dampak Penerapan PBI No. 9/15/PBI/2007

PBI No. 9/15/PBI/2007, diharapkan memberi suatu kepastian hukum bagi bank sebagai penyelenggara dan pengguna TI, khususnya *internet banking* sebagai bentuk layanan perbankan, dan juga bagi nasabah yang menggunakannya. Bagi bank, PBI tersebut memberikan suatu pedoman penerapan manajemen risiko yang efektif agar *internet banking* yang dijalankan dapat bermanfaat, sehingga dunia perbankan Indonesia menjadi perbankan yang modern dapat tercapai dan risiko-risiko yang menyertainya dapat dimitigasi. Dilain pihak, nasabah juga dapat secara langsung merasakan manfaat dari *internet banking*. Kepercayaan terhadap dunia perbankan semakin besar, yang berdampak positif pada kemajuan perekonomian.

B. 1. Dampak Penerapan PBI No. 9/15/PBI/2007 bagi Bank Dalam Kegiatan *internet banking*.

Penggunaan TI, khususnya *internet banking* diperlukan oleh bank dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional bank. Selain itu perkembangan *internet banking* memungkinkan bank meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui produk-produk *e-Banking* lainnya.

Bank Central Asia Tbk. (BCA) dalam menjalankan strategi pertumbuhan, manajemen telah menunjukkan profesionalisme, integritas, kerjasama dan kreatifitas yang tinggi agar menghasilkan kinerja pelayanan perbankan yang memuaskan nasabah, khususnya melalui layanan *internet banking*-nya.

Untuk itu, dalam kegiatan *internet banking* BCA menjalankan prinsip pengelolaan risiko, melalui penerapan secara ketat standar pengelolaan risiko berpatokan pada PBI No. 9/15/PBI/2007, yakni:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA memberi kontribusi yang besar agar fungsi pengawasan dijalankan berdasar prinsip keterbukaan informasi dan kepercayaan, serta dilaksanakan secara teliti dan berhati-hati. Selain itu, Dewan Komisaris mengadakan pertemuan secara regular dengan Direksi untuk mengkaji strategi, kinerja dan laporan dari Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Dibantu Konsultan Manajemen "Bain & Co," BCA juga merumuskan Visi, Misi dan Strategi sebagai panduan BCA pada dekade mendatang.

BCA mendefinisikan Struktur Manajemen Risiko sebagai kerangka kerja manajemen risiko terintegrasi, yang menentukan kebijakan dan tanggung jawab atas penerapan manajemen risiko secara efektif di seluruh tingkatan operasional Bank.

Direksi menjadi penanggung jawab tertinggi dari seluruh hasil yang berhubungan dengan identifikasi, pengukuran dan mitigasi risiko Bank.

Direksi telah menunjuk Direktur Manajemen Risiko untuk melakukan pengawasan sehari-hari terhadap masing-masing unit bisnis agar sesuai dengan kebijakan risiko yang ada.

Direktur Manajemen Risiko menjalankan tanggung jawabnya melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yang beroperasi secara independen dari unit-unit bisnis Bank maupun Divisi Audit Internal.

Direksi juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko, Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), Komite Kebijakan Kredit, dan Komite Kredit. Masing-masing komite bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Selain itu, terdapat pula Komite Pemantau Risiko yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite-komite ini memainkan peran integral dalam mempertahankan *self-monitoring* dan *self-assesment system*.

Sesuai dengan pedoman BI, BCA mengategorikan risiko ke dalam delapan kategori, yaitu (1) risiko kredit, (2) operasional, (3) pasar, (4) likuiditas, (5) strategis, (6) reputasi, (7) hukum dan (8) kepatuhan.

Pemantauan kategori risiko saat di BCA menggunakan model *Enterprise Wide* yang memungkinkan penerapan strategi "*overall one view of risk*". SKMR menganalisa data yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Selanjutnya, hasil analisa digunakan sebagai pertimbangan untuk mengubah kebijakan-kebijakan dalam merespon perubahan kondisi ekonomi maupun peraturan yang berlaku.

Risiko Operasional, Risiko Hukum dan Risiko Kepatuhan adalah katagori risiko yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Dalam menhadapi risiko operasional, BCA memiliki sistem *Operational Risk Management Information System (ORMIS)* berbasis *web* yang dilengkapi dengan aplikasi *Key Risk Indicator (KRI)* menyediakan deteksi dini terhadap risiko operasional yang mungkin timbul. Sistem ORMIS ini meliputi *Risk Control Self Assessment (RCSA)* dan *Loss Event Database (LED)*, yang memberikan informasi berguna untuk meminimalkan risiko operasional.

Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan (SKHK) bertanggung jawab untuk memantau semua hal yang terkait dengan risiko hukum dan kepatuhan. Risiko Hukum terkait dengan sifat kontraktual produk dan jasa perbankan yang ditawarkan BCA. SKHK bertanggung jawab mengembangkan dan memantau standarisasi dokumen-dokumen hukum untuk semua aktivitas bisnis perbankan, termasuk yang diperlukan untuk perjanjian kredit dan produk lainnya serta kontrak-kontrak yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan *outsourcing*. SKHK juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa koordinasi internal yang sistematis berjalan secara efektif sehingga dapat memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh ketidakpatuhan terhadap pedoman hukum yang berlaku. BCA beroperasi sesuai

dengan kerangka peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahan. Selain itu BCA juga mengelola serangkaian standar maupun pedoman internal yang menjamin profesionalisme dan integritas operasional Bank.

Risiko Kepatuhan muncul akibat adanya potensi penyimpangan dari kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. SKHK secara berkala melakukan kajian ulang terhadap kepatuhan di seluruh proses organisasi Bank. Kaji ulang secara teratur tersebut dilengkapi dengan tinjauan kepatuhan secara khusus, yang dilakukan sebelum peluncuran produk baru. Kaji ulang khusus juga dilakukan sebagai tanggapan terhadap transaksi yang mencurigakan atau aktivitas di luar kebiasaan. BCA memastikan kepatuhan terhadap UU Anti Pencucian Uang. Dalam rangka memenuhi PBI, BCA telah menerapkan prinsip-prinsip *Know Your Customer* (KYC).

Selama 2009, Manajemen Risiko BCA bekerja sama dengan unit TI dan Strategi Operasi melakukan kajian menyeluruh terhadap Rencana Kelangsungan Bisnis (*Business Continuity Plan* atau BCP) dan terhadap Manajemen Kelangsungan Bisnis (*Business Continuity Management* atau BCM) yang telah dimiliki oleh BCA.

Sistem-sistem itu membentuk suatu bagian integral dari Manajemen Risiko Operasional BCA secara keseluruhan dan secara efektif menentukan langkah-langkah yang perlu diambil jika terjadi bencana atau terdapat faktor-faktor eksternal lainnya di luar kendali BCA.

Penerapan sistem teknologi informasi merupakan kunci keunggulan BCA dalam menyediakan layanan penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan sesuai kebutuhan nasabah. BCA senantiasa melakukan *upgrade* terhadap sistem yang digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas, menjamin keamanan dan keandalan sistem.

Untuk itu, BCA melakukan sejumlah inisiatif untuk memperkuat infrastruktur dalam mendukung transaksi-transaksi nasabah. BCA berhasil mempertahankan stabilitas sistem sekaligus mengoptimalkan kinerja dari *dual data center* yang dimilikinya. BCA memiliki dua *mainframe* yang berada di dalam negeri, yang masing-masing berlokasi di kantor pusat Menara BCA dan gedung Wisma Asia. Masing-masing *mainframe* memiliki kemampuan untuk menangani seluruh proses transaksi nasabah Bank. Kedua *mainframe* tersebut dirancang untuk memelihara

redundansi (pengulangan) data yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan usaha apabila terjadi kegagalan sistem pada salah satu *mainframe* tersebut.

Selain dua *mainframe* yang berlokasi di dalam negeri, BCA juga memiliki sebuah *mainframe* yang berfungsi sebagai *Disaster Recovery Center* (DRC) di Singapura, yang dirancang untuk menjaga operasi-operasi dasar perbankan tetap berjalan seandainya terjadi bencana yang besar di Jakarta. Tingkat keamanan yang disediakan oleh sistem DRC yang berlokasi di Singapura membantu BCA dalam mengurangi risiko operasional.

Sepanjang 2009, BCA melakukan optimasi dan peningkatan kapasitas jaringan komunikasi data yang menghubungkan semua cabang utama dan sekitar 200 kantor cabang pembantu besar, untuk mengantisipasi peningkatan volume transaksi yang dilayani oleh cabang-cabang tersebut. BCA secara aktif terus memantau kinerja aplikasi-aplikasi yang vital seperti sistem cabang *on line*, *direct domestic delivery channels*, sentra operasi, sistem perbankan internasional dan sistem *treasury*.

Pada 2009, BCA melaksanakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat tata kelola teknologi informasi (*IT Governance*) secara menyeluruh. Tujuannya meningkatkan kedisiplinan di BCA dengan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan prosedur senantiasa diperbaharui dan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BCA tengah menyusun panduan keamanan teknologi informasi yang komprehensif dan akan mulai disosialisasikan kepada para karyawan pada 2010. Salah satu bidang yang mendapat perhatian khusus di tahun 2009 adalah implementasi Manajemen Kelangsungan Bisnis (*Business Continuity Management* atau BCM).

Unit TI dan Strategi Operasi BCA terus memastikan bahwa infrastruktur yang diperlukan untuk mengukur berbagai jenis risiko (risiko operasional, kredit, dan pasar) di bawah BASEL II telah sejalan dengan semua peraturan yang berlaku.

Unit TI dan Strategi Operasi BCA mendukung BCA memenuhi prinsip standar akuntansi keuangan yang baru, PSAK 50 dan 55, yang akan diterapkan pada tahun 2010. Selain itu, melakukan kajian terhadap kapasitas beban operasional maupun kebutuhan *bandwidth* yang diperlukan BCA.

Dalam jangka pendek dan jangka menengah, fokus akan lebih diarahkan pada pengembangan *middleware* untuk meningkatkan kapasitas *mainframe* yang ada. Mengingat pertumbuhan transaksi yang terus terjadi, perhatian yang lebih akan senantiasa diberikan untuk memastikan bahwa kapasitas dan kecepatan dapat dipertahankan pada tingkat yang optimal, dengan menekankan pada kegiatan perbankan yang sehat dan aman.⁶³ BCA berkeyakinan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance – GCG*) merupakan kunci utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan usaha.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab memastikan efektivitas implementasi GCG dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. BCA mewujudkan lima prinsip dasar GCG yaitu: (1) Transparansi, (2) Akuntabilitas, (3) Pertanggungjawaban, (4) Independensi, dan (5) Kewajaran dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan GCG, terutama PBI, peraturan Bapepam-LK dan UU PT.

Sesuai PBI tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum, pelaksanaan GCG di lingkungan BCA selama tahun 2009 adalah:

- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite penunjang Dewan Komisaris dan komite eksekutif di bawah Direksi.
- Kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
- Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.
- Laporan fungsi Sekretaris Perusahaan.
- Pengungkapan kondisi keuangan dan nonkeuangan bank.
- Hasil *self assessment* GCG selama periode 2009.

BCA melakukan *self assessment* secara berkala terhadap pelaksanaan GCG, yang meliputi sebelas aspek penilaian sebagaimana diatur di dalam PBI. Hasil *self assessment* tentang pelaksanaan GCG di lingkungan BCA selama periode tahun 2009

⁶³ *Ibid.*, hal. 61. Juga , Jawaban tertulis BCA.

memberikan peringkat nilai komposit 1,35 atau sama dengan predikat “Sangat Baik”.⁶⁴

3. Proses Manajemen Risiko Terkait TI

Kerangka pengelolaan risiko BCA berlandaskan pada kebijakan dan prosedur proaktif yang didesain untuk mengidentifikasi, mengukur dan memitigasi risiko-risiko yang melekat dalam bisnis perbankan. Hal ini dicapai melalui pemantauan dan pengawasan secara aktif terhadap indikator-indikator risikoutama.

Para profesional pengelola risiko di BCA terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan risiko serta penyempurnaan kebijakan, prosedur serta batasan risiko. Untuk lebih memperkuat pengawasan pengelolaan risiko serta meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris membentuk “Komite Pemantau Risiko” yang terdiri dari tiga anggota, termasuk dua anggota independen dari luar BCA yang bertanggungjawab melakukan kaji ulang atas kebijakan dan prosedur, serta membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengelolaan risiko.

Salah satu prioritas utama BCA meliputi investasi pengembangan teknologi data *warehouse* dan *analytics* guna membantu para *frontliner* dalam meningkatkan pemahaman terhadap nasabah. BCA juga mempertahankan kompetensi utamanya sebagai bank transaksional dengan meluncurkan fitur-fitur baru mendukung transaksi baik transaksi *business-to-business* maupun transaksi *business-to-consumer*.

4. Sistem Pengendalian dan Audit Intern Atas Penyelenggaraan TI

Komite Audit BCA mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan atas pelaporan keuangan, pengendalian internal dan tata kelola bank dan anak perusahaannya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komite diberi wewenang untuk menyelidiki semua temuan yang dipandang perlu sebagai upaya mereka untuk menjamin bahwa pengendalian internal, praktik akuntansi dan tata kelola bank telah dijalankan secara efektif serta dengan standar pengendalian dan integritas tertinggi.

Komite menjalin hubungan yang erat berkomunikasi dan berdialog secara memadai dengan Auditor Eksternal Bank. Disamping itu Komite juga melakukan pemantauan secara teratur, untuk memastikan bahwa semua peraturan dan

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 65

perundangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia serta otoritas lain, benar-benar dipatuhi.

B. 2 Dampak Penerapan PBI No. 9/15/PBI/2007 terhadap nasabah.

Dengan adanya PBI ini, nasabah juga diuntungkan. Penggunaan layanan perbankan, khususnya *internet banking* yang ditawarkan oleh bank dijalankan dengan sistem dan pengelolaan sesuai dengan standar internasional, agar risiko yang melekat pada layanan *internet banking* dapat dimitigasi dan diminimalisir.

Dengan kata lain, walaupun PBI No. 9/15/PBI/2007 diperuntukan bagi pihak bank, kepentingan pihak nasabah juga terlindungi. Nasabah juga terlindungi dengan diaturnya hal-hal mengenai *user weakness* atau kelemahan nasabah seperti ketidaktahuan mengenai komputerisasi, kelalaian, salah pengetikan, *low self-secure*, dan sebagainya. Karenanya, bank diharapkan memiliki kebijakan privasi dan prosedur penggunaan *internet banking* sesuai dengan Pasal 8 PBI No 9/15/PBI/2007 untuk mempertimbangkan kelemahan-kelemahan nasabah tersebut di dalam Rencana Strategis untuk disain sistem pengamanan dan pengendalian risiko operasional *internet banking*.

Dengan demikian, apabila terjadi suatu kesalahan, dampaknya tidak terlalu merugikan kedua belah pihak. Misalnya di KlikBCA, nasabah diberikan alat pengamanan yang bernama KeyBCA, di mana setiap nasabah bisa mendapatkan PIN yang berbeda untuk tiap transaksi yang dilakukan. Dengan KeyBCA, sistem pengamanan dibuat berlapis dengan PIN yang random, sehingga *user weakness* dapat teratasi.

BAB 5 PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar uraian-uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan aktivitas layanan perbankan menggunakan media *internet banking* di Indonesia, BI mengeluarkan PBI No. 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. Ada empat hal utama yang diatur dalam PBI ini, yakni: (a) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi; (b) Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan Teknologi Informasi; (c) Proses Manajemen Risiko terkait Teknologi Informasi, dan (d) Sistem Pengendalian dan Audit Intern. Dengan ini diharapkan agar penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh bank-bank di Indonesia dalam menjalankan layanan *internet banking* dapat meminimalisirkan berbagai risiko yang melekat pada layanan *internet banking*. Pihak bank akan melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan prinsip kehati-hatian. Komisaris dan direksi melakukan pengawasan aktif dalam pengembangan strategi bisnis dan penerapan manajemen yang efektif terhadap risiko atas penyelenggaraan *internet banking*. Pihak bank juga diharapkan meningkatkan pengendalian pengamanannya dengan melakukan pengujian identitas nasabah, pengujian keahlian transaksi, penerapan prinsip pemisahan tugas, pengendalian terhadap penggunaan hak akses terhadap sistem dan perlindungan terhadap integritas data maupun kerahasiaan informasi penting pada *internet banking*. Untuk mengatasi risiko hukum dan risiko reputasi, pelayanan jasa *internet banking* dilaksanakan secara konsisten, tepat waktu dan memiliki kapasitas, kontinuitas usaha serta perencanaan darurat yang efektif. Pihak bank juga harus memiliki Sistem Pengendalian intern yang bertanggung jawab melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan TI secara independen dan objektif agar dapat ditingkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen risiko pengendalian risiko, pengendalian intern dan tata kelola yang baik. PBI No, 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Teknologi

Informasi Oleh Bank Umum menjadikan bank yang melakukan dan menggunakan Teknologi Informasi, khususnya *internet banking* dapat memitigasi (mengurangi) risiko yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan *internet banking*. Bank juga dapat mempertimbangkan hasil penilaian terhadap risiko dalam aktivitas *internet banking* dan pengimplementasian kerangka manajemen risiko, dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, standar nasional dan internasional serta *best practice* sehingga bank dapat menerapkan manajemen risiko yang memadai dan efektif. Sedangkan secara tidak langsung, PBI No. 9/15/PBI/2007 bertujuan akhir pada kepentingan nasabah, karena hal-hal yang diatur didalam PBI itu mengharuskan bank menjalankan kegiatan *internet banking* secara terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan sampai tahap penghentian. Tujuannya agar nasabah sebagai pengguna (*user*) dapat secara langsung mendapatkan manfaat maksimal layanan *internet banking* dan nasabah pun merasa aman serta kerugian-kerugian yang timbul dapat dihindari dan diminimalisir.

2. Sepanjang studi yang penulis lakukan untuk keperluan skripsi ini, BCA telah berusaha mematuhi berbagai ketentuan baik yang terkait dengan pelaksanaan GCG maupun menyangkut penerapan Manajemen Risiko di dalam melaksanakan layanan internet bankingnya, yang dikenal dengan sebutan “KlikBCA.” Ini terlihat dari langkanya kasus yang terkait dengan pelaksanaan KlikBCA selama ini dan begitu banyaknya nasabah BCA (individual maupun korporat) yang menggunakan fasilitas ini.

B. Saran

1. Untuk mengakomodir perkembangan Teknologi Informasi yang sangat cepat, khususnya *internet banking*, BI perlu melibatkan lembaga-lembaga terpercaya yang bergerak di bidang *banking security* dan terus menerus melakukan riset dalam bidang sekuriti, bukan saja dari sisi teknologi, tapi juga dari sisi sosiologis para pengguna (nasabah). Dengan melakukan kerja sama penelitian dengan berbagai pihak, termasuk universitas dan lembaga penelitian independen lainnya, maka permasalahan *internet banking* dapat

terus dipantau dan cara-cara mencegah permasalahannya dapat terus diperbarui.

2. Perkembangan Teknologi Informasi, khususnya *internet banking* perlu diimbangi dengan peraturan-peraturan yang menganut prinsip *technology neutrality*, bahwa pada dasarnya teknologi itu bersifat netral (teknologi menyimpang karena ada penyimpangan dalam penggunaannya) . Tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan terhadap penggunaan dan perkembangan teknologi dengan menciptakan aturan-aturan yang ketat, sehingga sulit mengikuti perkembangan Teknologi Informasi di dunia.



DAFTAR PUSAKA

Buku

Bank Indonesia (2001), *Ringkasan Ketentuan Perbankan*, Direktorat Hukum BI.

Djumhana, Muhammad (2000), *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir (2003), *Hukum Perbankan Modern*, Bandung, Citra Aditya.

Furst, Karen , et al. (2002), *Internet Banking: Development and Prospect, Program on Information Resources Policy*, Harvard University.

Gandapraja, Permadi (2004), *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta, PT Grafindo Pustaka Utama.

Garner, Bryan A. (1999), *Black's Law Dictionary*, Edisi ke VII, West Group, ST. Paul, Minn.

Makarim, Edmon (2004), *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta Rajawali.

Mansur, Dikdik Arif dan Ali Satrius Gultom (1986), *Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Repika Aditama.

Mertokusumo, Sudikno (1999), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Muhammad, Abdulkadir (1999), *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Nasution, AZ (2001), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Diadit Media.

Riswandi, Budi Agus (2005), *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Riswandi, Budi Agus (2003), *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.

Soekanto, Soerjono (1994), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

----- dan Sri Mamudji (1996), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali.

Sumartono (1986), *Hukum Ekonomi*, Jakarta UI Press.

Sitompul, Asril (2004), *Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung, Citra Aditya.

Susilo, Y. Sri (2000), *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, Salemba Empat

Skinner, Chris (2007), *The Future of Banking in A Globalised World*, England, Wiley Finance.

Turban, Efraim, et. al. (2000), *Electronic Commerce A Manajerial Prespective*, New Jersey, Prentice Hall Inc.

Universitas Indonesia (2008), *Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia*, Depok.

Wiratmadja, Rasjim, dkk. (1990), *Himpunan Peraturan Perbankan di Indonesia*, Jilid I dan II, Jakarta, Pradnya Paramita.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara nomor 3843

Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara RI Nomor 182,

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen, Lembaran Negara RI Nomor 42.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, Lembaran Negara No. 144 Tambahan Lembaran Negara 4785.

Sumber Lain:

Aulia, Muhammad Adnan (2001), *Aspek Hukum Protokol Pembayaran Visa/Mastercard Secure Electronic Transaction (SET)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

Bank Indonesia Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan (2005), Volume 3 Nomor 1.

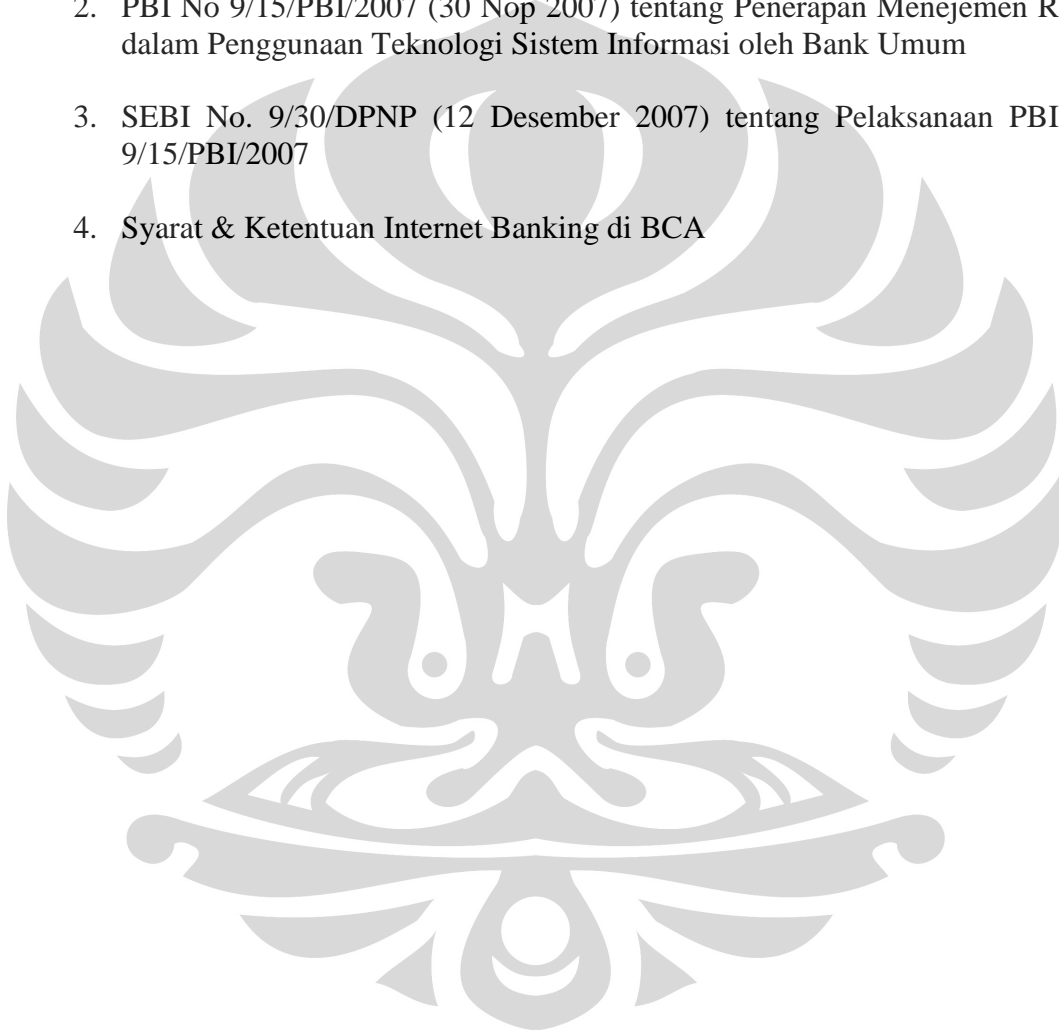
Bank Central Asia (2009), Laporan Tahunan Kepada Publik Tahun 2009.

“Bank Indonesia”, <http://www.bi.go.id/web/id>, 2 Juni 2008.

“Perbankan”, www.kadinnet.com/regulation/perbankan, 19 Juni 2008

Lampiran:

1. Pertanyaan terhadap Bank BCA
2. PBI No 9/15/PBI/2007 (30 Nop 2007) tentang Penerapan Menejemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank Umum
3. SEBI No. 9/30/DPNP (12 Desember 2007) tentang Pelaksanaan PBI No. 9/15/PBI/2007
4. Syarat & Ketentuan Internet Banking di BCA



DAFTAR PUSAKA

Bank Indonesia, Ringkasan Ketentuan Perbankan, Direktorat Hukum BI, 2001.

Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Furst, Karen, et al., Internet Banking: Development and Prospect, Program on Information Resources Policy, Harvard University, 2002.

Gandapraja, Permadi, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, PT Grafindo Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Garner, Bryan A., Black's Law Dictionary, Edisi ke VII, West Group, ST. Paul, Minn, 1999.

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perbankan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Riswandi, Budi Agus, Aspek Hukum Internet Banking, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Riswandi, Budi Agus, Hukum dan Internet di Indonesia, UII Press, Jakarta, 2003.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1994.

----- dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1996.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Susilo, Y. Sri, Bank & Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta, 2000.

Skinner, Chris, The Future of Banking in A Globalised World, Wiley Finance England 2007

Turban, Efraim, et. al., Electronic Commerce A Manajerial Prespective, Prentice Hall Inc., New Jersey, 2000.

Universitas Indonesia, Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia, Depok 2008.

Wiraatmadja, Rasjim, dkk., (eds.) Himpunan Peraturan Perbankan di Indonesia, Jilid I dan II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.

Wulandari, Bernadetta Tjandra, Diktat Perkuliahan Hukum Perbankan, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Jakarta, 2006.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, Lembaran Negara RI Tahun 1998 No. 182.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, LN Nomor 182, TLN Nomor 3790.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, LN Nomor 144, TLN Nomor 4785.

SUMBER LAIN:

Aulia, Muhammad Adnan, Aspek Hukum Protokol Pembayaran Visa/Mastercard Secure Electronic Transaction (SET), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 2001.

“Bank Indonesia”, <http://www.bi.go.id/web/id>, 2 Juni 2008.

“Perbankan”, www.kadinnet.com/regulation/perbankan, 19 Juni 2008

Dan UU lainnya spt UU ttg BI

Lampiran:

- I. PBI No 9/15/PBI/2007 (30 Nop 2007) tentang Penerepan Menejemen Risiko dalam Penggunaan teknologi Sistem Informasi oleh Bank Umum
- II. SEBI No. 9/30/DPNP (12 Desember 2007) tentang Pelaksanaan PBI No. 9/15/PBI/2007
- III. Syarat & Ketentuan Internet Banking di BCA

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi
Informasi oleh Bank Umum

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4785), maka perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM

1. Penggunaan Teknologi Informasi diperlukan Bank dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional Bank. Selain itu perkembangan Teknologi Informasi memungkinkan Bank untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui produk-produk *Electronic Banking*.
2. Dalam hal Bank tidak dapat menyelenggarakan sendiri Teknologi Informasi tersebut, Bank dimungkinkan untuk menggunakan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.

3. Mengingat ...

3. Mengingat penggunaan Teknologi Informasi dapat meningkatkan risiko yang dihadapi Bank, maka Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.

II. PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Dalam penggunaan Teknologi Informasi baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan oleh pihak penyedia jasa, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.
2. Dalam rangka menerapkan manajemen risiko penggunaan Teknologi Informasi tersebut, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang digunakan Bank dalam mengelola sumber daya Teknologi Informasi dalam rangka mendukung kelangsungan bisnis Bank terutama pelayanan kepada nasabah. Sumber daya ini mencakup antara lain perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, sumber daya manusia serta data/informasi.
3. Kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi serta pedoman manajemen risiko penggunaan Teknologi Informasi mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum yang merupakan Lampiran 1 Surat Edaran ini maupun Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko Bank sebagaimana diatur dalam Surat Edaran No. 5/21/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
4. Kebijakan dan prosedur tersebut paling kurang mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Manajemen;
 - b. Pengembangan dan pengadaan;

c. Operasional ...

- c. Operasional Teknologi Informasi;
 - d. Jaringan komunikasi;
 - e. Pengamanan informasi;
 - f. *Business Continuity Plan*;
 - g. *End user computing*;
 - h. Audit;
 - i. *Electronic Banking*; dan
 - j. Penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.
5. Pedoman dalam Lampiran 1 merupakan pokok-pokok penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi yang harus diterapkan oleh Bank untuk memitigasi risiko yang berhubungan dengan penyelenggaraan Teknologi Informasi.
 6. Bank dengan ukuran dan kompleksitas usaha besar menggunakan parameter yang lebih ketat sebagai tambahan dari hal-hal yang dikemukakan dalam pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1. Sementara itu Bank dengan ukuran dan kompleksitas usaha yang relatif kecil dapat menggunakan parameter yang lebih ringan dari hal-hal yang dikemukakan dalam pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, sepanjang Bank telah mempertimbangkan hasil penilaian terhadap risiko dalam aktivitas bisnis Bank, profil keamanan Teknologi Informasi serta *cost and benefit*.
 7. Bank yang telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam penggunaan Teknologi Informasi dan atau pedoman manajemen risiko penggunaan Teknologi Informasi sebelum berlakunya Surat Edaran ini wajib menyesuaikan dan menyempurnakan dengan berpedoman pada Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia ini paling lambat tanggal 31 Maret 2009.

III. PELAPORAN ...

III. PELAPORAN

1. Dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi, Bank wajib menyampaikan laporan-laporan sebagai berikut:

a. Laporan Penggunaan Teknologi Informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Laporan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2.1.
- 2) Laporan wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 September 2008

b. Laporan Tahunan Penggunaan Teknologi Informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Laporan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2.4.
- 2) Laporan wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun laporan. Laporan Tahunan Penggunaan Teknologi Informasi untuk tahun 2008 disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2009.

c. Laporan Rencana Perubahan Mendasar Teknologi Informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Laporan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2.2.
- 2) Laporan wajib disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perubahan tersebut efektif dioperasikan. Khusus untuk rencana perubahan hal-hal tersebut dibawah ini wajib disampaikan 4 (empat) bulan sebelum efektif dioperasikan:
 - a) Penyelenggaraan *Data Center* oleh pihak lain di luar negeri.

b) Penyelenggaraan ...

- b) Penyelenggaraan *Disaster Recovery Center* oleh pihak lain di luar negeri.
- c) Penyelenggaraan pemrosesan transaksi berbasis Teknologi Informasi oleh pihak lain di luar negeri.
- d. Laporan Realisasi Rencana Perubahan Mendasar Teknologi Informasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Laporan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2.3.
 - 2) Laporan wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak perubahan tersebut efektif dioperasikan.
 - 3) Bank yang menyampaikan laporan realisasi rencana perubahan mengenai produk dan atau aktivitas baru dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2.3, tidak perlu menyampaikan Laporan Produk dan Aktivitas Baru sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai manajemen risiko bank umum.
- 2. Seluruh laporan di atas wajib disampaikan oleh Bank walaupun penyelenggaraan Teknologi Informasi yang digunakan oleh Bank telah diserahkan kepada pihak penyedia jasa.

IV. PERMOHONAN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI KEPADA PIHAK LAIN DI LUAR NEGERI.

1. Permohonan Baru

Bank hanya dapat menyelenggarakan Pusat Data (*Data Center*), *Disaster Recovery Center* dan atau Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi di luar negeri setelah memperoleh persetujuan atas rencana tersebut dari Bank Indonesia. Untuk memperoleh persetujuan

dimaksud ...

dimaksud Bank wajib mengajukan permohonan yang didukung dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.2.3 dan Lampiran 2.2.5.

2. Permohonan Ulang

Bank yang telah melaporkan penyelenggaraan Teknologi Informasi yang diserahkan kepada pihak lain di luar negeri sebelum berlakunya ketentuan ini wajib mengajukan permohonan persetujuan ulang kepada Bank Indonesia untuk tetap menggunakan pihak lain di luar negeri dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi yang digunakan oleh Bank.

Pengajuan permohonan ulang tersebut wajib didukung dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.2.3 dan Lampiran 2.2.5.

Khusus permohonan ulang untuk penyelenggaraan *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* dari Kantor Cabang Bank Asing menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2.6.

V. LAIN-LAIN

Penyampaian laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam angka III dan pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka IV dialamatkan kepada:

- a. Direktorat Pengawasan Bank, Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;
- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

VI. PENUTUP ...

VI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH
DIREKTUR DIREKTORAT
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/15/PBI/2007
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN
TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa perkembangan Teknologi Informasi memungkinkan Bank memanfaatkannya untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan Bank kepada nasabah;
 - b. bahwa penggunaan Teknologi Informasi dalam kegiatan operasional Bank juga dapat meningkatkan risiko yang dihadapi Bank;
 - c. bahwa dengan meningkatnya risiko yang dihadapi, Bank perlu menerapkan manajemen risiko secara efektif;
 - d. bahwa Teknologi Informasi merupakan aset yang berharga bagi Bank sehingga pengelolaannya bukan hanya merupakan tanggung jawab unit kerja penyelenggara Teknologi Informasi namun juga seluruh pihak yang menggunakannya;

e. bahwa ...

- e. bahwa dalam rangka implementasi *Basel II* diperlukan infrastruktur Teknologi Informasi yang memadai;
- f. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dalam Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4292);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN
TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2. Teknologi Informasi adalah teknologi terkait sarana komputer, telekomunikasi dan sarana elektronis lainnya yang digunakan dalam pengolahan data keuangan dan atau pelayanan jasa perbankan.
3. Layanan Perbankan Melalui Media Elektronik atau selanjutnya disebut *Electronic Banking* adalah layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, *phone banking*, *electronic fund transfer*, *internet banking*, *mobile phone*.
4. Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) adalah dokumen yang menggambarkan visi dan misi Teknologi Informasi Bank, strategi yang mendukung visi dan misi tersebut dan prinsip-prinsip utama yang menjadi acuan dalam penggunaan Teknologi

Informasi ...

Informasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan mendukung rencana strategis jangka panjang.

5. Pusat Data (*Data Center*) adalah fasilitas utama pemrosesan data Bank yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung kegiatan operasional Bank secara berkesinambungan.
6. *Database* adalah sekumpulan data komprehensif dan disusun secara sistematis, dapat diakses oleh pengguna sesuai wewenang masing-masing, dan dikelola oleh *database administrator*.
7. *Disaster Recovery Center* (DRC) adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (*Data Center*) mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi antara lain karena tidak adanya aliran listrik ke ruang komputer, kebakaran, ledakan atau kerusakan pada komputer, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan Pusat Data Bank untuk menjaga kelangsungan kegiatan usaha (*business continuity*).
8. *Business Continuity Plan* (BCP) adalah kebijakan dan prosedur yang memuat rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinir mengenai langkah-langkah pengurangan risiko, penanganan dampak gangguan/bencana dan proses pemulihan agar kegiatan operasional Bank dan pelayanan kepada nasabah tetap dapat berjalan.
9. Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi adalah kegiatan berupa penambahan, perubahan, penghapusan, dan/atau otorisasi data yang dilakukan pada sistem aplikasi yang digunakan untuk memproses transaksi.
10. Komisaris :
 - a. bagi Bank berbentuk hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi ...

- b. bagi Bank berbentuk hukum perusahaan daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi Bank berbentuk hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- d. bagi kantor cabang bank asing adalah pejabat yang ditunjuk kantor pusat bank asing untuk melakukan fungsi pengawasan.

11. Direksi:

- a. bagi Bank berbentuk hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank berbentuk hukum perusahaan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi Bank berbentuk hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- d. bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing.

BAB II

RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO

TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 2

(1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi.

(2) Penerapan ...

- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
- a. pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan Teknologi Informasi; dan
 - d. sistem pengendalian intern atas penggunaan Teknologi Informasi.
- (3) Penerapan manajemen risiko harus dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan Teknologi Informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya Teknologi Informasi.

Pasal 3

Penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha Bank.

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Pertama

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pasal 4

Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi Dewan Komisaris paling kurang mencakup:

- a. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi;
- b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi Direksi paling kurang mencakup:

- a. menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi;
- b. memastikan bahwa :
 1. Teknologi Informasi yang digunakan Bank dapat mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis Bank dan kelangsungan pelayanan kepada nasabah;
 2. terdapat upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi;
 3. penerapan proses manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dilaksanakan secara memadai dan efektif;
 4. tersedianya kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi yang memadai dan dikomunikasikan serta diterapkan secara efektif baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi;

5. terdapat ...

5. terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi yang paling kurang dapat:
 - a) mendukung proses pemantauan terhadap implementasi strategi;
 - b) mendukung penyelesaian proyek;
 - c) mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan investasi pada infrastruktur;
 - d) meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi dan kualitas layanan penyampaian hasil proses kepada pengguna.

Pasal 7

- (1) Bank wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*).
- (2) Komite Pengarah Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait dengan:
 - a. Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
 - b. kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi;
 - c. kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*);
 - d. kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha Bank;

e. efektivitas ...

- e. efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
 - f. pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya;
 - g. upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara, secara efektif, efisien dan tepat waktu.
- (3) Komite Pengarah Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang beranggotakan:
- a. direktur yang membawahi satuan kerja Teknologi Informasi;
 - b. direktur yang membawahi satuan kerja Manajemen Risiko;
 - c. pejabat tertinggi yang membawahi satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi;
 - d. pejabat tertinggi yang membawahi satuan kerja pengguna utama Teknologi Informasi.

Bagian Kedua

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Penggunaan

Teknologi Informasi di Bank

Pasal 8

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (2) Kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi paling kurang meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

a. Manajemen ...

- a. Manajemen;
 - b. Pengembangan dan pengadaan;
 - c. Operasional Teknologi Informasi;
 - d. Jaringan komunikasi;
 - e. Pengamanan informasi;
 - f. *Business Continuity Plan*;
 - g. *End user computing*;
 - h. *Electronic Banking*; dan
 - i. Penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.
- (3) Bank wajib menetapkan limit risiko yang dapat ditoleransi untuk dapat memastikan aspek-aspek terkait Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berjalan dengan optimal.

Pasal 9

- (1) Bank wajib memiliki Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang mendukung rencana strategis kegiatan usaha Bank.
- (2) Rencana Strategis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Bagian Ketiga

Proses Manajemen Risiko Terkait Teknologi Informasi

Pasal 10

- (1) Bank wajib melakukan proses manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi.

(2) Proses ...

- (2) Proses manajemen risiko dilakukan terhadap aspek-aspek terkait Teknologi Informasi yang paling kurang mencakup pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi, operasional Teknologi Informasi, jaringan komunikasi, pengamanan informasi, *Business Continuity Plan*, *end user computing*, *Electronic Banking*, dan penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.
- (3) Dalam hal Bank menggunakan jasa pihak lain untuk menyelenggarakan Teknologi Informasi, Bank wajib memastikan bahwa pihak penyedia jasa Teknologi Informasi menerapkan juga manajemen risiko yang paling kurang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 11

Dalam melakukan pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi Bank wajib melakukan langkah-langkah pengendalian untuk menghasilkan sistem dan data yang terjaga kerahasiaan dan integritasnya serta mendukung pencapaian tujuan Bank, antara lain mencakup:

- a. menetapkan dan menerapkan prosedur dan metodologi pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi secara konsisten;
- b. menerapkan manajemen proyek dalam pengembangan sistem;
- c. melakukan *testing* yang memadai pada saat pengembangan dan pengadaan suatu sistem, termasuk uji coba bersama satuan kerja pengguna, untuk memastikan keakuratan dan berfungsinya sistem sesuai kebutuhan pengguna serta kesesuaian satu sistem dengan sistem yang lain;
- d. melakukan dokumentasi sistem yang dikembangkan dan pemeliharaannya;
- e. memiliki manajemen perubahan sistem aplikasi.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Bank wajib mengidentifikasi dan memantau serta mengendalikan risiko yang terdapat pada aktivitas operasional Teknologi Informasi, pada jaringan komunikasi serta pada *end user computing* untuk memastikan efektifitas, efisiensi dan keamanan aktivitas tersebut antara lain dengan :
- a. menerapkan pengendalian fisik dan lingkungan terhadap fasilitas Pusat Data (*Data Center*) dan *Disaster Recovery Center*;
 - b. menerapkan pengendalian hak akses secara memadai sesuai kewenangan yang ditetapkan;
 - c. menerapkan pengendalian pada saat input, proses, dan output dari informasi;
 - d. memperhatikan risiko yang mungkin timbul dari ketergantungan Bank terhadap penggunaan jaringan komunikasi;
 - e. memastikan aspek desain dan pengoperasian dalam implementasi jaringan komunikasi sesuai dengan kebutuhan;
 - f. melakukan pemantauan kegiatan operasional Teknologi Informasi termasuk adanya *audit trail*;
 - g. melakukan pemantauan penggunaan aplikasi yang dikembangkan atau diadakan oleh satuan kerja di luar satuan kerja Teknologi Informasi.
- (2) Bagi Bank yang memiliki unit usaha yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, wajib memiliki sistem yang dapat menghasilkan laporan yang terpisah bagi kegiatan usaha Bank berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Bank wajib memastikan *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan* dapat dilaksanakan secara efektif agar kegiatan usaha Bank tetap berjalan saat terjadi gangguan yang signifikan pada sarana Teknologi Informasi yang digunakan Bank.
- (2) Bank wajib melakukan uji coba atas *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan* terhadap seluruh sistem/aplikasi dan infrastruktur yang kritikal sesuai hasil *Business Impact Analysis*, paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun dengan melibatkan *end user (end to end)*.
- (3) Bank wajib melakukan pengkinian *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan*.

Pasal 14

Bank wajib memastikan pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:

- a. pengamanan informasi ditujukan agar informasi yang dikelola terjaga kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*) dan ketersediaannya (*availability*) secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
- b. pengamanan informasi dilakukan terhadap aspek teknologi, sumber daya manusia dan proses dalam penggunaan Teknologi Informasi;
- c. pengamanan informasi mencakup pengelolaan aset bank yang terkait dengan informasi, kebijakan sumber daya manusia, pengamanan fisik, pengamanan akses, pengamanan operasional, dan aspek penggunaan Teknologi Informasi lainnya;

d. adanya ...

- d. adanya manajemen penanganan insiden dalam pengamanan informasi; dan
- e. pengamanan informasi diterapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap risiko (*risk assessment*) pada informasi yang dimiliki Bank.

Bagian Keempat

Sistem Pengendalian dan Audit Intern atas Penyelenggaraan Teknologi Informasi

Pasal 15

- (1) Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap semua aspek penggunaan Teknologi Informasi.
- (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. pengawasan oleh manajemen dan adanya budaya pengendalian;
 - b. identifikasi dan penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi;
 - d. sistem informasi, sistem akuntansi dan sistem komunikasi;
 - e. kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan, yang dilakukan oleh satuan kerja operasional, satuan kerja audit intern maupun pihak lainnya.
- (3) Sistem informasi, sistem akuntansi dan sistem komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus didukung oleh teknologi, sumber daya manusia dan struktur organisasi Bank yang memadai.
- (4) Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling kurang meliputi:
 - a. kegiatan pemantauan secara terus menerus;
 - b. pelaksanaan fungsi audit intern yang efektif dan menyeluruh;

c. perbaikan ...

- c. perbaikan terhadap penyimpangan baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional, satuan kerja audit intern maupun pihak lainnya.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan fungsi audit intern Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat keterbatasan kemampuan satuan kerja audit intern Teknologi Informasi maka pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh auditor ekstern.
- (3) Pelaksanaan audit intern wajib dilakukan secara berkala.

Pasal 17

- (1) Pedoman audit intern yang dimiliki Bank wajib mencakup audit intern terhadap penggunaan Teknologi Informasi baik yang diselenggarakan sendiri atau oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.
- (2) Bank wajib menyampaikan hasil audit intern terhadap Teknologi Informasi sebagai bagian dari laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern.
- (3) Bank wajib melakukan kaji ulang atas fungsi audit intern atas penggunaan Teknologi Informasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menggunakan jasa pihak ekstern yang independen.

(5) Hasil ...

- (5) Hasil kaji ulang disertai saran perbaikan dilaporkan kepada Bank Indonesia sebagai bagian dari laporan kaji ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH PIHAK
PENYEDIA JASA TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 18

- (1) Bank dapat menyelenggarakan Teknologi Informasi sendiri dan/atau menggunakan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.
- (2) Penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang Bank dan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bagi Bank:
- 1) Bank tetap bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko;
 - 2) Bank mampu untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Bank yang diselenggarakan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi;
 - 3) pemilihan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi dilakukan oleh Bank berdasarkan *cost and benefit analysis* dan melibatkan satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi Bank;
 - 4) Bank wajib memantau dan mengevaluasi kehandalan pihak penyedia jasa secara berkala baik yang menyangkut kinerja, reputasi penyedia jasa dan kelangsungan penyediaan layanan;

5) Bank ...

- 5) Bank tetap memberikan akses kepada auditor intern, ekstern dan Bank Indonesia untuk memperoleh data dan informasi setiap kali dibutuhkan;
 - 6) Bank memberikan akses kepada Bank Indonesia terhadap *database* secara tepat waktu baik untuk data terkini maupun untuk data yang telah lalu.
- b. bagi pihak penyedia jasa Teknologi Informasi:
- 1) pihak penyedia jasa harus menerapkan prinsip pengendalian Teknologi Informasi (*IT control*) secara memadai yang dibuktikan dengan hasil audit yang dilakukan pihak independen;
 - 2) pihak penyedia jasa harus menyediakan akses bagi auditor intern Bank, auditor ekstern yang ditunjuk oleh Bank, dan auditor Bank Indonesia untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara tepat waktu setiap kali dibutuhkan;
 - 3) pihak penyedia jasa harus menyatakan tidak berkeberatan bila Bank Indonesia hendak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penyediaan jasa tersebut;
 - 4) sebagai pihak terafiliasi, pihak penyedia jasa harus menjamin keamanan seluruh informasi termasuk rahasia Bank dan data pribadi nasabah;
 - 5) pihak penyedia jasa hanya dapat melakukan subkontrak sebagian kegiatannya berdasarkan persetujuan Bank yang dibuktikan dengan dokumen tertulis;
 - 6) pihak penyedia jasa harus melaporkan kepada Bank setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional Bank;
 - 7) pihak ...

- 7) pihak penyedia jasa harus menyampaikan secara berkala hasil audit Teknologi Informasi yang dilakukan auditor independen terhadap penyelenggaraan Pusat Data (*Data Center*), *Disaster Recovery Center* dan/atau Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi, kepada Bank Indonesia melalui Bank yang bersangkutan;
 - 8) pihak penyedia jasa harus menyediakan *Disaster Recovery Plan* yang teruji dan memadai; dan
 - 9) pihak penyedia jasa harus bersedia untuk kemungkinan penghentian perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian (*early termination*).
- (3) Penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada perjanjian tertulis yang paling kurang memuat kesediaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi untuk menyelenggarakan dan atau melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal pihak penyedia jasa Teknologi Informasi merupakan pihak terkait dengan Bank, Bank tetap wajib melakukan proses seleksi dan transaksi dengan pihak penyedia jasa dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan didasarkan pada hubungan kerja sama secara wajar (*arm's length principle*).
- (5) Dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut:
- a. memburuknya kinerja penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi yang dapat berdampak signifikan pada kegiatan usaha Bank;
 - b. pihak penyedia jasa Teknologi Informasi menjadi tidak solvabel, atau dalam proses menuju likuidasi, atau dipailitkan oleh pengadilan;

c. terdapat ...

- c. terdapat pelanggaran oleh pihak penyedia jasa terhadap ketentuan rahasia Bank dan kewajiban merahasiakan data pribadi nasabah; dan/atau
 - d. terdapat kondisi yang menyebabkan Bank tidak dapat menyediakan data yang diperlukan dalam rangka pengawasan oleh Bank Indonesia; maka Bank wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kondisi tersebut diatas diketahui oleh Bank;
 - b. memutuskan tindak lanjut yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan termasuk penghentian penggunaan jasa apabila diperlukan;
 - c. melaporkan kepada Bank Indonesia segera setelah Bank menghentikan penggunaan jasa sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (6) Dalam hal penggunaan penyedia jasa atau rencana penggunaan penyedia jasa menyebabkan atau diindikasikan akan menyebabkan kesulitan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia maka Bank Indonesia dapat:
- a. memerintahkan Bank untuk menghentikan penggunaan jasa Teknologi Informasi sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian; atau.
 - b. menolak rencana penggunaan pihak penyedia jasa yang diajukan oleh Bank.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pusat Data (*Data Center*) dan/atau *Disaster Recovery Center*

Pasal 19

- (1) Pusat Data (*Data Center*) dan/atau *Disaster Recovery Center* diselenggarakan di dalam negeri.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Bank akan menyelenggarakan Pusat Data (*Data Center*) dan/atau *Disaster Recovery Center* di luar negeri, Bank harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila Bank memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (4) serta persyaratan tambahan sebagai berikut:
- a. Bank menyampaikan hasil analisis *country risk*;
 - b. Bank memastikan penyelenggaraan Pusat Data (*Data Center*) dan/atau *Disaster Recovery Center* di luar negeri tidak mengurangi efektifitas pengawasan Bank Indonesia;
 - c. Bank memastikan bahwa informasi mengenai rahasia Bank hanya dapat diungkapkan sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - d. Bank memastikan bahwa perjanjian tertulis dengan penyedia jasa juga memuat klausula *choice of law*;
 - e. Apabila Bank merupakan kantor cabang bank asing atau Bank yang dimiliki lembaga keuangan asing maka Bank wajib menyampaikan:
 - 1) Surat Pernyataan dari otoritas pengawas lembaga keuangan di luar negeri bahwa pihak penyedia jasa merupakan cakupan pengawasannya;
 - 2) Surat Pernyataan tidak keberatan dari otoritas pengawas lembaga keuangan di luar negeri bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa;
 - 3) Surat Pernyataan bahwa Bank akan menyampaikan secara berkala hasil penilaian yang dilakukan kantor bank di luar negeri atas penerapan manajemen risiko pada pihak penyedia jasa.

f. Permohonan ...

- f. Permohonan persetujuan yang diajukan Bank harus memuat pula hal-hal sebagai berikut:
- 1) Manfaat bagi Bank lebih besar daripada beban yang ditanggung oleh Bank;
 - 2) Rencana Bank untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Bank baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Teknologi Informasi maupun transaksi bisnis atau produk yang ditawarkan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi oleh Pihak Penyedia Jasa

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pemrosesan transaksi oleh pihak penyedia jasa hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi prinsip kehati-hatian.
- (2) Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi oleh pihak penyedia jasa di dalam negeri hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan pada pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (4);
- (3) Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi oleh pihak penyedia jasa di luar negeri hanya dapat dilakukan sepanjang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila bank memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan pada Pasal 19 ayat (3) serta persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - a. Memperhatikan aspek perlindungan kepada nasabah;

b. Aktivitas ...

- b. Aktivitas yang pemrosesannya diserahkan kepada pihak penyedia jasa di luar negeri tidak merupakan aktivitas *inherent banking functions*;
- c. Dokumen pendukung administrasi keuangan atas transaksi yang dilakukan di kantor Bank di Indonesia wajib dipelihara di kantor Bank di Indonesia.
- d. Rencana Bisnis Bank menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan peran Bank bagi perkembangan perekonomian Indonesia.

Pasal 21

- (1) Rencana penggunaan pihak penyedia jasa dalam penyelenggaraan Pusat Data (*Data Center*), *Disaster Recovery Center* dan/atau Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi wajib telah dimuat dalam Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Rencana Bisnis Bank.
- (2) Bank wajib melaporkan rencana penggunaan pihak penyedia jasa dalam penyelenggaraan Pusat Data (*Data Center*), *Disaster Recovery Center* dan/atau Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi di dalam negeri kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penyelenggaraan kegiatan oleh pihak penyedia jasa tersebut efektif dioperasikan.
- (3) Dalam hal terdapat rencana menyerahkan penyelenggaraan Pusat Data (*Data Center*), *Disaster Recovery Center* dan/atau Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi kepada pihak penyedia jasa di luar negeri, Bank wajib menyampaikan permohonan persetujuan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum penyelenggaraan kegiatan oleh pihak penyedia jasa tersebut efektif dioperasikan.

(4) Realisasi ...

- (4) Realisasi rencana penyelenggaraan Pusat Data (*Data Center*), *Disaster Recovery Center* dan/atau Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi oleh pihak penyedia jasa wajib dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak kegiatan tersebut efektif dioperasikan.
- (5) Penyampaian rencana dan realisasi rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan menggunakan format Laporan Perubahan Mendasar.
- (6) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

BAB V

ELECTRONIC BANKING

Pasal 22

- (1) Bank yang menyelenggarakan kegiatan *Electronic Banking* wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (2) Bank harus memberikan edukasi kepada nasabah mengenai produk *Electronic Banking* dan pengamanannya secara berkesinambungan.

Pasal 23

- (1) Setiap rencana penerbitan produk *Electronic Banking* baru harus dimuat dalam Rencana Bisnis Bank.
- (2) Setiap rencana penerbitan produk *Electronic Banking* yang bersifat transaksional wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan sebelum produk tersebut diterbitkan.

(3) Pelaporan ...

- (3) Pelaporan rencana produk *Electronic Banking* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi produk *Electronic Banking* sepanjang terdapat ketentuan Bank Indonesia yang secara khusus mengatur persyaratan persetujuan produk tersebut.
- (4) Laporan rencana penerbitan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. bukti-bukti kesiapan untuk menyelenggarakan *Electronic Banking* yang paling kurang memuat:
 - 1) struktur organisasi yang mendukung termasuk pengawasan dari pihak manajemen;
 - 2) kebijakan, sistem, prosedur dan kewenangan dalam penerbitan produk *Electronic Banking*;
 - 3) kesiapan infrastruktur Teknologi Informasi untuk mendukung produk *Electronic Banking*;
 - 4) hasil analisis dan identifikasi risiko terhadap risiko yang melekat pada produk *Electronic Banking*;
 - 5) kesiapan penerapan manajemen risiko khususnya pengendalian pengamanan (*security control*) untuk memastikan terpenuhinya prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), keaslian (*authentication*), *non repudiation* dan ketersediaan (*availability*);
 - 6) hasil analisis aspek hukum;
 - 7) uraian sistem informasi akuntansi;
 - 8) program perlindungan dan edukasi nasabah.
 - b. hasil analisis bisnis mengenai proyeksi produk baru 1 (satu) tahun kedepan.

(5) Penyampaian ...

- (5) Penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilengkapi dengan hasil pemeriksaan dari pihak independen untuk memberikan pendapat atas karakteristik produk dan kecukupan pengamanan sistem Teknologi Informasi terkait produk serta kepatuhan terhadap ketentuan dan atau praktek-praktek yang berlaku di dunia internasional.
- (6) Dalam hal Teknologi Informasi yang digunakan dalam menyelenggarakan kegiatan *Electronic Banking* dilakukan oleh pihak penyedia jasa maka berlaku pula ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab IV mengenai penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.
- (7) Realisasi rencana penerbitan produk *Electronic Banking* wajib dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak rencana dilaksanakan dengan menggunakan format Laporan Perubahan Mendasar Teknologi Informasi.

BAB VI

PELAPORAN

Bagian Pertama

Laporan Penggunaan Teknologi Informasi

Pasal 24

- (1) Bank wajib menyampaikan kembali Laporan Penggunaan Teknologi Informasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Bank wajib menyampaikan Laporan Tahunan Penggunaan Teknologi Informasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak akhir tahun pelaporan;
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kalinya disampaikan pada Januari 2009 untuk laporan tahun 2008.

Bagian ...

Bagian Kedua
Laporan Perubahan Mendasar

Pasal 25

- (1) Bank wajib menyampaikan Laporan Rencana Perubahan Mendasar Teknologi Informasi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perubahan tersebut efektif dioperasikan;
- (2) Bank wajib menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Perubahan Mendasar Teknologi Informasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak perubahan tersebut efektif dioperasikan.
- (3) Produk dan/atau aktivitas baru yang telah dilaporkan dalam Laporan Realisasi Rencana Perubahan Mendasar Teknologi Informasi tidak perlu dilaporkan dalam Laporan Produk dan Aktivitas Baru sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai manajemen risiko bank umum.

Bagian Ketiga
Laporan Lain

Pasal 26

- (1) Bank wajib menyampaikan hasil audit Teknologi Informasi yang dilakukan pihak independen terhadap Pusat Data (*Data Center*) dan/atau *Disaster Recovery Center* dan/atau Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pihak penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf b angka 7 paling lambat 2 (dua) bulan setelah audit selesai dilakukan.
- (2) Bank wajib menyampaikan hasil penilaian penerapan manajemen risiko pada pihak penyedia jasa di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf e angka 3 paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir periode penilaian risiko.

(3) Bank ...

- (3) Bank wajib melaporkan kejadian kritis, penyalahgunaan, dan/atau kejahatan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi yang dapat dan/atau telah mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional bank.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan sesegera mungkin melalui e-mail atau telepon yang diikuti dengan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kejadian kritis dan/atau penyalahgunaan/kejahatan diketahui.
- (5) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari Laporan kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum.

Bagian Keempat

Format dan Alamat Penyampaian Laporan

Pasal 27

Format dan petunjuk penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 28

Permohonan persetujuan penggunaan penyedia jasa di luar negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dan Pasal 20 serta penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 dialamatkan kepada:

- a. Direktorat Pengawasan Bank, Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;
- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

BAB VII ...

BAB VII
LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan atau meminta Bank untuk melakukan pemeriksaan terhadap aspek-aspek terkait penggunaan Teknologi Informasi.
- (2) Bank wajib menyediakan akses kepada Bank Indonesia untuk dapat melakukan pemeriksaan pada seluruh aspek terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan oleh pihak lain.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 30

Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan;
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- d. pencantuman anggota pengurus dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*).

Pasal 31 ...

Pasal 31

Bank yang tidak memenuhi ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (7), Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi sesuai Pasal 52 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:

- a. kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan per laporan;
- b. kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per laporan, bagi Bank yang belum menyampaikan laporan setelah 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.

Pasal 32

Bank yang menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah Bank diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap teguran dan Bank tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Bank yang telah memiliki kebijakan, prosedur dalam penggunaan Teknologi Informasi dan pedoman manajemen risiko penggunaan Teknologi Informasi wajib menyesuaikan dan menyempurnakannya paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 34 ...

Pasal 34

Bank yang telah menggunakan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, wajib menyesuaikan perjanjian yang telah dibuat dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia ini paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 35

- (1) Bank yang sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini telah menyerahkan penyelenggaraan Pusat Data (*Data Center*), *Disaster Recovery Center* dan/atau Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi kepada pihak penyedia jasa di luar negeri wajib menyampaikan permohonan persetujuan ulang untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Dalam hal Bank tidak memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bank wajib menyampaikan laporan *action plan* kepada Bank Indonesia.
- (3) *Action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau setelah permohonan Bank tidak disetujui.

Pasal 36

Bank yang belum memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib membentuk atau menyesuaikan komite tersebut dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB X ...

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/9/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank;
 - b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/175/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/14/UPPB tanggal 22 Desember 1998 tentang Penyempurnaan Teknologi Sistem Informasi Bank dalam Menghadapi tahun 2000;
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/11/PBI/1999 tanggal 22 Desember 1999 tentang Fasilitas Khusus Dalam Rangka Mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum yang disebabkan Masalah Komputer tahun 2000;
 - d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank melalui Internet (*Internet Banking*);
- dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum.

Pasal 39 ...

Pasal 39

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 November 2007

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA

MIRANDA S. GOELTOM
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 144
DPNP

2009

Laporan Tahunan



Mempertahankan Soliditas
di Tengah Tantangan



BCA

Pendahuluan

- 2 Tonggak Sejarah
- 4 Ikhtisar Data Keuangan
- 7 Ikhtisar Saham
- 8 Laporan
Presiden Komisaris
- 14 Laporan Presiden Direktur

Tinjauan Bisnis

- 22 Perbankan Cabang
- 28 Perbankan Korporasi
- 32 Perbankan Individual
- 38 Tresuri dan Perbankan
Internasional

Pendukung Bisnis

- 44 Manajemen Risiko
- 50 Pengembangan Sumber
Daya Manusia
- 54 Operasi dan Jaringan
- 58 Teknologi Informasi

Tinjauan Tata Kelola Perusahaan

- 64 Laporan Pelaksanaan GCG
- 98 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tinjauan Keuangan

- 104 Pembahasan Hasil Kinerja Keuangan
- 119 Laporan Keuangan Konsolidasi

Data Perusahaan



Visi

Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia

Misi

- Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan
- Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah
- Meningkatkan nilai *francais* dan nilai *stakeholder* BCA



Mempertahankan Soliditas di Tengah Tantangan

Dinamisme dan daya tahan masyarakat Indonesia telah membuat bangsa ini mampu mengatasi berbagai tantangan yang diakibatkan oleh krisis global serta mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun 2009. Sebagai bank penyedia layanan transaksi dan pembayaran terkemuka di Indonesia, BCA bangga dapat terus memainkan peranan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Upaya BCA untuk menjaga likuiditas yang memadai, permodalan yang kuat, serta aktiva yang berkualitas, telah menempatkan BCA sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia dan menjadi dasar komitmen BCA untuk terus menghadirkan layanan yang berkualitas bagi para nasabah.



1955

NV Perseroan Dagang Dan Industrie Semarang Knitting Factory berdiri sebagai cikal bakal Bank Central Asia (BCA).

1957

BCA mulai beroperasi pada 21 Februari 1957 dan berkantor pusat di Jakarta.

1970an

BCA memperkuat jaringan layanan cabang. Tahun 1977 BCA berkembang menjadi Bank Devisa.

1980an

Sejalan dengan deregulasi sektor perbankan di Indonesia, BCA mengembangkan jaringan kantor cabang secara luas. BCA mengembangkan berbagai produk dan layanan maupun penerapan teknologi informasi, seperti menerapkan *on line system* untuk jaringan kantor cabang, dan meluncurkan Tabungan Hari Depan (Tahapan) BCA.

1990an

BCA mengembangkan alternatif jaringan layanan melalui ATM BCA (Anjungan Tunai Mandiri atau *Automated Teller Machine*) yang berkembang secara pesat.

Pada tahun 1991, BCA mulai menempatkan 50 unit ATM di berbagai tempat di Jakarta. Pengembangan jaringan dan fitur ATM dilakukan secara intensif.

BCA menjalin kerja sama dengan institusi terkemuka, antara lain PT Telkom untuk pembayaran tagihan telepon melalui ATM BCA. BCA juga bekerja sama dengan Citibank agar nasabah BCA pemegang kartu kredit Citibank dapat melakukan pembayaran tagihan melalui ATM BCA.

1997-1998

Indonesia mengalami krisis moneter. BCA mengalami *rush*.

Pada tahun 1998 BCA menjadi *Bank Taken Over* (BTO) dan disertakan dalam program rekapitalisasi dan restrukturisasi yang dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

1999

Proses rekapitalisasi BCA selesai dan sebagian besar kredit yang disalurkan BCA dipertukarkan dengan Obligasi Pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia melalui BPPN, menguasai 92,8% saham BCA.



Langkah strategis pada periode 2000an

2000

BPPN melakukan divestasi 22,5% dari seluruh saham BCA melalui Penawaran Saham Publik Perdana (IPO), sehingga kepemilikan BPPN berkurang menjadi 70,3%.

2001

Penawaran Publik Kedua (*Secondary Public Offering*) 10% dari total saham BCA. Kepemilikan BPPN atas BCA berkurang menjadi 60,3%.

2002

FarIndo Investment (Mauritius) Limited mengambil-alih 51% total saham BCA melalui proses tender *strategic private placement*.

2004

BPPN melakukan divestasi atas 1,4% saham BCA kepada investor domestik melalui penawaran terbatas.

2005

Pemerintah Republik Indonesia melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) melakukan divestasi seluruh sisa 5,02% saham BCA.

Pengembangan bisnis pada periode 2000an

BCA memperkuat dan mengembangkan produk dan layanan, terutama perbankan elektronik dengan memperkenalkan Debit BCA, Tunai BCA, Internet Banking KlikBCA, Mobile Banking m-BCA, EDCBIZZ, dan lain-lain.

BCA juga mengembangkan beberapa layanan khusus, seperti: BCA Prioritas, BCABIZZ, dan BCA Consumer Plus.

BCA mendirikan fasilitas Disaster Recovery Center (DRC) di Singapura.

BCA meningkatkan kompetensi di bidang penyaluran kredit.

2007

BCA menjadi pelopor dalam menawarkan produk kredit kepemilikan rumah dengan suku bunga tetap, yang berhasil meraih respon positif dari pasar. BCA meluncurkan kartu prabayar FlazzCard serta mulai menawarkan layanan Weekend Banking untuk terus membangun keunggulan di bidang perbankan transaksional.

2008-2009

BCA secara proaktif mengelola penyaluran kredit dan posisi likuiditas di tengah gejolak krisis global, sekaligus tetap memperkuat kompetensi utama sebagai bank transaksional.

BCA telah menyelesaikan pembangunan *mirroring IT system* guna memperkuat kelangsungan usaha dan meminimalisasi risiko operasional.

Catatan: Terdapat efek dilusi atas kepemilikan saham lama sehubungan dengan penerbitan saham baru dalam rangka program kompensasi manajemen berbasis saham, dimana periode eksekusi opsi dapat dilakukan dari November 2001 sampai dengan November 2006.

Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar Data Keuangan 5 tahun terakhir (Audit, Konsolidasi, pada atau untuk tahun yang berakhir 31 Desember)

	2009	2008	2007	2006	2005
Neraca (dalam miliar Rupiah)					
Total Aktiva	282.392	245.570	218.005	176.799	150.181
Total Aktiva Produktif	254.686	216.119	181.870	146.512	125.906
Kredit – gros	123.901	112.784	82.389	61.422	54.131
Surat-surat Berharga	113.460	84.045	72.801	48.565	22.672
Korporasi	6.103	6.149	6.051	3.872	4.422
Lainnya	107.357	77.896	66.750	44.693	18.250
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah ¹	-	6.323	19.928	28.935	34.001
Dana Pihak Ketiga ²	245.140	209.529	189.172	152.736	129.555
Giro	51.641	44.788	39.592	29.748	25.049
Tabungan	128.137	111.774	99.074	76.054	67.477
Deposito	65.362	52.967	50.506	46.934	37.029
Pinjaman yang Diterima ³	3.219	4.496	3.149	2.294	831
Ekuitas	27.857	23.279	20.442	18.067	15.847
Laba Rugi (dalam miliar Rupiah)					
Pendapatan Bunga Bersih	14.900	12.356	9.579	9.460	7.653
Pendapatan Operasional Lainnya	4.332	3.863	2.846	2.248	1.979
Beban Operasional Lainnya	(8.455)	(6.810)	(5.884)	(5.115)	(4.269)
Penyisihan Penghapusan Aktiva dan Lainnya	(2.258)	(1.741)	(210)	(584)	(358)
Laba Operasional	8.519	7.668	6.331	6.009	5.004
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	8.945	7.720	6.402	6.067	5.124
Laba Bersih	6.807	5.776	4.489	4.243	3.598
Laba Bersih per Saham (EPS) ⁴	279	236	183	173	146
Rasio Keuangan ⁵					
ROA ⁶	3,4%	3,4%	3,3%	3,8%	3,4%
ROE ⁷	31,8%	30,2%	26,7%	29,1%	28,2%
Marjin Bunga Bersih (NIM) ⁸	6,4%	6,6%	6,1%	7,2%	6,0%
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) ⁹	15,3%	15,8%	19,2%	22,1%	21,5%
Rasio Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR) ¹⁰	50,3%	53,8%	43,6%	40,3%	41,8%
Rasio NPL terhadap Total Kredit ¹¹	0,7%	0,6%	0,8%	1,3%	1,7%
Indikator Utama Lainnya					
Jumlah Rekening (dalam ribuan)	8.574	7.954	7.341	6.825	6.611
Jumlah Cabang (domestik dan luar negeri)	875	844	809	791	774
Jumlah ATM	6.611	5.997	5.654	5.042	4.173
Jumlah Kartu ATM (dalam ribuan)	7.990	7.392	6.718	6.142	5.859
Jumlah Kartu Kredit (dalam ribuan)	2.004	1.847	1.436	1.273	1.025

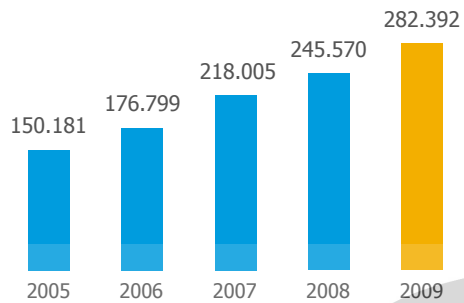
Semua angka dalam laporan tahunan ini menggunakan aturan dalam Bahasa Indonesia, kecuali dinyatakan lain.

- Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah adalah obligasi hasil rekapitalisasi BCA yang dimiliki hingga jatuh tempo.
- Dana pihak ketiga tidak termasuk simpanan dari bank lain.
- Pinjaman yang diterima termasuk simpanan dari bank lain.
- Laba bersih per saham dasar tidak termasuk pengaruh dilusi saham atas pelaksanaan opsi kepemilikan saham manajemen dari MSOP, namun setelah penyesuaian retroaktif pemecahan nilai saham satu menjadi dua lembar pada tanggal 31 Januari 2008.
- Induk perusahaan saja, rasio keuangan disajikan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/50/PBI/2005 mengenai perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001, tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 mengenai perubahan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, tentang Laporan

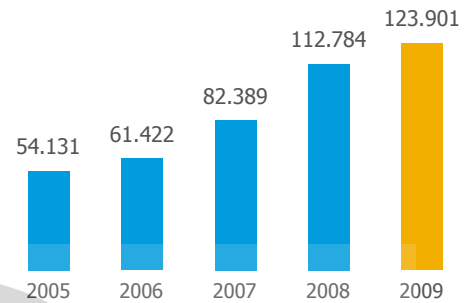
Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

- Dihitung dari laba (rugi) sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total aktiva.
- Dihitung dari laba (rugi) setelah pajak dibagi dengan rata-rata total ekuitas.
- Dihitung dari pendapatan (beban) bunga bersih dibagi dengan rata-rata aktiva produktif, yang terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga yang dimiliki dan tagihan lainnya, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, obligasi pemerintah, dan kredit yang diberikan.
- Dihitung dari total modal (jumlah bersih dari investasi jangka panjang) dibagi dengan aktiva tertimbang menurut risiko termasuk risiko pasar sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/12/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- Dihitung dari total kredit (diluar antar bank) dibagi dengan dana pihak ketiga (diluar antar bank).
- Dihitung dari total kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet) dibagi total kredit (di luar kredit antar bank).

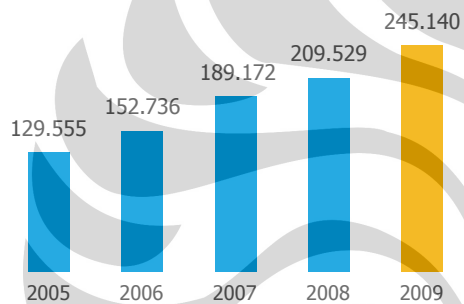
Total Aktiva
(dalam miliar Rupiah)



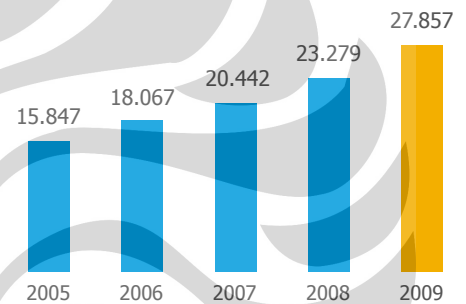
Kredit - gros
(dalam miliar Rupiah)



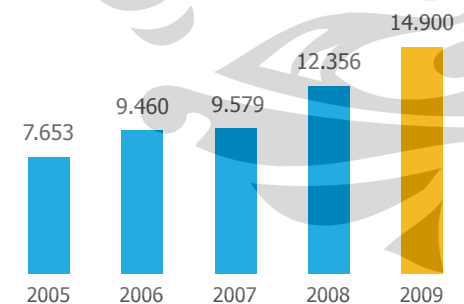
Dana Pihak Ketiga
(dalam miliar Rupiah)



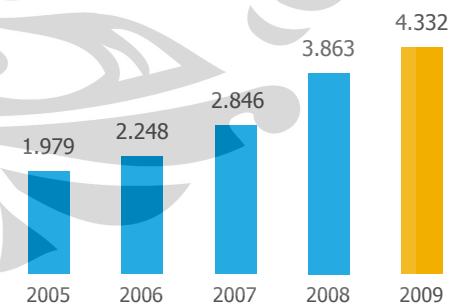
Ekuitas
(dalam miliar Rupiah)



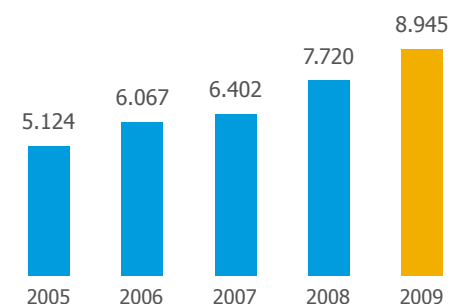
Pendapatan Bunga Bersih
(dalam miliar Rupiah)



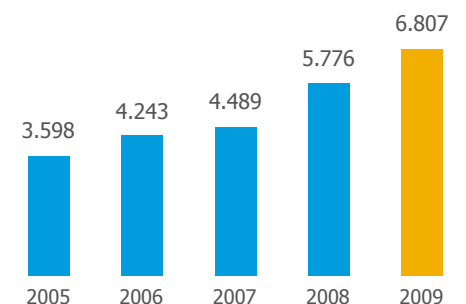
Pendapatan Operasional Lainnya
(dalam miliar Rupiah)

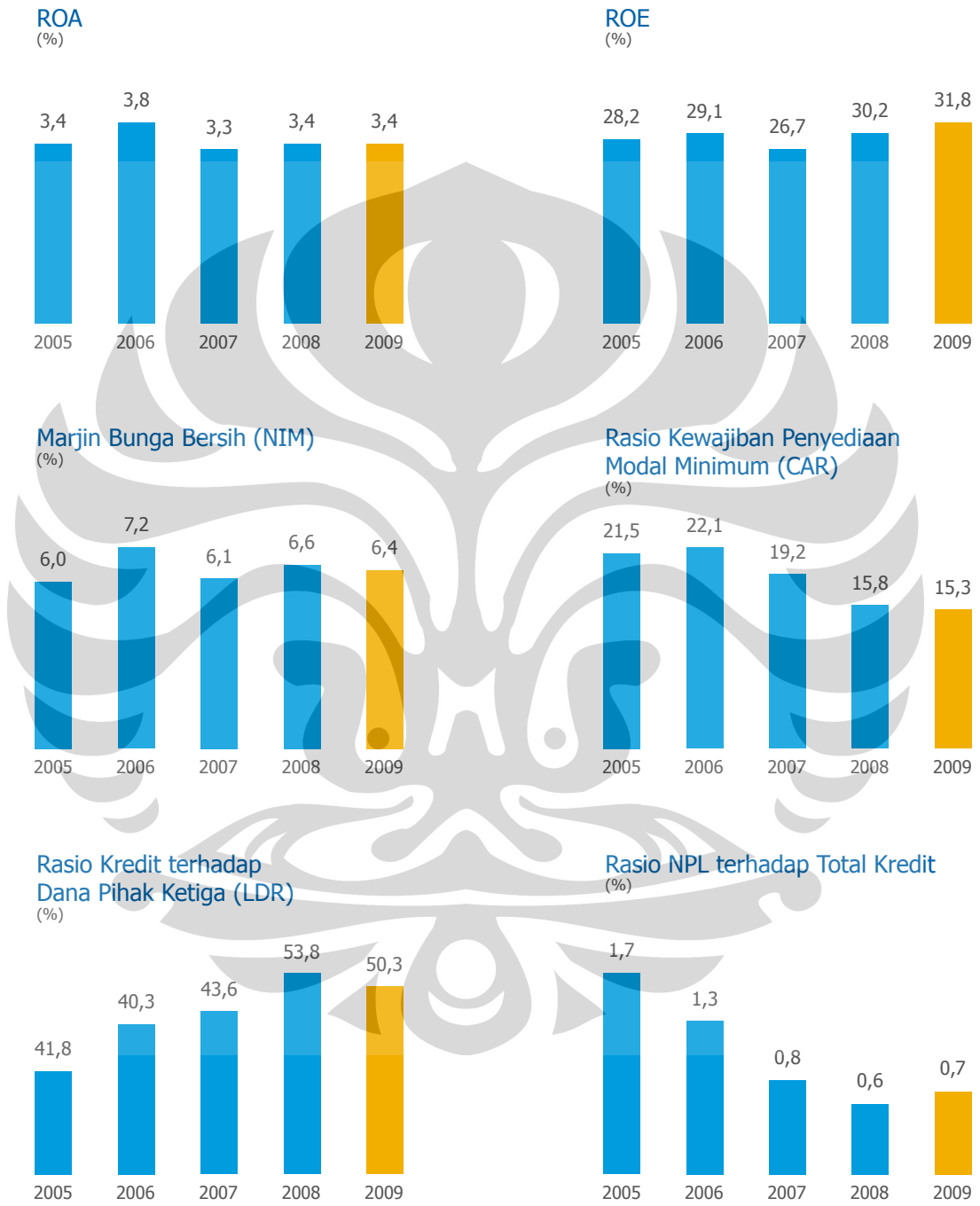


Laba Sebelum Pajak Penghasilan
(dalam miliar Rupiah)



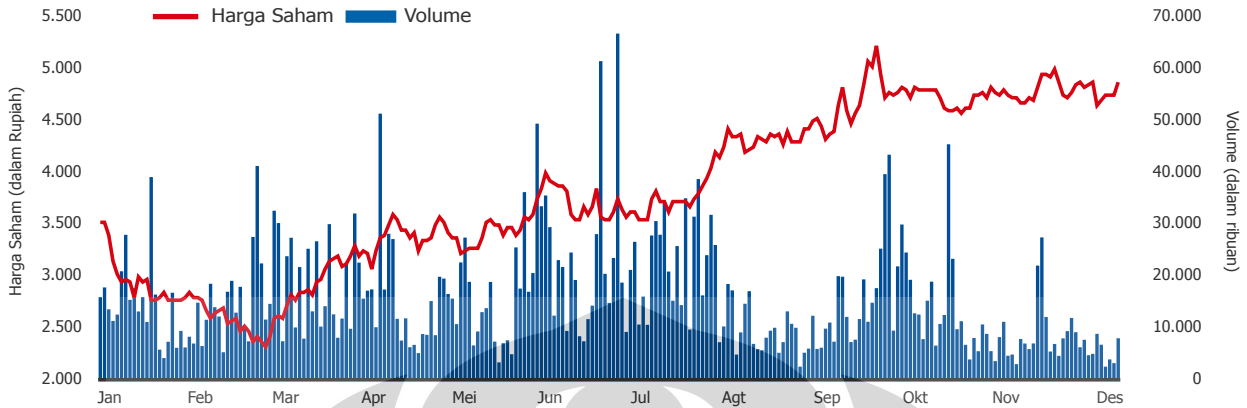
Laba Bersih
(dalam miliar Rupiah)





Ikhtisar Saham

Kinerja Saham BCA Tahun 2009



Harga Saham BCA (dalam Rupiah)	2009					2008
	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Setahun Penuh	Setahun Penuh
Tertinggi	3.500	3.975	4.800	5.200	5.200	3.675
Terendah	2.300	3.050	3.525	4.550	2.300	2.025
Penutupan						
Akhir Periode	3.100	3.525	4.625	4.850	4.850	3.250
Rata-rata	2.793	3.468	4.090	4.761	3.782	3.015

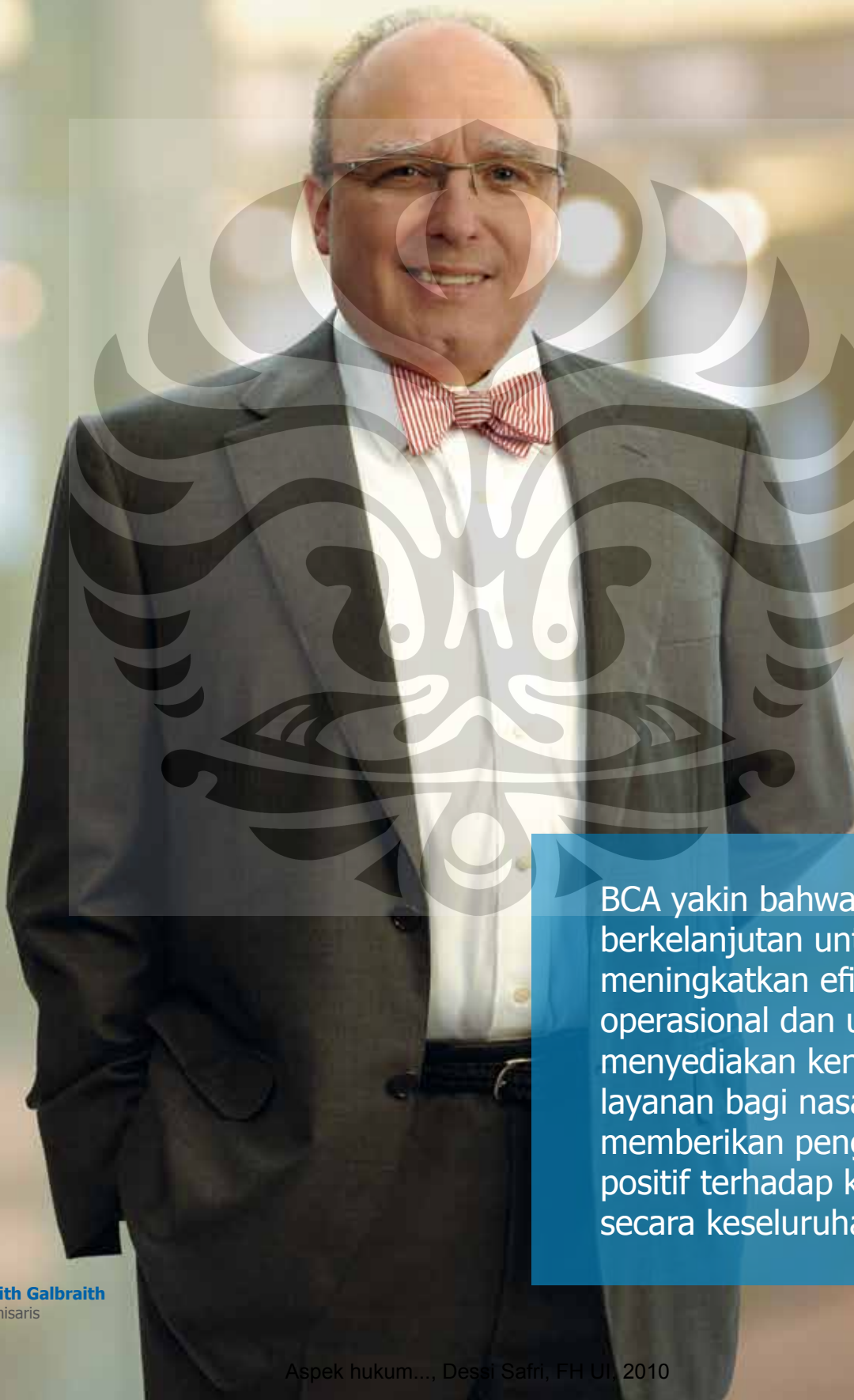
Data Saham BCA (per 31 Desember)	2009	2008
Jumlah Lembar Saham	24.655.010.000	24.655.010.000
Saham Dibeli Kembali oleh BCA (<i>Treasury Stock</i>)	289.767.000	289.767.000
Kapitalisasi Pasar (dalam miliar Rupiah)	119.577	80.129
Laba per Saham (dalam Rupiah)	279	236
Nilai Buku per Saham (dalam Rupiah)	1.143	944
P/E	17,4	13,8
P/BV	4,2	3,4

Sumber: Bloomberg

Riwayat Dividen*

	Nilai per Saham	Diumumkan	Cum-Dividend	Pencatatan	Pembayaran
2009 Interim	Rp 40	26 Okt 2009	Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	12 Nov 2009 17 Nov 2009	17 Nov 2009 2 Des 2009
2008 Final	Rp 65	20 Mei 2009	Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	9 Jun 2009 12 Jun 2009	12 Jun 2009 26 Jun 2009
2008 Interim	Rp 35	22 Des 2009	Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	15 Jan 2009 20 Jan 2009	20 Jun 2009 30 Jan 2009
2007 Final	Rp 63,5	26 Mei 2008	Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	12 Jun 2008 17 Jun 2008	17 Jun 2008 1 Jul 2008
2007 Interim	Rp 55	12 Nov 2007	Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	29 Nov 2007 4 Des 2007	4 Des 2007 18 Des 2007
2006 Final	Rp 115	21 Mei 2007	Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	8 Jun 2007 13 Jun 2007	13 Jun 2007 27 Jun 2007
2006 Interim	Rp 55	21 Sep 2006	Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	10 Okt 2006 13 Okt 2006	13 Okt 2006 3 Nov 2006
2005 Final	Rp 90	17 Mei 2006	Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	6 Jun 2006 9 Jun 2006	9 Jun 2006 23 Jun 2006
2005 Interim	Rp 50	15 Sep 2005	Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	6 Okt 2005 11 Okt 2005	11 Okt 2005 25 Okt 2005
2004 Final	Rp 80	28 Jun 2005	Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	19 Jul 2005 22 Jul 2005	22 Jul 2005 5 Agt 2005
2004 Interim	Rp 50	27 Okt 2004	Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	22 Nov 2004 25 Nov 2004	25 Nov 2004 8 Des 2004
2003 Final	Rp 112,5	8 Jun 2004	Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	30 Jun 2004 6 Jun 2004	6 Jul 2004 20 Jul 2004
2002 Final	Rp 225	7 Nov 2003	Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	3 Des 2003 8 Des 2003	8 Des 2003 19 Des 2003
2001 Final	Rp 140	10 Okt 2002	Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	29 Okt 2002 1 Nov 2002	1 Nov 2002 15 Nov 2002
2001 Interim	Rp 85	29 Okt 2001	Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	14 Nov 2001 20 Nov 2001	20 Nov 2001 4 Des 2001

* BCA melakukan pemecahan saham (*stock split*) dengan rasio 1:2 efektif pada tanggal 15 Mei 2001, 8 Juni 2004 dan 31 Januari 2008.



BCA yakin bahwa upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan untuk menyediakan kenyamanan layanan bagi nasabah akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja BCA secara keseluruhan

Para Pemegang Saham yang kami hormati,

Sepanjang tahun 2009, manajemen BCA menerapkan strategi usaha berpedoman pada prinsip kehati-hatian dengan menjaga kecukupan likuiditas, soliditas permodalan dan kualitas aktiva. Melihat gejolak ekonomi global yang berawal pada pertengahan tahun 2008, tahun 2009 yang lalu merupakan periode adaptasi bagi kami maupun bagi para nasabah. Di tengah tantangan-tantangan tersebut, BCA berhasil meraih kinerja keuangan yang memuaskan, baik di sisi pendanaan maupun penyaluran kredit, serta mampu mempertahankan profitabilitas dan menjaga *franchise value* BCA.

Tema Laporan Tahunan ini adalah: **Mempertahankan Soliditas di Tengah Tantangan**. Sebuah tema yang menggambarkan kondisi keseluruhan operasional BCA yang tercermin dari kestabilan neraca Bank. Tingkat pengembalian atas aktiva (ROA) pada tahun 2009 tercatat sebesar 3,4% sementara pengembalian atas ekuitas (ROE) dapat dipertahankan pada level 31,8%. Rasio kredit bermasalah (NPL) tercatat sebesar 0,7%, jauh di bawah rata-rata rasio NPL industri perbankan nasional. Kondisi neraca BCA yang kokoh memungkinkan bagi Bank untuk meningkatkan cadangan pada tahun 2009 sehingga rasio cadangan terhadap NPL mencapai 480,2% dan total cadangan terhadap total kredit adalah sebesar 3,5%. Meskipun pertumbuhan kredit BCA sebesar 9,9% tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya, kami

yakin bahwa pilihan untuk lebih menjaga kualitas aktiva dengan tidak mengejar keuntungan marjinal di luar batas toleransi risiko Bank akan memberikan hasil optimal seiring dengan pulihnya pertumbuhan perekonomian dunia. Meskipun kondisi ekonomi saat ini masih terus memberikan tekanan terhadap margin keuntungan Bank, baik dalam jangka pendek maupun menengah, kami yakin bahwa upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan untuk menyediakan kenyamanan layanan bagi nasabah akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja Bank secara keseluruhan. Ke depan, BCA akan terus fokus dalam membangun keunggulan utama di bidang sistem pembayaran dan transaksi perbankan.

Tangguh Menghadapi Masa Sulit

Soliditas kinerja BCA selama tahun 2009 juga dimungkinkan oleh daya tahan perekonomian Indonesia yang cukup tinggi selama tahun tersebut. Permintaan ekspor bahan baku asal Indonesia, terutama produk pertambangan dan hasil hutan serta minyak kelapa sawit, tetap tinggi selama 18 bulan terakhir. Hal tersebut berdampak positif terhadap kemampuan perekonomian Indonesia dalam merespon dinamika perkembangan ekonomi global secara lebih baik. Pada saat ekonomi banyak negara di seluruh dunia mengalami stagnasi atau bahkan mengalami kontraksi, ekonomi Indonesia mampu membukukan pertumbuhan domestik bruto (PDB) sebesar 4,5%.

Pencapaian ini merupakan prestasi yang menggembirakan mengingat bahwa di tengah kondisi ekonomi global yang kurang kondusif, Indonesia juga sukses dalam menyelenggarakan pemilihan Presiden yang diakui komunitas internasional berlangsung secara bebas dan adil. Proses pemilihan umum yang berlangsung damai dan demokratis memunculkan keyakinan baru terhadap status Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang menarik. Lebih lanjut, Pemerintah telah mengambil tindakan yang tepat dalam merespon tantangan maupun peluang yang muncul dalam kondisi saat ini. Pemerintah secara proaktif menerapkan kebijakan yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan dan menciptakan pemerataan pendapatan ke segmen masyarakat yang lebih luas.

Keterlibatan Pemerintah secara efektif serta pemberian stimulus ekonomi telah mampu mendorong pengembangan ekonomi selama tahun 2009. Menatap ke depan, kami berkeyakinan bahwa Pemerintah akan terus memberikan dukungan fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan, termasuk dengan memacu pembangunan di beberapa sektor infrastruktur yang selama ini dirasa menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. BCA sendiri memiliki minat yang cukup tinggi untuk berpartisipasi dalam mendukung pendanaan pembangunan di bidang infrastruktur.

Indonesia memiliki posisi yang baik untuk menciptakan transformasi ekonomi domestik dan basis konsumen dalam waktu lima tahun mendatang. Dengan melihat proyeksi pertumbuhan PDB per kapita, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki rekening bank diperkirakan akan meningkat secara signifikan. Merupakan salah satu tujuan strategis utama bagi BCA untuk terus memberikan fasilitas perbankan dalam mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat kelas menengah di Indonesia.

Mempertahankan Nilai Perusahaan

Sepanjang tahun 2009, BCA berhasil memperkuat posisi likuiditas dengan mempertahankan sumber dana pihak ketiga yang menguntungkan, serta dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit ke seluruh segmen – korporasi, komersial, UKM dan konsumen. Kebijakan proaktif BCA untuk menjaga kinerja keuangannya cukup efektif dalam melindungi kepentingan segenap pemegang saham, mitra bisnis, nasabah maupun para karyawan.

Layanan penyelesaian pembayaran tetap menjadi inti dari model bisnis BCA. Pendalaman hubungan dengan para nasabah terus dilakukan di seluruh tingkatan dengan memastikan tercapainya kualitas dan efisiensi melalui beragam produk dan layanan yang inovatif. Lebih lanjut, BCA memiliki komitmen untuk memperluas jaringan distribusi melalui investasi yang berkelanjutan terhadap infrastruktur kantor cabang dan layanan perbankan elektronik untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi nasabah.

Pada bulan September 2009, BCA menandatangani kesepakatan untuk berpartisipasi dalam kliring dan penyelesaian pembayaran transaksi internasional dalam mata uang Renminbi (RMB) dengan Bank of China di Hong Kong, suatu bank yang memiliki otorisasi untuk melakukan kliring dari Republik Rakyat Cina dan untuk melakukan perdagangan lintas batas terhadap mata uang RMB di Hong Kong. Dengan adanya pengakuan dari Bank of China, diharapkan BCA dapat memainkan peran utama dalam peningkatan arus perdagangan antara Indonesia dan Cina serta negara-negara lainnya.

Pendalaman hubungan dengan nasabah merupakan kunci dalam mempertahankan kekokohan *franchise value* BCA. Fokus BCA yang kuat kepada para nasabah diterapkan secara berimbang baik dalam hal penyaluran kredit maupun penghimpunan dana, dan saat ini telah menjadi unsur utama pendekatan BCA dalam hal penyelesaian pembayaran. Di tahun 2009, BCA terus meningkatkan nilai hubungan dengan nasabah korporasi dan komersial melalui layanan Cash Management yang terintegrasi guna memfasilitasi perputaran dana dari transaksi bisnis. Dengan menyediakan proses pembayaran yang lebih efisien atas transaksi barang dan jasa nasabah, BCA menempatkan diri pada posisi yang strategis di sepanjang mata rantai usaha nasabah, sehingga dapat menangkap peluang secara efektif untuk memperoleh *fee based income* maupun mempertahankan sumber dana pihak ketiga yang menguntungkan.

Tata Kelola Perusahaan

Sepanjang tahun 2009, Dewan Komisaris terus memantau posisi likuiditas dan kualitas aktiva Bank. Tiga komite yang melapor langsung kepada Dewan Komisaris – Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko – berperan aktif dalam memastikan bahwa seluruh mekanisme pengawasan dan pengendalian berfungsi secara optimal. Dewan Komisaris puas atas kompetensi Direksi dalam melakukan kewajiban-kewajibannya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Bank yang menyangkut aspek transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan. Dengan menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku maupun standar internal, BCA senantiasa memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dilaksanakan secara profesional dan berintegritas.

Berbagai inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan telah dilakukan sepanjang tahun 2009. BCA menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk membantu komunitas lokal terutama kelompok masyarakat yang secara ekonomi kurang beruntung. Selama tahun 2009, beberapa program untuk membantu komunitas yang membutuhkan telah dilaksanakan termasuk diantaranya adalah memberikan bantuan dan pemulihan korban gempa bumi pada 30 September di Padang, Sumatera Barat.

Menatap ke Depan

BCA optimis bahwa perekonomian global akan mulai mengalami pemulihan yang berarti dan Indonesia akan mempertahankan pertumbuhan yang berimbang. Suku bunga acuan Bank Indonesia diperkirakan akan berada pada tingkat yang relatif rendah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Posisi neraca yang sehat, likuiditas yang kuat, NPL yang rendah dan jumlah pencadangan yang memadai, menempatkan BCA pada posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang muncul dalam proses pemulihan ekonomi di tahun 2010.

Sementara BCA akan tetap memprioritaskan kualitas aktiva dan likuiditas di atas keuntungan marginal, BCA juga akan berupaya meningkatkan penyaluran kredit, sesuai dengan batasan toleransi risiko yang ditetapkan. Selanjutnya, sejalan dengan proses pemulihan perekonomian, aktivitas bisnis diharapkan dapat kembali ke pola yang normal sehingga BCA dapat melonggarkan kriteria pemberian fasilitas kredit bagi nasabah baru.

BCA terus melanjutkan investasi yang signifikan dalam pengembangan infrastruktur perbankan. Hal tersebut tercermin dalam ekspansi jaringan cabang dan *outlet* perbankan elektronik termasuk ATM, EDC dan Flazz *point of sale* yang sedang berjalan saat

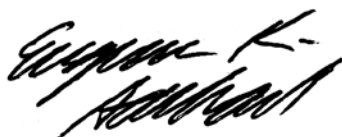
ini. Selanjutnya, BCA akan senantiasa melanjutkan pengembangan layanan Internet dan Mobile Banking. BCA bermaksud untuk mempertahankan kapasitas pada tingkat optimal untuk menjamin kenyamanan dan kepuasan para nasabah. Memasuki tahun 2010, BCA akan menekankan pengembangan data center yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan guna mendukung upaya pendalaman hubungan dengan nasabah dan kegiatan promosi yang lebih terarah. BCA memiliki komitmen untuk terus menjadi yang terdepan sebagai penyedia sistem pembayaran dan bank transaksional dalam mendukung produk dan layanan yang beragam dan kompetitif.

Ucapan Terima Kasih

Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemegang saham, mitra bisnis, nasabah dan karyawan BCA atas dukungannya kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, mewakili Dewan Komisaris, kami ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada jajaran eksekutif BCA atas kinerja yang memuaskan selama tahun 2009 dalam mempertahankan kestabilan Bank, kinerja keuangan dan tingkat keuntungan yang disesuaikan dengan risiko (*risk adjusted return*). Kami berharap pendekatan yang dilakukan oleh manajemen ini akan terus memberikan nilai bagi para pemegang saham di masa yang akan datang.

Jakarta, April 2010

Atas nama Dewan Komisaris



Eugene Keith Galbraith
Presiden Komisaris



1 Sigit Pramono
Komisaris Independen

2 Tonny Kusnadi
Komisaris

3 Eugene Keith Galbraith
Presiden Komisaris

4 Raden Pardede
Komisaris Independen

5 Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen



Dengan memperdalam hubungan dengan nasabah baik dari sisi pendanaan maupun penyaluran kredit, BCA akan terus berupaya mempertahankan likuiditas dan struktur permodalan yang kuat serta kualitas aktiva yang dimilikinya

Pemangku kepentingan dan nasabah yang kami hormati,

Tahun 2009 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian dunia. Kekhawatiran akan runtuhnya sistem keuangan global merupakan ancaman yang sangat nyata di paruh pertama tahun 2009. Namun saat ini kita patut bersyukur bahwa sebagian besar ancaman kejatuhan tersebut telah berlalu dan sistem keuangan global berangsur membaik menuju pertumbuhan moderat di tahun 2010. Selama masa yang penuh dengan tantangan ini, BCA berhasil mempertahankan soliditas usaha dan kinerja keuangan sehingga menempatkan Bank pada posisi yang baik untuk mendapatkan manfaat dari pemulihan ekonomi nasional maupun dunia.

Pada tahun 2009, BCA fokus pada upaya untuk mempertahankan posisi likuiditas yang memadai, permodalan yang kuat dan kualitas aktiva yang baik. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, BCA secara proaktif mengelola cadangan likuiditas dan posisi investasi serta menekankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. BCA juga membangun *franchise value* secara berkesinambungan melalui peningkatan mutu infrastruktur perbankan transaksional dan sistem pembayaran. Kami juga terus memperdalam hubungan dengan nasabah yang ditekankan pada pemahaman kebutuhan nasabah dan penyediaan kualitas layanan terbaik.

Pencapaian Kinerja

BCA saat ini melayani lebih dari 8,5 juta rekening nasabah melalui beragam jaringan distribusi yang meliputi 875 cabang, 6.611 ATM dan 129.164 EDC serta melalui layanan Internet dan Mobile Banking. Keunggulan BCA di bidang perbankan transaksional dan sistem pembayaran tetap merupakan elemen utama dalam mempertahankan profitabilitas Bank. Volume transaksi yang dilayani oleh BCA selama tahun 2009 mengalami pertumbuhan yang signifikan dimana nasabah BCA melakukan transaksi perbankan rata-rata 4,1 juta transaksi per hari.

Pertumbuhan dana pihak ketiga BCA didukung oleh beragam produk dan layanan serta kenyamanan bertransaksi melalui penyediaan jaringan distribusi yang aman. Pada tahun 2009, dana pihak ketiga tumbuh 17,0% dimana dana tabungan meningkat sebanyak 14,6% sementara dana giro dan deposito berjangka tumbuh masing-masing sebesar 15,3% dan 23,4%. Peningkatan sumber pendanaan di tengah kondisi perekonomian yang penuh tantangan ini merupakan cerminan atas kepercayaan dan keyakinan nasabah kami terhadap reputasi BCA.

Dalam beberapa tahun terakhir aktivitas penyaluran kredit BCA menunjukkan kinerja yang baik. Selama tahun 2009, permintaan terhadap kredit mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya sebagai dampak dari banyaknya nasabah bisnis yang menunda investasi belanja modal (*capital expenditure*) dan mengurangi persediaan barang (*inventory*). Mereka mengambil pendekatan *wait and see* dalam menentukan langkah pengembangan usaha. Selain itu, dengan kembali maraknya pasar obligasi domestik maupun internasional, banyak nasabah korporasi kami menerbitkan obligasi guna mendapatkan pendanaan dengan tingkat suku bunga yang rendah dan menggunakan dana penerbitan obligasi tersebut untuk melunasi pinjaman bank.

Dengan mengacu kepada hal di atas, maka pertumbuhan kredit BCA di tahun 2009 lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi awal dengan tingkat pertumbuhan sebesar 9,9% dan mencapai Rp 123,9 triliun. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini adalah sektor konsumsi yang terbukti cukup tangguh. Secara keseluruhan, kredit konsumsi BCA tumbuh sebesar 31,9%. Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor tumbuh 32,8% menjadi Rp 10,4 triliun, lebih tinggi dibanding perkiraan semula. Sementara itu kredit pemilikan rumah tumbuh 27,5% menjadi Rp 13,1 triliun sedangkan saldo pinjaman kartu kredit BCA meningkat 45,0% di tahun 2009.

Meskipun rasio kredit bermasalah (NPL) pada semester pertama tahun 2009 meningkat menjadi 1,9% dari total kredit yang disalurkan, rasio NPL tersebut berangsur-angsur turun menjadi 0,7% pada akhir tahun 2009. Membaiknya kualitas kredit tersebut berkat perhatian kami terhadap pengawasan portofolio kredit secara proaktif dan upaya-upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan secara cepat. Selama kurun waktu tersebut, BCA menerapkan kebijakan pembentukan cadangan kredit bermasalah secara dinamis, menggunakan kajian menyeluruh terhadap masing-masing sektor untuk menentukan kecukupan cadangan. Pada akhir tahun 2009, total cadangan terhadap kredit bermasalah tercatat sebesar 480,2%.

BCA membukukan laba bersih sebesar Rp 6,8 triliun pada tahun 2009. Laba sebelum pajak tumbuh sebesar 15,9% menjadi Rp 8,9 triliun. Walaupun margin bunga bersih (NIM) terus mengalami tekanan yang dipicu oleh penurunan tingkat suku bunga dan tingginya tingkat persaingan pemberian kredit, BCA mencatat pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 20,6% menjadi Rp 14,9 triliun. Laba operasional BCA tumbuh 11,1% menjadi Rp 8,5 triliun. Tingkat pengembalian terhadap aktiva (ROA) tercatat sebesar 3,4%, sementara itu tingkat pengembalian terhadap ekuitas (ROE) adalah sebesar 31,8%. Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) saat ini berada pada posisi 50,3% sementara rasio kecukupan modal (CAR) dapat dipertahankan pada posisi 15,3%.

BCA memiliki keyakinan bahwa soliditas neraca – posisi likuiditas yang mencukupi, struktur permodalan yang kuat dan kualitas aktiva yang baik – dengan didukung oleh posisi efektif BCA dalam hal produk dan jangkauan layanan akan senantiasa menjadi sumber keunggulan strategis bagi Bank. BCA akan senantiasa fokus kepada aktivitas transaksi perbankan dan sistem penyelesaian pembayaran untuk menjamin stabilitas *franchise value* BCA dalam menghimpun dana giro dan tabungan. Dengan demikian, BCA berada pada posisi yang baik untuk dapat memanfaatkan berbagai peluang bisnis yang diproyeksikan meningkat seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi.

Relationship Banking

Sebagai bank transaksional yang unggul dalam sistem pembayaran, BCA memiliki volume data nasabah yang cukup besar. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang dapat menyimpan dan mengolah data nasabah tersebut merupakan suatu bagian integral dari penekanan strategis BCA pada peningkatan hubungan dengan nasabah. Oleh karena itu, BCA menerapkan strategi *data warehousing* untuk menganalisa transaksi dan perilaku nasabah guna dapat menentukan strategi yang efektif dalam melakukan pemasaran *product bundling* dan berbagai promosi.

Inisiatif peningkatan kualitas sumber daya manusia akan difokuskan pada pendalaman pengetahuan produk bagi setiap *account officer* dan peningkatan

kemampuan untuk membangun dan membina hubungan baik dengan nasabah. Hal ini diharapkan dapat mendukung kegiatan penjualan silang (*cross selling*) yang lebih baik melalui para *front liner* yang selanjutnya didukung oleh kegiatan *after-sales* yang menyeluruh.

Tata Kelola Perusahaan

BCA memiliki komitmen untuk senantiasa memenuhi standar tertinggi terkait dengan aspek kepatuhan, transparansi, akuntabilitas dan etika profesional. Salah satu unsur penting tata kelola perusahaan di BCA adalah penerapan manajemen risiko dan *contingency plan* yang efektif untuk mengantisipasi kondisi pasar yang memburuk. Dalam beberapa tahun terakhir BCA telah menerapkan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa Bank mampu mengelola dampak volatilitas pasar. Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar didukung oleh kebijakan-kebijakan proaktif yang secara efektif disiapkan untuk mengantisipasi dan merespon dampak-dampak negatif yang berpotensi timbul pada saat krisis. Komite Kredit dan Komite Aset & Liabilitas (ALCO) memiliki peranan penting untuk memastikan kemampuan Bank dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dialami pada tahun 2009.

Menatap Masa Depan

Tiga unsur utama strategi BCA dalam memasuki tahun 2010 adalah: Pertumbuhan, Kualitas dan Efisiensi. Dengan memperdalam hubungan dengan

nasabah baik dari sisi pendanaan maupun penyaluran kredit, BCA akan terus berupaya mempertahankan likuiditas dan struktur permodalan yang kuat serta kualitas aktiva yang dimilikinya. Dalam hal pendanaan, BCA akan meningkatkan *franchise value* sebagai bank transaksional dalam upaya untuk mendapatkan sumber dana pihak ketiga yang menguntungkan. Dari segi penyaluran kredit, BCA akan terus berupaya menerapkan prinsip kehati-hatian diseluruh sektor bisnis. Pendekatan yang berimbang ini akan memungkinkan BCA untuk terus mengelola likuiditas, risiko kredit dan posisi permodalannya secara efektif, dengan tetap mempertahankan tingkat profitabilitas.

BCA telah mengakuisisi Bank UIB di bulan Oktober 2008 yang selanjutnya akan dikonversi menjadi bank Syariah dengan nama BCA Syariah. Konversi tersebut akan selesai pada semester pertama 2010.

Penutup

Jajaran Direksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan atas semua kerja keras dan dukungan yang telah diberikan. Meskipun selama tahun 2009 kita dihadapkan pada berbagai tantangan, namun ketekunan dan dedikasi tinggi yang telah ditunjukkan

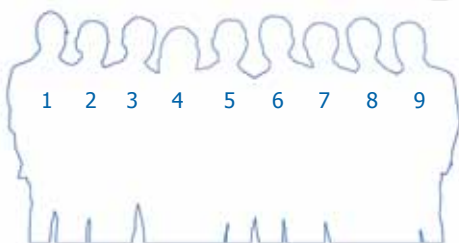
oleh seluruh karyawan membuat BCA berada pada posisi yang menguntungkan dalam menangkap peluang-peluang bisnis di masa yang akan datang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada setiap mitra bisnis dan para pemegang saham yang telah menunjukkan dukungannya kepada segenap Jajaran Direksi dan anggota manajemen dalam melalui krisis di tahun 2009. Kebijakan BCA yang menerapkan prinsip keterbukaan dalam berkomunikasi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan dengan semangat profesionalisme dan integritas yang tinggi. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para nasabah yang telah setia dan memberikan kepercayaan kepada BCA. Melalui keunggulannya sebagai bank transaksional dan sistem pembayaran, BCA memiliki komitmen untuk senantiasa memberikan kenyamanan bagi nasabah serta menghadirkan produk dan layanan yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan pasar di Indonesia.

Dalam kesempatan yang baik ini, jajaran Direksi mengucapkan selamat datang kepada Bapak Armand W. Hartono sebagai Direktur yang akan bertanggung jawab terhadap pengembangan operasi dan jaringan BCA.

Jakarta, April 2010
Atas nama Direksi



Djohan Emir Setijoso
Presiden Direktur



1 Anthony Brent Elam
Direktur

2 Renaldo Hector Barros
Direktur

3 Suwignyo Budiman
Direktur

4 Dhalia Mansor Ariotedjo
Direktur


5 Djohan Emir Setijoso
Presiden Direktur

6 Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur

7 Henry Koenafi
Direktur

8 Armand Wahyudi Hartono
Direktur

9 Subur Tan
Direktur



Keunggulan di bidang perbankan transaksional dan sistem pembayaran merupakan elemen utama dalam mempertahankan profitabilitas BCA

Tinjauan Bisnis

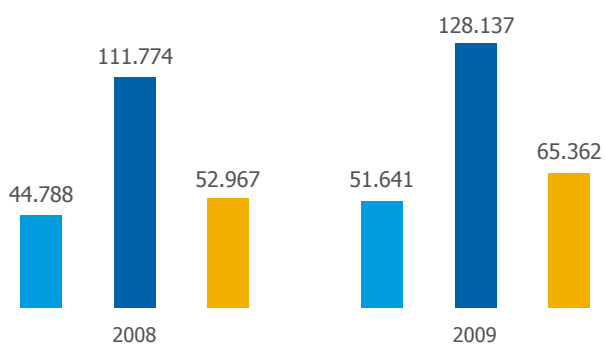




Perbankan Cabang

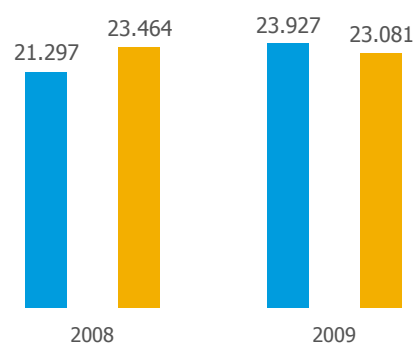
Dana Pihak Ketiga
(dalam miliar Rupiah)

- Giro
- Tabungan
- Deposito



Portofolio Kredit Komersial dan UKM
(dalam miliar Rupiah)

- Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Komersial



Menghadapi kondisi perekonomian yang berubah dengan cepat, BCA tetap fokus untuk terus mengembangkan *franchise value* sebagai bank transaksional pilihan utama nasabah

Unit bisnis Perbankan Cabang memegang peran strategis dalam pengembangan hubungan antara BCA dengan para nasabah, baik dalam penyediaan layanan transaksi perbankan kepada para pemilik rekening di BCA maupun dalam penyediaan fasilitas kredit kepada para nasabah komersial dan usaha kecil & menengah (UKM). Jaringan kantor cabang tetap memegang peran penting yang berfungsi sebagai penghubung dan pintu gerbang utama dalam menjangkau nasabah-nasabah BCA.

Menghadapi kondisi perekonomian yang berubah dengan cepat, BCA tetap fokus untuk terus mengembangkan *franchise value* sebagai bank transaksional pilihan utama nasabah. Sepanjang tahun 2009, BCA melanjutkan investasi yang cukup signifikan untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas pelayanan termasuk perluasan jaringan serta memperkaya ragam produk dan layanan. Pertumbuhan dana simpanan nasabah yang cukup signifikan di sepanjang tahun telah menegaskan kembali posisi BCA sebagai bank transaksional pilihan dan terpercaya di Indonesia.

Di segi penyaluran kredit, pada tahun 2009 BCA terus melaksanakan pendekatan yang konservatif, dengan mengutamakan kualitas kredit dibandingkan pertumbuhan kredit termasuk untuk segmen kredit komersial dan UKM. Memasuki tahun 2009, Bank memperketat kriteria permohonan kredit, dimana hal tersebut telah mulai diterapkan pada pertengahan tahun 2008. Pada saat yang sama *customer relationship manager* BCA memantau dengan seksama dampak melemahnya perekonomian terhadap usaha debitur. Dengan upaya tersebut kualitas kredit di segmen UKM dan komersial berada pada posisi yang cukup sehat, dengan rasio NPL berada pada tingkat yang relatif rendah yakni 1,1% per akhir tahun 2009.

PERBANKAN TRANSAKSIONAL

Bisnis Inti BCA

BCA merupakan bank transaksional terkemuka di Indonesia dengan basis nasabah mencapai sekitar 8,5 juta rekening, baik nasabah individual maupun nasabah bisnis. Jaringan layanan BCA meliputi

875 kantor cabang dan 6.611 unit ATM yang berlokasi di pusat-pusat perdagangan komersial dan ritel serta di pusat-pusat hiburan di seluruh Indonesia. Total populasi EDC BCA mencapai 129.164 unit pada akhir tahun 2009. BCA secara konsisten menawarkan fitur-fitur yang memberikan nilai tambah pada seluruh produk dan layanannya, yang dihadirkan sesuai dengan kebutuhan nasabah untuk setiap segmen yang berbeda. Fasilitas perbankan yang beragam ini meliputi: BCABIZZ untuk nasabah bisnis individu; BCA Prioritas untuk nasabah individu *mass-affluent*; dan layanan Weekend Banking untuk memenuhi kebutuhan transaksi melalui cabang pada hari libur. Layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah ini ditujukan untuk selalu mendekatkan Bank dengan para nasabahnya serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman dalam bertransaksi.

Di dalam situasi persaingan yang ketat dan dinamis seperti saat ini, BCA menyadari akan pentingnya kualitas layanan yang membedakan satu institusi

perbankan dengan yang lainnya. Untuk itu, secara berkesinambungan BCA meningkatkan standar layanan kepada nasabah dengan menanamkan budaya layanan dalam organisasi melalui berbagai aktivitas yang dapat mendukung pengembangan kepribadian dan keterampilan karyawan guna membina hubungan dengan nasabah. Melalui pemantauan secara seksama dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan, memungkinkan Bank untuk mengidentifikasi karyawan yang memiliki kinerja terbaik di tingkat kantor wilayah maupun kantor cabang dan memberikan penghargaan baik melalui peningkatan karir ataupun bentuk insentif lainnya.

Frekuensi dan nilai transaksi melalui Internet Banking BCA dan jaringan elektronik lainnya terus menunjukkan pertumbuhan di tahun 2009. Total nasabah yang memiliki akses terhadap layanan berbasis internet baik KlikBCA Individu maupun KlikBCA Bisnis meningkat dari 1,2 juta nasabah di tahun 2008 menjadi 1,7 juta nasabah di tahun 2009. Total transaksi yang

Jumlah Jaringan Layanan (unit)

	2009	2008
Kantor Cabang	875	844
ATM	6.611	5.997
EDC (<i>Electronic Data Capture</i>)	129.164	81.750

Transaksi Melalui Delivery Channels

	2009	2008
Kantor Cabang		
Jumlah Transaksi (dalam jutaan)	174,3	171,9
Nilai Transaksi (dalam triliun Rupiah)	9.134,2	8.956,9
ATM		
Jumlah Transaksi (dalam jutaan)	848,9	793,6
Nilai Transaksi (dalam triliun Rupiah)	858,8	807,6
Internet Banking		
Jumlah Transaksi (dalam jutaan)	230,5	135,0
Nilai Transaksi (dalam triliun Rupiah)	1.355,6	991,8
Mobile Banking		
Jumlah Transaksi (dalam jutaan)	120,9	85,8
Nilai Transaksi (dalam triliun Rupiah)	135,3	95,5

dilayani oleh sistem Internet Banking ini mencapai 230,5 juta transaksi dengan nilai transaksi Rp 1.356 triliun pada tahun 2009.

Guna memenuhi kebutuhan nasabah terhadap layanan perbankan, BCA senantiasa melakukan inovasi layanan dan pengembangan fitur-fitur yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan fleksibilitas bagi para nasabah. Upaya pengembangan layanan perbankan BCA melalui internet di tahun 2009 meliputi serangkaian fitur baru dalam e-payment dimana kini terdapat pilihan pembelian pulsa isi ulang telepon selular untuk berbagai provider; pembelian tiket penerbangan; transaksi pembayaran melalui biro perjalanan dan pembelian barang ritel secara *on line*. Layanan perbankan BCA melalui internet juga berfungsi sebagai platform untuk layanan Cash Management.

Dari segi frekuensi transaksi, jaringan ATM BCA masih merupakan sarana transaksi yang paling populer. Sepanjang tahun 2009, sekitar 848,9 juta transaksi dilakukan melalui jaringan ATM dengan nilai transaksi mencapai Rp 858,8 triliun. ATM BCA yang berada di lokasi-lokasi strategis terdiri dari ATM multi fungsi, ATM untuk setoran tunai dan kios ATM. Di tahun 2009, BCA memperluas jaringan ATM dengan menambah 614 unit sehingga jumlah ATM BCA menjadi 6.611 unit.

Dengan basis nasabah BCA yang cukup besar dan loyal, BCA memiliki sumber dana pihak ketiga yang kuat dan stabil. Pada akhir tahun 2009, total dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp 245,1 triliun, dimana 73,3% berupa dana rekening transaksional dari rekening giro dan rekening tabungan. Dana giro dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 15,3% dan 14,6%, sehingga mencapai Rp 51,6 triliun dan Rp 128,1 triliun di akhir tahun 2009.

Dana deposito BCA meningkat cukup signifikan pada tahun 2009. Berawal dari perlambatan kondisi keuangan global pada awal tahun 2009, cukup banyak nasabah yang memutuskan untuk memindahkan dananya dari bank-bank dengan ukuran relatif kecil ke bank-bank yang lebih besar, seperti BCA yang memiliki kondisi neraca lebih kuat.

Meningkatkan Kemampuan Perbankan

Transaksional

Untuk memperkuat posisi sebagai bank utama penyedia layanan pembayaran, BCA senantiasa melakukan inovasi dalam mengembangkan layanan Cash Management yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, baik nasabah korporasi, komersial maupun UKM. Berbagai layanan yang dikembangkan termasuk layanan pembayaran, penagihan dan pemantauan likuiditas, yang memungkinkan para nasabah mengelola transaksi-transaksi *Business-to-Business* (B2B), *Business-to-Customer* (B2C) dan *Customer-to-Customer* (C2C) dengan lebih baik. Salah satu fitur di dalam layanan Cash Management BCA adalah Virtual Account yang digunakan untuk memudahkan pembayaran dan meminimalkan *outstanding* pembayaran yang tidak teridentifikasi. Sejak diluncurkan pada tahun 2007, sistem Virtual Account telah digunakan oleh 119 perusahaan di berbagai sektor industri, termasuk lembaga pembiayaan, asuransi, pendidikan, telekomunikasi, *Cable & Sattelite TV*, serta pedagang grosir dan distributor. Di tahun 2009, layanan Virtual Account digunakan oleh 30 lembaga pendidikan nasional untuk memfasilitasi pembayaran biaya pendidikan.

Pertama kali diluncurkan pada tahun 2007, FlazzCard terus dikembangkan guna mendukung transaksi-transaksi dengan nilai relatif kecil tetapi berfrekuensi tinggi. BCA juga memperkenalkan Kartu Combo yang menggabungkan fungsi kartu kredit dan FlazzCard. Untuk meningkatkan penggunaan kartu, BCA terus

menjalin kerja sama dengan berbagai *retail merchant* seperti penyedia jasa parkir, gerai makanan dan minuman cepat saji, operator armada distribusi, dan pasar ritel modern (minimarket, supermarket, dan hypermarket). Saat ini nasabah dapat menggunakan FlazzCard untuk bertransaksi di kota Jakarta, Bandung dan Surabaya. BCA secara aktif terus melakukan edukasi dan promosi untuk memperkenalkan layanan FlazzCard pada masyarakat luas. Jumlah FlazzCard yang aktif mencapai sekitar 1,5 juta per akhir tahun 2009 dimana angka tersebut merupakan kenaikan sebesar 482,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Sejumlah 2.171 *merchant* dengan *outlet* sebanyak 10.407 menerima layanan pembayaran menggunakan FlazzCard.

PERBANKAN KOMERSIAL & UKM

Kinerja Tahun 2009

Portofolio kredit komersial dan UKM tercatat mengalami kenaikan sebesar 5,0% menjadi sebesar Rp 47,0 triliun di akhir tahun 2009 yang mencerminkan penurunan permintaan modal kerja dari sektor usaha serta sebagai dampak dari kebijakan BCA untuk memperketat kriteria pemberian kredit. Sebagian besar pertumbuhan terjadi di segmen UKM yang meningkat sebesar 12,3%, sedangkan total kredit yang disalurkan ke segmen komersial relatif sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sepanjang tahun 2009, para pengusaha di segmen komersial dan UKM cenderung untuk mengurangi tingkat persediaan barang (*inventory*) dan jumlah piutang dagang sebagai langkah antisipasi terhadap ketidakpastian kondisi pasar. Akibatnya, kebutuhan modal kerja menurun secara signifikan dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Hal ini tercermin pada penurunan tingkat pemanfaatan fasilitas pinjaman menjadi 69,5% pada tahun 2009 dari 73,3% pada tahun 2008.

Selama semester pertama tahun 2009, BCA mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengendalikan potensi kredit bermasalah dengan memperketat kriteria pencairan kredit dan membatasi pemberian fasilitas kredit baru, termasuk untuk segmen komersial dan UKM. Pemberian fasilitas kredit diutamakan bagi para nasabah yang telah menjalin hubungan cukup lama dengan Bank sehingga potensi risiko yang mungkin timbul dapat dipahami dengan lebih baik. Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, maka kualitas kredit secara keseluruhan tetap sehat, baik untuk segmen komersial maupun UKM dengan rasio NPL masing-masing sebesar 1,6% dan 0,7%.

Memperkuat Fondasi Bagi Pertumbuhan

BCA memahami potensi segmen komersial dan UKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Nasabah komersial dan UKM BCA memegang peran penting dalam menciptakan basis nasabah transaksional yang solid. Keunggulan BCA di bidang perbankan transaksional, memungkinkan BCA untuk menyalurkan kredit kepada nasabah-nasabah yang berkualitas di segmen komersial dan UKM.

BCA senantiasa mengembangkan berbagai solusi pembiayaan menggunakan skema Value Chain-Financing guna mendukung transaksi keuangan perusahaan besar yang memiliki keterkaitan hubungan bisnis yang luas dari hulu ke hilir di sepanjang mata rantai usaha nasabah. Saat ini, BCA telah mengembangkan skema kredit Supplier Financing, Distributor Financing dan Dealer Financing. Di tahun 2009, BCA bekerja sama dengan sebuah produsen otomotif terkemuka di Indonesia untuk menyediakan fasilitas pembiayaan bagi para dealer untuk memasarkan produk-produk otomotif. BCA juga memiliki kerja sama dengan beberapa produsen barang-barang konsumen untuk menyediakan pembiayaan bagi para distributor produk-produk konsumen mereka.

Pada tahun 2009, BCA juga mengambil langkah untuk memperkuat infrastruktur kredit serta meningkatkan keterampilan dan kemampuan para *account officer* untuk mendukung pendalaman hubungan dengan nasabah.

Pemberian kredit kepada segmen UKM memanfaatkan kedekatan lokasi kantor-kantor cabang BCA dengan berbagai daerah komersial di kota-kota besar di Indonesia, yang didukung oleh sistem penilaian *on line* dan terpusat atas aplikasi kredit dan pengelolaan risiko. Kredit UKM dipasarkan melalui jaringan kantor cabang dan didefinisikan sebagai fasilitas kredit mulai dari Rp 500 juta hingga Rp 7,5 miliar. Di sub-segmen Kredit Usaha Kecil (KUK), sebagian besar nasabah adalah nasabah giro dan tabungan BCA yang memiliki beragam usaha seperti pedagang, usaha manufaktur kecil, toko-toko dan restoran. Dalam menyalurkan kredit mikro, BCA menjalin kerja sama dengan sekitar 302 mitra institusi seperti Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, Bank Perkreditan Rakyat dan Koperasi dengan memberikan fasilitas pinjaman secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung pengembangan usaha mikro.

Di segmen komersial, BCA menyediakan fasilitas kredit terutama dalam bentuk modal kerja dan pembiayaan perdagangan antara Rp 7,5 miliar hingga Rp 100 miliar yang diarahkan kepada perusahaan-perusahaan skala menengah di sektor perdagangan, manufaktur dan jasa. BCA terus mengembangkan dan memperkuat infrastruktur Sentra Bisnis Komersial (SBK) guna memberikan layanan yang lebih cepat dan kemudahan akses ke kepada para *account officer* yang berpengalaman dalam memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan nasabah. Selain itu, BCA juga telah mengembangkan SBK di Jakarta, Semarang, Surabaya dan Bandung yang merupakan pusat-pusat kegiatan ekonomi di Pulau Jawa.

Melangkah ke Depan

BCA akan senantiasa mempertahankan keunggulan kompetitif di bidang perbankan transaksional dengan memperluas jangkauan pelayanan serta menyempurnakan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Proses penjualan melalui kantor cabang akan terus menjadi titik penting untuk memperdalam hubungan dengan nasabah.

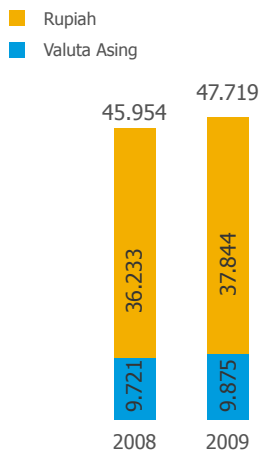
BCA berencana untuk mengembangkan FlazzCard dengan memperluas lokasi-lokasi pembayaran menggunakan FlazzCard di sektor industri transportasi. Di tahun 2010 BCA akan meluncurkan berbagai program pemasaran bersama dan fokus kepada pembukaan *outlet-outlet* baru untuk distribusi FlazzCard, mengembangkan fasilitas pengisian kartu (*top-up*), serta melakukan kegiatan promosi untuk meningkatkan penggunaan kartu dan loyalitas nasabah.

Segmen komersial dan UKM akan terus berperan penting sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional. Di segmen tersebut, BCA akan memacu pertumbuhan dengan meningkatkan fasilitas kredit kepada nasabah yang prospektif melalui strategi pendalaman hubungan. BCA akan terus fokus kepada pengembangan infrastruktur kredit dan kemampuan para *account officer*. Penekanan pada upaya segmentasi kredit komersial juga akan dilakukan berdasarkan sektor industri yang diharapkan dapat membantu *account officer* untuk lebih memahami aktivitas dan kebutuhan nasabah. BCA akan terus meningkatkan keterkaitan hubungan antara nasabah-nasabah UKM, komersial dan korporasi dengan menciptakan solusi-solusi keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan para nasabah.

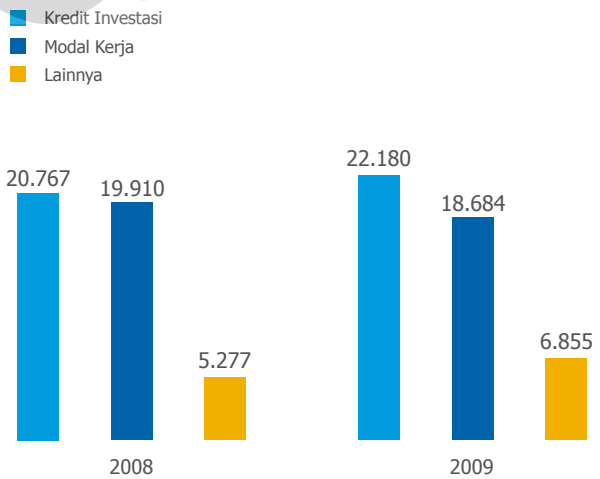


Perbankan Korporasi

Portofolio Kredit Korporasi
(dalam miliar Rupiah)



Kredit Korporasi Berdasarkan Penggunaan
(dalam miliar Rupiah)



BCA optimis terhadap prospek pemulihan perekonomian global pada tahun 2010, dimana BCA akan terus memperkuat posisinya sebagai bank penyedia kredit korporasi terkemuka di Indonesia

Pendalaman hubungan dengan nasabah merupakan kunci keberhasilan BCA dalam menyediakan berbagai solusi keuangan yang tepat sesuai dengan kebutuhan nasabah korporasi terkemuka di Indonesia. BCA secara konsisten mendukung para nasabah korporasinya pada saat kondisi ekonomi sedang melemah. Pada saat mulainya krisis likuiditas global di tahun 2008, dimana banyak nasabah korporasi mengalami kesulitan dalam mengakses dana dari sumber-sumber alternatif, keunggulan BCA yang didukung oleh posisi neraca, permodalan dan kualitas aktiva yang baik memungkinkan BCA untuk terus melayani kebutuhan nasabah.

Memasuki tahun 2009, kondisi perekonomian telah menunjukkan beberapa perbaikan. Kebijakan internal BCA untuk melakukan penyaluran kredit secara berhati-hati serta portofolio kredit yang terdiversifikasi telah membantu BCA dalam menghadapi dampak dari kelesuan ekonomi. Di tengah kondisi pasar yang tidak menentu, kualitas portofolio kredit Perbankan Korporasi BCA tetap terjaga dengan baik.

Penyaluran Kredit Korporasi di Tahun 2009

Selama beberapa tahun sebelum krisis, kredit korporasi BCA terus tumbuh dengan menyalurkan fasilitas kredit secara berhati-hati kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki reputasi baik yang tersebar di berbagai sektor industri. Di tahun 2009, penyaluran kredit korporasi mengalami pertumbuhan sebesar 3,8% menjadi Rp 47,7 triliun, atau 38,6% dari total portofolio kredit BCA. Pertumbuhan yang lebih rendah dari biasanya ini merupakan dampak menurunnya permintaan kredit dari nasabah-nasabah korporasi karena mereka melakukan penyesuaian terhadap aktivitas usaha di tengah kelesuan ekonomi dengan mengurangi persediaan barang (*inventory*). Walaupun tingkat suku bunga kredit telah turun cukup signifikan sejak triwulan kedua, banyak perusahaan masih menunda belanja modalnya dan mengalokasikan likuiditas yang ada untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.

Sementara itu, dalam menyalurkan kredit, BCA menghadapi persaingan yang semakin ketat, baik dari industri keuangan dalam negeri maupun dari pasar keuangan luar negeri. Dengan pulihnya pasar obligasi internasional dan domestik, banyak nasabah korporasi kembali menerbitkan obligasi guna mendapatkan suku bunga yang rendah dan menggunakan dana yang diperoleh tersebut untuk melunasi pinjaman bank.

BCA tetap berhati-hati dan selektif dalam penyaluran kredit disepanjang tahun 2009, dimana prioritas diberikan untuk memenuhi kebutuhan nasabah-nasabah yang telah menjalin hubungan dengan BCA. BCA fokus pada sektor-sektor industri yang tetap memperlihatkan kinerja yang baik di tengah melemahnya perekonomian, antara lain sektor telekomunikasi, infrastruktur, energi dan otomotif.

Selama tahun 2009, BCA menyelesaikan beberapa transaksi kredit sindikasi berskala besar, termasuk pembiayaan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk pembangunan pembangkit listrik baru sebagai bagian dari program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW. Transaksi kredit sindikasi yang telah diselesaikan pada tahun 2009 berjumlah Rp 24,7 triliun, dimana porsi BCA adalah sebesar Rp 4,3 triliun. BCA optimis bahwa pemerintah akan terus melanjutkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, dan berencana akan terus berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek tersebut.

Pendekatan yang Proaktif

Di akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009, Perbankan Korporasi BCA melakukan kajian terhadap seluruh portofolio kredit untuk melihat pengaruh melemahnya perekonomian terhadap masing-masing sektor industri. Berdasarkan analisa tersebut, BCA kemudian menetapkan sektor-sektor industri yang masih memiliki potensi pertumbuhan dan sektor-sektor mana yang perlu dipantau secara khusus untuk memastikan kualitas kredit. *Customer relationship manager* kemudian melakukan pendekatan proaktif untuk menjalin komunikasi dengan nasabah di sektor-sektor yang rentan tersebut. Berkat pengelompokan tim Perbankan Korporasi BCA berdasarkan sektor-sektor industri, para *customer relationship manager* BCA memiliki pemahaman yang baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi usaha para nasabah sehingga mereka dapat memberikan masukan-masukan guna membantu para nasabah terkait.

Melihat perekonomian Indonesia yang relatif tidak terlalu bergantung kepada ekspor dibandingkan beberapa negara tetangga, sebagian besar sektor industri tetap memiliki potensi yang baik di tengah melemahnya kondisi ekonomi global. Beberapa industri yang banyak bergantung kepada ekspor mengalami penurunan kinerja, termasuk sektor industri baja, tekstil dan perkapalan. Sementara itu, di sektor ekspor barang komoditas – seperti batubara dan minyak sawit – pada awalnya mengalami kesulitan

10 Portofolio Kredit Korporasi Terbesar Berdasarkan Sektor Industri

Sektor Industri	2009	2008
Telekomunikasi	22,3%	17,7%
Pertambangan Migas	11,4%	5,8%
Perkebunan dan Pertanian	6,6%	7,2%
Bahan Bangunan dan Besi Konstruksi Lainnya	5,2%	5,6%
Makanan dan Minuman	5,0%	5,1%
Bahan Kimia dan Plastik	4,6%	5,6%
Pembiayaan Konsumen	4,4%	4,8%
Infrastruktur Sarana Angkutan	4,2%	4,2%
Jasa Keuangan	3,6%	2,1%
Tekstil dan Produk Tekstil	3,6%	4,2%
Total	70,9%	62,3%

akibat menurunnya permintaan, meskipun demikian, harga-harga komoditas tersebut telah kembali ke level yang menguntungkan.

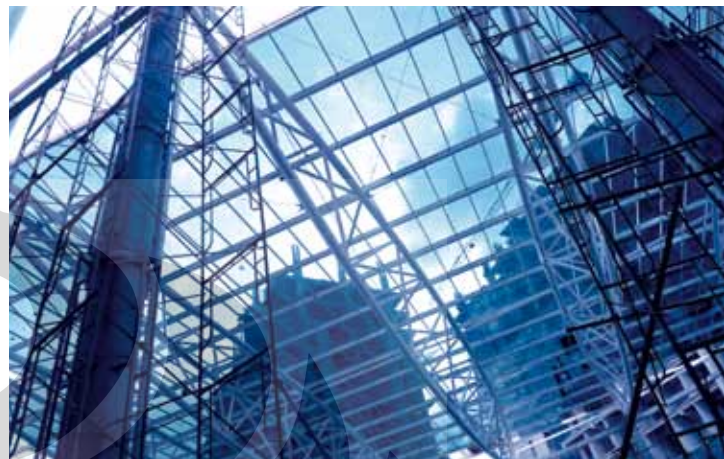
Rasio NPL kredit korporasi meningkat dan mencapai level tertinggi pada semester pertama tahun 2009 yaitu sebesar 2,4%. Melalui langkah-langkah yang efektif, kami berhasil menyelesaikan kredit-kredit bermasalah hingga ke level yang mendekati nol pada akhir tahun 2009. Memasuki tahun 2009, BCA secara proaktif menerapkan kebijakan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi ketidakpastian kondisi ekonomi. BCA telah menyiapkan cadangan untuk menghadapi penurunan ekonomi yang lebih buruk dari yang sebenarnya terjadi. Berkat ketangguhan perekonomian Indonesia serta langkah-langkah proaktif BCA, kinerja Perbankan Korporasi BCA tidak mengalami tekanan yang berarti.

Layanan di Sepanjang Mata Rantai Usaha

Perbankan Korporasi terus berkonsentrasi pada pengembangan aktivitas pemberian kredit secara kluster dan pengembangan Cash Management serta layanan transaksi perbankan. Strategi tersebut dikembangkan dengan tujuan untuk memanfaatkan keunggulan BCA sebagai bank transaksional dan penyedia layanan pembayaran untuk meningkatkan keterkaitan antara para nasabah korporasi, komersial dan nasabah UKM BCA. Layanan Cash Management dan layanan transaksi perbankan yang terintegrasi di sepanjang mata rantai usaha nasabah (*value chain*), memungkinkan BCA untuk memfasilitasi efisiensi operasi maupun penghematan biaya bagi para nasabah. BCA secara konsisten menerapkan strategi ini di beberapa sektor industri seperti telekomunikasi, agribisnis, maupun distributor dari sektor ritel.

Melangkah ke Depan

BCA optimis terhadap prospek pemulihan perekonomian global pada tahun 2010, dimana BCA akan terus memperkuat posisinya sebagai bank penyedia kredit korporasi terkemuka di Indonesia. BCA akan melakukan langkah-langkah untuk menyempurnakan berbagai proses internal dan meningkatkan kapabilitas



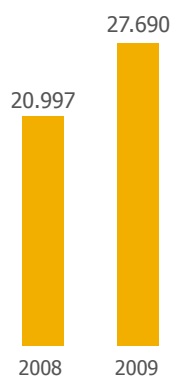
relationship manager, dan terus fokus kepada perusahaan-perusahaan *top tier*. Dengan menjalin komunikasi secara terbuka dengan para nasabah tersebut, BCA berharap memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap berbagai kebutuhan nasabah dalam rangka meningkatkan hubungan secara menyeluruh. BCA juga berencana untuk memperluas portofolio kredit dengan menyalurkan kredit secara selektif kepada nasabah baru di industri-industri yang sedang tumbuh. Secara bersamaan, Perbankan Korporasi juga akan memperdalam hubungannya dengan para nasabah BCA di segmen komersial yang memiliki potensi cukup tinggi.

Selain melakukan ekspansi kredit, BCA juga akan terus mengembangkan dan memasarkan beragam layanan *advisory* yang memberikan nilai tambah dan *fee based income*. BCA secara khusus akan mendalami pengembangan solusi inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah melalui pelayanan Cash Management. BCA juga akan mencari peluang untuk menyediakan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan di sepanjang mata rantai bisnis dengan memanfaatkan keunggulan BCA di bidang perbankan transaksional dan sistem pembayaran. Dengan memfasilitasi transaksi di sepanjang mata rantai usaha nasabah, Perbankan Korporasi akan memiliki posisi penting terkait dengan kegiatan penjualan silang (*cross selling*) produk dan layanan dari unit bisnis lainnya seperti Tresuri, Perbankan Internasional dan Perbankan Cabang.



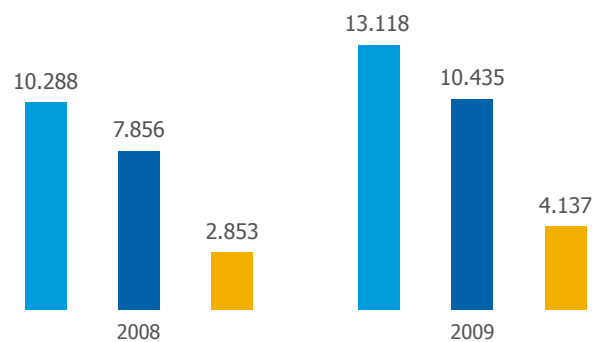
Perbankan Individual

Total Kredit Konsumer
(dalam miliar Rupiah)

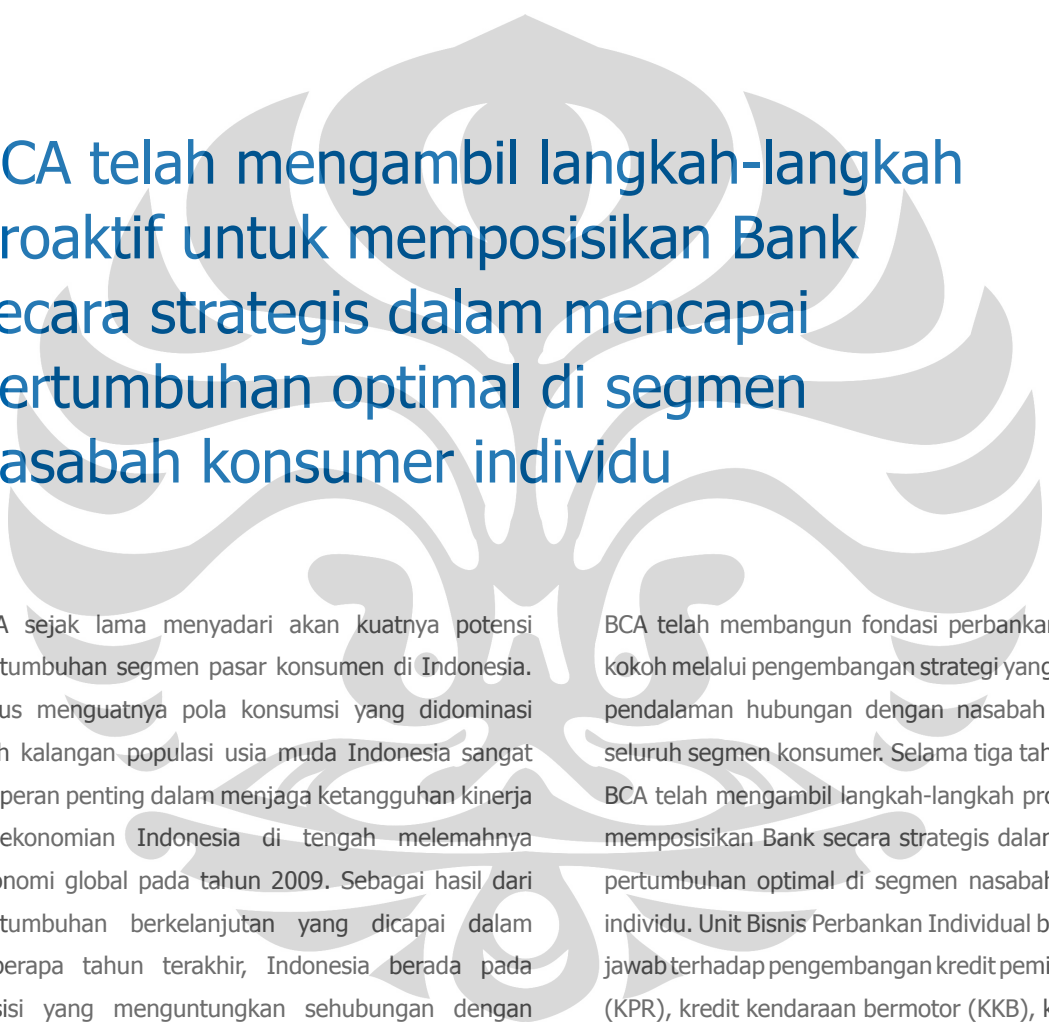


Portofolio Kredit Konsumer
(dalam miliar Rupiah)

- Kredit Pemilikan Rumah (KPR) *
- Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
- Kartu Kredit



* termasuk kredit konsumer lainnya masing-masing sebesar Rp 4 miliar untuk tahun 2009 dan 2008



BCA telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk memposisikan Bank secara strategis dalam mencapai pertumbuhan optimal di segmen nasabah konsumen individu

BCA sejak lama menyadari akan kuatnya potensi pertumbuhan segmen pasar konsumen di Indonesia. Terus menguatnya pola konsumsi yang didominasi oleh kalangan populasi usia muda Indonesia sangat berperan penting dalam menjaga ketangguhan kinerja perekonomian Indonesia di tengah melemahnya ekonomi global pada tahun 2009. Sebagai hasil dari pertumbuhan berkelanjutan yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berada pada posisi yang menguntungkan sehubungan dengan perubahan besar yang terjadi di sektor riil dimana jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, demikian pula dengan jumlah masyarakat yang memiliki rekening bank. Selain memberikan kontribusi signifikan pada penghimpunan dana pihak ketiga maupun transaksi-transaksi yang menghasilkan *fee based income*, segmen nasabah konsumen individu juga memberi peluang yang menarik bagi diversifikasi penyaluran pinjaman berbasis agunan, yang sering kali lebih aman di saat kondisi perekonomian cenderung melemah.

BCA telah membangun fondasi perbankan ritel yang kokoh melalui pengembangan strategi yang fokus pada pendalaman hubungan dengan nasabah individu di seluruh segmen konsumen. Selama tiga tahun terakhir, BCA telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk memposisikan Bank secara strategis dalam mencapai pertumbuhan optimal di segmen nasabah konsumen individu. Unit Bisnis Perbankan Individual bertanggung jawab terhadap pengembangan kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), kartu kredit, Wealth Management serta Bancassurance. Dengan menangani seluruh produk ini dalam satu atap, BCA dapat meningkatkan penjualan silang (*cross selling*) melalui jaringan distribusi sekaligus memungkinkan Bank secara konsisten untuk memperbaiki kualitas produk dan layanan.

Di tengah rendahnya tingkat suku bunga dan kuatnya pola konsumsi, kredit konsumen BCA tumbuh 31,9% menjadi sebesar Rp 27,7 triliun di tahun 2009. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit telah memungkinkan BCA untuk mempertahankan kualitas kredit di tengah kondisi ekonomi yang mengalami tekanan. Hal ini terlihat dari rasio kredit bermasalah (NPL) Perbankan Individual yang cukup rendah tanpa adanya peningkatan yang berarti. Kredit konsumen mewakili 22,4% dari total portofolio kredit BCA pada akhir tahun 2009, naik dari 18,6% pada tahun 2008. Di akhir tahun 2009, rasio NPL untuk KPR dan KKB masing-masing adalah 1,2% dan 0,3%.

KPR BCA: Tumbuh Bersama Kebutuhan Nasabah

BCA merupakan salah satu penyedia kredit perumahan terkemuka di Indonesia. Memasuki tahun 2009 total portofolio KPR BCA tercatat sebesar Rp 10,3 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan di permulaan tahun 2009, namun kembali tumbuh sejak triwulan kedua seiring dengan kebijakan BCA yang menurunkan tingkat suku bunga kredit sesuai dengan penurunan suku bunga di pasar. Secara keseluruhan KPR tumbuh 27,5% mencapai Rp 13,1 triliun pada akhir tahun 2009. Jumlah nasabah KPR meningkat 18,8% menjadi 41.034 nasabah. Pada akhir tahun 2009, pangsa pasar KPR BCA adalah 10,6%, dan berkontribusi sebesar 47,4% dari total kredit konsumen.

Sepanjang tahun 2009, BCA secara proaktif menjaga tingkat suku bunga kredit yang kompetitif. BCA merupakan salah satu bank pertama yang menawarkan



suku bunga KPR di bawah 10% di tahun 2009. Secara umum permintaan kredit pemilikan rumah akan meningkat secara signifikan pada saat suku bunga yang ditawarkan berada pada level di bawah 10%.

Selain memberi kontribusi yang penting terhadap pendapatan bunga, bisnis KPR juga memberi peluang strategis untuk membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah. Melalui aktivitas pemberian kredit pemilikan rumah, BCA dapat memelihara loyalitas nasabah dengan biaya relatif rendah. Dengan adanya persyaratan agunan serta tingginya uang muka menyebabkan eksposur risiko menjadi relatif lebih rendah. Selain itu, dengan diperolehnya informasi nasabah yang cukup lengkap pada saat memproses aplikasi KPR, BCA dapat memperdalam hubungan dengan para nasabah sehingga dapat lebih memahami kebutuhannya. Dengan demikian, penjualan produk KPR merupakan titik awal yang strategis bagi BCA untuk melakukan penjualan silang (*cross selling*) di masa depan.

Dalam mengembangkan bisnis KPR, BCA akan terus menawarkan produk-produk kompetitif yang secara konsisten memberikan nilai tambah bagi para nasabah. Walaupun sebagian besar penyaluran KPR masih dilakukan melalui jaringan kantor cabang, namun penyaluran KPR melalui pengembang dan agen properti menunjukkan porsi yang terus meningkat. Selain terus mengoptimalkan penjualan produk KPR melalui cabang, BCA terus memperluas kerja sama dengan para pengembang dan agen properti. Pada tahun 2009 BCA telah menjalin kerja sama dengan 293 pengembang dan 309 agen properti untuk memasarkan produk KPR.

Pembiayaan Kendaraan: Komitmen Terhadap Kualitas

Kredit kendaraan bermotor dipasarkan melalui BCA Finance, anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh BCA yang beroperasi di bawah pengelolaan Unit Bisnis Perbankan Individual. Pinjaman yang disalurkan melalui BCA Finance dilakukan melalui skema *joint financing* dimana porsi pembiayaan BCA adalah sebesar 95% dari jumlah pinjaman yang diberikan. Meskipun krisis ekonomi global telah berdampak signifikan terhadap pasar penjualan mobil baru yang mengalami penurunan sebesar 20%, namun secara keseluruhan penyaluran kredit melalui BCA Finance terus menunjukkan pertumbuhan. Portofolio pembiayaan yang dikelola BCA Finance meningkat 31,4% mencapai Rp 12,7 triliun di tahun 2009. Pencapaian ini akan lebih signifikan lagi apabila memperhitungkan laju cicilan oleh nasabah. Dengan rata-rata jangka waktu pembiayaan selama 31,5 bulan, jumlah fasilitas baru yang disalurkan oleh BCA Finance di tahun 2009 adalah sebesar Rp 11,4 triliun, naik 24% dibandingkan tahun 2008. BCA Finance senantiasa menekankan prinsip kehati-hatian melalui persyaratan agunan dan uang muka yang lebih tinggi,

sehingga tingkat NPL dapat dijaga pada level yang relatif rendah.

BCA Finance menggunakan strategi intensifikasi maupun ekstensifikasi dalam upaya penjualan dan pemasaran di sepanjang tahun 2009, termasuk melalui upaya peningkatan penjualan langsung kepada nasabah. Unit Bisnis Perbankan Individual mendukung upaya-upaya pemasaran BCA Finance dengan memperkenalkan promosi *product bundling* yang lebih efektif, dengan fokus pada penjualan silang (*cross selling*) kepada nasabah KPR BCA. Bersamaan dengan hal tersebut, BCA Finance terus memperluas kerjasama dengan para *dealer* dan *showroom* mobil.

Kunci sukses BCA Finance terletak pada komitmen dalam menawarkan harga yang kompetitif dan pada keunggulan dalam layanan operasional. BCA Finance senantiasa menawarkan suku bunga yang kompetitif untuk seluruh produk pembiayaan mobil. Loyalitas nasabah BCA Finance dapat dilihat dari peningkatan jumlah *repeat order*. Fitur-fitur bernilai tambah yang diperkenalkan selama tahun 2009 antara lain adalah *product bundling* dengan FlazzCard, yang diberikan untuk setiap pinjaman baru.

Untuk menjamin kualitas layanan, BCA Finance telah meninjau ulang proses-proses inti dalam aspek operasional guna meningkatkan kecepatan, efisiensi dan efektivitas pemrosesan kredit. Sepanjang tahun 2009, BCA Finance melakukan analisis dan evaluasi kinerja karyawan termasuk penilaian kompetensi. Berbagai program pelatihan baru diluncurkan untuk meningkatkan kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Seluruh inisiatif ini telah disatukan ke dalam Sistem Manajemen Berbasis Kinerja yang mulai diterapkan oleh BCA Finance pada tahun 2009.



Bisnis Kartu Kredit

Industri kartu kredit di Indonesia tumbuh 12% pada tahun 2009, dengan kompetisi yang semakin ketat di antara institusi keuangan penerbit kartu kredit. BCA terus mempertahankan posisinya sebagai pemain terkemuka di industri kartu kredit Indonesia. BCA menawarkan beragam produk kartu kredit yang dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup tertentu bagi setiap segmen pasar yang berbeda, baik bagi pemegang kartu individu maupun perusahaan. Ragam jenis kartu kredit BCA, selain BCA Visa dan BCA MasterCard juga meliputi kartu kredit Platinum untuk segmen premium dengan batas kredit yang lebih tinggi. Selain itu, Bank juga menerbitkan produk kartu kreditnya sendiri yaitu BCA Card. Jumlah kartu kredit BCA yang aktif mengalami pertumbuhan sebesar 8,5% mencapai 2 juta kartu pada tahun 2009. Saldo tagihan kartu kredit di tahun 2009 meningkat 45,0% menjadi Rp 4,1 triliun. Pendapatan kotor dari bisnis kartu kredit BCA pada tahun 2009 tumbuh 79% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebesar 48% dari pendapatan tersebut merupakan pendapatan bunga, sementara 26% diperoleh dari *interchange fee* dan *merchant discount rates*.

BCA memberi nilai tambah pada produk-produk kartu kreditnya dengan menawarkan fitur-fitur yang menarik bagi pemegang kartu, termasuk *reward program* yang diperbaharui secara rutin, penawaran khusus, serta paket promosi bersama dengan mitra-mitra strategis diantaranya gerai ritel, restoran maupun pusat-pusat hiburan ternama. Selain itu, BCA kini telah mengintegrasikan layanan pembayaran mikro ke dalam kartu kredit untuk memudahkan pembayaran non tunai berjumlah kecil pada titik-titik penjualan dengan tingkat kenyamanan transaksi yang lebih tinggi.

BCA bekerja sama dengan mitra-mitra strategis dalam menerbitkan kartu khusus untuk digunakan di *outlet-outlet* yang dimiliki oleh mereka. Salah satunya adalah kartu BCA Finance yang diberikan sebagai nilai tambah kepada nasabah BCA Finance. Di tahun 2009, BCA juga melanjutkan kerja samanya dengan Carrefour dalam rangka mempromosikan kartu kredit Carrefour BCA. Fitur yang ditawarkan termasuk diskon 10% hingga 15% untuk produk-produk yang dipromosikan, serta tambahan diskon reguler sekitar 5% untuk produk berlabel Carrefour. Sejak diluncurkan pada tahun 2008, kartu kredit Carrefour BCA telah dipromosikan di kota-kota besar di seluruh Indonesia, sehingga jumlah kartu aktif meningkat 35,6% selama tahun 2009 dan mencapai sekitar 300.000 kartu. Volume penggunaan kartu Carrefour BCA meningkat sebesar 267,7% pada tahun 2009. Kesuksesan dari promosi kartu kredit BCA Carrefour adalah berkat penjualan silang (*cross selling*) atas layanan-layanan perbankan yang diberikan secara efektif oleh BCA.

Wealth Management

Kunci sukses di bisnis Wealth Management bergantung pada kemampuan untuk melakukan inovasi dan memahami kebutuhan nasabah. Di tahun 2009, Unit Bisnis Perbankan Individual meluncurkan layanan Solitaire yang ditujukan bagi segmen eksklusif yaitu nasabah BCA segmen *high networth individuals*. Solitaire bertujuan melakukan penanganan hubungan dengan nasabah secara menyeluruh guna memenuhi kebutuhan produk Wealth Management. Tim Solitaire terdiri para *financial adviser* yang terlatih secara khusus untuk menangani berbagai transaksi perbankan maupun non-perbankan guna mengelola portofolio keuangan nasabah secara komprehensif. Salah satu kunci keunggulan Wealth Management BCA adalah kemampuan memilih mitra yang tepat guna mendukung berbagai jenis produk dan jasa keuangan yang dipromosikan. Kualitas produk, reputasi dan kekuatan finansial adalah pertimbangan utama BCA dalam menentukan mitra-mitra untuk bekerja sama. BCA juga telah memasuki pasar Bancassurance, sehingga semakin melengkapi portofolio produk dan layanan keuangan yang ditawarkan.

Strategi ke Depan

Terintegrasinya penanganan berbagai produk konsumen ke dalam Unit Bisnis Perbankan Individual telah menghasilkan peningkatan efisiensi termasuk dalam penyederhanaan proses persetujuan dan peningkatan komunikasi antar lini bisnis. Unit Bisnis Perbankan Individual bertujuan untuk memastikan bahwa fokus BCA secara keseluruhan terhadap peningkatan hubungan dengan nasabah akan menjadi strategi yang mendasari pertumbuhan di segmen konsumen. Kemudahan dan kepuasan nasabah akan terus ditingkatkan melalui penerapan *customer relationship management* (CRM) yang efektif di seluruh lini bisnis.



Menyusul keberhasilan BCA Finance, BCA akan mengeksplorasi peluang untuk memasuki pasar pembiayaan sepeda motor pada tahun 2010. Pada tahap awal, BCA akan menggunakan skema *joint financing* untuk memasuki pasar pembiayaan sepeda motor tersebut. BCA akan fokus melakukan *market research*, pengembangan infrastruktur, termasuk pelatihan staf serta pengembangan kapasitas *underwriting* dan pengembangan hubungan kerja sama dengan para dealer.

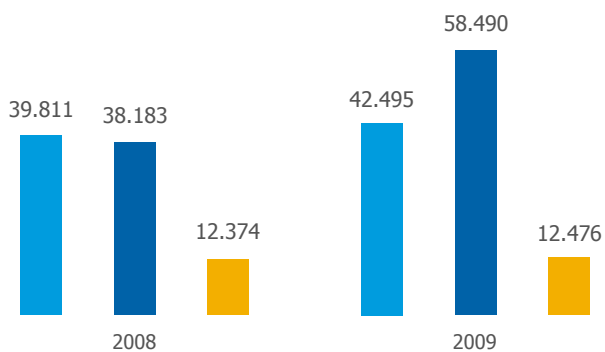
Unit Bisnis Perbankan Individual akan meningkatkan koordinasi dalam melakukan promosi bersama melalui strategi *product bundling* yang dapat dipasarkan secara lebih efektif kepada segmen konsumen. Unit Bisnis Perbankan Individual telah melakukan analisis terhadap perilaku nasabah untuk lebih memahami dan mengantisipasi kebutuhan nasabah. Dengan memperkuat hubungan dengan nasabah, Unit Bisnis Perbankan Individual akan menciptakan peluang-peluang untuk melakukan penjualan silang (*cross selling*) produk dan layanan BCA, guna meningkatkan *fee based income* maupun pertumbuhan kredit.



Tresuri dan Perbankan Internasional

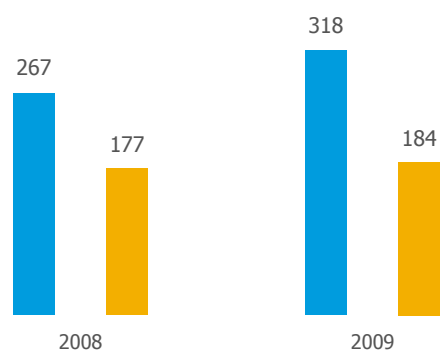
Surat-surat Berharga
(dalam miliar Rupiah)

- Obligasi Pemerintah
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- Obligasi Korporasi dan Lainnya



Pendapatan Bisnis Perbankan Internasional
(dalam miliar Rupiah)

- Pendapatan *Trade Finance*
- Pendapatan *Remittance*





Untuk tahun yang akan datang, aktivitas Tresuri akan lebih ditekankan pada upaya untuk memaksimalkan imbal hasil dari aktiva produktif BCA

Perbankan Tresuri

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pada tahun 2009, Tresuri BCA mampu menjaga keseimbangan dalam mempertahankan likuiditas, mengelola aktiva dan pasiva, maupun mengoptimalkan profitabilitas. Pencapaian ini dimungkinkan karena dukungan kinerja perekonomian Indonesia yang relatif kuat.

Berbeda dengan perkiraan sebelumnya, ekonomi domestik selama tahun 2009 terus menunjukkan pertumbuhan, sebagian didukung oleh penurunan suku bunga. Pada bulan November 2008, suku bunga acuan Bank Indonesia yang berada pada posisi 9,5%, kemudian secara bertahap turun hingga ke posisi 6,5% pada bulan Agustus 2009 dan bertahan pada posisi tersebut di akhir tahun. Namun demikian, tingkat suku bunga tersebut masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat suku bunga negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa, mengingat negara-negara tersebut

menerapkan kebijakan moneter secara agresif untuk mendukung perkembangan ekonomi. Kombinasi antara suku bunga yang relatif tinggi dan kinerja ekonomi nasional yang stabil mampu menarik aliran modal (*capital inflows*) yang memberikan dampak positif terhadap menguatnya nilai tukar mata uang Rupiah.

Rendahnya tingkat suku bunga negara-negara lain seperti yang telah dibahas sebelumnya telah menjadi tantangan bagi Tresuri BCA dalam mengelola kelebihan likuiditas dalam mata uang USD. Di tengah terbatasnya sarana investasi berisiko rendah yang dapat memberikan tingkat pengembalian yang memadai, berbagai upaya telah dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi rekening nostro yang dimiliki oleh BCA. Pada paruh kedua tahun 2009, Tresuri berhasil mengalihkan sebagian portofolio investasinya ke surat hutang korporasi yang memiliki peringkat AAA untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih baik.



Di akhir tahun 2009, *secondary reserve* dalam mata uang Rupiah berada pada posisi Rp 62,3 triliun dan dalam mata uang USD tercatat sebesar USD 226,8 juta. Tresuri BCA memiliki peran penting dalam mempertahankan tingkat keuntungan dari dana yang diinvestasikan. Strategi untuk mengelola kelebihan likuiditas mata uang Rupiah diantaranya adalah dengan melakukan investasi secara optimal dalam obligasi pemerintah dengan tingkat suku bunga tetap maupun suku bunga mengambang serta memperhatikan jangka waktu dari obligasi pemerintah tersebut. Tresuri BCA menjalin kerjasama erat dengan unit Manajemen Risiko BCA untuk menentukan limit berbagai investasi yang dilakukan. Sepanjang tahun 2009 BCA dapat mempertahankan rata-rata biaya dana (*cost of funds*) sebesar 3,6% sedangkan margin bunga bersih (NIM) dipertahankan pada posisi 6,4%.

Kunci kekuatan Tresuri BCA di tahun 2009 terletak pada hubungan kerja sama yang erat dengan unit-unit bisnis lain yang mendukung penjualan produk dan layanan Tresuri kepada nasabah korporasi, komersial serta sektor UKM selain juga nasabah perorangan. Secara reguler, Tresuri memberikan informasi terkini mengenai nilai pasar mata uang asing yang dimanfaatkan oleh unit-unit bisnis untuk mempromosikan layanan jasa penukaran valuta asing.

Layanan tersebut terbukti sangat penting terutama pada triwulan pertama tahun 2009 disaat nilai tukar mata uang berfluktuasi dan menghasilkan *fee based income* yang signifikan bagi BCA.

Sesuai dengan arahan Bank Indonesia, Tresuri tidak berinvestasi pada produk-produk derivatif. Jatuhnya pasar atas produk-produk derivatif merupakan pusat dari krisis perekonomian global di tahun 2008. Dengan menghindari kerugian seperti yang dialami oleh banyak institusi keuangan di dunia, BCA mampu mempertahankan posisi keuangannya yang kuat sepanjang tahun 2009. Kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan perbankan memungkinkan BCA untuk tetap fokus menjaga profitabilitas jangka panjang dan pada saat yang sama juga menjaga likuiditas yang memadai, mempertahankan struktur permodalan yang kuat dan kualitas aktiva yang baik.

BCA kembali ditunjuk menjadi agen penjualan utama bagi Surat Utang Negara (SUN) dan agen penjualan bagi Obligasi Retail Indonesia (ORI). Sepanjang tahun 2009 BCA berhasil menjual ORI-006 sejumlah Rp 645,3 miliar di pasar perdana. BCA secara berkala menyediakan penawaran harga untuk semua seri ORI di pasar sekunder. Di tahun 2009, BCA mendapat penghargaan sebagai Agen Penjual Terbaik untuk seri ORI006 dari Kementerian Keuangan Indonesia.

Sebagai bentuk apresiasi atas meningkatnya kualitas layanan, BCA menerima penghargaan dari majalah Finance Asia sebagai *Best Foreign Exchange Bank* di tahun 2009. Selain itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh majalah AsiaMoney, BCA tercatat sebagai *Best Domestic Provider of Foreign Exchange Services* di Indonesia.

Divisi Tresuri akan terus mengupayakan peningkatan kualitas produk dan layanannya di tahun 2010 dan terus mengambil pendekatan proaktif dalam mengelola aktiva dan pasiva serta posisi likuiditas BCA.

Perbankan Internasional

BCA mencatat kinerja yang cukup baik dalam aktivitas perdagangan internasional (*trade finance*) untuk melayani aktivitas ekspor dan impor selama tahun 2009, di tengah melemahnya perekonomian global. Pendapatan dari aktivitas *trade finance* BCA meningkat sebesar 19,1% dari Rp 267 miliar di tahun 2008 menjadi Rp 318 miliar di tahun 2009. Produk-produk *trade finance* yang diberikan mencakup penerbitan *Letter of Credit* (L/C) serta fasilitas *Pre- dan Post-Shipment Financing* dalam bentuk negosiasi atau diskonto tagihan wesel L/C ekspor.

Di tahun 2009, BCA terpilih menjadi bank komersial pertama di Indonesia yang menjadi anggota langsung dari sistem kliring mata uang Renminbi yang diselenggarakan oleh Otoritas Keuangan Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority atau HKMA). Sejalan dengan komitmen BCA untuk melayani kebutuhan para nasabahnya, BCA telah dapat memfasilitasi transaksi pembayaran dengan mata uang Renminbi. Lebih lanjut, BCA terus menyelenggarakan USD Direct Settlement di pasar lokal, dimana saat ini BCA bekerja sama dengan bank-bank peserta untuk menyediakan layanan pembayaran USD baik secara bilateral maupun multilateral.

BCA mempertahankan kinerjanya yang baik dalam jasa pengiriman uang terutama didukung oleh pertumbuhan transaksi kiriman uang ke Indonesia dari luar negeri (*inward remittance*). Untuk memfasilitasi transaksi ini BCA menggunakan sistem berbasis internet yang diberi nama FIRE (Financial Institution Remittance). Sistem ini memberikan layanan transfer secara instan dari bank-bank koresponden dan mitra institusi keuangan lainnya dengan biaya yang cukup efisien. BCA melayani jasa kiriman uang ke Indonesia dari beberapa pasar utama seperti – negara-negara di Kawasan Teluk, Hong Kong dan Malaysia – dengan peningkatan tenaga-tenaga pemasaran dan memperluas jaringan kantor layanan di luar negeri. Saat ini total bank koresponden BCA berjumlah 1.870 bank di 106 negara, termasuk 194 mitra yang menggunakan sistem FIRE di negara-


negara Timur Tengah dan Asia Pasifik. Di tahun 2009, BCA telah menambah satu cabang BCA Finance Ltd., yang merupakan anak perusahaan BCA yang berada di Hong Kong, menjadi 4 cabang. Di tahun 2010 BCA bermaksud untuk mendirikan anak perusahaan sejenis di Malaysia.

BCA menyediakan layanan pengiriman uang ke luar negeri yang mencakup 13 mata uang asing utama di dunia. Untuk pengiriman uang ke Cina, BCA menawarkan China Today (kirim USD hari ini, terima hari ini) dan Yuan Remittance (terima Yuan dalam nilai penuh pada hari yang sama). BCA juga memiliki layanan RMB Trade Settlement yang memfasilitasi nasabah untuk melakukan transaksi pembayaran perdagangan dalam mata uang Yuan.

Pertumbuhan Di Masa Depan

Di masa yang akan datang, Tresuri akan terus mendukung strategi BCA untuk menjaga posisi likuiditas yang memadai, struktur permodalan yang kuat dan aktiva yang berkualitas. Untuk tahun yang akan datang, aktivitas Tresuri lebih ditekankan dalam upaya untuk memaksimalkan imbal hasil dari aktiva produktif yang dimilikinya. Sebagai upaya untuk meningkatnya efisiensi dari rekening nostro yang ada, BCA akan melakukan pendekatan proaktif dalam melakukan investasi di pasar obligasi dalam mata uang USD. Dengan kondisi ekonomi yang terus menunjukkan perbaikan, Tresuri BCA juga telah merencanakan pendekatan yang lebih agresif dalam pengembangan dan pemasaran atas produk-produk surat berharga Rupiah berpendapatan tetap.

Bersamaan dengan upaya untuk mempertahankan posisinya sebagai bank yang terdepan dalam penyediaan kliring di Indonesia, BCA akan terus menambah jumlah jaringan bank koresponden dan meningkatkan pemasaran layanan jasa pengiriman uang dengan membuka beberapa anak perusahaan di luar negeri. Selain itu, BCA akan terus menambah tenaga pemasaran di beberapa kawasan yang strategis dalam bisnis pengiriman uang.



BCA senantiasa
membangun dan
mengembangkan
budaya pelayanan yang
kuat sebagai kunci
untuk mempertahankan
loyalitas nasabah

Pendukung Bisnis





Manajemen Risiko

Manajemen Risiko BCA bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengukur dan memitigasi risiko Bank secara keseluruhan melalui penerapan kebijakan manajemen risiko secara proaktif dan terintegrasi. Struktur Manajemen Risiko BCA memberikan sistem pengendalian dan pengawasan yang solid untuk mengatasi risiko-risiko dalam bisnis perbankan. Secara teratur Manajemen Risiko BCA memperbaiki kebijakan, menyempurnakan prosedur, dan menyesuaikan batas toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aktiva dengan profitabilitas usaha, serta menjaga agar manajemen risiko yang diterapkan sejalan dengan perubahan ekonomi makro yang terjadi. Perhatian BCA yang terpusat pada pengelolaan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko

pasar guna mengantisipasi risiko yang dapat terjadi, memungkinkan BCA untuk mempersiapkan diri dalam mengatasi berbagai masalah jika hal tersebut terjadi.

Gugus Tugas Penyelesaian NPL

Meskipun pengelolaan kredit bermasalah (NPL) disesuaikan dengan karakteristik setiap segmen kredit, filosofi yang menjadi panduan strategi pengelolaan risiko tetap konsisten; yaitu mempertahankan kebijakan yang proaktif dan bertindak secara cepat untuk mengatasi masalah yang terjadi. Pengelolaan NPL secara keseluruhan ditangani oleh Central Work Out Group yang dibantu oleh beberapa tim di kantor wilayah untuk menangani kredit komersial dan UKM yang berada di cabang. Tim khusus telah dibentuk

BCA akan terus memantau perkembangan ekonomi dan industri perbankan yang tengah berlangsung, dan akan secara teratur meninjau dan merevisi kebijakan yang diterapkan sesuai dengan keperluan

untuk menangani kredit bermasalah di segmen korporasi secara individu untuk setiap debitur. Di segmen konsumen, kredit bermasalah yang akan diselesaikan ditangani oleh unit-unit khusus dengan pengawasan oleh Central Work Out Group.

Dalam semua kasus, seluruh gugus tugas penyelesaian NPL menjaga jalur komunikasi terbuka untuk memastikan perhatian yang cepat dan efisien terhadap penyelesaian kredit-kredit bermasalah. Berdasarkan aturan, suatu kredit masih belum dianggap bermasalah apabila tunggakan belum melewati 90 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran. Namun, sebelum kredit tersebut dikategorikan sebagai pinjaman bermasalah, BCA terus memantau dan bekerja sama dengan debitur untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan menentukan tindakan yang tepat, baik dengan merestrukturisasi pinjaman ataupun mengidentifikasi alternatif sumber-sumber pembayaran lainnya. Sebagai hasil dari langkah-langkah tersebut, banyak kredit yang diperkirakan

sebelumnya akan bermasalah dapat diselesaikan sebelum kredit-kredit tersebut berada pada kategori kredit bermasalah. Dengan demikian, rasio kredit bermasalah (NPL) yang mencapai puncaknya di level 1,9% pada triwulan kedua 2009, berkurang menjadi 0,7% pada akhir tahun 2009.

Kebijakan Manajemen Risiko

Sepanjang 2009, BCA mengevaluasi risiko-risiko yang terkait dengan prosedur pemberian pinjaman di berbagai sektor dalam konteks penurunan kondisi ekonomi. Pelajaran yang diperoleh dari pengalaman ini akan dikaji lebih lanjut dan digunakan untuk lebih meningkatkan teknik-teknik manajemen risiko di masa depan, dan juga untuk menyesuaikan batasan toleransi risiko dalam perubahan kondisi usaha. Karena itu, BCA akan menjalankan proyek percontohan di beberapa cabang untuk menerapkan proses penilaian kredit yang lebih agresif bagi kredit komersial kecil dan kredit UKM. Sistem penilaian kredit alternatif ini lebih menekankan pada arus kas debitur dibandingkan

nilai jaminan. Pada tahap awal, pinjaman baru yang dibukukan menggunakan pendekatan ini tidak boleh melebihi 20% dari total portofolio kredit sebuah kantor cabang dan secara individual, nilai kredit tidak boleh melebihi Rp 10 miliar. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pemasaran di segmen UKM.

Struktur Manajemen Risiko

Struktur Manajemen Risiko BCA didefinisikan sebagai kerangka kerja manajemen risiko terintegrasi, yang menentukan kebijakan dan tanggung jawab atas penerapan manajemen risiko secara efektif di seluruh tingkatan operasional Bank. Direksi pada akhirnya menjadi penanggung jawab tertinggi dari seluruh hasil yang berhubungan dengan identifikasi, pengukuran dan mitigasi risiko Bank. Direksi telah menunjuk Direktur Manajemen Risiko untuk melakukan pengawasan sehari-hari terhadap masing-masing unit bisnis agar sesuai dengan kebijakan risiko yang ada. Direktur Manajemen Risiko menjalankan tanggung jawabnya melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yang beroperasi secara independen dari unit-unit bisnis Bank maupun Divisi Audit Internal. Direksi juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko, Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), Komite Kebijakan Kredit, dan Komite Kredit. Masing-masing komite bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Selain itu terdapat pula Komite Pemantau Risiko yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite-komite ini memainkan peran integral dalam mempertahankan *self-monitoring* dan *self-assessment system*.

Kategori Risiko

Sesuai dengan pedoman Bank Indonesia, BCA mengkategorikan risiko ke dalam 8 (delapan) kategori, yaitu risiko kredit, operasional, pasar, likuiditas, strategis, reputasi, hukum dan kepatuhan.

Pemantauan kategori risiko saat ini menggunakan model *Enterprise Wide* yang memungkinkan penerapan strategi "*overall one view of risk*". Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) menganalisa data yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Selanjutnya, hasil analisa tersebut digunakan sebagai pertimbangan untuk mengubah kebijakan-kebijakan dalam merespon perubahan kondisi ekonomi maupun peraturan yang berlaku. Sepanjang tahun 2009, BCA melakukan *stress test* terhadap kebijakan kredit dan likuiditas untuk memastikan kelangsungan portofolio kredit.

Risiko kredit dikelola secara menyeluruh melalui penetapan batasan-batasan kredit untuk setiap segmen pasar dan untuk penetapan batasan kredit secara individu maupun antar sektor industri guna memastikan portofolio kredit terdiversifikasi dengan baik. Selain itu Divisi Analisa Risiko Kredit yang independen bertugas untuk menilai risiko secara kasus per kasus atas kredit dalam jumlah besar dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Risiko. Profil risiko kredit UKM dan konsumen dikelola menggunakan program-program produk kredit dan sistem penilaian risiko terpusat, yang dimonitor berdasarkan basis portofolio. *Business Credit Origination System* memberikan informasi secara cepat dan memiliki kapasitas untuk mengetahui tahapan pengolahan kredit dari awal hingga akhir.

Operasional dan pemeliharaan infrastruktur transaksi perbankan berskala besar menyebabkan timbulnya **risiko operasional** yang cukup signifikan. Sebuah sistem *Operational Risk Management Information System (ORMIS)* berbasis web yang dilengkapi dengan aplikasi *Key Risk Indicator (KRI)* menyediakan deteksi dini terhadap risiko operasional yang mungkin timbul. Sistem ORMIS ini meliputi *Risk Control Self Assessment (RCSA)* dan *Loss Event Database (LED)*, yang memberikan informasi berguna untuk meminimalkan risiko operasional.

Untuk meningkatkan keamanan bertransaksi melalui ATM dan melindungi data nasabah, BCA telah memasang perangkat *anti-skimming* dan penutup *pin-pad* pada seluruh unit ATM. Selanjutnya, BCA akan mengganti kartu kredit maupun kartu ATM yang masih menggunakan teknologi strip magnetik dengan kartu yang lebih aman dengan menggunakan teknologi *chip EMV*.

Risiko pasar meliputi eksposur terhadap fluktuasi tingkat suku bunga dan nilai tukar valuta asing serta pergerakan pada variabel-variabel penting lainnya. Untuk menentukan dan mengelola eksposur risiko portofolio penghimpunan dana dan penyaluran kredit, BCA menggunakan metode Value at Risk terkait dengan risiko fluktuasi tingkat suku bunga maupun nilai tukar mata uang asing yang berada dalam portofolio perdagangan. Untuk mengelola risiko suku bunga secara keseluruhan, BCA menggunakan pendekatan *fixed rate limit* berdasarkan tenor dan *repricing gap profile*.

Risiko likuiditas muncul dari kemampuan Bank untuk menyeimbangkan antara dana masuk dan keluar. Untuk memenuhi keseimbangan tersebut, Bank menggunakan analisa arus kas secara terinci baik Rupiah maupun Dollar AS, dan menggunakan alat analisis skenario untuk menetapkan margin likuiditas yang sesuai. Langkah-langkah yang proaktif senantiasa diambil untuk menjamin bahwa dana inti dapat dipertahankan pada tingkat yang konsisten sesuai dengan kebijakan internal BCA maupun kebijakan Bank Indonesia.

Risiko strategis berasal dari kesenjangan yang mungkin timbul dalam proses mengantisipasi perubahan eksternal. Untuk mengatasi risiko tersebut, BCA – terutama melalui Direksi dan Dewan Komisaris –

menetapkan dan secara berkala menyesuaikan strategi-strategi jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Proses perencanaan strategis Bank dilakukan dengan memanfaatkan sistem anggaran dan perangkat model keuangan terintegrasi, yang membantu dalam proses identifikasi, pengukuran dan pengurangan potensi risiko.

Risiko reputasi berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan di antara para pemangku kepentingan. Bank secara proaktif mengelola sistem komunikasinya baik secara internal melalui *interoffice channels* maupun secara eksternal melalui unit Hubungan Masyarakat dan call center Halo BCA. Dengan demikian, BCA mampu memonitor persepsi para pemangku kepentingan dan secara profesional mengelola semua keluhan dengan efektif sehingga membatasi potensi timbulnya risiko reputasi.

Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan (SKHK) bertanggung jawab untuk memantau semua hal yang terkait dengan risiko hukum dan kepatuhan. **Risiko Hukum** terkait dengan sifat kontraktual produk dan jasa perbankan yang ditawarkan oleh BCA. Oleh karena itu, SKHK bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memantau standarisasi dokumen-dokumen hukum untuk semua aktivitas bisnis perbankan, termasuk yang diperlukan untuk perjanjian kredit dan produk lainnya serta kontrak-kontrak yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan *outsourcing*.

SKHK juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa koordinasi internal yang sistematis berjalan secara efektif sehingga dapat memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh ketidakpatuhan terhadap pedoman hukum yang berlaku. BCA beroperasi sesuai dengan kerangka peraturan yang ditetapkan oleh berbagai

pihak dalam pemerintahan. Selain itu BCA juga mengelola serangkaian standar maupun pedoman internal yang menjamin profesionalisme dan integritas operasional Bank. **Risiko Kepatuhan** muncul akibat adanya potensi penyimpangan dari kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. SKHK secara berkala melakukan kajian ulang terhadap kepatuhan di seluruh proses organisasi Bank. Kaji ulang secara teratur tersebut dilengkapi dengan tinjauan kepatuhan secara khusus, yang dilakukan sebelum peluncuran produk baru. Kaji ulang khusus juga dilakukan sebagai tanggapan terhadap transaksi yang mencurigakan atau aktivitas di luar kebiasaan.

BCA berkomitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Anti Pencucian Uang Indonesia. Dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia, BCA telah menerapkan prinsip-prinsip Know Your Customer (KYC). Selain mengatasi risiko yang terkait dengan adanya potensi penggunaan rekening nasabah BCA oleh pihak eksternal untuk transaksi kriminal, pelaksanaan KYC juga memfasilitasi kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Manajemen Risiko Konsolidasi bagi Bank-Bank yang memiliki Kepemilikan Pengendali pada Anak Perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, manajemen risiko BCA dipantau secara independen maupun secara konsolidasi.

Rencana Kelangsungan Bisnis

Selama tahun 2009, Manajemen Risiko BCA bekerja sama dengan unit Teknologi Informasi dan Strategi Operasi untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap Rencana Kelangsungan Bisnis (*Business Continuity Plan* atau BCP) dan terhadap Manajemen Kelangsungan Bisnis (*Business Continuity Management* atau BCM) yang telah dimiliki oleh Bank. Sistem-sistem ini membentuk suatu bagian integral dari Manajemen Risiko Operasional Bank secara keseluruhan dan secara efektif menentukan langkah-langkah yang perlu diambil jika terjadi bencana atau terdapat faktor-faktor eksternal lainnya di luar kendali Bank. Bencana gempa bumi yang terjadi di Padang, Sumatera Barat, pada tanggal 30 September menciptakan peluang untuk menerapkan rencana tersebut secara nyata. BCA memiliki satu kantor cabang di Padang, yang mengalami kerusakan struktural cukup parah dan terputus dari jaringan nasional BCA. Melalui penerapan BCP dan BCM, Bank mampu menghidupkan kembali operasional bisnis dengan Cabang Padang secara *on line* dalam waktu 2 hari. Penyesuaian-penyesuaian penting yang dibuat pada BCP dan BCM sebagai hasil dari kajian yang dilakukan adalah meliputi pemberian kewenangan yang lebih besar kepada manajer kantor cabang untuk mengambil keputusan saat terjadi bencana di tengah sulitnya berkomunikasi.

Implementasi Basel II

BCA telah sepenuhnya siap untuk melaksanakan persyaratan Basel II Accord pada tahun 2010. BCA telah menerapkan sistem pelaporan bulanan bagi bank umum (LBU) seperti yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia dalam persiapan untuk memenuhi Basel II.

Pada tahun 2010, BCA akan mulai menerapkan perhitungan biaya modal untuk risiko operasional yang disyaratkan untuk memenuhi Basel II. BCA memperkirakan hal ini dapat sepenuhnya dilaksanakan pada tahun 2011. Menggunakan metodologi Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach* atau BIA), perhitungan biaya modal pada risiko operasional diperkirakan akan mengurangi rasio kecukupan modal (CAR) BCA sebesar 1% - 3%.

Selain BIA, BCA juga mempertimbangkan penggunaan metodologi Pendekatan Pengukuran Tingkat Atas (*Advanced Measurement Approach* atau AMA), yang diyakini merupakan pendekatan yang lebih baik bagi pengelolaan risiko operasional. Penggunaan AMA ini juga dapat menyebabkan biaya modal menjadi lebih rendah. Manajemen Risiko BCA akan melanjutkan pengembangan *Operational Risk Management Information System* (ORMIS) dalam rangka untuk memfasilitasi pelaksanaan AMA.

Melangkah ke Depan

Seluruh kegiatan manajemen risiko akan terus dipantau secara ketat oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk memastikan kepatuhan pada prinsip kehati-hatian perbankan maupun peraturan yang berlaku, sebagai bagian dari komitmen terhadap Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) dan standar-standar untuk praktik terbaik (*best practice*) yang diakui secara internasional. Pada tahun 2010, BCA akan terus melanjutkan penerapan Basel II sesuai dengan waktu dan arah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Manajemen Risiko BCA akan menerapkan strategi secara proaktif untuk mengelola kredit, likuiditas dan risiko pasar, dalam rangka mengantisipasi kemungkinan peningkatan NPL, pengetatan likuiditas di industri perbankan dan fluktuasi dalam nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga. BCA akan terus memantau perkembangan ekonomi dan industri perbankan yang tengah berlangsung, dan akan secara teratur meninjau dan merevisi kebijakan yang ada sesuai dengan keperluan.



Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan dari pengembangan sumber daya manusia BCA adalah untuk menciptakan karyawan berkualitas di seluruh operasi bisnis dengan menanamkan budaya kerja berbasis kinerja yang menekankan pada aspek kerja sama, integritas dan kebanggaan terhadap perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut terkait erat dengan visi dan misi serta tata nilai Perusahaan. BCA menyadari bahwa kepuasan karyawan yang optimal sangat penting dalam meraih tujuan-tujuan perusahaan. Untuk itu, BCA memberi perhatian yang cukup besar dalam upaya untuk mendapatkan calon karyawan terbaik maupun dalam mengasah karyawan potensial melalui berbagai program pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, BCA juga memberi peluang

kepada seluruh karyawan untuk terus berkembang dan memberi pengakuan serta penghargaan atas prestasi yang telah dicapai.

Upaya untuk mencapai kinerja terbaik diawali dengan proses perekrutan calon karyawan secara selektif. Setiap tahun BCA merekrut lulusan terbaik dan berdedikasi tinggi untuk ikut serta dalam program pengembangan karyawan. Selain turut serta dalam berbagai kegiatan *job expo* dan kegiatan lainnya secara nasional, BCA juga menyediakan sarana penerimaan karyawan melalui *website* yang dimilikinya, dimana calon karyawan dapat mengajukan lamaran kerja secara *on line*.

Upaya untuk mempertahankan standar tertinggi dalam pengembangan sumber daya manusia akan tetap menjadi unsur penting dalam mempertahankan keunggulan BCA di bidang perbankan transaksional

Pelatihan dan Pengembangan

Penyediaan program-program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif merupakan salah satu landasan utama untuk membentuk sikap profesionalisme, kepercayaan diri dan integritas yang berkelanjutan. BCA Learning Center menyelenggarakan kelas-kelas pelatihan di berbagai bidang yang relevan terhadap pengembangan keahlian yang dibutuhkan oleh masing-masing karyawan. Tujuan dari pelaksanaan program pelatihan oleh Bank tidak saja untuk mengasah keterampilan dan pengetahuan teknis, namun juga bertujuan untuk menanamkan sikap yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja secara kelompok dan menjaga standar mutu layanan Bank yang tinggi. Oleh karena itu, pelatihan seringkali diarahkan untuk menggali kompetensi-kompetensi baru dan untuk membekali karyawan dengan berbagai keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan umum sehingga terbentuk keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan tuntutan dunia kerja. Di tahun 2009

sejumlah 1.550 kelas pelatihan telah diselenggarakan dengan jumlah peserta sebanyak 39.000 orang. Total keseluruhan waktu pelatihan adalah 127.445 hari.

Beberapa program yang diselenggarakan oleh BCA Learning Center diantaranya adalah *Management Development Program* (MDP), *Officer Development Program* (ODP) dan *International Banking Officer Program* (IBOP). Program yang dimulai sejak pertengahan tahun 1990an tersebut, bertujuan untuk memastikan keseimbangan akan kebutuhan staf manajemen, baik yang bersifat generalis maupun spesialis, pada setiap unit bisnis Bank. *International Banking Officer Program* bertujuan untuk menghasilkan tenaga profesional spesialis dalam bidang perdagangan internasional untuk menangani perdagangan internasional dan sistem pembayaran di Divisi Perbankan Internasional. Di tahun 2009, sebagai upaya untuk memastikan program pelatihan manajemen sesuai dengan arah bisnis dan strategi

perusahaan, program pelatihan MDP disesuaikan menjadi *BCA Development Program (BDP)*. Program ini memiliki tujuan untuk menghasilkan tenaga profesional yang memiliki spesialisasi sesuai kebutuhan unit-unit kerja. Pada akhir program, peserta akan ditugaskan sebagai *account officer*, analis kredit, auditor internal, staf operasional atau posisi lain yang relevan di Divisi Perbankan Internasional. Pada akhir tahun 2009, sebanyak 4 program BDP telah dilaksanakan dengan total peserta mencapai 84 orang.

Untuk memastikan peluang pelatihan terbuka setiap saat bagi seluruh karyawan, BCA menggunakan e-Learning yaitu sebuah rangkaian modul program pelatihan berbasis web yang dapat diakses melalui portal intranet BCA. Sepanjang tahun 2009 BCA Learning Center telah menyelenggarakan 21 pelatihan e-Learning dan jumlah pelatihan tersebut akan terus ditambah di masa mendatang. Sebanyak 10.082 karyawan telah mengikuti pelatihan e-Learning sepanjang tahun 2009. Sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah peserta pelatihan, Bank telah menyiapkan fasilitas dan infrastruktur pendukung e-Learning di seluruh kantor cabang. Di akhir tahun 2009, lebih dari 200 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia telah memiliki fasilitas e-Learning dan angka ini akan bertambah lagi di tahun 2010.

Di tahun 2009, BCA terus mengadakan pelatihan khusus sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Sejumlah 421 orang karyawan berhasil mendapatkan sertifikasi manajemen risiko untuk berbagai tingkatan di tahun 2009. Secara keseluruhan total karyawan yang memenuhi persyaratan menjadi 1.591 orang dengan 3.289 sertifikasi. BCA berharap dapat sepenuhnya memenuhi persyaratan pelatihan manajemen risiko dari Bank Indonesia.

Mengidentifikasi dan Memotivasi Karyawan Potensial

Untuk memastikan pengembangan sumber daya manusia berjalan dengan baik, BCA mengelola karyawan melalui sistem panel manajemen. Sistem ini secara efektif menciptakan *talent pool* yang dapat diberdayakan untuk mengisi posisi lowong dalam organisasi demi menjamin kelancaran jalannya operasi Bank. Melalui mekanisme panel, BCA dapat mengidentifikasi dan menganalisa nilai lebih maupun kompetensi karyawan yang kemudian digunakan untuk menentukan Indikator Pencapaian Kinerja (IPK). IPK memberi panduan untuk pelaksanaan promosi dan penempatan, sekaligus berguna untuk memotivasi dan membangun kekompakan karyawan. BCA memiliki program pengembangan karir bagi karyawan pilihan yang teridentifikasi sebagai *'top performer'* dimana dalam program tersebut diberikan serangkaian pelatihan dan penugasan khusus.

Profil Karyawan Berdasarkan Tingkat Manajemen

	2009	2008
Staf	17.132	17.441
Manajer	2.985	2.814
Eksekutif (termasuk Direksi dan Dewan Komisaris)	56	48
Total	20.173	20.303

BCA juga menerapkan sistem apresiasi dan penghargaan yang jelas dengan menggunakan standar remunerasi sesuai dengan target yang ditetapkan sebagai upaya untuk memotivasi karyawan agar lebih meningkatkan kinerjanya. Pada tahun 2009, BCA melanjutkan pelaksanaan program SMART yang menggunakan tolok ukur industri dalam menilai kinerja cabang dalam tiga elemen utama yaitu: sumber daya manusia, proses dan infrastruktur. Salah satu hasil dari program SMART adalah teridentifikasinya karyawan-karyawan dengan kinerja tinggi yang akan mendapat apresiasi pada acara tahunan BCA Award.

Melangkah ke Depan

Upaya untuk mempertahankan standar tertinggi dalam pengembangan sumber daya manusia akan tetap menjadi unsur penting dalam mempertahankan keunggulan BCA di bidang perbankan transaksional. BCA berupaya untuk merekrut bakat-bakat terbaik di industri perbankan maupun yang berasal dari lulusan pendidikan tinggi. Kepemimpinan, komitmen dan integritas adalah nilai-nilai utama yang terus ditanamkan oleh BCA untuk memperkuat identitas dan budaya perusahaan. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, menyediakan program pelatihan terbaik dan memberikan peluang peningkatan karir serta apresiasi, BCA yakin dapat menjaga kepuasan dan loyalitas nasabah.

Profil Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	2009	2008
SD, SMP dan SMU	7.190	7.452
Diploma dan Sarjana	12.477	12.369
Pasca Sarjana	506	482
Total	20.173	20.303



Operasi dan Jaringan

Adalah prioritas utama kami untuk terus memperkuat posisi BCA sebagai salah satu bank transaksional pilihan nasabah mengingat sistem penyelesaian pembayaran merupakan *franchise value* BCA yang memiliki arti tinggi dan merupakan inti dari seluruh model bisnis BCA. Dengan memusatkan perhatian kepada kepuasan nasabah, BCA bertekad untuk memastikan kualitas dan standar layanan yang tinggi serta melanjutkan pengembangan jaringan cabang maupun *electronic delivery channel*.

Menanamkan Budaya Pelayanan

BCA senantiasa membangun dan mengembangkan budaya pelayanan yang kuat sebagai kunci untuk mempertahankan loyalitas nasabah. Di dalam naungan

satu program yang bernama SMART, sepanjang tahun 2009 berbagai kegiatan peningkatan layanan dilakukan di kantor pusat, kantor wilayah, dan tingkat kantor cabang. Program ini menggunakan tolok ukur industri (*industry benchmark*) untuk menilai kualitas kantor cabang di tiga bidang: sumber daya manusia, proses dan infrastruktur. Sejak diterapkan pada tahun 2001, SMART telah menjadi semboyan kualitas pelayanan di antara karyawan BCA, yang merupakan singkatan dari lima standar layanan BCA: **S**igap, **M**enarik, **A**ntusias, **R**amah, dan **T**eliti.

Guna memastikan semua karyawan berpartisipasi penuh dalam upaya peningkatan kualitas layanan, masing-masing unit kerja memiliki seorang *Service*



BCA bertekad untuk memastikan kualitas dan standar layanan yang tinggi serta melanjutkan pengembangan jaringan cabang maupun *electronic delivery channel*

Quality Manager (SQM) dan bertugas untuk memantau pelaksanaan program. SQM bertindak sebagai mentor dan memberi masukan mengenai penerapan SMART kepada masing-masing kepala unit kerja. SQM juga berkoordinasi dengan Tim SMART di Kantor Pusat dalam menentukan prioritas terhadap aspek-aspek yang perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit. Berbagai pelatihan mengenai budaya pelayanan telah menjadi bagian dari program SMART. Pelaksanaan program dipantau dan dievaluasi oleh sebuah tim penilai independen. Penilaian pelaksanaan SMART dilakukan dengan berbagai metode diantaranya tim penilai independen akan melakukan observasi langsung maupun melalui *mystery caller* dan penilaian dari para nasabah melalui angket.

Kegiatan Operasional yang Bermutu Tinggi

Volume transaksi nasabah yang ditangani oleh BCA mencapai 4,1 juta transaksi per hari. Hal tersebut menjadikan BCA sebagai salah satu bank penyedia layanan transaksi perbankan terbesar di Indonesia.

Untuk mempertahankan keunggulan ini, BCA senantiasa menyediakan sumber daya yang memadai untuk memastikan layanan operasional berjalan efektif untuk menghadirkan kenyamanan bagi nasabah.

Tiga bidang yang menjadi fokus dalam memastikan keunggulan BCA sebagai bank transaksional yaitu kapasitas proses, kemampuan sumber daya manusia dan integrasi sistem. Efisiensi aktivitas operasional dicapai melalui pemantauan secara cermat terhadap kinerja ATM dan EDC, pemeliharaan rutin dan *upgrade* secara berkala. *Response time* atas laporan-laporan kerusakan ATM dan EDC juga diamati secara rutin. Selama tahun 2009, BCA berhasil menjaga tingkat *down time* ATM pada level 1,96%. Transaksi-transaksi RTGS dan Sistem Kliring Nasional (SKN) ditangani sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan untuk memastikan kualitas transaksi tetap terjaga meskipun semua bank mendapatkan kapasitas jaringan yang sama dalam sistem kliring nasional. BCA melakukan *testing* terhadap jaringan *back up* untuk transaksi RTGS dan SKN setiap dua kali dalam setahun.

Selain itu, BCA juga berusaha meningkatkan efisiensi *back-office* di cabang dengan memantau, mengkaji serta meningkatkan proses kerja dan sistem aplikasi yang digunakan.

Pada tahun 2009, BCA melakukan inisiatif untuk menyederhanakan manual proses dan kerja guna meningkatkan pemahaman karyawan maupun mempermudah proses pengkinian secara berkala. Revisi-revisi ini juga menyangkut perubahan proses administrasi kredit dimana dilakukan sentralisasi dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Guna memastikan keunggulan operasional dan kenyamanan nasabah, kami memastikan transaksi yang tidak biasa terjadi dapat ditangani dengan baik, seperti pada kasus kartu ATM terblokir atau hilang. Menyadari bahwa peristiwa serupa ini adalah peluang bagi karyawan BCA dalam menunjukkan tingkat kepedulian ke nasabah, BCA menerapkan prosedur yang lebih sederhana untuk menangani hal tersebut, dengan tetap menjaga keamanan mengacu kepada *best practice*.

BCA memberikan perhatian yang sangat besar dalam upaya untuk memberi kemudahan kepada nasabah dalam memperoleh informasi dan solusi permasalahan perbankan melalui call center Halo BCA. Halo BCA yang telah mendapat sertifikasi ISO 9001:2000, beroperasi 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu didukung oleh personil maupun mesin penjawab otomatis. Sepanjang tahun 2009, Halo BCA menerima sebanyak 7,8 juta telepon masuk yang sebagian besar merupakan permintaan informasi produk dan jasa, sedangkan sejumlah 857,2 ribu telepon masuk atau sekitar 11% merupakan keluhan nasabah. Personil Halo BCA telah mendapatkan pelatihan khusus untuk menangani semua keluhan secara profesional melalui proses yang terstandarisasi. Kualitas layanan Halo BCA tercermin dari penghargaan yang diterima baik di tingkat nasional dan internasional.

Perluasan jaringan

BCA terus mengoptimalkan pengembangan, perluasan, dan kualitas jaringan kantor cabang, ATM, dan *electronic delivery channel* lainnya. Sepanjang tahun 2009, BCA membuka 35 cabang, menambah 614 ATM, dan 47.414 EDC baru. Pada akhir tahun 2009, jaringan BCA beroperasi dengan 875 cabang dan 6.611 ATM yang tersebar di lokasi-lokasi strategis. Total populasi EDC mencapai sebanyak 129.164 unit. Dalam pengembangan dan perluasan jaringan, unit pendukung Operasi dan Jaringan berhubungan erat dengan unit-unit BCA terkait dan terutama dengan divisi Teknologi Informasi & Strategi Operasi, Perbankan Cabang dan Logistik.

Meskipun popularitas penggunaan fasilitas perbankan melalui internet dan telepon terus meningkat, BCA memahami keunikan peran cabang dalam memperkuat hubungan dengan nasabah. Selain membuka cabang baru, di tahun 2009 BCA juga merenovasi dan merelokasi sejumlah kantor cabang. Desain dan tata letak ruangan pada kantor cabang senantiasa diperbaiki, sesuai kebutuhan nasabah serta prioritas BCA dalam mengembangkan bisnis di beberapa wilayah tertentu. Oleh karena itu, BCA senantiasa memperkuat kehadirannya di tempat-tempat strategis di seluruh Indonesia. Tujuan BCA adalah untuk mendekatkan kegiatan operasionalnya dengan nasabah, dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dalam rangka membangun loyalitas dan kepuasan nasabah yang lebih tinggi.

Diluncurkan pada tahun 2002, BCABIZZ secara khusus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah UKM terutama pedagang. Layanan BCABIZZ saat ini tersedia di lebih dari 131 cabang BCA di sentra-sentra perdagangan dan pusat bisnis. Layanan ini kini telah digunakan oleh 34.303 nasabah. Selain kenyamanan dalam layanan perbankan transaksional BCA, nasabah BCABIZZ juga dapat menikmati layanan perbankan yang lebih cepat, mudah dan aman. Di antaranya

adalah layanan pengambilan dan pengiriman uang tunai, layanan penukaran uang kecil terjadwal, informasi mutasi rekening harian, serta layanan *drop-bag* yang memudahkan proses setoran tunai tanpa harus menunggu di loket teller Bank.

BCA menyediakan pula fasilitas EDC BIZZ bagi nasabah *merchant* BCABIZZ. Selain berguna untuk menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit, EDC BIZZ juga dapat digunakan untuk berbagai transaksi non-tunai antara lain: transfer dana ke rekening BCA atau bank lain; pembayaran tagihan telepon, listrik, dan tagihan kartu kredit; permintaan informasi saldo rekening; transaksi Debit BCA; serta permintaan informasi tentang bunga dan nilai tukar mata uang asing. EDC BIZZ memungkinkan nasabah *merchant* BCA untuk melakukan transaksi perbankan tanpa perlu meninggalkan toko mereka.

Bagi segmen nasabah *mass affluent*, BCA menyediakan layanan BCA Prioritas yang kini tersedia di 128 cabang. Nasabah BCA Prioritas dapat menikmati layanan dan program eksklusif seperti pelayanan kesehatan, buletin komunikasi eksklusif, *executive lounge* di bandara, penyediaan produk-produk investasi, dan berbagai penawaran menarik lainnya yang menjadi nilai tambah layanan BCA. Sejak akhir tahun 2009, jumlah nasabah BCA Prioritas adalah sebanyak 96.182 nasabah, meningkat sebesar 6,9% dibanding tahun sebelumnya.

Meningkatkan Keamanan

Pada tahun 2009, BCA mengidentifikasi adanya tindakan kejahatan pencurian data nasabah di sejumlah ATM. Masalah serupa juga dialami oleh bank-bank lain di seluruh dunia. Menanggapi hal tersebut, BCA segera mengambil langkah-langkah preventif untuk meningkatkan keamanan ATM dengan memasang perangkat *anti-skimming* dan penutup *pin-pad* di semua ATM. Selain itu, BCA juga secara proaktif menjalankan kebijakan untuk menghubungi nasabah yang diindikasikan terkena *skimming* dan



meminta mereka untuk segera mengganti kartu ATM yang digunakan. Selain itu, BCA melakukan serangkaian edukasi kepada publik secara intensif tentang cara yang aman dalam melakukan transaksi perbankan melalui jaringan elektronik. Kasus tindak kejahatan pencurian data nasabah tersebut tidak menimbulkan dampak yang berarti terhadap kinerja BCA ataupun pada kepercayaan nasabah terhadap BCA.

Melangkah ke Depan

Basis nasabah BCA yang besar dan volume transaksi yang terus berkembang merupakan suatu tantangan bagi Bank. Peningkatan kualitas layanan BCA dilakukan dengan mengikuti perkembangan dinamika pasar yang membentuk kebutuhan dan pilihan nasabah atas produk dan layanan perbankan. Keamanan transaksi, terutama melalui *electronic delivery channel*, akan terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan faktor kenyamanan nasabah.

Selanjutnya, jangkauan pelayanan akan terus diperluas melalui pembukaan kantor cabang baru dan penambahan *electronic delivery channel*. Standar kualitas layanan akan dipertahankan, sementara sistem dan prosedur akan disederhanakan dengan tetap mempertimbangkan kehati-hatian dalam praktik perbankan.



Teknologi Informasi

Penerapan sistem teknologi informasi yang andal merupakan kunci keunggulan BCA dalam menyediakan layanan penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan sesuai kebutuhan nasabah. BCA memiliki komitmen untuk menjaga posisi terdepan di bidang teknologi perbankan di Indonesia. BCA senantiasa melakukan *upgrade* terhadap sistem yang digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas, menjamin keamanan dan keandalan sistem, serta pada akhirnya dapat memberikan penghargaan atas kesetiaan para nasabah dengan menyediakan pelayanan yang terbaik.

Sejalan dengan meningkatnya volume transaksi yang ditangani oleh BCA, kebutuhan akan pemeliharaan dan *upgrade* sistem guna mendukung perputaran

dana dan informasi bukan hanya merupakan masalah penyediaan infrastruktur, namun juga membutuhkan perencanaan strategis yang matang. Menyikapi pertumbuhan signifikan yang dialami oleh BCA dan juga di seluruh sektor keuangan, tantangan yang harus dihadapi adalah kemampuan untuk mengantisipasi dan untuk berubah sejalan dengan perkembangan yang terjadi di sektor perbankan. Tuntutan terbesar bagi BCA adalah memelihara kenyamanan dan kualitas pelayanan serta keamanan dan kepercayaan nasabah terhadap sistem yang digunakan. Oleh karena itu, BCA secara berkesinambungan mengutamakan dan melakukan pembaruan infrastruktur yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap kelangsungan usaha dan untuk merespon kebutuhan nasabah.

BCA secara berkesinambungan mengutamakan dan melakukan pembaruan infrastruktur yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap kelangsungan usaha dan untuk merespon kebutuhan nasabah

Optimalisasi Infrastruktur

Selama tahun 2009, BCA melakukan sejumlah inisiatif untuk memperkuat infrastruktur dalam mendukung transaksi-transaksi nasabah. BCA berhasil mempertahankan stabilitas sistem sekaligus mengoptimalkan kinerja dari *dual data center* yang dimilikinya. BCA memiliki dua mainframe yang berada di dalam negeri, yang masing-masing berlokasi di kantor pusat Menara BCA dan gedung Wisma Asia. Masing-masing mainframe memiliki kemampuan untuk menangani seluruh proses transaksi nasabah Bank. Kedua mainframe tersebut dirancang untuk memelihara redundansi data yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan usaha apabila terjadi kegagalan sistem pada salah satu mainframe tersebut. Selain hal tersebut, sistem ini juga memiliki kapasitas pendukung (*backup capacity*). Selain dua mainframe yang berlokasi di dalam negeri, BCA juga memiliki sebuah mainframe yang berfungsi sebagai Disaster Recovery Center (DRC) di Singapura, yang dirancang untuk menjaga operasi-operasi dasar perbankan tetap berjalan seandainya terjadi bencana

yang bersifat katastrofik di Jakarta. Tingkat keamanan yang disediakan oleh sistem DRC yang berlokasi di Singapura tersebut membantu BCA dalam mengurangi risiko operasional.

Sepanjang tahun 2009, BCA melakukan optimasi dan peningkatan kapasitas jaringan komunikasi data yang menghubungkan semua cabang-cabang utama dan sekitar 200 kantor cabang pembantu besar, untuk mengantisipasi peningkatan volume transaksi yang dilayani oleh cabang-cabang tersebut. BCA secara aktif terus memantau kinerja aplikasi-aplikasi yang vital seperti sistem cabang *on line*, *direct domestic delivery channels*, sentra operasi, sistem perbankan internasional dan sistem tresuri.

Kemampuan untuk Memanfaatkan Informasi Nasabah

Secara teratur, BCA menghasilkan volume data yang cukup besar, dimana data tersebut memiliki potensi yang tinggi untuk dimanfaatkan oleh unit-unit bisnis dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap

nasabah-nasabah individu. Pemahaman tersebut merupakan komponen utama dari pendalaman hubungan dengan nasabah. Kunci dari model bisnis BCA adalah keunggulannya di bidang perbankan transaksional dan penyediaan sistem pembayaran. Selanjutnya, BCA juga memiliki beragam produk dan layanan perbankan. Salah satu tantangan yang dihadapi Bank adalah bagaimana menentukan pendekatan yang tepat dalam melakukan penjualan silang (*cross selling*). Selanjutnya, kemampuan untuk memanfaatkan informasi nasabah memiliki peranan penting dalam menentukan strategi penjualan silang (*cross selling*) kepada para nasabah.

Dalam upaya meningkatkan penjualan melalui *product bundling* dan cara pemasaran yang optimal, Bank saat ini menerapkan aplikasi *Enterprise Data Warehouse* yang bertujuan untuk menciptakan satu sumber informasi yang terintegrasi yang memberikan informasi strategis baik dari segi bisnis maupun yang bersifat operasional. Dengan mengembangkan sistem aplikasi penyimpanan informasi nasabah tersebut, BCA dapat lebih efektif dalam memantau perilaku nasabah dan mempertahankan hubungan dengan nasabah. Program pengembangan sistem *Enterprise Data Warehouse* ini diterapkan untuk mendukung aktivitas Unit Bisnis Perbankan Individual dan diharapkan mampu untuk meningkatkan pemasaran produk kredit kepemilikan rumah dan kredit kepemilikan mobil BCA sekaligus penjualan kartu kredit maupun layanan Bancassurance dan Wealth Management.

Tata Kelola Teknologi Informasi dan Kelangsungan Bisnis

Selama tahun 2009, BCA melaksanakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat tata kelola teknologi informasi (*IT Governance*) secara menyeluruh. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan di dalam Bank dengan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan prosedur senantiasa diperbaharui dan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan ketetapan yang berlaku. BCA tengah menyusun panduan keamanan teknologi informasi yang komprehensif dan akan mulai disosialisasikan kepada para karyawan pada tahun 2010.

Salah satu bidang yang mendapat perhatian khusus di tahun 2009 adalah implementasi Manajemen Kelangsungan Bisnis (*Business Continuity Management* atau BCM). Bank mengembangkan Rencana Kelangsungan Bisnis (*Business Continuity Plan* atau BCP), yang secara efektif mengatur tindakan Bank jika terjadi peristiwa bencana alam atau keadaan lain yang menyebabkan fasilitas jaringan menjadi tidak dapat berfungsi atau *off line*. Panduan yang disediakan oleh BCP mengatur prosedur dalam mengantisipasi situasi darurat dan upaya pemulihan paska bencana agar Bank dapat segera beroperasi dan melayani nasabah kembali. Proyek ini juga meliputi peninjauan atas lokasi dan pendirian (DRC), serta pembentukan unit kerja yang bertanggung jawab atas manajemen bencana, yang akan melapor langsung kepada Direksi.

BCP telah sepenuhnya teruji pada tahun 2009 saat gempa bumi pada tanggal 30 September di Padang, Sumatera Barat. BCA sangat beruntung, bahwa tidak satu pun staf atau keluarga mereka yang meninggal dalam bencana tersebut. Meskipun demikian, satu cabang BCA yang beroperasi di kota Padang rusak cukup parah dan tidak dapat beroperasi. Penerapan BCP secara efektif memungkinkan pemulihan layanan ATM sehari setelah kejadian dan pemulihan operasional cabang di lokasi yang berbeda, dua hari kemudian. Seluruh kejadian ini merupakan pelajaran berharga bagi BCA mengingat tidak semua penanganan darurat telah disiapkan dengan sempurna. Oleh karena itu, BCA terus mengkaji dan memperbaiki prosedur untuk memastikan bahwa kelangsungan usaha dapat dipertahankan dalam segala situasi.

2010 dan ke depan

Unit pendukung TI & Strategi Operasi BCA akan terus memainkan peran penting dalam memastikan bahwa infrastruktur yang diperlukan untuk mengukur berbagai jenis risiko (risiko operasional, kredit, dan pasar) di bawah BASEL II telah sejalan dengan semua peraturan yang berlaku. Unit TI dan Strategi Operasi BCA juga mendukung Bank dalam upaya memenuhi prinsip standar akuntansi keuangan yang baru, PSAK 50 dan 55, yang akan diterapkan pada tahun 2010.

Unit TI dan Strategi Operasi BCA akan melakukan kajian terhadap kapasitas beban operasional maupun kebutuhan *bandwidth* yang diperlukan oleh Bank. Dalam jangka pendek dan jangka menengah, fokus akan lebih diarahkan pada pengembangan *middle-ware* untuk meningkatkan kapasitas mainframe yang ada. Mengingat pertumbuhan transaksi yang terus terjadi, perhatian yang lebih akan senantiasa diberikan untuk memastikan bahwa kapasitas dan kecepatan dapat dipertahankan pada tingkat yang optimal, dengan menekankan pada kegiatan perbankan yang sehat dan aman.

Pengelolaan risiko yang efektif serta perencanaan antisipatif terhadap memburuknya kondisi pasar merupakan salah satu unsur penting tata kelola perusahaan di BCA



Tinjauan Tata Kelola Perusahaan





Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance

BCA memiliki keyakinan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* – GCG) merupakan kunci utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan usaha. Komitmen kami untuk menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme dalam setiap kegiatan operasional lahir dari pengalaman dan filosofi yang dimiliki. Dalam satu dekade terakhir, praktik GCG di BCA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pertumbuhan BCA dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu dengan tetap mengacu kepada peraturan maupun kelaziman yang berlaku.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan efektivitas implementasi GCG dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. BCA terus melakukan upaya-upaya dalam membangun dan menyempurnakan berbagai kebijakan, sistem dan perangkat yang secara keseluruhan memberi bentuk pada praktik GCG. Melalui upaya-upaya tersebut, BCA mewujudkan lima prinsip dasar GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan GCG, terutama peraturan

Bank Indonesia, peraturan Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum (PBI), berikut adalah pokok-pokok laporan pelaksanaan GCG di lingkungan BCA selama tahun 2009:

- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite penunjang Dewan Komisaris dan komite eksekutif di bawah Direksi.
- Kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
- Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.
- Laporan fungsi Sekretaris Perusahaan.
- Pengungkapan kondisi keuangan dan non-keuangan bank.
- Hasil *self assessment* GCG selama periode 2009.

BCA melakukan *self assessment* secara berkala terhadap pelaksanaan GCG, yang meliputi 11 (sebelas) aspek penilaian sebagaimana diatur di dalam PBI. Hasil *self assessment* tentang pelaksanaan GCG di lingkungan BCA selama periode tahun 2009 memberikan peringkat nilai komposit 1,35 atau sama dengan predikat "Sangat Baik".

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. RUPS mempunyai kewenangan antara lain:

- menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCA atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya;
- memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi (dengan persetujuan Dewan Komisaris) untuk menentukan dan membayar dividen;
- mengambil keputusan-keputusan menyangkut struktur organisasi misalnya perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran, likuidasi perseroan;
- melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- memutuskan penetapan gaji, tunjangan lain serta honorarium Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- memberi persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
- melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan akuntan publik terdaftar.

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat. Penyelenggaraan RUPS dapat berupa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.

Pada tahun 2009, BCA menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST pada tanggal 18 Mei 2009. Pengumuman hasil RUPST tersebut disajikan di bagian Data Perusahaan, halaman 240 Laporan Tahunan ini.

B. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas memberikan pengarahan dan pengawasan kepada Direksi dalam proses implementasi visi, misi, rencana kerja dan anggaran BCA, serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS dan tugas-tugas yang ditentukan di dalam Anggaran Dasar BCA dan Peraturan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

Keanggotaan

Dewan Komisaris BCA per Desember 2009 terdiri dari 5 (lima) orang yaitu 1 (satu) Presiden Komisaris, 1 (satu) Komisaris, dan 3 (tiga) Komisaris Independen. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui keputusan RUPS. Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA berdomisili di Indonesia. Keanggotaan Dewan Komisaris BCA telah memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia, baik menyangkut kelulusan masing-masing anggota

Dewan Komisaris dalam *Fit and Proper Test* oleh Bank Indonesia, larangan perangkapan jabatan, maupun keberadaan Komisaris Independen.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA.

Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris BCA per Desember 2009

Eugene Keith Galbraith	Presiden Komisaris
Tonny Kusnadi	Komisaris
Cyrellus Harinowo	Komisaris Independen
Dr. Raden Pardede	Komisaris Independen
Sigit Pramono	Komisaris Independen

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris saat ini berlaku sampai dengan ditutupnya RUPST BCA yang akan diselenggarakan pada tahun 2011.

Profil singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris disajikan di bagian Data Perusahaan, halaman 230 Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya dan memberi nasihat kepada Direksi yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan sejalan dengan maksud dan tujuan Perseroan sesuai Anggaran Dasar.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris BCA dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha BCA dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi melalui Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
 4. Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA.
 5. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi Divisi Audit Internal BCA, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain termasuk namun tidak terbatas pada Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan/atau Bursa Efek Indonesia.
 6. Sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG pada Bank Umum, Dewan Komisaris telah membentuk:
 - a. Komite Audit.
 - b. Komite Pemantau Risiko.
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi.
 7. Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite-Komite yang telah dibentuk Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.
 8. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada jam kerja, dapat memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BCA dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 9. Dewan Komisaris secara berkala meminta anggota Direksi untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai BCA sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
 10. Dewan Komisaris:
 - a. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
 - b. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan Perusahaan lain, berupa Daftar Khusus yang dikinikan setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal.
 11. Mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
 12. Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
 13. Dewan Komisaris sehubungan dengan penerapan manajemen risiko:
 - a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.
 - b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
 - c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar BCA.
- Sejalan dengan tugas dan tanggung jawab di atas, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pelaksanaan rapat.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris, maupun dalam rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat tersebut dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil-hasil rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Sepanjang tahun 2009, telah diselenggarakan sebanyak 43 kali rapat Dewan Komisaris dan 7 kali rapat gabungan Dewan

Komisaris dan Direksi. Catatan kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam rapat-rapat tersebut dapat dilihat pada bagian Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi pada halaman 90 Laporan Tahunan ini.

Dewan Komisaris telah berperan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dengan menjalankan fungsi pengarahan dan pengawasan secara baik. Selama tahun 2009, Dewan Komisaris tidak menemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA.

Komite Audit

Susunan Keanggotaan Komite Audit per Desember 2009

Cyrillus Harinowo	Ketua (juga sebagai Komisaris Independen BCA)
Herman Yoseph Susmanto	Anggota
Rodulphus Aquaviva Supriyono	Anggota
Inawaty Handoyo Suwardi	Anggota

Keanggotaan

Komite Audit BCA beranggotakan 4 (empat) orang, yaitu 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang anggota, serta dibantu oleh seorang Sekretaris Komite. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, Ketua Komite Audit adalah juga Komisaris Independen, sedangkan anggota Komite adalah pihak-pihak independen yang memiliki kompetensi di bidang-bidang yang dipersyaratkan. Seluruh keanggotaan Komite Audit adalah independen sehingga tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah melalui PBI No.8/14/2006 tanggal 5 Oktober 2006, BCA telah membentuk komite-komite penunjang Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite-komite tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam fungsinya membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dengan mengacu kepada pedoman dan tata tertib kerja yang telah disusun untuk masing-masing Komite.

Masa tugas Ketua dan Anggota Komite Audit ini akan berakhir sampai dengan akhir masa tugas jabatan Dewan Komisaris BCA yaitu sampai dengan saat ditutupnya RUPST yang akan diselenggarakan pada tahun 2011.

Profil singkat anggota Komite Audit disajikan pada bagian Data Perusahaan, halaman 236 Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Pokok

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap penerapan tata kelola perusahaan, yang difokuskan kepada pengawasan atas:

1. Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Keandalan (*reliability*) laporan keuangan.
3. Efektivitas dan efisiensi operasi Perseroan, dengan menitikberatkan pada pengelolaan risiko.
4. Evaluasi fungsi audit internal sejak perencanaan, pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil-hasilnya, termasuk menghadiri pembahasan hasil-hasil audit apabila dipandang perlu.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut Komite Audit membuat rencana kegiatan tahunan yang dapat menjawab, mendalami, dan memberi keyakinan bahwa tata kelola perusahaan telah berjalan dengan integritas tinggi dan andal. Komite Audit juga menjalin hubungan kerja yang efektif dengan Direksi, Divisi Audit Internal, dan auditor eksternal maupun pihak terkait lainnya.

Tugas dan tanggung jawab yang lain adalah:

1. Melakukan penelaahan atas Laporan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian yang dilaporkan secara bulanan.
2. Melakukan penelaahan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
3. Menghadiri dan membuat relasi aktif dengan asosiasi-asosiasi seperti Paguyuban Komisaris Independen Indonesia (ISICOM) dan Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) untuk memperoleh

pemahaman yang mendalam atas peraturan, perundangan serta *best practices* yang berkembang.

4. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), laporan keuangan publikasi (triwulanan) dan secara *random* laporan keuangan bulanan *on line*, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
5. Melakukan penelaahan atas rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal.
6. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik.
7. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
8. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi BCA.
9. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
10. Membuat, mengkaji dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.
11. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Frekuensi Rapat

Komite Audit mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit. Selama tahun 2009, Komite Audit tercatat mengadakan sebanyak 20 (dua puluh) kali rapat.

Berikut adalah frekuensi penyelenggaraan rapat dan kehadiran anggota pada rapat Komite Audit selama tahun 2009.

Rapat Komite Audit						
No.	Tanggal	Perihal	CH	HYS	RAS	IHS
1.	8 Januari	Pembahasan Rencana Kerja Komite Audit (bersama dengan Dewan Komisaris)	O	O	O	O
2.	14 Januari	Rutin Bulanan	X	O	O	O
3.	5 Februari	Rapat dengan Auditor Eksternal	O	O	O	O
4.	26 Februari	Rutin Bulanan	O	O	O	O
5.	27 Februari	Pembahasan Risiko Teknologi Informasi (dilakukan bersama dengan Komite Pemantau Risiko, SKMR dan Direktur Terkait)	O	O	X	O
6.	16 Maret	Kajian Laporan Keuangan Tahun 2008 yang akan dipublikasikan	O	O	X	O
7.	15 April	Rutin Bulanan	O	X	O	O
8.	28 April	Kajian Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2009 yang akan dipublikasikan	O	O	O	O
9.	27 Mei	Rutin Bulanan	O	O	O	X
10.	29 Juni	Rutin Bulanan	X	O	O	O
11.	13 Juli	Kesiapan Implementasi Prosedur Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50/55	X	O	O	O
12.	23 Juli	Rutin Bulanan (bersama dengan Dewan Komisaris)	O	O	O	O
13.	28 Juli	Kajian Laporan Keuangan Triwulan II Tahun 2009 yang akan dipublikasikan	O	O	O	O
14.	5 Agustus	Pembahasan mengenai tindak lanjut Audit Teknologi Informasi dan <i>Operation Risk Management Information System (ORMIS)</i>	O	O	X	O
15.	6 Agustus	Realisasi Kerja Divisi Audit Internal Semester I Tahun 2009 (bersama dengan Dewan Komisaris dan Divisi Internal Audit)	O	O	O	O
16.	30 September	Rutin Bulanan	O	X	O	O
17.	27 Oktober	Kajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2009 yang akan dipublikasikan	O	O	X	O
18.	17 November	Rutin Bulanan	O	O	O	O
19.	17 Desember	Rutin Bulanan	X	O	O	O
20.	17 Desember	Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris	X	O	O	O

Keterangan:

O : Hadir X : Tidak Hadir
 CH : Cyrillus Harinowo
 HYS : Herman Yoseph Susmanto
 RAS : Rodolphus Aquaviva Supriyono
 IHS : Inawaty Handoyo Suwardi

Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dan segala keputusan rapat Komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite. Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang

ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*Dissenting Opinions*) yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Di bawah ini disajikan ringkasan kegiatan Komite Audit selama tahun 2009.

Kegiatan Komite Audit tahun 2009	Jumlah
Rapat dalam 1 (satu) tahun	20 kali
Melakukan penelaahan atas laporan Audit Internal	228 laporan
Melakukan penelaahan atas hasil rapat Dewan Komisaris	48 hasil rapat
Melakukan penelaahan atas hasil rapat Direksi	32 hasil rapat
Melakukan penelaahan atas tindak lanjut hasil audit eksternal dan Bank Indonesia	1 laporan
Melakukan kunjungan ke Cabang dan menghadiri <i>exit meeting</i> Audit Internal	8 kali

Selanjutnya dalam tabel berikut ditampilkan Laporan singkat Pelaksanaan atau Realisasi dari Program Kerja Komite Audit selama tahun 2009.

Program Kerja dan Realisasi Komite Audit sepanjang tahun 2009		
No.	Program Kerja	Realisasi
1.	Melakukan kajian atas laporan keuangan yang akan dipublikasikan (laporan keuangan triwulanan dan tahunan)	Kajian dilakukan dengan menyelenggarakan rapat dengan Divisi Akuntansi setiap triwulan
2.	Melakukan telaah atas perencanaan dan hasil audit eksternal atas laporan keuangan tahunan serta tindak lanjutnya	Telah dilaksanakan melalui rapat dan pengkajian atas hasil audit serta laporan auditor eksternal kepada manajemen BCA (<i>management letter</i>).
3.	Memantau kesiapan BCA untuk menerapkan Prosedur Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50/55	Evaluasi kemajuan proyek PSAK 50/55 dilakukan melalui rapat dengan Divisi Akuntansi dan selanjutnya telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris
4.	Melakukan telaah atas laporan dan hasil audit internal dan tindak lanjutnya	Telah melakukan penelaahan, memberikan rekomendasi dan komentar atas 228 laporan hasil audit internal dan tindak lanjutnya.
5.	Melakukan diskusi bulanan dengan Divisi Audit Internal atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan	Selama tahun 2009 telah melakukan 9 kali pertemuan, dan temuan-temuan penting telah dilaporkan ke Dewan Komisaris

Program Kerja dan Realisasi Komite Audit sepanjang tahun 2009		
No.	Program Kerja	Realisasi
6.	Mengadakan kunjungan ke kantor cabang dan menghadiri <i>exit meeting</i> audit internal	Telah menghadiri <i>exit meeting</i> audit internal dan melakukan kunjungan ke delapan kantor cabang dan unit kerja Kantor Pusat
7.	Mengevaluasi perencanaan tahunan dan pelaksanaan audit internal setiap semester	Telah melakukan evaluasi atas perencanaan tahunan dan pelaksanaan audit internal
8.	Melakukan kajian atas hasil pemeriksaan dari Bank Indonesia dan tindak lanjutnya	Telah melakukan kajian atas hasil pemeriksaan dari Bank Indonesia dan tindak lanjutnya
9.	Menelaah kepatuhan BCA terhadap ketentuan, peraturan dan hukum yang berlaku di bidang perbankan	Telah melakukan penelaahan atas kepatuhan BCA melalui kajian terhadap laporan kepatuhan bulanan. Hal-hal yang dipandang memerlukan perhatian telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris
10.	Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik	Telah mengevaluasi dan menyetujui usulan perpanjangan kontrak dengan KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja yang berafiliasi dengan Ernst & Young dan merekomendasikannya kepada Dewan Komisaris
11.	Melakukan kajian atas hasil rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi	Telah melakukan kajian atas 48 hasil rapat Dewan Komisaris dan 32 hasil Rapat Direksi
12.	Berperan aktif dalam keanggotaan Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dan Paguyuban Komisaris Independen Indonesia (ISICOM)	Telah berperan aktif melalui 2 orang anggota Komite yang menjadi anggota IKAI dan 1 anggota Komite yang juga menjadi anggota ISICOM
13.	Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin kepada Dewan Komisaris	Telah dilakukan melalui Rapat dengan Dewan Komisaris sebanyak 4 kali rapat / setiap kuartal

Komite Audit

PT Bank Central Asia Tbk



Cyrillus Harinowo

Ketua (juga sebagai Komisaris Independen)

Komite Pemantau Risiko

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko per Desember 2009

Sigit Pramono	Ketua (juga sebagai Komisaris Independen BCA)
Andreas E. Susetyo	Anggota
Endang Swasthika Wibowo	Anggota

Catatan: Wolf Arno Kluge telah menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sampai dengan 21 Juli 2009

Keanggotaan

Komite Pemantau Risiko BCA terdiri dari Ketua yang juga adalah Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota pihak independen yang memiliki kapasitas, kompetensi, keahlian dan pengalaman yang diperlukan. Seluruhnya memiliki integritas dan moral yang baik. Kedua anggota pihak independen tersebut memiliki keahlian di bidang Perbankan dan Keuangan, Teknologi Informasi serta Manajemen Risiko. Komite Pemantau Risiko dibantu oleh seorang Sekretaris.

Masa tugas Komite dan Anggota Komite Pemantau Risiko ini akan berakhir sampai dengan akhir masa tugas jabatan Dewan Komisaris BCA yaitu sampai dengan saat ditutupnya RUPST yang akan diselenggarakan dalam tahun 2011.

Profil singkat anggota Komite Pemantau Risiko disajikan pada bagian Data Perusahaan, halaman 237 Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris, dan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam hal keberadaan, operasi dan efektivitas program pengelolaan risiko BCA, kebijakan dan praktik-praktik BCA, termasuk dan tidak terbatas pada kepatuhan atas kebijakan Bank Indonesia terkait implementasi Basel II.
2. Memberi masukan atau rekomendasi atas toleransi risiko BCA.
3. Memastikan ketersediaan informasi dan implementasi dari standar, kontrol, batasan, pedoman dan kebijakan sehubungan dengan pengukuran dan

pengelolaan risiko terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, risiko strategis, risiko hukum dan risiko kepatuhan.

Dalam menjalankan tugas pemantauannya, Komite Pemantau Risiko memiliki kewenangan dalam hal:

- a. Menerima dan memeriksa laporan dari manajemen BCA perihal langkah-langkah yang telah diambil untuk melakukan pengawasan dan kontrol eksposur.
- b. Melakukan pemeriksaan atas laporan tentang hal-hal signifikan yang disiapkan oleh grup pengelolaan risiko internal dan memberikan masukan bila diperlukan.
- c. Melakukan pemantauan atas proses *underwriting* dan kontrol serta kepatuhan atas kebijakan serta mengevaluasi kinerja manajemen terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa proses pengelolaan risiko telah berjalan efektif dan bahwa tanggung jawab pengelolaan risiko dari Direksi dan Manajemen yang terkait, dan karyawan BCA lainnya telah didefinisikan dengan jelas.
- d. Memantau dan mengevaluasi tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- e. Meminta manajemen untuk melakukan analisis atas risiko tertentu sesuai kebutuhan dan menetapkan batasan, kontrol dan prosedur tertentu yang disetujui Dewan Komisaris untuk memitigasi risiko.
- f. Menerima laporan dan rekomendasi dari Direksi dan manajemen BCA yang terkait sehubungan dengan masalah pengelolaan risiko yang signifikan dan menyiapkan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

- g. Secara mandiri atau bersama Komite Audit, melakukan kaji ulang dan diskusi tentang regulasi perbankan.
- h. Melakukan aktivitas lainnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite ini.
- i. Membuat laporan aktivitas kepada Dewan Komisaris secara periodik tentang hal-hal material sehubungan dengan masalah-masalah pengelolaan risiko dan kepatuhan BCA.

Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak sedangkan segala keputusan rapat Komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite.

Hasil risalah rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*Dissenting Opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan Perseroan sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko. Selama tahun 2009 rapat Komite Pemantau Risiko telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali.

Berikut adalah informasi mengenai rapat Komite Pemantau Risiko yang diselenggarakan selama tahun 2009.

Rapat Komite Pemantau Risiko						
No.	Tanggal	Perihal	SP	AES	ESW	WAK*
1.	27 Februari	Pembahasan Kepatuhan BCA terhadap PBI No. 15/2007 mengenai Manajemen Risiko Teknologi Informasi	O	O	O	O
2.	13 April	Pemantauan BMPK dan kajian aplikasi <i>Operation Risk Management Information System (ORMIS)</i>	O	O	O	O
3.	5 Agustus	Pembahasan mengenai tindak lanjut Audit Teknologi Informasi dan ORMIS (bersama Komite Audit)	X	O	O	-*
4.	6 Oktober	Pembahasan tingkat Risiko Kredit dengan metode <i>Stress Test</i>	O	O	O	-*
5.	10 November	Pembahasan <i>Update Market Risk</i> yang dihadapi oleh BCA	O	O	O	-*

Keterangan:

- O : Hadir X : Tidak Hadir
- SP : Sigit Pramono
- AES : Andreas E. Susetyo
- ESW : Endang Swasthika Wibowo
- WAK : Wolf Arno Kluge
- * Wolf Arno Kluge telah menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sampai dengan 21 Juli 2009

Di bawah ini disajikan penjelasan mengenai program kerja Komite Pemantau Risiko berikut realisasinya selama tahun 2009.

Program Kerja dan Realisasi Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2009		
No.	Program Kerja	Realisasi
1.	Melakukan pemantauan risiko melalui analisis terhadap dokumen: a. Laporan Keuangan dan Indikator Kinerja b. Laporan Profil Risiko c. Laporan Portofolio Kredit d. Laporan Kepatuhan e. Laporan Risiko Operasional (<i>Lost Event Database / LED dan ORMIS</i>) f. Laporan Hasil Audit	Telah dilakukan pemantauan risiko dengan melakukan evaluasi atas berbagai laporan. Selanjutnya, Komite Pemantau Risiko memberikan pendapat dan saran dalam bentuk tertulis atas hasil evaluasi tersebut. Hal-hal yang membutuhkan klarifikasi telah dijelaskan lebih lanjut dan ditindaklanjuti melalui pertemuan khusus dengan pihak-pihak terkait
2.	Melakukan pemantauan risiko sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi dan kebutuhan operasional BCA	Komite telah melakukan pemantauan secara khusus baik terhadap kualitas aset dan <i>stress test</i> atas portofolio kredit maupun risiko pasar. Di samping itu telah dilakukan pemantauan penanganan dampak bencana gempa di Tasikmalaya dan Padang
3.	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan GCG	Telah melakukan <i>review</i> terhadap ketentuan GCG serta tugas dan kewajiban Komite Pemantau Risiko
4.	Memberikan masukan atas pelaksanaan dan pengembangan proses manajemen risiko	Komite mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas manajemen risiko teknologi informasi, pengembangan sistem <i>Operation Risk Management Information System (ORMIS)</i> , pengembangan <i>Data Recovery Center (DRC)</i> , dan pelaksanaan <i>Business Continuity Planning (BCP)</i> . Di samping itu juga telah dilakukan rapat koordinasi dengan Komite Audit, khususnya membahas pengembangan <i>risk based audit</i> dan hasil audit yang terkait dengan manajemen risiko
5.	Melakukan evaluasi Pedoman dan Ketentuan yang terkait dengan proses Manajemen Risiko	Telah melakukan evaluasi atas ketentuan dan pedoman kerja sebagai bagian dari tugas Komite Pemantau Risiko untuk memastikan bahwa BCA memiliki infrastruktur yang baik untuk mengendalikan risiko. Pada tahun 2009 telah dilakukan <i>review</i> terhadap berbagai Pedoman <i>Trading</i> di Divisi Tresuri
6.	Memantau kesiapan Bank atas Regulasi Baru	Telah melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan regulasi di bidang IT yang harus dipenuhi pada awal tahun 2009
7.	Menghadiri kegiatan dalam rangka pelaksanaan GCG	Komite Pemantau Risiko telah menghadiri Rapat Kerja Nasional, Rapat Umum Pemegang Saham dan <i>Analyst Meeting</i>

Mengacu pada pelaksanaan tugas dan kewajiban Komite Pemantau Risiko serta melihat perkembangan kondisi bisnis BCA dan lingkungan makro, maka hasil

pemantauan Komite Pemantau Risiko selama tahun 2009 terhadap risiko BCA secara umum sangat baik dan terkendali.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi per Desember 2009

Dr. Raden Pardede	Ketua (juga sebagai Komisaris Independen)
Eugene Keith Galbraith	Anggota (juga sebagai Presiden Komisaris)
Lianawaty Suwono	Anggota (juga sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia)

Keanggotaan

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua yang juga sebagai Komisaris Independen, seorang Presiden Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi unit kerja sumber daya manusia.

Masa tugas Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ini akan berakhir sampai dengan akhir masa tugas jabatan Dewan Komisaris BCA yaitu sampai dengan saat ditutupnya RUPST yang akan diselenggarakan pada tahun 2011.

Profil singkat anggota Komite Remunerasi dan Nominasi disajikan pada bagian Data Perusahaan, halaman 238 Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi.
2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BCA.
 - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi.
3. Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Memastikan kebijakan remunerasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.
5. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
6. Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat

Rapat Komite dilaksanakan sesuai kebutuhan Perseroan, sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib

Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, dan dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota. Sepanjang tahun 2009, rapat Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilaksanakan 1 (satu) kali.

Berikut penyelenggaraan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2009.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi					
No.	Tanggal	Perihal	RP	EKG	LS
1.	7 Mei	Rekomendasi pemberian Tantiem tahun buku 2008 kepada Dewan Komisaris dan Direksi serta Nominasi calon anggota Direksi BCA	O	O	O

Keterangan

O : Hadir X : Tidak Hadir
RP : Dr. Raden Pardede
EKG : Eugene Keith Galbraith
LS : Lianawaty Suwono

Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak sedangkan segala keputusan rapat Komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite. Hasil risalah rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat

yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*Dissenting Opinions*) yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Program Kerja dan Realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2009		
No.	Program Kerja	Realisasi
1.	Tantiem tahun buku 2008	Telah dibayarkan pada Juni 2009
2.	Nominasi calon anggota Direktur BCA	Nominasi telah disetujui dalam RUPST 18 Mei 2009 dan efektif diangkat 14 September 2009

C. DIREKSI

Direksi bertanggung jawab menyusun strategi bisnis, anggaran dan rencana kerja sesuai dengan Visi dan Misi BCA, serta mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Direksi juga bertanggung jawab terhadap struktur pengendalian internal BCA dan penerapan manajemen risiko serta praktik-praktik tata kelola yang baik. Direksi memastikan agar praktik-praktik akuntansi BCA sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan perusahaan publik serta prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Disamping itu Direksi mengawasi pelaksanaan audit

internal dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan arahan Dewan Komisaris.

Keanggotaan

Jumlah anggota Direksi per Desember 2009 adalah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) Presiden Direktur, 1 (satu) Wakil Presiden Direktur, dan 7 (tujuh) Direktur dimana salah satu Direktur merangkap juga sebagai Direktur Kepatuhan. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia dan memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank.

Susunan Keanggotaan Direksi BCA per Desember 2009	
Djohan Emir Setijoso	Presiden Direktur
Jahja Setiaatmadja	Wakil Presiden Direktur
Dhalia Mansor Ariotedjo	Direktur
Anthony Brent Elam	Direktur
Suwignyo Budiman	Direktur
Renaldo Hector Barros	Direktur
Henry Koenafifi	Direktur
Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)
Armand Wahyudi Hartono*	Direktur

* Armand Wahyudi Hartono, sesuai surat persetujuan BI, efektif menjadi anggota Direksi sejak 14 September 2009

Anggota Direksi diangkat, diganti dan/atau diberhentikan melalui keputusan RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris setelah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi *Fit and Proper Test* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Anggota Direksi juga tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Masa jabatan anggota Direksi ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST Perseroan tahun 2011.

Profil singkat masing-masing Direksi disajikan pada bagian Data Perusahaan, halaman 232 Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi:

1. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan risalah rapat Direksi.
3. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Dokumen Perusahaan.
4. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya, yang disimpan di tempat kedudukan Perseroan.
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal BCA, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas terkait lainnya.
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
7. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BCA yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain berbagai kebijakan kepegawaian dalam berbagai surat keputusan dan edaran-edaran yang dapat diakses seluruh pegawai serta melalui buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB), *Website* BCA, kebijakan mengenai sistem *recruitment*, sistem promosi dan sistem remunerasi. Pengungkapan tersebut dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai.
8. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
9. Sehubungan dengan penerapan manajemen risiko, Direksi:
 - a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif.
 - b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh BCA secara keseluruhan.
 - c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
 - d. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
 - e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.
 - f. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
 - g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - i. keakuratan metodologi penilaian risiko;
 - ii. kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
 - iii. ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur etika kerja, waktu kerja, dan pelaksanaan rapat.

BCA menyelenggarakan program orientasi untuk anggota Direksi baru agar memperoleh pemahaman tentang BCA dalam waktu lebih singkat sehingga dapat menjalankan perannya dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu, anggota Direksi juga terus-menerus meningkatkan kemampuan, pengetahuan maupun wawasannya dalam mengikuti perkembangan terakhir yang terjadi di bidang industri perbankan.

Komite Eksekutif Penunjang Direksi

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Direksi yang efektif dan efisien, Direksi telah membentuk 7 (tujuh) Komite Eksekutif di bawah Direksi, yaitu:

1. Komite Teknologi Informasi (KTI)
2. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)
3. *Asset & Liability Committee* (ALCO)
4. Komite Kredit (KK)
5. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK)
6. Komite Sumber Daya Manusia (KSDM)
7. Komite Manajemen Risiko (KMR)

1. Komite Teknologi Informasi (KTI)

KTI dibentuk untuk memastikan keunggulan bersaing melalui pemanfaatan teknologi informasi. Fungsi pokok KTI antara lain memantau dan mengevaluasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh kegiatan yang berdampak signifikan bagi BCA. KTI mempunyai wewenang untuk menetapkan arah dan kebijakan pengembangan teknologi informasi yang mendukung kinerja BCA.

2. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

KKP dibentuk untuk mengarahkan perumusan kebijakan perkreditan dalam rangka penyaluran kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Komite tersebut berfungsi sebagai Komite Penasihat Direksi yang memantau serta mengevaluasi penerapan kebijakan perkreditan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen serta melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) BCA. Komite tersebut membuat laporan atas risalah rapat rutin yang diselenggarakan setiap 6 (enam) bulan sekali dan dapat menyelenggarakan rapat khusus untuk membahas hal tertentu.

3. Asset & Liability Committee (ALCO)

ALCO berfungsi antara lain untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk mencukupi kebutuhan likuiditas bank dan meminimalisasi *idle funds*. Selain itu ALCO menetapkan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, strategi harga dan strategi dalam penataan portofolio investasi dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga, sehingga dapat dicapai tingkat *net interest margin* yang optimum. Realisasi kerja Komite tersebut dilaporkan melalui risalah rapat rutin dan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu. Komite tersebut mengadakan rapat minimum sekali dalam 1 (satu) bulan.

4. Komite Kredit (KK)

KK dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan

kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BCA dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian.

Fungsi pokok KK adalah:

- Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa kredit yang lebih mendalam dan komprehensif.
- Memberikan rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul.
- Melakukan koordinasi dengan *Asset & Liability Committee (ALCO)* dalam hal aspek pendanaan kredit dan penyesuaian suku bunga kredit terutama untuk debitur korporasi dan komersial.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Komite Kredit dikelompokkan berdasarkan kategori kredit, yakni: KK Korporasi dan KK Komersial

Pertanggungjawaban Komite disampaikan melalui risalah rapat, memorandum keputusan yang diedarkan dan laporan berkala Komite.

5. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK)

KPKK dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus kepegawaian melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan karyawan. Dengan adanya rekomendasi tersebut maka keputusan Direksi yang diambil dapat memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan. KPKK dapat memberikan saran dan pengarahan (jika diperlukan) kepada cabang dan wilayah dalam menangani kasus-kasus menyangkut kepegawaian. Komite tersebut melaporkan realisasi kerjanya melalui risalah rapat rutin dan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.

6. Komite Sumber Daya Manusia (KSDM)

KSDM dibentuk untuk memastikan bahwa penerapan kebijakan sumber daya manusia dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan. Fungsi pokok Komite tersebut membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi sumber daya manusia, terutama yang terkait dengan pengembangan dan penghargaan terhadap karyawan. Realisasi kerja Komite tersebut dilaporkan melalui risalah rapat rutin setiap 6 (enam) bulan sekali dan risalah rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu dan laporan khusus/kegiatan (jika diperlukan).

7. Komite Manajemen Risiko (KMR)

KMR dibentuk untuk menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, serta menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif dan menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*). Pertanggungjawaban Komite dilaporkan melalui laporan tertulis secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Direksi. Sedangkan mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu, juga dilaporkan kepada Direksi secara tertulis.

Kehadiran Direksi dalam Rapat-Rapat Komite Eksekutif Periode Tahun 2009

		D.E. Setijoso	Jahja Setiaatmadja	Dhalia M. Ariotedjo	Anthony Brent Elam	Suwignyo Budiman	Renaldo Hector Barros	Henry Koenafi	Subur Tan	Armand W. Hartono#
Asset & Liability Committee (ALCO)	J	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	H	14**	11	13	13	11	4*	10	8*	4*
Komite Manajemen Risiko (KMR)	J	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	H	3	2	3	4**	2	4	4	4	2
Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)	J	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	H	2**	2	1	2	2	0*	0*	1*	0*
Komite Kredit (KK)	J	53	53	53	53	53	53	53	53	53
	H	51	34	52	36**	7	7*	16*	22*	9*
Komite Teknologi Informasi (KTI)	J	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	H	4	3	0*	4	3*	4**	0*	0*	1*
Komite Sumber Daya manusia (KSDM)	J	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	H	2**	1	0*	0*	1*	0*	0*	2	0*
Komite Pertimbangan Kasus Kpegawaian (KPKK)	J	Telah dilaksanakan 8X								
	H	Dihadiri oleh Pejabat Eksekutif di bawah Direksi (Ketua dan Anggota) (Apabila perlu, hasil dari rapat KPKK dibawakan dalam rapat Direksi)								

Catatan :

J : Jumlah rapat

H : Kehadiran dalam rapat

* Bukan anggota

** Sebagai Ketua pada Komite dimaksud

Armand Wahyudi Hartono, sesuai surat persetujuan BI, efektif menjadi anggota Direksi sejak 14 September 2009

D. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN, FUNGSI AUDIT EKSTERN DAN FUNGSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

D.1 Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sesuai ketentuan yang berlaku, BCA telah menugaskan salah satu anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan. Saat ini, Direktur Kepatuhan BCA dijabat oleh Subur Tan. Profil Direktur Kepatuhan dapat dilihat di halaman 234 laporan tahunan ini. Pengangkatan Direktur Kepatuhan BCA telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) pada tahun 2002. Direktur Kepatuhan merupakan salah satu bagian yang penting dalam fungsi pengawasan di BCA.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999, Direktur Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab sekurang-kurangnya untuk :

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BCA telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BCA tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
3. Memantau dan menjaga kepatuhan BCA terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh BCA kepada Bank Indonesia.

Untuk membantu tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan, dibentuk Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan (SKHK) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional. SKHK juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Tindak Pidana Pencucian Uang di BCA.

Selama tahun 2009 aktivitas fungsi kepatuhan, termasuk penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan *Anti Money Laundering*, telah dilakukan antara lain :

1. Melakukan kajian kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal BCA untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
2. Melakukan kajian kepatuhan terhadap penyediaan dana dalam jumlah besar baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait, dan evaluasi atas aktivitas penyelamatan kredit.
3. Melakukan kajian kepatuhan terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru.
4. Melakukan uji kepatuhan terhadap unit-unit kerja operasional.
5. Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan untuk mengembangkan kesadaran akan budaya patuh.
6. Memperbaharui *data base* ketentuan/peraturan.
7. Menerapkan manajemen risiko kepatuhan secara konsolidasi dengan perusahaan anak BCA.
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, menganalisis dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, dan transaksi keuangan tunai kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
9. Melakukan pengkinian data nasabah dalam rangka penerapan prinsip mengenal nasabah.
10. Menyampaikan laporan bulanan kepatuhan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali.

Secara umum pelaksanaan kepatuhan selama tahun 2009 telah berjalan baik, dan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih ada pada pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang umumnya bersifat administratif dan tidak material, BCA telah dan terus melakukan tindak lanjut perbaikan.

Mengingat kepatuhan merupakan suatu proses yang terus berjalan seiring dengan perkembangan bisnis dan peraturan yang ada, BCA berkomitmen untuk terus menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu proyek di tahun 2010 sebagai pelaksanaan komitmen BCA terhadap penerapan prinsip kehati-hatian adalah penyesuaian kebijakan dan prosedur internal Prinsip Mengenal Nasabah dengan Peraturan Bank Indonesia yang baru mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

D.2 Fungsi Audit Intern

Fungsi audit intern dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal yang independen terhadap unit kerja operasional. Dalam menjalankan fungsinya, Divisi Audit Internal melapor langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Sesuai misinya, Divisi Audit Internal bertujuan memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional BCA dengan melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola, serta memberikan konsultasi bagi pihak BCA yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugas audit intern.

Rencana audit strategis dan anggaran audit tahunan disetujui oleh Presiden Direktur, Komite Audit dan Dewan Komisaris. Rencana audit tahunan disusun menggunakan pendekatan audit berdasarkan risiko dengan memperhatikan sasaran bisnis BCA. Cakupan audit intern meliputi kegiatan Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi dan Satuan Kerja di Kantor Pusat, serta anak perusahaan BCA.

Dalam melaksanakan audit intern, Divisi Audit Internal berpedoman pada Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*), Manual Kerja Divisi Audit Internal yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dari Bank Indonesia, disamping menggunakan standar yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA) serta *Information System Audit & Control Association* (ISACA) sebagai acuan ke arah *global best practices*. Secara berkala pendekatan, sistem dan prosedur serta manual kerja audit disesuaikan untuk merefleksikan perubahan dan perkembangan bisnis, organisasi BCA dan profesi audit intern.

Divisi Audit Internal melakukan pemeriksaan berdasarkan rencana audit yang telah disetujui oleh Manajemen BCA. Pada setiap penyelesaian penugasan audit, Divisi Audit Internal menyampaikan laporan hasil audit – temuan-temuan dan rekomendasi – kepada manajemen BCA dan *auditee* untuk ditindaklanjuti. Divisi Audit Internal menyampaikan rangkuman laporan setiap triwulan kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit mengenai status rencana audit dan status tindak lanjut temuan audit oleh *auditee*. Hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dibahas dalam rapat bulanan Divisi Audit Internal bersama Presiden Direktur dan Komite Audit. Pelaksanaan kegiatan audit dan pokok-pokok hasil audit dilaporkan ke Bank Indonesia setiap semester.

Pengendalian mutu audit dilakukan melalui supervisi atasan dan *review* internal secara berkesinambungan. Kaji ulang oleh pihak yang independen terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi Divisi Audit Internal dan kepatuhannya terhadap SPFAIB dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sejak tahun 1998 dan terakhir dilaksanakan pada tahun 2007. Disamping itu Divisi Audit Internal menjalankan *post-audit survey* pada setiap kunjungan audit sejak tahun 2008.

Dalam menjalankan profesinya, seluruh staf Divisi Audit Internal berpedoman pada nilai-nilai inti Perseroan yang meliputi: fokus pada pelanggan, integritas, kerjasama, meraih keunggulan yang berkelanjutan, serta mematuhi kode etik dan prinsip-prinsip audit internal yaitu: Integritas, Obyektivitas, Kompetensi dan Menjaga Kerahasiaan.

Divisi Audit Internal mengembangkan program pelatihan yang berkesinambungan bagi segenap staf dan auditor melalui penyertaan dalam program sertifikasi profesi, pelatihan dalam kelas dan di lapangan (*on the job*), dan seminar yang dihadiri staf Divisi Audit Internal. Program pengembangan diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam bidang spesialisasi dan standar profesi audit internal, serta memastikan seluruh auditor memiliki kualifikasi profesi yang dapat memenuhi standar dan kebutuhan Divisi Audit Internal.

D.3 Fungsi Audit Ekstern

Laporan Keuangan BCA setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor eksternal yang independen. Penunjukan KAP dilakukan oleh Dewan Komisaris sesuai rekomendasi dari Komite Audit, dan harus disetujui oleh RUPS. Penunjukan KAP dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain bahwa KAP tersebut merupakan entitas yang terdaftar di Bank Indonesia, tidak memberikan jasa lain kepada BCA pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan, dan tidak melakukan pekerjaan audit atas Laporan Keuangan BCA lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut. Selain itu, KAP yang ditunjuk juga harus memenuhi persyaratan BCA terkait dengan kompetensi profesionalnya. Dalam seleksi penunjukan KAP, BCA hanya mengikutsertakan 4 (empat) KAP terbesar yang terdaftar di Bank Indonesia.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPST BCA pada tanggal 18 Mei 2009, Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundangan yang berlaku, telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sarwoko dan Sandjaja, afiliasi dari Ernst & Young,

untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BCA untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2009, dengan perkiraan imbal jasa sebesar USD 410.000.

D.4 Fungsi Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penerapan GCG BCA terutama yang menyangkut pelaksanaan keterbukaan, selain memastikan agar BCA mematuhi ketentuan dan peraturan pasar modal yang berlaku. Sekretaris Perusahaan dibentuk untuk memelihara citra BCA dan melindungi kepentingan BCA melalui terbentuknya komunikasi dan hubungan yang baik dengan segenap *stakeholder* melalui berbagai aktivitas hubungan masyarakat dan mewakili Direksi dalam setiap hal yang berhubungan dengan komunikasi eksternal, khususnya kepada investor, masyarakat pasar modal dan pemegang saham.

Sekretaris Perusahaan memberikan saran-saran kepada Dewan Komisaris dan Direksi apabila diperlukan dan menjalankan berbagai kegiatan untuk mendukung Dewan Komisaris dan Direksi termasuk korespondensi, protokoler dan kelogistikan.

Fungsi Pokok Sekretaris Perusahaan yaitu:

1. Mewakili Direksi dalam hubungannya dengan pihak luar, khususnya investor, masyarakat pasar modal, lembaga-lembaga terkait dan pemegang saham.
2. Memantau kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan tentang pasar modal.
3. Mendukung penyelenggaraan Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris agar sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan lainnya.
4. Melakukan aktivitas yang mendukung pelaksanaan prinsip keterbukaan terutama menyangkut kinerja BCA melalui komunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Saat ini, Sekretaris Perusahaan BCA dijabat oleh Raymon Yonarto, yang telah menjabat sejak tahun 2007. Profil Sekretaris Perusahaan dapat dilihat di halaman 238 Laporan Tahunan ini.

Berikut adalah kegiatan Sekretaris Perusahaan dalam rangka pelaksanaan keterbukaan ditahun 2009

Kegiatan	Jumlah
Rapat Umum Pemegang Saham	1
Forum Investor dan <i>Non Deal Road Show</i>	12
Kunjungan oleh Investor dan Analis	129
Telekonferensi	18
Pertemuan dengan Analis dan Media setiap Kuartal	4
Paparan Publik	1

E. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal BCA mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko; sistem informasi manajemen risiko; dan sistem pengendalian intern.

BCA telah menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan BCA, dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia, melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk dan aktivitas baru.
2. Memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR) yang bertujuan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dihadapi oleh BCA.
3. Secara aktif mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk langkah menghadapi perubahan kondisi

pasar dengan cara membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

4. Memastikan bahwa penyusunan sistem dan prosedur kerja yang ada telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
5. Memastikan bahwa terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan (SKHK) dan Divisi Audit Internal (DAI).
6. Memastikan bahwa DAI melakukan *review* secara independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional BCA secara berkala. Hasil *review* DAI disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit.
7. Memantau kepatuhan BCA dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku melalui unit kerja SKHK.
8. Memastikan bahwa Pengawasan Internal Cabang (PIC), Pengawasan Internal Kantor Wilayah (PIKW), dan DAI telah melakukan fungsi evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur yang berlaku di BCA. Hasil evaluasi dari PIC, PIKW dan DAI tersebut dijadikan tolok ukur tingkat kepatuhan unit kerja terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

- Membuat Laporan Profil Risiko setiap triwulan dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap profil risiko BCA, maka predikat risiko komposit BCA adalah rendah (*low*), sebagai hasil dari penilaian risiko inheren yang rendah (*low*) dan sistem pengendalian yang dapat diandalkan (*strong*).

F. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)

BCA telah memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, sebagaimana diatur dalam Manual Ketentuan

Kredit UKM, Komersial, Korporasi dan Konsumen. Evaluasi dan pengkinian atas kebijakan dalam manual ketentuan kredit tersebut dilakukan secara berkala. Pendanaan kepada pihak terkait dan kepada debitur dengan dana dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, pendanaan kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen.

Sepanjang tahun 2009, tidak terdapat pelanggaran ataupun pelampauan atas BMPK, dan pelaporan BMPK kepada Bank Indonesia senantiasa dilakukan secara tepat waktu.

Tabel di bawah ini tentang menguraikan tentang pendanaan kepada pihak terkait maupun debitur individu dan grup di BCA selama tahun 2009.

No.	Penyedia Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (juta Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	107	1.970.124
2.	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	50	39.304.079
	b. Grup	30	41.794.387

G. RENCANA STRATEGIS

Merujuk pada PBI No. 6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum, BCA telah menyusun hal-hal sebagai berikut:

- Rencana Bisnis Bank (RBB) yang mencakup periode 3 (tiga) tahun. RBB tersebut merupakan cetak biru rencana bisnis BCA.
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) merupakan strategi bisnis BCA jangka pendek (satu tahun). RKAT lebih berorientasi pada pelaksanaan termasuk didalamnya Program Kerja Divisi (PKD) beserta anggaran yang dibutuhkan.

RBB dan RKAT telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta telah sesuai dengan Visi dan Misi BCA. Penyusunan RBB dan RKAT didasari oleh strategi BCA dan didukung dengan analisa makro ekonomi (dunia dan regional, serta Indonesia), perbankan nasional, arahan Dewan Komisaris, analisa SWOT, analisa kompetitor, dan hal-hal terkait lainnya.

RBB dan RKAT tersebut disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dimana strategi bisnis dirumuskan melalui serangkaian diskusi yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan jajaran Manajemen lainnya.

Pencapaian target jangka menengah yang dimuat dalam RBB dan target jangka pendek yang dimuat dalam RKAT senantiasa dimonitor secara berkala.

Direksi telah mengkomunikasikan RBB dan RKAT kepada seluruh jenjang organisasi di BCA dan telah melaksanakan rencana yang ada di dalamnya secara efektif, dimana:

- visi, misi dan strategi bisnis Perseroan dipresentasikan secara berkala ke berbagai jenjang organisasi;
- rapat bulanan dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian target bisnis perusahaan;
- pemantauan realisasi RBB dan RKAT setiap triwulan dan dilaporkan ke Bank Indonesia; dan
- buku RBB dan RKAT serta realisasi triwulannya didistribusikan kepada seluruh Divisi dan Kepala Kantor Wilayah.

Pelaksanaan RBB dan RKAT tersebut diawasi oleh Dewan Komisaris dengan melakukan rapat bulanan untuk mengevaluasi dan memberikan pengarahannya kepada Direksi. Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan per semester dari Dewan Komisaris ke Bank Indonesia.

H. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

Informasi kondisi keuangan dan non keuangan BCA telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan dimaksud antara lain mencakup:

- a. Informasi umum, yang meliputi antara lain kepengurusan, kepemilikan saham, perkembangan usaha dan kelompok usaha, strategi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen Perseroan.
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia dan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

BCA telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan terkait. Laporan ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi BCA yang pengumumannya dilakukan dalam 3 (tiga) surat kabar, 2 (dua) berbahasa Indonesia dan 1 (satu) berbahasa Inggris, yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat BCA.

3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

BCA menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dalam format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia. Selanjutnya, laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Bank Indonesia untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di *website* Bank Indonesia.

4. Laporan Keuangan Konsolidasi

BCA telah menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku serta menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia maupun ketentuan perusahaan publik.

5. Laporan Non Keuangan Bank

BCA telah memberikan informasi mengenai produk BCA secara jelas, akurat dan terkini. Informasi ini dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah seperti *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang BCA pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah dan/ atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *hotline service/call center* atau *website*. Selain itu BCA menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

3. Mempublikasikan informasi produk BCA sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
4. Mempublikasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
5. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia, regulator dan lembaga-lembaga lainnya seperti yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya.
6. Melaporkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara transparan dan tepat waktu pada *website* BCA.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, BCA telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mempublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholder* termasuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka tidak ada kondisi keuangan dan non keuangan bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

I. REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA selama tahun 2009.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi*	
	orang	juta Rupiah	orang	juta Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	5	34.605	9	106.598
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura	5	822	9	1,111
Total	5	35.427	9	107.709

Berikut adalah informasi remunerasi per orang dalam 1 (satu) tahun.

	Jumlah Anggota	
	Dewan Komisaris	Direksi*
Di atas Rp 2 miliar	5	9
Di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2 miliar	-	-
Di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	-	-
Rp 500 juta ke bawah	-	-

* Armand Wahyudi Hartono, sesuai surat persetujuan BI, efektif menjadi anggota Direksi sejak 14 September 2009

J. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan yang diberikan oleh BCA kepada pegawainya. Gaji tersebut termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya dan gaji tersebut ditetapkan dan dibayarkan dengan mengacu kepada perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan skala gaji yang wajar dari *peer group*.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 54,6x
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 2,2x
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah sebesar 1,6x
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi adalah sebesar 4,6x

K. KEPEMILIKAN SAHAM OLEH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BCA membuat Daftar Khusus mengenai kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang jumlahnya mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor baik pada BCA maupun bank lain atau lembaga keuangan bukan bank atau perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Daftar Khusus tersebut diisi dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan diperbaharui secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Sampai dengan Desember 2009, tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor baik pada BCA maupun pada bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

L. PENYELENGGARAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT DIREKSI, SERTA RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja serta dalam rangka pelaksanaan GCG, Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin dan berkala mengadakan pertemuan/rapat. Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat tersebut dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil-hasil rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan secara baik.

Sepanjang tahun 2009 telah diselenggarakan sebanyak 43 kali rapat Dewan Komisaris, 44 kali rapat Direksi, dan 7 kali rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Berikut adalah informasi mengenai frekuensi penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi serta rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris maupun Direksi di setiap rapat yang diselenggarakan selama periode tahun 2009.

Nama Komisaris / Direksi	Rapat Dewan Komisaris		Rapat Direksi		Rapat Gabungan Dewan Komisaris / Direksi	
	Jumlah	Hadir	Jumlah	Hadir	Jumlah	Hadir
Dewan Komisaris						
Eugene Keith Galbraith	43	41	-	-	7	7
Tonny Kusnadi	43	39	-	-	7	4
Cyrillus Harinowo	43	32	-	-	7	7
Raden Pardede	43	29	-	-	7	3
Sigit Pramono	43	36	-	-	7	7
Direksi						
Djohan Emir Setijoso	-	-	44	39	7	7
Jahja Setiaatmadja	-	-	44	32	7	7
Dhalia M. Ariotedjo	-	-	44	36	7	5
Anthony Brent Elam	-	-	44	35	7	4
Suwignyo Budiman	-	-	44	40	7	7
Renaldo Hector Barros	-	-	44	38	7	6
Henry Koenafi	-	-	44	32	7	6
Subur Tan	-	-	44	41	7	7
Armand W. Hartono*	-	-	44	9	7	1

* Armand Wahyudi Hartono, sesuai surat persetujuan BI, efektif menjadi anggota Direksi sejak 14 September 2009

M. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

Sampai dengan Desember 2009, terdapat 1 (satu) anggota Direksi BCA yang memiliki hubungan sebagaimana dimaksud di atas.

N. OPSI SAHAM

BCA pernah melaksanakan Program Opsi Saham yaitu MSOP dari tahun 2001 sampai tahun 2006.

Dan sejak berakhirnya Program MSOP tersebut pada November 2006, sampai berakhirnya periode Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2009 ini, BCA tidak melaksanakan Program Opsi Saham.

O. PENYIMPANGAN INTERNAL

Penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional BCA.

Berikut adalah kasus-kasus penyimpangan internal yang dijumpai di BCA selama tahun 2009 dengan jumlah lebih dari Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah). Selama tahun 2009 hanya terdapat 1 (satu) kasus *fraud* dimana kasus tersebut telah diselesaikan.

Internal <i>Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total <i>Fraud</i>	-	-	4	1	-	-
Telah diselesaikan	-	-	3	1	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BCA	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	1	-	-	-

P. PERMASALAHAN HUKUM

Berikut adalah jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian per Desember 2009.

Permasalahan Hukum BCA per Desember 2009	Jumlah Perdata	Jumlah Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) :		
• Rp 101 juta – Rp 500 juta	2	-
• Diatas Rp 500 juta	-	-
Total	2	-
Dalam proses penyelesaian :		
• Rp 101 juta – Rp 500 juta	30	-
• Rp 501 juta – Rp 1.638 juta	2	-
Total	32	-
Total Perkara	34	-

Q. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

BCA memiliki komitmen yang tinggi untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan tunduk kepada peraturan terkait yang ada. Sebagai implementasi dari komitmen tersebut RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2008 telah memberikan persetujuan dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang nilainya tidak melebihi Rp 25 miliar atau ekuivalennya untuk 1 (satu) atau beberapa transaksi yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun buku. Selanjutnya, transaksi

tersebut dilakukan dengan persetujuan dari Komite Audit terlebih dahulu.

Disamping itu, BCA telah memiliki kebijakan internal yang mengharuskan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eselon 5 (S5) sampai dengan eselon 1 (S1) membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan, yang dikinikn setiap tahun.

Berikut adalah transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi selama kurun waktu tahun 2009.

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
1.	BCA dengan pihak terafiliasi	RUPSLB tanggal 22 Mei 2008	<ul style="list-style-type: none"> Pembelian Tanah di Semarang Penggunaan Hotel Indonesia Kempinski 	Rp 13.435.500.000 Rp 1.100.243.474	Transaksi-transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku

R. SHARES BUY BACK

Sepanjang tahun 2009 BCA tidak melaksanakan program *shares buy back*.

S. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

BCA turut aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Di bawah bendera 'Bakti BCA', kegiatan sosial difokuskan pada pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Rincian lebih lengkap mengenai kegiatan kepedulian sosial BCA selama tahun 2009 dapat dilihat di halaman 98 Laporan Tahunan ini.

Pemberian dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh BCA selama tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Program Kegiatan Kepedulian Sosial BCA Selama Tahun 2009			
No.	Jenis Program/ Tujuan Penggunaan	Penerima Dana	Nilai Nominal yang diberikan (> Rp 25 juta) atau bentuk lainnya
1.	Pendidikan dan Seni		
	• PPA (Program Pendidikan Akuntansi) non-gelar	Peserta PPA adalah lulusan SMU yang berprestasi namun memiliki kendala finansial untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, program berlangsung selama 30 bulan. Jumlah peserta pada tahun 2009 : 211 orang	Rp 5.442.206.250
	• Beasiswa Bakti BCA	Peserta adalah mahasiswa S1 yang berprestasi namun memiliki kendala finansial, beasiswa diberikan selama 2 tahun. Jumlah peserta selama tahun 2009 : 111 orang	Rp 365.484.900
	• Bakti BCA Terintegrasi	Program pelatihan <i>Future Leader</i> yang diikuti oleh 21 siswa dan guru sekolah menengah umum penerima bantuan Bakti BCA Terintegrasi di Gunung Kidul (Yogyakarta), Lampung (Sumatera), dan Serang (Banten).	Rp 137.308.215
	• LPB Astra-BCA-Pertamina	Bersama dengan PT Astra Internasional Tbk dan PT Pertamina (Persero), BCA mendirikan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari pelaku wirausaha. Pada tahun 2009 diresmikan LPB Mitra Bersama di Waru Sidoarjo, Jawa Timur	Rp 1.051.038.000
	• Edukasi Perbankan	Edukasi mengenai perbankan di beberapa lembaga pendidikan seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (UNDIP), dan Universitas Negeri Semarang (UNS) serta di 15 Sekolah Menengah Umum (SMU) dan 3 Sekolah Dasar (SD).	Rp 270.000.000

Program Kegiatan Kepedulian Sosial BCA Selama Tahun 2009			
No.	Jenis Program/ Tujuan Penggunaan	Penerima Dana	Nilai Nominal yang diberikan (> Rp 25 juta) atau bentuk lainnya
	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi BCA kepada Lembaga Pendidikan dan lembaga lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Karyawan Unika Atmajaya Perpustakaan Unika Atmajaya Yogyakarta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sakti Alam Kerinci Bengkulu ABFII Perbanas (dahulu STIE Perbanas) 50 (lima puluh) SD dan SMPN di Jabodetabek Yayasan pengelola anak-anak berkebutuhan khusus dalam acara konser piano "Hee Ah Lee" Lembaga-lembaga lainnya 	Rp 3.322.424.438
	<ul style="list-style-type: none"> Seni budaya Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Pameran Pita Prada Bienale Seni Lukis Tradisonal Bali, Utan Kayu Literary Bienale 2009 dan Wayang Orang Sriwedari Solo 	Rp 255.000.000
2.	Kesehatan dan Bencana Alam		
	<ul style="list-style-type: none"> Donor Darah Bakti BCA 	Bekerjasama dengan PMI, pendonor adalah karyawan BCA di Kantor Pusat dan beberapa cabang	Mendonorkan 1.816 kantong darah pada tahun 2009. Sejak tahun 1990 sampai dengan 2009 telah mendonorkan 35.465 kantong darah
	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Operasi Katarak 	<p>Layanan dilakukan bekerjasama dengan Seksi Penanggulangan Buta Katarak-Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (SPBK-Perdami) untuk penderita katarak yang kurang mampu. Pada periode 2009 operasi katarak dilakukan di Bogor, Bengkulu dan Tasikmalaya sebanyak 210 operasi</p> <p>Sejak 2001 sampai dengan 2009 BCA telah memberikan bantuan 1.124 operasi katarak di beberapa kota di Indonesia</p>	Rp 143.476.998
	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung Program Imunisasi Rutin Unicef 	Merupakan program imunisasi rutin UNICEF bagi anak-anak Indonesia usia dibawah 1 tahun.	Rp 850.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan Bencana Alam 	<p>Memberikan donasi kepada masyarakat yang menjadi korban bencana alam gempa bumi di Tasikmalaya dan Sumatera Barat</p> <p>BCA membuka kembali rekening Bakti BCA untuk menampung dana dari nasabah, masyarakat dan mitra kerja BCA. Dana yang terkumpul melalui rekening tersebut adalah sebesar Rp 3.190.389.416,34</p>	Rp 863.006.071

T. SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG di BCA

Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG, BCA secara berkala melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap pelaksanaan GCG di BCA yang menyangkut 11 (sebelas) aspek penilaian sebagaimana diatur di dalam PBI.

Berikut ringkasan perhitungan nilai komposit *self assessment* GCG di BCA untuk periode tahun 2009:

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot (A)	Peringkat (B)	Nilai (A) x (B)	Catatan
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10%	1	0,10	Sesuai kriteria Pemingkatan SEBI *
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20%	1	0,20	sda
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10%	1	0,10	sda
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	1	0,10	sda
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5%	2	0,10	sda
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	5%	2	0,10	sda
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5%	2	0,10	sda
8.	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7,5%	2	0,15	sda
9.	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Dalam Jumlah Besar (<i>Large Exposures</i>)	7,5%	2	0,15	sda
10.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	15%	1	0,15	sda
11.	Rencana Strategis Bank	5%	2	0,10	sda
	Nilai Komposit	100%		1,35	

* Surat Edaran Bank Indonesia

Peringkat Komposit Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan GCG di BCA adalah 1,35 atau predikat "Sangat Baik" sesuai dengan klasifikasi peringkat komposit sebagaimana tabel berikut :

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
1,5 ≤ Nilai komposit < 2,5	Baik
2,5 ≤ Nilai Komposit < 3,5	Cukup Baik
3,5 ≤ Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik
4,5 ≤ Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

Adapun pertimbangan peringkat komposit hasil *self assessment* tersebut diatas didasarkan antara lain pada hal-hal berikut dibawah ini :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang antara lain memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi melalui 3 komite yang dibentuknya dan melalui rapat Dewan Komisaris. Pada tahun 2009 Dewan Komisaris telah mengadakan 43 kali rapat dan pada periode yang sama Dewan Komisaris juga mengadakan 7 kali rapat gabungan dengan Direksi. Pertemuan dengan frekuensi yang demikian tinggi membuktikan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Bank serta tim manajemennya termasuk Direksi

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam berbagai aspek kegiatan BCA antara lain dengan membentuk 3 Satuan Kerja dan 7 Komite Eksekutif yang membantu pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Direksi menyelenggarakan rapat dengan frekuensi yang cukup tinggi sebanyak 44 kali selama tahun 2009. Disamping itu Direksi telah memastikan fungsi Audit Internal, fungsi Audit Eksternal, fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern dan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (*large exposure*) terlaksana dengan baik.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Seluruh Komite penunjang Dewan Komisaris termasuk Komite-Komite penunjang Direksi mempunyai struktur, kompetensi, dan independensi

yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam PBI.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

BCA memiliki komitmen yang tinggi dalam menangani potensi terjadinya benturan kepentingan melalui kebijakan intern dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan terkait secara komprehensif. Sebagai salah satu implementasi dari komitmen tersebut RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2008 telah memberikan persetujuan dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang nilainya tidak melebihi Rp 25 miliar atau ekuivalennya untuk 1 (satu) atau beberapa transaksi yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun buku. Selanjutnya, transaksi tersebut dilakukan dengan persetujuan dari Komite Audit terlebih dahulu.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Sepanjang tahun 2009 kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku dapat terjaga dengan baik. Hal tersebut merupakan wujud atas tingginya komitmen Dewan Komisaris dan Direksi yang didukung oleh Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan (SKHK) yang bersifat independen dalam membantu tugas Direktur Kepatuhan dalam memantau kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Intern dilaksanakan dengan efektif dan optimal dimana Kepala Divisi Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Divisi Audit Internal (DAI) melakukan antara lain evaluasi atas proses manajemen risiko, struktur pengendalian intern dan tata kelola perusahaan untuk menilai kecukupan dan efektifitasnya. DAI juga melaksanakan fungsi konsultasi kepada pihak intern yang membutuhkan. Dalam menjalankan tugasnya, DAI berpedoman pada Piagam Audit

Intern (*Internal Audit Charter*) dan Manual Kerja Divisi Audit Internal yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan standar yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA) serta *Information System Audit and Control Association* (ISACA) sebagai acuan ke arah *global best practices*.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Laporan Keuangan BCA setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor eksternal yang independen. Adanya kesadaran dari pihak manajemen dari awal penunjukan sampai dengan akhir penunjukan untuk dapat memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang telah diterapkan, sehingga hanya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memenuhi persyaratan dan ketentuan saja yang diikutsertakan dalam proses seleksi, serta dalam pelaksanaannya semua hal selalu tertuang dalam perjanjian kerja yang disepakati bersama. Penunjukan KAP sebagai auditor eksternal independen BCA (termasuk Akuntan Publik yang tergabung dalam KAP tersebut) telah diputuskan dalam RUPS Tahunan BCA.

8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

Berdasarkan hasil penilaian terhadap profil risiko, BCA memiliki tingkat risiko yang rendah (Low). Hasil tersebut diraih berkat kualitas penerapan manajemen risiko yang mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank berbasis risiko yang mencakup 8 (delapan) risiko utama yang dihadapi bank yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan. BCA juga memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru BCA.

9. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*)

BCA telah memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*) dalam bentuk manual Ketentuan Kredit UKM, Komersial, Korporasi dan Konsumen dimana kebijakan tersebut selalu dievaluasi dan dikiniikan secara berkala. Penyediaan Dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar tersebut senantiasa dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan Bank Indonesia serta ketentuan terkait lainnya dan diputuskan juga oleh Dewan Komisaris secara independen.

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BCA, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal

BCA memiliki komitmen yang tinggi terhadap aspek transparansi dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan termasuk informasi produk dan jasa, penerapan pengelolaan pengaduan nasabah. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan di BCA telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

11. Rencana Strategis Bank

Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja Akhir Tahun (RKAT) disusun oleh BCA dengan merujuk kepada Peraturan Bank Indonesia No. 6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum. RBB telah sesuai dengan Visi dan Misi BCA dan disusun secara realistis, komprehensif, terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. RBB tersebut disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan sebelumnya dirumuskan melalui serangkaian diskusi yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan jajaran Manajemen lainnya. RBB tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh jenjang organisasi BCA.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

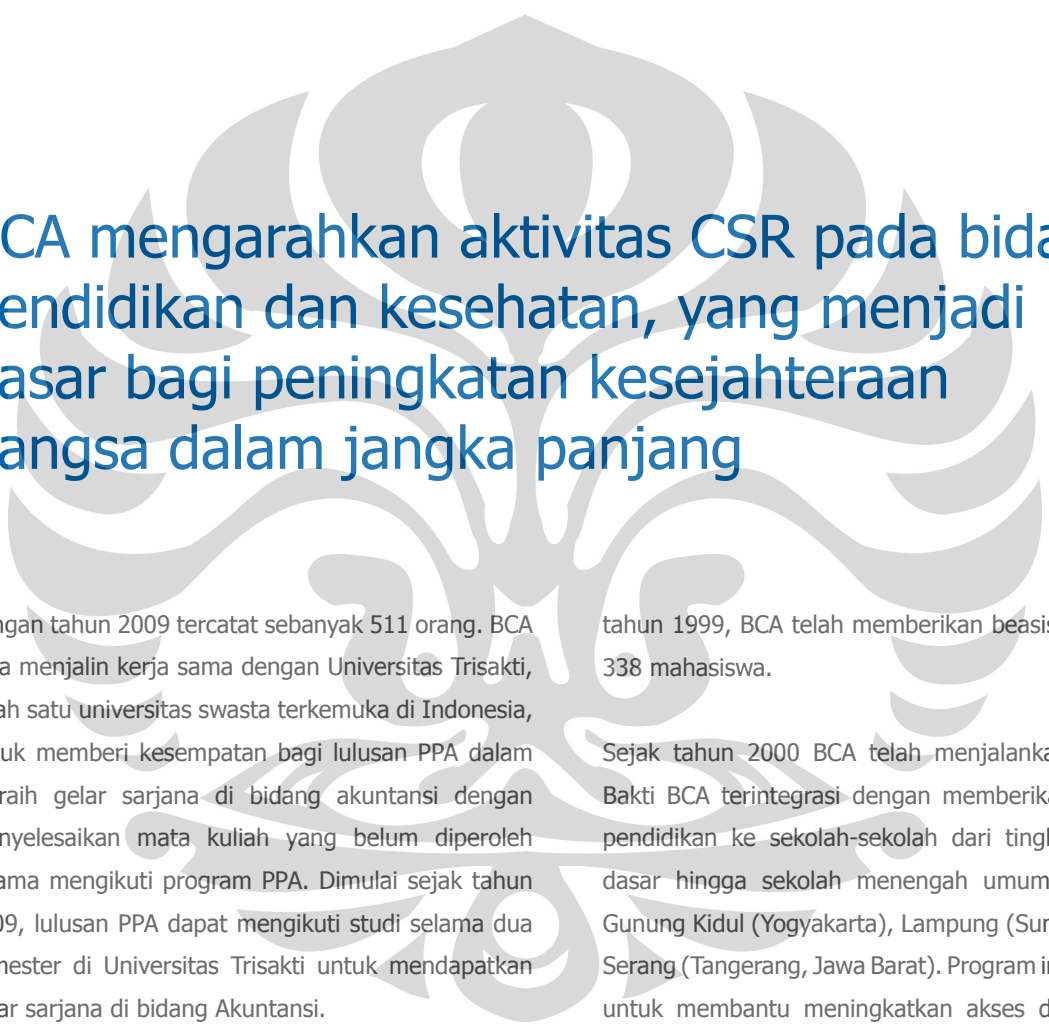
Sebagai bagian dari masyarakat, BCA memiliki komitmen memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan sosial dilakukan secara berkesinambungan di bawah payung Bakti BCA, dan diarahkan ke bidang pendidikan dan kesehatan, bidang yang menjadi dasar bagi peningkatan kesejahteraan bangsa dalam jangka panjang. BCA juga aktif berkontribusi dalam upaya untuk meringankan beban korban bencana alam di Indonesia.

Kontribusi di Bidang Pendidikan

Keterlibatan BCA dalam upaya untuk meningkatkan standar pendidikan di Indonesia diwujudkan melalui serangkaian program pendidikan bagi generasi muda

termasuk di dalamnya pemberian beasiswa bagi pelajar, bantuan kepada tenaga pengajar maupun penyediaan fasilitas belajar mengajar.

Sejak tahun 1996, BCA telah menjalankan Program Pengembangan Akuntansi (PPA), sebuah program pengembangan manajemen non gelar tanpa dipungut biaya, melalui metode belajar dan praktek kerja selama 30 bulan yang difokuskan pada bidang akuntansi. Program yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang bisnis dan akuntansi ini terbuka bagi lulusan sekolah menengah umum di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009 sebanyak 211 lulusan sekolah menengah umum berpartisipasi dalam program ini. Total alumni PPA sampai



BCA mengarahkan aktivitas CSR pada bidang pendidikan dan kesehatan, yang menjadi dasar bagi peningkatan kesejahteraan bangsa dalam jangka panjang

dengan tahun 2009 tercatat sebanyak 511 orang. BCA juga menjalin kerja sama dengan Universitas Trisakti, salah satu universitas swasta terkemuka di Indonesia, untuk memberi kesempatan bagi lulusan PPA dalam meraih gelar sarjana di bidang akuntansi dengan menyelesaikan mata kuliah yang belum diperoleh selama mengikuti program PPA. Dimulai sejak tahun 2009, lulusan PPA dapat mengikuti studi selama dua semester di Universitas Trisakti untuk mendapatkan gelar sarjana di bidang Akuntansi.

Bekerja sama dengan beberapa universitas, BCA menyediakan program beasiswa bagi para mahasiswa berprestasi yang membutuhkan bantuan finansial untuk menyelesaikan pendidikannya. Dana beasiswa yang diberikan mencakup biaya pendidikan dan bantuan uang saku bulanan selama dua tahun untuk setiap penerima beasiswa. Pada tahun 2009, sejumlah 111 mahasiswa dari 18 universitas dan lembaga pendidikan tinggi lainnya telah menerima beasiswa BCA. Sejak program ini diluncurkan pada

tahun 1999, BCA telah memberikan beasiswa kepada 338 mahasiswa.

Sejak tahun 2000 BCA telah menjalankan program Bakti BCA terintegrasi dengan memberikan bantuan pendidikan ke sekolah-sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum di daerah Gunung Kidul (Yogyakarta), Lampung (Sumatera) dan Serang (Tangerang, Jawa Barat). Program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah-daerah tersebut. Bantuan yang diberikan berupa buku-buku sekolah dan perlengkapan perpustakaan, komputer, koneksi internet, pelatihan guru dan dukungan untuk merenovasi bangunan sekolah. Program ini diperluas pada tahun 2009 dengan menyelenggarakan berbagai macam program pelatihan. Bekerja sama dengan Outward Bond Indonesia (OBI), BCA menyelenggarakan program pelatihan *Future Leaders* kepada 21 siswa dan guru sekolah menengah umum. Pelatihan ini menerapkan proses interaktif dimana peserta diberikan berbagai



persoalan dan tantangan untuk dipecahkan. Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, kemandirian, integritas, komitmen dan kerja sama kepada para peserta.

Pada tahun 2009, BCA berpartisipasi dalam program 'Ayo ke Bank' yang diprakarsai oleh Bank Indonesia untuk melakukan edukasi pengenalan produk dan layanan perbankan bagi para pelajar. Sebagai bagian dari program ini, BCA memberikan sesi edukasi perbankan bagi mahasiswa di beberapa perguruan tinggi dengan tema 'Bersahabat dengan Kartu'. Selain itu, BCA juga memberikan edukasi perbankan kepada para siswa di beberapa sekolah menengah dengan tema "Mengenal e-Banking". BCA juga mendukung kegiatan-kegiatan guna menumbuhkan minat baca bagi para siswa sekolah dasar. Bekerja sama dengan Koran Anak Berani, BCA menyumbangkan majalah dinding Papan Cerdas ke beberapa sekolah dasar dan menengah pertama yang berada di sekitar kantor wilayah BCA.

Pemberdayaan UKM

Melanjutkan program yang dijalankan pada tahun lalu, BCA mendukung kegiatan kewirausahaan di sektor usaha kecil dan menengah (UKM) melalui pembentukan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) di Sidoarjo, Jawa Timur, bekerja sama dengan PT Astra International Tbk dan PT Pertamina (Persero). LPB mendukung pengusaha di sektor UKM dengan menyediakan fasilitas pembiayaan, dukungan pemasaran, pelatihan manajerial, dan berbagai bentuk dukungan lainnya. Saat ini, sebanyak 350 wirausaha dan usaha kecil telah menerima bantuan dari LPB. Selanjutnya LPB akan dikembangkan ke beberapa daerah diantaranya Padang, Palembang, Makassar, dan Bukit Tinggi serta daerah-daerah lain.

Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

BCA secara berkala mendukung peningkatan kesehatan masyarakat yang diwujudkan melalui kerja sama dengan beberapa institusi mitra BCA.




Bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia, sejak tahun 1991 BCA telah mendorong kegiatan donor darah secara berkala di Kantor Pusat maupun kantor-kantor cabang. Selain anggota manajemen dan para karyawan, BCA juga telah mengajak nasabah serta anggota masyarakat lainnya untuk ikut serta dalam program ini. Selama tahun 2009, sejumlah 1.816 kantong darah berhasil dikumpulkan melalui kegiatan ini, sehingga total kantong darah yang telah disumbangkan sejak peluncuran program ini adalah 35.465.

BCA juga memiliki kerja sama yang telah terbina cukup lama dengan Seksi Penanggulangan Buta Katarak – Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (SPBK-Perdami) untuk menyediakan operasi katarak gratis di berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 2009, sebanyak 210 operasi katarak dilakukan di Rumah Sakit Atang Sanjaya, Bogor; Rumah Sakit Arga Makmur, Bengkulu Utara; dan Rumah Sakit Prasetya Bunda, Tasikmalaya. Sejak diluncurkan pada tahun 2001, BCA telah membantu 1.124 penderita katarak di Indonesia.

Pada tahun 2009, BCA melanjutkan kerja sama dengan United Nations Children's Fund (UNICEF) untuk mendukung Program Imunisasi Rutin Nasional. Inisiatif ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya imunisasi sebagai cara yang efektif untuk melindungi kesehatan anak-anak Indonesia.

Bantuan Penanganan Bencana Alam

Komponen penting lainnya dalam program Bakti BCA adalah penyediaan bantuan kepada korban bencana alam. Pada tahun 2009, BCA turut aktif dalam memberikan bantuan kepada korban gempa bumi yang melanda kota Tasikmalaya (Jawa Barat) pada bulan Juli dan kota Padang (Sumatera Barat) pada bulan September. Distribusi bantuan BCA dan donasi yang berhasil dikumpulkan oleh Bakti BCA kemudian disalurkan melalui Palang Merah Indonesia. Bantuan tersebut, selain berasal dari BCA, juga dari para karyawan maupun masyarakat umum.



BCA berhasil
membukukan kinerja
yang memuaskan
di tahun 2009 didukung
oleh model bisnis
yang teruji

Tinjauan Keuangan





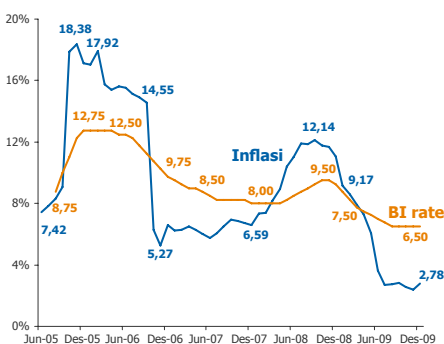
Pembahasan Hasil Kinerja Keuangan

Tinjauan Umum Kinerja Keuangan

Pada permulaan tahun 2009, prospek perekonomian Indonesia masih diliputi oleh ketidakpastian, dimana para pelaku pasar melakukan antisipasi terhadap dampak krisis ekonomi global yang belum sepenuhnya

dirasakan oleh Indonesia. Pada penghujung tahun 2008, kinerja ekspor Indonesia menurun signifikan sebagai akibat dari jatuhnya harga komoditas dan melemahnya permintaan. Nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi

Inflasi dan BI Rate (%)

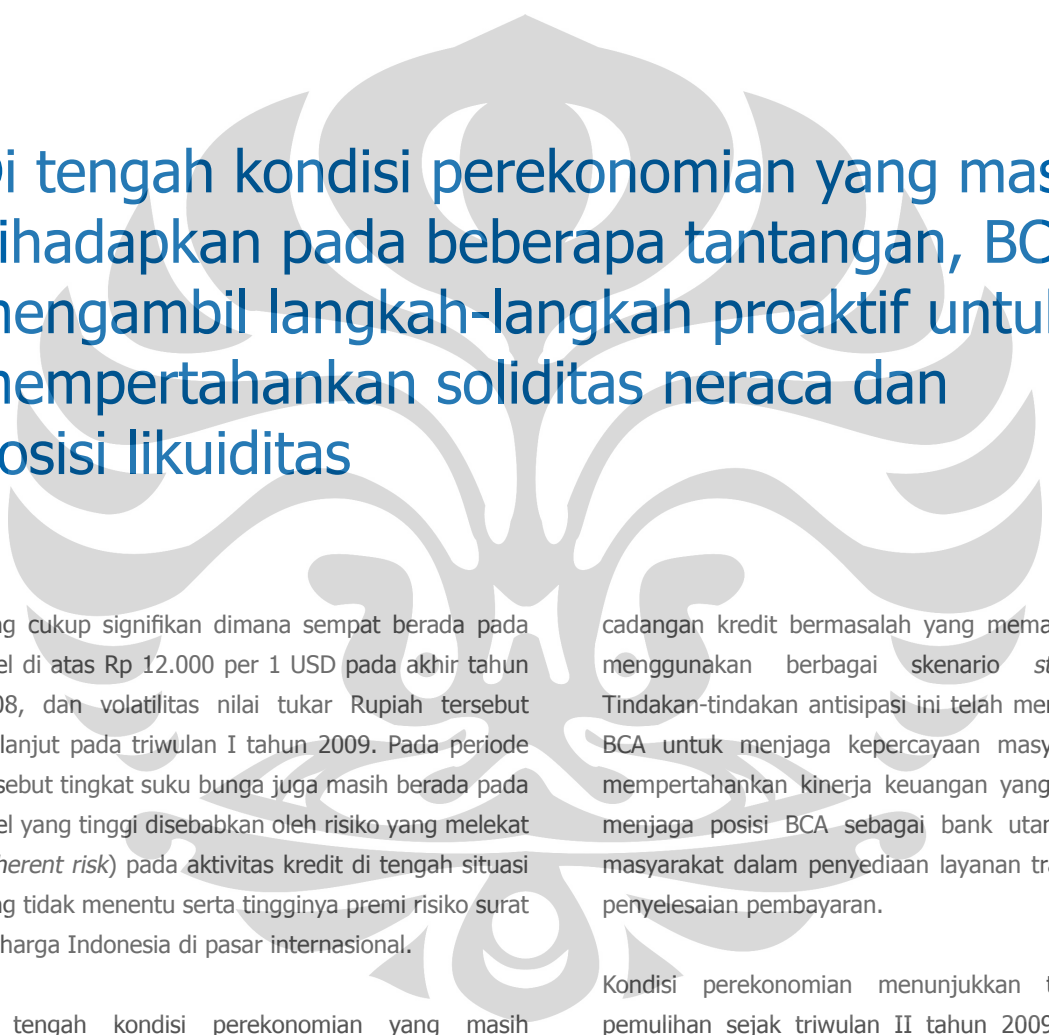


Sumber: Bank Indonesia dan BPS

Nilai Tukar Rupiah vs USD



Sumber: Bloomberg



Di tengah kondisi perekonomian yang masih dihadapkan pada beberapa tantangan, BCA mengambil langkah-langkah proaktif untuk mempertahankan soliditas neraca dan posisi likuiditas

yang cukup signifikan dimana sempat berada pada level di atas Rp 12.000 per 1 USD pada akhir tahun 2008, dan volatilitas nilai tukar Rupiah tersebut berlanjut pada triwulan I tahun 2009. Pada periode tersebut tingkat suku bunga juga masih berada pada level yang tinggi disebabkan oleh risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas kredit di tengah situasi yang tidak menentu serta tingginya premi risiko surat berharga Indonesia di pasar internasional.

Di tengah kondisi perekonomian yang masih dihadapkan pada beberapa tantangan tersebut, BCA mengambil langkah-langkah proaktif untuk mempertahankan soliditas neraca dan posisi likuiditas. Meskipun BCA tetap berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan likuiditas bagi para nasabahnya, BCA memperketat kebijakan kredit untuk pemberian fasilitas pinjaman baru sebagai antisipasi dari ketidakpastian kondisi ekonomi. BCA mengambil langkah konservatif dalam menghadapi kemungkinan meningkatnya kredit macet dengan membentuk

cadangan kredit bermasalah yang memadai dengan menggunakan berbagai skenario *stress test*. Tindakan-tindakan antisipasi ini telah memungkinkan BCA untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mempertahankan kinerja keuangan yang kuat serta menjaga posisi BCA sebagai bank utama andalan masyarakat dalam penyediaan layanan transaksi dan penyelesaian pembayaran.

Kondisi perekonomian menunjukkan tanda-tanda pemulihan sejak triwulan II tahun 2009 dan terus berlanjut pada paruh kedua tahun 2009. Stimulus fiskal yang diberikan Pemerintah dan penerapan kebijakan moneter longgar telah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dari perkiraan semula dan tercatat sebesar 4,5% untuk keseluruhan tahun 2009 yang membuat ekonomi Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang masih mencatat pertumbuhan positif pada tahun 2009.

BCA berhasil membukukan kinerja yang memuaskan di tahun 2009 didukung oleh model bisnis yang teruji. Laba sebelum pajak tercatat sebesar Rp 8,9 triliun, meningkat 15,9% didukung oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional lainnya. Dengan pencapaian tersebut serta penggunaan tarif pajak yang lebih rendah, BCA membukukan laba bersih sebesar Rp 6,8 triliun, meningkat 17,8% dari posisi tahun sebelumnya sehingga tingkat pengembalian atas aktiva (ROA) dan pengembalian atas ekuitas (ROE) masing-masing tercatat sebesar 3,4% dan 31,8%.

Bisnis inti BCA sebagai bank penyedia layanan transaksi dan pembayaran terkemuka di Indonesia tetap menjadi penopang pertumbuhan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga tumbuh 17,0% menjadi Rp 245,1 triliun pada akhir Desember 2009 didukung oleh pertumbuhan dana yang berasal dari rekening transaksional (giro dan tabungan) maupun dari peningkatan dana deposito. Dana rekening transaksional masih mendominasi dana pihak ketiga BCA, dimana pada akhir Desember 2009 komposisi giro dan tabungan tercatat sebesar 73,3% dari total dana pihak ketiga.

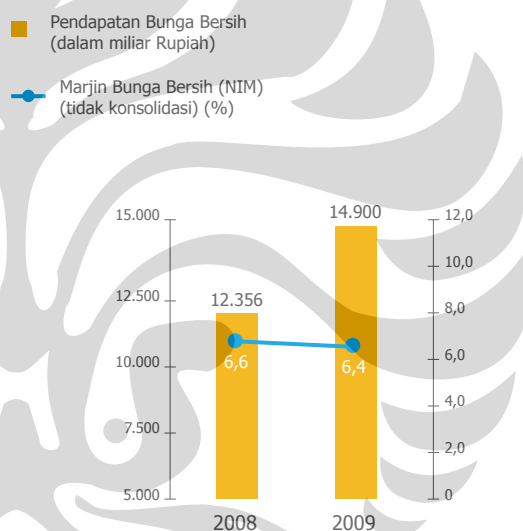
Pada akhir tahun 2009, portofolio kredit BCA tercatat sebesar Rp 123,9 triliun, tumbuh 9,9% dari posisi tahun lalu. Rasio kredit bermasalah (NPL) pada akhir tahun tercatat sebesar 0,7%, lebih baik dari proyeksi semula, sehingga rasio cadangan terhadap kredit bermasalah tercatat sebesar 480,2% pada akhir tahun 2009.

LABA/RUGI

Pendapatan bunga bersih

Pendapatan bunga bersih meningkat 20,6% menjadi Rp 14,9 triliun pada tahun 2009 didukung oleh pertumbuhan aktiva dan komposisi neraca yang menguntungkan.

Pendapatan Bunga Bersih dan Marjin Bunga Bersih (NIM)



Pada permulaan awal tahun 2009 suku bunga pinjaman BCA dipertahankan pada level yang cukup tinggi mengingat masih tingginya tingkat risiko maupun ketidakpastian dunia usaha. Sehingga dengan kondisi tersebut, *yield* aktiva produktif BCA pada triwulan I 2009 mencapai 10,9%. Selanjutnya, BCA melakukan penyesuaian suku bunga pinjaman sejalan dengan penurunan suku bunga acuan sehingga apabila hanya dilihat pada triwulan IV saja, maka *yield* aktiva produktif BCA juga mengalami penurunan menjadi sebesar 9,0%. Meskipun demikian, secara keseluruhan *yield* aktiva produktif BCA pada tahun 2009 dapat dijaga pada level 9,9% dibandingkan dengan 9,8% pada tahun 2008.

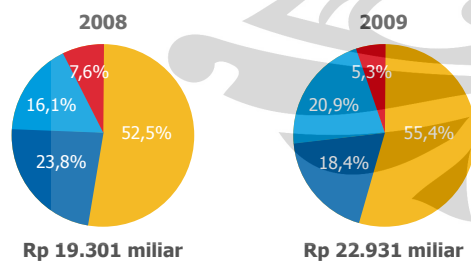
Dengan didukung oleh keunggulan BCA sebagai bank transaksional terkemuka di Indonesia, BCA dapat mempertahankan biaya dana (*cost of fund*) pada level 3,6%, relatif tidak berubah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Marjin bunga bersih (NIM) BCA mengalami penurunan secara bertahap dari 7,1% pada triwulan I 2009 menjadi 5,9% pada triwulan IV 2009. Sehingga secara keseluruhan NIM BCA pada tahun 2009 tercatat sebesar 6,4% dibandingkan dengan 6,6% pada tahun 2008.

Pendapatan bunga tumbuh 18,8% dari Rp 19,3 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp 22,9 triliun pada tahun 2009, didukung oleh pertumbuhan pendapatan bunga dari portofolio kredit dan surat-surat berharga termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Komposisi Pendapatan Bunga

- Kredit yang diberikan
- Obligasi pemerintah
- Surat-surat berharga
- Lain-lain*

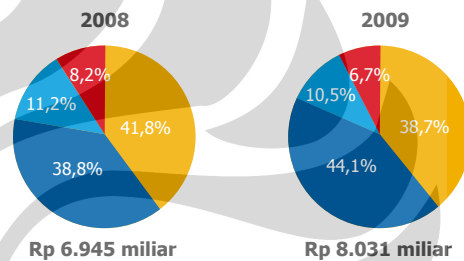


* termasuk provisi dan komisi

Beban bunga meningkat 15,6% dari Rp 6,9 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp 8,0 triliun pada tahun 2009 sebagai konsekuensi dari pertumbuhan dana pihak ketiga terutama deposito.

Komposisi Beban Bunga

- Tabungan
- Deposito
- Giro
- Lain-lain *



* termasuk beban pendanaan lainnya

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya meningkat 12,1% menjadi Rp 4,3 triliun pada tahun 2009 disebabkan oleh peningkatan *fee based income* dan pendapatan lainnya. Aktivitas utama BCA sebagai penyedia layanan penyelesaian pembayaran masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan operasional lainnya.

Fee based income meningkat 8,7% menjadi Rp 2,8 triliun pada tahun 2009 dan berkontribusi 63,7% terhadap total pendapatan operasional lainnya, dimana lebih dari 90% dari *fee based income* adalah pendapatan administrasi bulanan simpanan nasabah, pendapatan penyelesaian transaksi pembayaran, bisnis kartu kredit maupun pendapatan dari jasa pengiriman uang, kliring, dan inkaso. Di samping itu, pendapatan lainnya meningkat 44,5% menjadi Rp 941 miliar, terutama berasal dari kenaikan pendapatan administrasi operasional dari BCA Finance, anak perusahaan BCA.

Pendapatan Operasional Lainnya (dalam miliar Rupiah)

	2009	2008	Naik / (turun)	
			miliar Rupiah	Persentase
<i>Fee based Income</i> *	2.761	2.539	222	8,7%
Laba Selisih Kurs, bersih	600	687	(87)	-12,7%
Keuntungan (kerugian) dari penjualan surat-surat berharga dan obligasi pemerintah	(16)	2	(18)	-900,0%
Keuntungan (kerugian) dari kenaikan/penurunan surat-surat berharga dan obligasi pemerintah	46	(16)	62	N.A
Pendapatan lainnya	941	651	290	44,5%
Jumlah	4.332	3.863	469	12,1%

* Fee based income disebut juga pendapatan provisi dan komisi lainnya

Fee Based Income (dalam miliar Rupiah)

	2009	2008	Naik / (turun)	
			miliar Rupiah	Persentase
Simpanan dari Nasabah *	1.346	1.206	140	11,6%
Penyelesaian Pembayaran (<i>payment settlement</i>)	620	607	13	2,1%
Kartu Kredit	362	317	45	14,2%
Pengiriman uang, kliring dan inkaso	225	221	4	1,8%
Lain-lain	208	188	20	10,6%
Jumlah	2.761	2.539	222	8,7%

* Sebagian besar didominasi pendapatan administrasi bulanan produk-produk simpanan nasabah

Laba selisih kurs pada tahun 2009 tercatat sebesar Rp 600 miliar, mengalami penurunan 12,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan keuntungan transaksi valuta asing yang signifikan sebesar Rp 469 miliar pada triwulan IV tahun 2008 sebagai akibat dari gejolak fluktuasi nilai tukar rupiah yang sejalan dengan ketidakpastian kondisi ekonomi. Meskipun tren tersebut masih berlanjut pada triwulan I tahun 2009, membaiknya kondisi ekonomi dan menguatnya nilai tukar rupiah serta stabilnya nilai tukar rupiah pada tahun 2009 mengurangi laba selisih kurs.

Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)

Pada tahun 2009 BCA membentuk penyisihan penghapusan aktiva (PPA) sebesar Rp 2,3 triliun meningkat 29,7% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,7 triliun. Beban penyisihan untuk portofolio kredit yang dibentuk pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 1,9 triliun meningkat 58,3% dari Rp 1,2 triliun pada tahun 2008. Penyisihan penghapusan tersebut dibentuk sebagai langkah antisipasi untuk merespon hasil *stress test* portofolio dan kemungkinan meningkatnya risiko kredit macet.

Beban Operasional

Beban operasional tercatat sebesar Rp 8,5 triliun pada tahun 2009, meningkat 24,2% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 6,8 triliun. Kenaikan biaya dapat ditutup oleh kenaikan pendapatan sehingga BCA mampu mempertahankan *cost efficiency ratio* pada level 43,6%.

Beban personalia meningkat 27,5% menjadi Rp 4,2 triliun pada tahun 2009. Peningkatan tersebut selaras dengan kebijakan manajemen untuk meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif, kesejahteraan karyawan dan SDM yang berkualitas melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan.

Beban Operasional (dalam miliar Rupiah)

	2009	2008	Naik / (turun)	
			miliar Rupiah	Persentase
Beban Umum dan Administrasi	4.066	3.332	734	22,0%
Beban Personalia	4.187	3.284	903	27,5%
Lainnya	202	194	8	4,1%
Jumlah	8.455	6.810	1.645	24,2%

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 22,0% dari Rp 3,3 triliun di tahun 2008 menjadi Rp 4,1 triliun pada tahun 2009. Kenaikan biaya tersebut terutama disebabkan oleh kegiatan ekspansi jaringan dan kantor cabang BCA juga disebabkan oleh meningkatnya beban ATM dan meningkatkannya biaya kegiatan operasional. Kenaikan biaya keperluan kantor,

sewa, penyusutan aktiva tetap serta biaya perbaikan dan perawatan menyumbang sekitar 85% dari total kenaikan biaya umum dan administrasi di tahun 2009. Sedangkan kenaikan biaya komunikasi, komputer dan perangkat lunak memberikan kontribusi 13% dari total kenaikan biaya umum dan administrasi.

Jumlah Jaringan Layanan (unit)

	2009	2008
Kantor Cabang	875	844
ATM	6.611	5.997
EDC (<i>Electronic Data Capture</i>)	129.164	81.750

Detail Beban Umum dan Administrasi (dalam miliar Rupiah)

	2009	2008	Naik / (turun)	
			miliar Rupiah	Persentase
Keperluan kantor	1.063	815	248	30,4%
Sewa	679	594	85	14,3%
Penyusutan dan amortisasi	535	369	166	45,0%
Perbaikan dan pemeliharaan	496	367	129	35,1%
Promosi	490	477	13	2,7%
Komputer dan perangkat lunak	164	98	66	67,3%
Komunikasi	157	127	30	23,6%
Air, listrik dan bahan bakar	140	119	21	17,6%
Jasa tenaga ahli	105	120	(15)	-12,5%
Keamanan	84	107	(23)	-21,5%
Pengangkutan	33	38	(5)	-13,2%
Asuransi	28	22	6	27,3%
Pajak	10	14	(4)	-28,6%
Lainnya	82	65	17	26,2%
Jumlah	4.066	3.332	734	22,0%

Laba Bersih

Laba bersih yang dicatat oleh BCA pada tahun 2009 dipengaruhi oleh perubahan tarif pajak yang digunakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Pada September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" diubah dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan tahun-tahun selanjutnya. Selain itu, pada tahun 2007 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 81/2007 mengenai penurunan tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam

Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2008. Sesuai dengan PP tersebut, BCA memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan sehingga pada tahun 2008 dan tahun 2009 BCA berhak mendapatkan insentif berupa pemotongan tarif pajak sebesar 5%. Dengan insentif yang diterima dan berlakunya tarif pajak yang baru, maka tarif pajak penghasilan yang dikenakan kepada BCA adalah 23% pada tahun 2009.

Pada tahun 2009 BCA membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp 8,9 triliun, meningkat 15,9% dari tahun sebelumnya. Laba bersih BCA pada tahun 2009 tercatat sebesar Rp 6,8 triliun atau Rp 279 per saham, meningkat 17,8% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 5,8 triliun atau Rp 236 per saham.

NERACA

AKTIVA

Total aktiva per 31 Desember 2009 tercatat sebesar Rp 282,4 triliun, meningkat 15,0% dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 245,6 triliun. Peningkatan nilai aktiva tersebut didukung oleh

pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 17,0% yang kemudian ditempatkan dalam bentuk aktiva produktif berupa portofolio kredit dan surat berharga termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Total Aktiva

	31 Desember 2009		31 Desember 2008		Naik / (turun)	
	miliar Rupiah	% terhadap Total Aktiva	miliar Rupiah	% terhadap Total Aktiva	miliar Rupiah	Persentase
Total Aktiva Produktif	254.686	90,2%	216.119	88,0%	38.567	17,8%
Giro pada Bank-bank lain	12.024	4,3%	7.989	3,3%	4.035	50,5%
Penempatan pada Bank-bank lain ¹⁾	5.300	1,9%	4.978	2,0%	322	6,5%
Sertifikat Bank Indonesia	58.490	20,7%	38.183	15,5%	20.307	53,2%
Surat-surat Berharga ²⁾	12.476	4,4%	12.374	5,0%	102	0,8%
Kredit – gros	123.901	43,9%	112.784	45,9%	11.117	9,9%
Obligasi Pemerintah	42.495	15,0%	39.811	16,2%	2.684	6,7%
Total Aktiva Non Produktif	27.706	9,8%	29.451	12,0%	(1.745)	-5,9%
Kas	8.865	3,1%	10.799	4,4%	(1.934)	-17,9%
Giro pada Bank Indonesia	11.511	4,1%	9.669	3,9%	1.842	19,1%
Aktiva Tetap – bersih	2.971	1,1%	2.645	1,1%	326	12,3%
Aktiva Lainnya ³⁾	4.359	1,5%	6.338	2,6%	(1.979)	-31,2%
Total Aktiva	282.392	100,0%	245.570	100,0%	36.822	15,0%

¹⁾ Termasuk penempatan pada Bank Indonesia

²⁾ Termasuk surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali

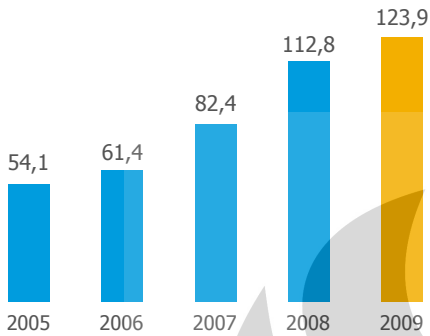
³⁾ Termasuk Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)

Selama tahun 2009 aktiva produktif tumbuh 17,8% menjadi Rp 254,7 triliun dimana komposisi portofolio kredit meliputi 48,6% dari total aktiva produktif. Komposisi surat berharga dan SBI tercatat sebesar 27,9% dari total aktiva produktif dan 16,7% aktiva produktif adalah berupa obligasi pemerintah.

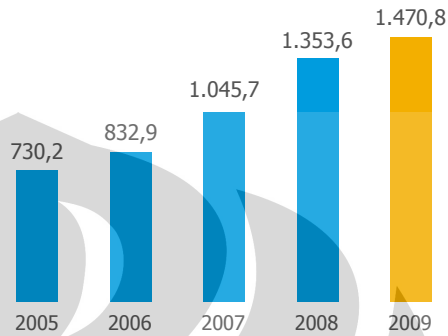
Penyaluran Kredit

Portofolio kredit BCA tumbuh sebesar 9,9% menjadi Rp 123,9 triliun pada akhir tahun 2009. Meskipun pertumbuhan kredit ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun pertumbuhan tersebut sejalan dengan pertumbuhan kredit rata-rata pada sektor perbankan. BCA merupakan bank penyalur kredit terbesar ketiga dengan pangsa pasar sebesar 8,6%.

Pertumbuhan Kredit BCA
(dalam triliun Rupiah)



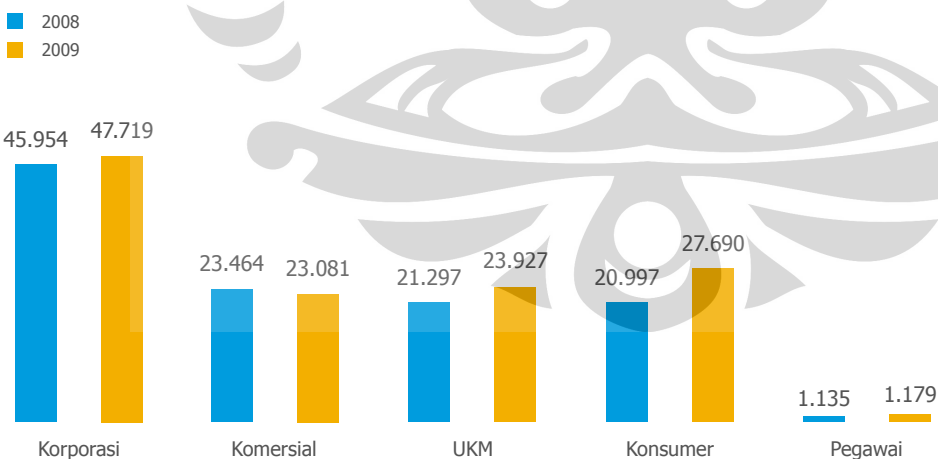
Pertumbuhan Kredit Sektor Perbankan
(dalam triliun Rupiah)



Melambatnya pertumbuhan kredit pada permulaan tahun 2009 disebabkan karena BCA memperketat kriteria pemberian kredit sebagai langkah antisipasi terhadap ketidakpastian dunia usaha akibat imbas dari krisis keuangan dan ekonomi global. Faktor lain yang mempengaruhi melambatnya pertumbuhan kredit adalah melemahnya permintaan kredit dari

sektor komersial sebagai akibat dari banyaknya nasabah bisnis yang mengurangi persediaan dan menunda investasi untuk belanja modal. Namun di segmen konsumen, portofolio kredit tumbuh signifikan didorong oleh penurunan tingkat suku bunga dan kuatnya konsumsi domestik.

Komposisi Kredit Berdasarkan Jenis Debitur
(tidak konsolidasi – dalam miliar Rupiah)



Kredit konsumen tumbuh 31,9% di semua produk menjadi Rp 27,7 triliun pada akhir tahun 2009 dan berkontribusi 22,4% dari total kredit yang disalurkan, kedua terbesar setelah kredit korporasi. Meskipun pada tahun 2009 penjualan mobil baru mengalami penurunan, kredit kendaraan bermotor (KKB) tumbuh signifikan sebesar 32,8% menjadi Rp 10,4 triliun pada akhir tahun 2009. Sebagian besar kredit kendaraan

bermotor yang disalurkan adalah pembiayaan untuk pembelian mobil baru. Kredit kepemilikan rumah (KPR) tercatat sebesar Rp 13,1 triliun, tumbuh 27,5% dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 10,3 triliun. Demikian juga dengan portofolio kartu kredit yang tumbuh 45,0% menjadi Rp 4,1 triliun.

Kredit Konsumer (tidak konsolidasi, dalam miliar Rupiah)

	2009	2008	Naik / (turun)	
			miliar Rupiah	Persentase
KPR	13.114	10.284	2.830	27,5%
KKB	10.435	7.856	2.579	32,8%
Kartu Kredit	4.137	2.853	1.284	45,0%
Lainnya	4	4	0	0,0%
Jumlah	27.690	20.997	6.693	31,9%

Kredit korporasi BCA tumbuh 3,8% dan tercatat sebesar Rp 47,7 triliun pada akhir tahun 2009, setelah mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 42,3% pada tahun 2008. Rendahnya pertumbuhan tersebut disebabkan oleh faktor eksternal termasuk faktor melemahnya permintaan seperti yang telah disebutkan di atas dan meningkatnya ketersediaan sumber-sumber pendanaan alternatif. Dengan mulai pulihnya pasar obligasi pada paruh kedua tahun ini, banyak nasabah korporasi yang menerbitkan obligasi untuk mendapatkan tingkat suku bunga yang rendah dimana dana yang diperoleh akan digunakan untuk melunasi pinjaman bank yang ada. Selain itu, pulihnya likuiditas global memungkinkan banyak perusahaan memperoleh pendanaan dari luar negeri.

Persaingan pada segmen komersial & UKM dalam menyalurkan kredit cukup ketat sepanjang tahun 2009. Mengingat hampir semua bank masuk ke sektor tersebut, terjadi kompetisi dalam penawaran suku bunga kredit. Portofolio kredit segmen komersial & UKM tumbuh 5,0% menjadi Rp 47,0 triliun pada akhir tahun 2009, didukung oleh pertumbuhan kredit di segmen UKM sebesar 12,3% menjadi Rp 23,9 triliun. Sedangkan portofolio kredit di segmen komersial sedikit mengalami penurunan 1,6% sehingga pada akhir tahun 2009 tercatat sebesar Rp 23,1 triliun.

Portofolio kredit BCA terdiversifikasi berdasarkan sektor ekonomi. Per Desember 2009, kredit disektor perdagangan, restoran dan hotel berjumlah 25,9% dari

total portofolio kredit diikuti oleh sektor manufaktur (19,8%), sektor transportasi dan komunikasi (9,7%), sektor jasa bisnis (9,2%), dan sektor lainnya (35,4%). Selain itu, 90,8% dari total portofolio kredit BCA terdiri dari kredit dalam mata uang Rupiah sedangkan sisanya 9,2% adalah kredit dalam valuta asing terutama dollar Amerika.

Berkat pengelolaan portofolio kredit secara aktif, kualitas kredit dapat dijaga dan lebih baik dari yang diperkirakan semula. BCA berhasil menyelesaikan kredit bermasalah terutama beberapa debitur korporasi sehingga rasio kredit bermasalah (NPL) berhasil diturunkan menjadi 0,7% pada akhir tahun 2009, setelah sempat mencapai level tertinggi sebesar 1,9% pada akhir semester I 2009. Rasio NPL tersebut jauh di bawah nilai maksimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 5%.

BCA menerapkan kebijakan pembentukan cadangan kredit secara proaktif. *Stress test* yang menyeluruh terhadap portofolio kredit yang dimiliki digunakan untuk menentukan kebutuhan cadangan yang diperlukan dalam mengantisipasi dampak dari berbagai skenario terburuk pada portofolio secara keseluruhan, maupun sektor-sektor industri dan perusahaan-perusahaan secara individu. Pada akhir tahun 2009 cadangan kredit bermasalah yang telah dibentuk mencapai sebesar Rp 4,3 triliun meningkat 56,0% dari posisi tahun lalu, sehingga rasio cadangan terhadap kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 480,2% sejalan dengan berkurangnya kredit yang bermasalah.

Kredit Berdasarkan Kolektibilitas (tidak konsolidasi)

	31 Desember 2009		31 Desember 2008	
	miliar Rupiah	% terhadap Total Kredit	miliar Rupiah	% terhadap Total Kredit
Lancar	120.934	97,9%	109.464	97,0%
Dibawah Perhatian Khusus	1.767	1,4%	2.708	2,4%
Performing Loan	122.701	99,3%	112.172	99,4%
Kurang Lancar	179	0,1%	136	0,1%
Diragukan	97	0,1%	79	0,1%
Macet	619	0,5%	460	0,4%
NPL	895	0,7%	675	0,6%
Total Kredit	123.596	100,0%	112.847	100,0%
Rasio NPL – kotor	0,7%		0,6%	
Rasio NPL – bersih	0,1%		0,1%	

Obligasi Pemerintah

Obligasi pemerintah pada akhir tahun 2009 tercatat sebesar Rp 42,5 triliun, meningkat 6,7% dari posisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 39,8 triliun.

Seluruh obligasi rekapitalisasi pemerintah yang diterima BCA telah jatuh tempo pada tahun 2009. Sehingga obligasi pemerintah yang saat ini dimiliki oleh BCA adalah berasal dari *secondary market*.

Portofolio obligasi pemerintah dikelola secara hati-hati untuk memastikan keseimbangan baik dari jenis suku bunga maupun jangka waktu, sehingga dapat memberikan hasil yang optimal di tengah pergerakan

suku bunga acuan yang cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2009, obligasi pemerintah dengan tingkat suku bunga tetap sebesar Rp 26,7 triliun atau meliputi 62,9% dari portofolio obligasi sementara sisanya sebesar 37,1% adalah obligasi dengan tingkat suku bunga mengambang. Obligasi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai kategori dimiliki hingga jatuh tempo (HTM) adalah sebesar Rp 29,5 triliun, sedangkan obligasi yang tersedia untuk dijual (AFS) adalah sebesar Rp 13,0 triliun, dan sisanya adalah obligasi dengan kategori diperdagangkan sebesar Rp 14,0 miliar.

Obligasi Pemerintah (dalam miliar Rupiah)

Jenis Obligasi	2009	2008	Naik / (turun)		Komposisi	
			miliar Rupiah	Persentase	2009	2008
Berdasarkan Tujuan Kepemilikan	42.495	39.811	2.684	6,7%	100,0%	100,0%
- Diperdagangkan	14	140	(126)	-90,0%	0,0%	0,4%
- Tersedia untuk Dijual	12.954	5.588	7.366	131,8%	30,5%	14,0%
- Dimiliki hingga Jatuh Tempo	29.527	34.083	(4.556)	-13,4%	69,5%	85,6%
Berdasarkan Suku Bunga	42.495	39.811	2.684	6,7%	100,0%	100,0%
- Bunga Tetap	26.722	24.082	2.640	11,0%	62,9%	60,5%
- Bunga Variabel	15.773	15.729	44	0,3%	37,1%	39,5%

Obligasi Pemerintah berdasarkan Jatuh Tempo (dalam miliar Rupiah)

Jenis Obligasi Berdasarkan Tujuan Kepemilikan)	miliar Rupiah	Besarnya Obligasi Pemerintah yang Jatuh Tempo								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Diperdagangkan	14	1	5	8	-	-	-	-	-	-
Tersedia untuk Dijual	12.954	3.607	606	4.195	1.026	3.499	2	19	-	-
Dimiliki hingga Jatuh Tempo	29.527	2.764	8.674	5.482	3.607	5.273	1.855	1.282	490	100
Jumlah	42.495	6.372	9.285	9.685	4.633	8.772	1.857	1.301	490	100

PASIVA

Dana Pihak Ketiga

Total dana pihak ketiga tumbuh sebesar 17,0% menjadi Rp 245,1 triliun pada akhir tahun 2009 didukung oleh pertumbuhan semua produk dana. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa peran BCA sebagai bank transaksional terkemuka di Indonesia masih tetap kuat serta mencerminkan tingginya kepercayaan dan keyakinan nasabah terhadap BCA. Dengan peningkatan tersebut maka pangsa pasar dana pihak ketiga BCA tercatat sebesar 12,4%.

Dana giro per akhir tahun 2009 mencapai Rp 51,6 triliun, naik sebesar 15,3% dibandingkan dengan posisi tahun lalu. Saldo tabungan meningkat sebesar 14,6% menjadi Rp 128,1 triliun pada akhir tahun 2009. Meskipun BCA tidak menawarkan bunga yang khusus, namun dana deposito tumbuh signifikan sebesar 23,4% menjadi Rp 65,4 triliun pada akhir tahun 2009. Di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi, masyarakat

cenderung memindahkan dananya dari bank-bank yang relatif kecil ke bank-bank besar dengan neraca yang kokoh, termasuk BCA.

Pertumbuhan dana pihak ketiga yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit menyebabkan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) mengalami penurunan menjadi 50,3% di akhir tahun 2009, dimana LDR di tahun sebelumnya tercatat sebesar 53,8%. Komposisi giro dan tabungan terhadap total dana pihak ketiga masih tinggi, meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 73,3% dari 74,7% di tahun sebelumnya sebagai akibat pertumbuhan deposito yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan giro dan tabungan.

Dana pihak ketiga dalam mata uang rupiah adalah sebesar 89,0% sedangkan sisanya sebesar 11,0% adalah dana pihak ketiga dalam valuta asing.

Dana Pihak Ketiga

	31 Desember 2009		31 Desember 2008		Naik / (turun)		Suku Bunga Rata-rata		
	miliar Rupiah	Komposisi	miliar Rupiah	Komposisi	miliar Rupiah	%	2009	2008	Naik / (turun)
Giro	51.641	21,1%	44.788	21,4%	6.853	15,3%			
Rupiah	42.881	17,5%	36.878	17,6%	6.003	16,3%	1,8%	1,9%	-0,1%
Valuta Asing	8.760	3,6%	7.910	3,8%	850	10,7%	1,3%	1,4%	-0,1%
Tabungan	128.137	52,3%	111.774	53,3%	16.363	14,6%			
Rupiah	119.690	48,8%	105.390	50,3%	14.300	13,6%	2,8%	2,8%	0,0%
Valuta Asing	8.447	3,4%	6.384	3,0%	2.063	32,3%	1,9%	3,1%	-1,2%
Jumlah Dana Rekening Transaksional	179.778	73,3%	156.562	74,7%	23.216	14,8%			
Deposito	65.362	26,7%	52.967	25,3%	12.395	23,4%			
Rupiah	55.622	22,7%	44.551	21,3%	11.071	24,9%	7,0%	6,2%	0,8%
Valuta Asing	9.740	4,0%	8.416	4,0%	1.324	15,7%	2,3%	3,3%	-1,0%
Jumlah Dana Pihak Ketiga	245.140	100,0%	209.529	100,0%	35.611	17,0%			
Rupiah	218.193	89,0%	186.819	89,2%	31.374	16,8%	3,6%	3,4%	0,2%
Valuta Asing	26.947	11,0%	22.710	10,8%	4.237	18,7%	1,8%	2,6%	-0,7%

EKUITAS

Total ekuitas meningkat sebesar 19,7% dari Rp 23,3 triliun menjadi Rp 27,9 triliun pada akhir tahun 2009, sejalan dengan peningkatan laba bersih pada tahun 2009.

Pada akhir tahun 2009, Bank memiliki modal inti dan modal pelengkap sebesar Rp 22,8 triliun, meningkat 9,4% dari posisi tahun sebelumnya. Hampir seluruh permodalan BCA adalah terdiri dari modal inti. Permodalan Bank berhasil dijaga dan berada pada level yang cukup sehat dengan rasio kecukupan modal (CAR), dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar, tercatat sebesar 15,3% pada akhir tahun 2009, lebih tinggi dari persyaratan minimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 8%. Peningkatan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) pada tahun 2009 menyebabkan rasio CAR mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 15,8%.

Pada tahun 2010, BCA akan mulai memperhitungkan biaya modal (*capital charge*) pada risiko operasional sesuai dengan persyaratan Basel II dan akan diterapkan secara menyeluruh pada tahun 2011 sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Dengan menggunakan metodologi Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*), perhitungan biaya modal pada risiko operasional diperkirakan akan mengurangi rasio CAR BCA sebesar 1% hingga 3%.

LIKUIDITAS DAN RISIKO NILAI TUKAR

BCA memiliki posisi likuiditas yang memadai dengan *secondary reserves* sebesar Rp 64,5 triliun pada akhir tahun 2009. *Secondary reserves* tersebut terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia dan penempatan pada bank Indonesia maupun bank lain. Sumber utama likuiditas BCA berupa dana pihak ketiga yang berasal dari produk giro dan tabungan yang meskipun bersifat jangka pendek namun memiliki pengendapan yang cukup stabil karena perputaran dana aktivitas transaksi terjadi dengan intensitas yang cukup tinggi.

Komposisi aktiva dalam denominasi mata uang asing adalah sebesar 11,4% terhadap total aktiva sedangkan komposisi kewajiban dalam denominasi mata uang asing adalah sebesar 20% terhadap total kewajiban. Per 31 Desember 2009, posisi devisa neto (PDN)

tercatat sebesar 0,3% dibandingkan dengan 0,1% pada akhir tahun 2008, jauh di bawah persyaratan maksimum Bank Indonesia yang sebesar 20%. Dengan demikian, risiko nilai tukar yang dihadapi oleh BCA relatif kecil.

Rasio Keuangan (tidak konsolidasi)

	31 Desember 2009	31 Desember 2008
I. Permodalan		
1. CAR dengan memperhitungkan risiko kredit	15,3%	15,6%
2. CAR dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar	15,3%	15,8%
3. Aktiva tetap terhadap modal	25,7%	24,7%
II. Kualitas Aktiva		
1. Aktiva produktif bermasalah	0,4%	0,3%
2. PPAP terhadap Aktiva Produktif	2,0%	1,6%
3. Pemenuhan PPA Produktif	219,1%	168,9%
4. Pemenuhan PPA Non Produktif	100,0%	100,0%
5. NPL - kotor	0,7%	0,6%
6. NPL - bersih	0,1%	0,1%
III. Rentabilitas		
1. ROA	3,4%	3,4%
2. ROE	31,8%	30,2%
3. NIM (tanpa biaya premi penjaminan pemerintah)	6,6%	6,8%
4. NIM (dengan biaya premi penjaminan pemerintah)	6,4%	6,6%
5. BOPO *)	68,7%	66,8%
IV. LDR	50,3%	53,8%
V. Kepatuhan		
1. a. Persentase Pelanggaran BMPK		
a.1. Pihak Terkait	0,0%	0,0%
a.2. Pihak Tidak Terkait	0,0%	0,0%
b. Persentase Pelampauan (BMPK)		
b.1. Pihak Terkait	0,0%	0,0%
b.2. Pihak Tidak Terkait	0,0%	0,0%
2. GWM Rupiah	5,2%	5,1%
3. Posisi Devisa Neto (PDN)	0,3%	0,1%

*) (BOPO) = biaya operasional termasuk biaya bunga dan beban PPAP dibagi pendapatan operasional termasuk pendapatan bunga

Tanggung Jawab atas Pelaporan Tahunan

Laporan Tahunan ini serta laporan keuangan dan informasi lain yang terkait, merupakan tanggung jawab Manajemen PT Bank Central Asia Tbk dan telah disetujui oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan membubuhkan tanda tangannya masing-masing di bawah ini.

Dewan Komisaris



Eugene Keith Galbraith
Presiden Komisaris



Tony Kusnadi
Komisaris



Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen



Raden Pardede
Komisaris Independen



Sigit Pramono
Komisaris Independen

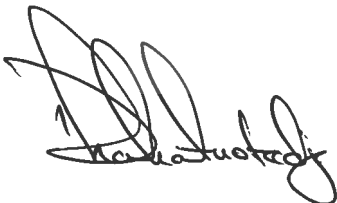
Direksi



Djohan Emir Setijoso
Presiden Direktur



Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur



Dhalia Mansor Ariotedjo
Direktur



Anthony Brent Elam
Direktur



Suwignyo Budiman
Direktur



Subur Tan
Direktur



Renaldo Hector Barros
Direktur



Henry Koenafi
Direktur



Armand Wahyudi Hartono
Direktur



PT Bank Central Asia Tbk dan anak perusahaan

Laporan keuangan konsolidasi
beserta laporan auditor independen
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2009 dan 2008

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-11177

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Central Asia Tbk**

Kami telah mengaudit neraca konsolidasi PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, serta laporan laba rugi konsolidasi, laporan perubahan ekuitas konsolidasi dan laporan arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasi adalah tanggung jawab manajemen BCA. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasi berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasi yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BCA dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan pokok konsolidasi secara keseluruhan. Informasi tambahan disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian laporan keuangan pokok konsolidasi yang diharuskan menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Informasi tersebut, telah menjadi objek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan keuangan pokok konsolidasi dan, menurut pendapat kami, disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan pokok konsolidasi secara keseluruhan.

Purwantono, Sarwoko & Sandjaja



Drs. Hari Purwantono
Izin Akuntan Publik No. 98.1.0065

5 Maret 2010

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
ASET			
Kas	2j,4	8.865.151	10.798.921
Giro pada Bank Indonesia	2j,5	11.511.278	9.668.608
Giro pada bank lain - setelah dikurangi penyisihan penghapusan masing-masing sebesar Rp120.559 dan Rp79.645 per 31 Desember 2009 dan 2008	2j,2q,6	11.903.845	7.909.406
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - setelah dikurangi penyisihan penghapusan masing-masing sebesar Rp40.860 dan Rp41.549 per 31 Desember 2009 dan 2008	2k,2q,7	5.259.335	4.936.408
Surat-surat berharga - setelah dikurangi penyisihan penghapusan masing-masing sebesar Rp733.557 dan Rp512.468 per 31 Desember 2009 dan 2008	2l,2q,8	69.562.763	50.044.630
Obligasi Pemerintah	2l,9	42.494.673	39.810.702
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	2m,10	669.336	-
Tagihan derivatif - setelah dikurangi penyisihan penghapusan masing-masing sebesar Rp237 dan Rp682 per 31 Desember 2009 dan 2008	2g,2q,11	23.450	67.494
Kredit yang diberikan	2n,2o,12		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2c,3	688.590	824.211
Pihak ketiga		123.212.679	111.960.125
Jumlah kredit yang diberikan		123.901.269	112.784.336
Dikurangi: Penyisihan penghapusan	2q,12	(4.305.608)	(2.757.475)
Jumlah kredit yang diberikan - bersih		119.595.661	110.026.861
Investasi dalam sewa guna usaha - setelah dikurangi penyisihan penghapusan masing-masing sebesar Rp206 dan Rp1.177 per 31 Desember 2009 dan 2008	2h,2q	1.952	11.532
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi penyisihan penghapusan masing-masing sebesar Rp38.516 dan Rp36.137 per 31 Desember 2009 dan 2008	2i,2q	1.902.262	1.409.286

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI (lanjutan)
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
ASET (lanjutan)			
Tagihan akseptasi - setelah dikurangi penyisihan penghapusan masing-masing sebesar Rp127.633 dan Rp120.647 per 31 Desember 2009 dan 2008	2p,2q,13	3.240.427	4.186.718
Penyertaan - setelah dikurangi penyisihan penghapusan masing-masing sebesar Rp18.306 dan Rp11.962 per 31 Desember 2009 dan 2008	2q,2r	18.502	24.603
Aset pajak tangguhan - bersih	2w,17	1.046.739	770.686
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp2.942.242 dan Rp2.517.468 per 31 Desember 2009 dan 2008	2s,14,22	2.971.269	2.644.785
Aset lain-lain - setelah dikurangi penyisihan penghapusan masing-masing sebesar Rp43.490 dan Rp35.526 per 31 Desember 2009 dan 2008	2c,2q,3	3.325.651	3.259.216
JUMLAH ASET		<u>282.392.294</u>	<u>245.569.856</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI (lanjutan)
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban segera	37	841.266	1.121.603
Simpanan dari nasabah	2t,15		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2c,3	49.125	41.489
Pihak ketiga		245.090.821	209.487.432
Jumlah simpanan dari nasabah		245.139.946	209.528.921
Simpanan dari bank lain	2u,15	2.488.707	4.048.142
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	2m,8	-	49.892
Kewajiban derivatif	2g,11	12.265	80.394
Kewajiban akseptasi	2p,16	2.031.512	3.109.382
Surat-surat berharga yang diterbitkan	2v	425.947	535.742
Pinjaman yang diterima	18	730.333	448.325
Estimasi kerugian atas transaksi rekening administratif	2q,19	63.692	54.233
Hutang pajak	2w,17	269.334	504.635
Beban yang masih harus dibayar	37	157.140	144.577
Kewajiban lain-lain	31	2.375.459	2.664.700
JUMLAH KEWAJIBAN		254.535.601	222.290.546
EKUITAS			
Modal saham dengan nilai nominal Rp62,50 (nilai penuh) per saham Modal dasar: 88.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh: 24.655.010.000 saham	1a,1c,20	1.540.938	1.540.938
Tambahan modal disetor	2z,2aa,21	3.895.933	3.895.933
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2d	214.425	273.356
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	2r	3.786	1.494

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI (lanjutan)
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS (lanjutan)			
Laba yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan	2l	422.913	37.782
Saldo laba*)			
Telah ditentukan penggunaannya	30	392.036	392.036
Belum ditentukan penggunaannya		22.195.247	17.946.356
Modal saham diperoleh kembali (<i>treasury stock</i>): 289.767.000 saham, harga perolehan	1c,2ac,20	(808.585)	(808.585)
JUMLAH EKUITAS		27.856.693	23.279.310
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		282.392.294	245.569.856

*) Saldo rugi sebesar Rp25.853.162 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor pada saat kuasi reorganisasi Bank pada tanggal 31 Oktober 2000 (Catatan 2aa).

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2009	2008
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan bunga			
Pendapatan bunga	2c,2e,3,24	22.079.920	18.616.168
Provisi dan komisi	2f	851.233	685.013
Jumlah pendapatan bunga		<u>22.931.153</u>	<u>19.301.181</u>
Beban bunga			
Beban bunga	2c,2e,3,25	(8.029.233)	(6.940.345)
Beban pendanaan lainnya		(2.195)	(4.488)
Jumlah beban bunga		<u>(8.031.428)</u>	<u>(6.944.833)</u>
PENDAPATAN BUNGA - BERSIH		14.899.725	12.356.348
Pendapatan operasional lainnya			
Provisi dan komisi lainnya	26	2.761.088	2.538.897
Laba selisih kurs - bersih	2d,2g	600.443	686.996
Keuntungan dari kenaikan nilai surat-surat berharga dan obligasi pemerintah	2l	45.933	-
Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga dan obligasi pemerintah	2l	-	1.441
Lain-lain		940.878	650.718
Jumlah pendapatan operasional lainnya		<u>4.348.342</u>	<u>3.878.052</u>
Beban penyisihan penghapusan aset	2q	(2.242.533)	(1.754.149)
(Beban) pemulihan estimasi kerugian atas transaksi rekening administratif	2q,19	(15.416)	13.516
Beban operasional lainnya			
Beban karyawan	2y,27	(4.186.617)	(3.283.965)
Beban umum dan administrasi	28	(4.066.016)	(3.332.376)
Kerugian dari penjualan surat-surat berharga dan obligasi pemerintah	2l	(16.497)	-
Kerugian dari penurunan nilai surat-surat berharga dan obligasi pemerintah	2l	-	(15.870)
Lain-lain		(202.105)	(193.649)
Jumlah beban operasional lainnya		<u>(8.471.235)</u>	<u>(6.825.860)</u>
LABA OPERASIONAL		8.518.883	7.667.907

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI (lanjutan)
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2009	2008
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - bersih			
Laba penjualan aset tetap	2s	9.756	5.974
Pendapatan sewa		21.414	19.048
Lain-lain - bersih		395.039	27.114
Jumlah pendapatan non-operasional - bersih		<u>426.209</u>	<u>52.136</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		8.945.092	7.720.043
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN			
Pajak tahun berjalan	2w,17	(2.539.930)	(2.342.474)
Pajak tangguhan		402.080	398.570
Jumlah beban pajak		<u>(2.137.850)</u>	<u>(1.943.904)</u>
LABA BERSIH		<u>6.807.242</u>	<u>5.776.139</u>
LABA PER SAHAM (nilai penuh):			
Laba operasional Dasar	2x,29	350	314
Laba bersih Dasar		279	236

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahkan Modal Disetor	Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan	Laba yang Belum Direalisasi atas Surat-surat Berharga dan Obligasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan	Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	Modal Saham Diperoleh Kembali (<i>Treasury Stock</i>)	Saldo Laba*)		Jumlah Ekuitas
								Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Saldo per 31 Desember 2007	1.540.938	3.895.933	207.498	1.385	22.313	1.059.907	(190.996)	392.036	13.512.717	20.441.731
Laba bersih	-	-	-	-	-	-	-	-	5.776.139	5.776.139
Laba yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan	2l	-	-	-	15.469	-	-	-	-	15.469
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2d	-	65.858	-	-	-	-	-	-	65.858
Selisih karena penilaian kembali aset tetap	2s,22	-	-	-	-	(1.059.907)	-	-	1.059.907	-
Dividen kas	30	-	-	-	-	-	-	-	(2.402.407)	(2.402.407)
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	2r	-	-	109	-	-	-	-	-	109
Modal saham diperoleh kembali (<i>treasury stock</i>), harga perolehan	1c,2ac,20	-	-	-	-	-	(617.589)	-	-	(617.589)
Saldo per 31 Desember 2008	1.540.938	3.895.933	273.356	1.494	37.782	-	(808.585)	392.036	17.946.356	23.279.310

*) Saldo rugi sebesar Rp25.853.162 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor pada saat kuasi reorganisasi Bank pada tanggal 31 Oktober 2000.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahkan Modal Disetor	Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan	Laba yang Belum Direalisasi atas Surat-surat Berharga dan Obligasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan	Modal Saham Diperoleh Kembali (Treasury Stock)	Saldo Laba *)		Jumlah Ekuitas
							Telah Ditetapkan Penggunaannya	Belum Ditetapkan Penggunaannya	
Saldo per 31 Desember 2008	1.540.938	3.895.933	273.356	1.494	37.782	(808.585)	392.036	17.946.356	23.279.310
Laba bersih	-	-	-	-	-	-	-	6.807.242	6.807.242
Laba yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan	2l	-	-	-	385.131	-	-	-	385.131
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2d	-	(58.931)	-	-	-	-	-	(58.931)
Dividen kas	30	-	-	-	-	-	-	(2.558.351)	(2.558.351)
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	2r	-	-	2.292	-	-	-	-	2.292
Saldo per 31 Desember 2009	1.540.938	3.895.933	214.425	3.786	422.913	(808.585)	392.036	22.195.247	27.856.693

*) Saldo rugi sebesar Rp25.853.162 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor pada saat kuasi reorganisasi Bank pada tanggal 31 Oktober 2000.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2009	2008
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga, provisi dan komisi	19.127.371	16.915.774
Pembayaran bunga, provisi dan komisi	(8.016.223)	(6.937.316)
Penerimaan dari (pembayaran untuk) transaksi valuta asing - bersih	7.492.116	(4.995.685)
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	3.703.399	3.243.649
Penerimaan dari pendapatan non-operasional	417.023	48.949
Pembayaran untuk beban operasional lainnya	(8.008.750)	(6.730.833)
Pembayaran pajak penghasilan	(2.772.529)	(2.251.332)
Kenaikan/penurunan lainnya yang mempengaruhi kas:		
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	(333.125)	1.433.831
Surat-surat berharga untuk tujuan diperdagangkan	(45.916.424)	(268.095)
Obligasi pemerintah untuk tujuan diperdagangkan	147.144	390.002
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	(669.336)	-
Kredit yang diberikan	(12.940.868)	(28.914.778)
Investasi dalam sewa guna usaha	10.551	16.376
Piutang pembiayaan konsumen	(501.086)	(69.974)
Tagihan akseptasi	(138.565)	(549.930)
Aset lain-lain	250.397	573.186
Kewajiban segera	(284.287)	205.837
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	(49.892)	49.892
Simpanan dari nasabah	31.219.015	23.344.452
Simpanan dari bank lain	(1.849.219)	2.413.264
Surat-surat berharga yang diterbitkan	(109.795)	3.960
Kewajiban lain-lain	562.682	335.007
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(18.660.401)	(1.743.764)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(930.497)	(1.014.455)
Hasil penjualan aset tetap	11.045	13.780
Pembelian penyertaan dalam saham	(212.490)	(25.824)
Pembelian obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual	(8.310.109)	(1.810.483)
Penerimaan dari obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual yang dijual dan jatuh tempo selama tahun berjalan	11.854.425	17.821.531
Pembelian obligasi pemerintah untuk dimiliki hingga jatuh tempo	(6.530.064)	(9.403.737)
Pembelian surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual	(26.193.767)	(162.861)
Penerimaan dari surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual yang jatuh tempo selama tahun berjalan	15.401.446	1.297.445
Pembelian surat-surat berharga untuk dimiliki hingga jatuh tempo	(154.418.115)	(6.248.349)
Penerimaan dari surat-surat berharga untuk dimiliki hingga jatuh tempo yang jatuh tempo selama tahun berjalan	195.134.001	3.737.906
Penerimaan dividen kas	108	51
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi	25.805.983	4.205.004

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI (lanjutan)
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran dividen kas	(3.411.135)	(1.549.623)
Penarikan (pembayaran) atas pinjaman yang diterima - bersih	282.008	(635.670)
Pembayaran tantiem Dewan Komisaris dan Direksi	(72.202)	(56.113)
Pembelian kembali saham beredar	-	(617.589)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(3.201.329)	(2.858.995)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	3.944.253	(397.755)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	28.456.580	28.854.335
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	<u>32.400.833</u>	<u>28.456.580</u>
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	8.865.151	10.798.921
Giro pada Bank Indonesia	11.511.278	9.668.608
Giro pada bank lain	12.024.404	7.989.051
Jumlah kas dan setara kas	<u>32.400.833</u>	<u>28.456.580</u>
INFORMASI TAMBAHAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS:		
Reklasifikasi obligasi pemerintah dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual	10.778.552	16.885.820
Reklasifikasi surat-surat berharga dari kelompok diperdagangkan ke kelompok tersedia untuk dijual	-	534.359
Reklasifikasi surat-surat berharga dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual	2.290.486	1.143.000
Penyisihan saldo laba untuk dividen interim	-	852.784

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

- a. PT Bank Central Asia Tbk ("Bank BCA" atau "Bank") didirikan di negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Raden Mas Soeprapto tanggal 10 Agustus 1955 No. 38 dengan nama "N.V. Perseroan Dagang Dan Industrie Semarang Knitting Factory". Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan No. J.A.5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan diumumkan dalam Tambahan No. 595 pada Berita Negara No. 62 tanggal 3 Agustus 1956. Nama Bank telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta Wargio Suhardjo, S.H., pengganti Notaris Ridwan Suselo, tanggal 21 Mei 1974 No. 144, nama Bank diubah menjadi PT Bank Central Asia.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk perubahan yang dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana saham Bank pada bulan Mei 2000, yang antara lain, mengubah status Bank menjadi perusahaan terbuka dan nama Bank menjadi PT Bank Central Asia Tbk. Perubahan ini dilakukan dengan Akta Notaris Hendra Karyadi, S.H., tanggal 29 Desember 1999 No. 62, yang disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan No. C-21020 HT.01.04.TH.99 tanggal 31 Desember 1999 dan diumumkan dalam Tambahan No. 1871 pada Berita Negara No. 30 tanggal 14 April 2000.

Perubahan sehubungan dengan penerbitan saham baru dalam rangka Program Kompensasi Manajemen Berbasis Saham, dimana eksekusi opsi telah dilakukan hingga 31 Desember 2006, dilakukan dengan Akta Notaris Hendra Karyadi, S.H., tanggal 9 Januari 2007 No. 1. Akta ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W7-HT.01.04-797 tanggal 18 Januari 2007 dan diumumkan dalam tambahan No. 185 pada Berita Negara No. 15 tanggal 20 Februari 2007.

Perubahan terakhir terhadap seluruh Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi. tanggal 15 Januari 2009 No. 19. Akta ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-12512.AH.01.02 tanggal 14 April 2009 dan diumumkan dalam tambahan No. 12790 pada Berita Negara No. 38 tanggal 12 Mei 2009.

Bank mulai beroperasi di bidang perbankan sejak tanggal 12 Oktober 1956. Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasarnya, Bank beroperasi sebagai bank umum. Bank bergerak di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Bank memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan No. 42855/U.M.II tanggal 14 Maret 1957. Bank memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977.

Bank berkedudukan di Jakarta dengan kantor pusat di Jalan M.H. Thamrin No. 1. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Bank memiliki sejumlah cabang dan kantor perwakilan sebagai berikut:

	2009	2008
Cabang dalam negeri	873	842
Kantor perwakilan luar negeri	2	2
Jumlah	875	844

Cabang-cabang dalam negeri berlokasi di berbagai pusat bisnis utama yang tersebar di seluruh Indonesia. Kantor-kantor perwakilan luar negeri berlokasi di Hong Kong dan Singapura.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

- b. Berdasarkan surat keputusan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) No. 19/BPPN/1998 tanggal 28 Mei 1998, BPPN mengambil alih operasi dan manajemen Bank. Sesuai dengan keputusan tersebut, status Bank diubah menjadi *Bank Taken Over* (BTO). Bank ditetapkan untuk ikut serta dalam program rekapitalisasi bank berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 117/KMK.017/1999 dan No. 31/15/KEP/GBI tanggal 26 Maret 1999 mengenai pelaksanaan program rekapitalisasi bank untuk *Bank Taken Over*.

Sehubungan dengan program rekapitalisasi, pada tanggal 28 Mei 1999 Bank menerima pembayaran sebesar Rp60.877.000 dari Pemerintah Republik Indonesia. Jumlah ini terdiri dari (i) nilai pokok kredit yang diberikan kepada perusahaan afiliasi yang telah diserahkan kepada BPPN (terdiri dari Rp47.751.000 yang dialihkan secara efektif pada tanggal 21 September 1998 dan Rp4.975.000 yang dialihkan secara efektif pada tanggal 26 April 1999), dan (ii) bunga yang masih harus diterima atas kredit yang diberikan kepada perusahaan afiliasi terhitung sejak tanggal efektif pengalihan sampai dengan tanggal 30 April 1999, sejumlah Rp8.771.000, dikurangi dengan (iii) kelebihan saldo Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (termasuk bunga) sejumlah Rp29.100.000 atas pembayaran rekapitalisasi dari Pemerintah melalui BPPN sejumlah Rp28.480.000. Pada tanggal yang sama, Bank menggunakan penerimaan tersebut untuk membeli obligasi pemerintah yang baru diterbitkan sejumlah Rp60.877.000 (terdiri dari obligasi dengan tingkat bunga tetap sejumlah Rp2.752.000 dan obligasi dengan tingkat bunga variabel sejumlah Rp58.125.000 melalui Bank Indonesia) (Catatan 9).

Berdasarkan surat keputusan Ketua BPPN No. SK-501/BPPN/0400 tanggal 25 April 2000, BPPN mengembalikan Bank kepada Bank Indonesia yang berlaku efektif pada tanggal tersebut. Untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/11/PBI/2000 tanggal 31 Maret 2000, Bank Indonesia mengumumkan melalui Peng. No. 2/4/Bgub tanggal 28 April 2000, bahwa program pemulihan termasuk restrukturisasi Bank telah selesai dan Bank telah dikembalikan ke dalam pengawasan Bank Indonesia.

- c. Berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1037/PM/2000 tanggal 11 Mei 2000, Bank menawarkan 662.400.000 saham melalui Penawaran Umum Perdana dengan jumlah nilai nominal Rp331.200 (harga penawaran Rp1.400 (nilai penuh) per saham), yang merupakan 22% dari modal saham yang ditempatkan dan disetor, sebagai bagian dari divestasi kepemilikan saham Republik Indonesia yang diwakili oleh BPPN. Penawaran umum ini dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 31 Mei 2000.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 12 April 2001 (notulen rapat dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H., dengan Akta No. 25) menetapkan untuk dilakukannya pemecahan nilai nominal saham ("*stock split*") dari Rp500 (nilai penuh) per saham, menjadi Rp250 (nilai penuh) per saham dan meningkatkan jumlah saham ditempatkan sebanyak 147.199.300 saham (atau sejumlah 294.398.600 saham setelah *stock split*) melalui Program Kompensasi Manajemen Berbasis Saham ("MSOP"). *Stock split* dilakukan dengan Akta Notaris Hendra Karyadi, S.H., tanggal 12 April 2001 No. 30, yang disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 18 April 2001.

Berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1611/PM/2001 tanggal 29 Juni 2001, Bank menawarkan lagi 588.800.000 saham dengan jumlah nilai nominal Rp147.200 (harga penawaran Rp900 (nilai penuh) per saham), yang merupakan 10% dari modal saham ditempatkan dan disetor saat itu, sebagai bagian dari divestasi kepemilikan saham Republik Indonesia yang diwakili oleh BPPN. Penawaran umum ini dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 10 Juli 2001.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 6 Mei 2004 (notulen rapat dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H., dengan Akta No. 16) menetapkan untuk dilakukannya *stock split* dari Rp250 (nilai penuh), per saham menjadi Rp125 (nilai penuh), per saham. *Stock split* dilakukan dengan Akta Notaris Hendra Karyadi, S.H. tanggal 18 Mei 2004 No. 40, yang disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 26 Mei 2004.

RUPSLB tanggal 26 Mei 2005 (notulen rapat dibuat oleh notaris Hendra Karyadi, S.H., dengan Akta No. 42) menyetujui untuk dilakukannya pembelian kembali saham (*buy back shares*) oleh Bank, dengan ketentuan bahwa pembelian kembali saham disetujui oleh Bank Indonesia, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak melebihi 5% dari jumlah seluruh saham Bank yang telah diterbitkan hingga tanggal 31 Desember 2004, yaitu sebanyak 615.160.675 saham dan jumlah dana untuk pembelian kembali saham tidak melebihi Rp2.153.060. Dengan surat No. 7/7/DPwB2/PwB24/Rahasia tanggal 16 November 2005, Bank Indonesia tidak berkeberatan dengan rencana pembelian kembali saham Bank.

RUPSLB tanggal 15 Mei 2007 (notulen rapat dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H., dengan Akta No. 6) menyetujui untuk dilakukannya pembelian kembali saham (*buy back shares*) tahap II oleh Bank, dengan ketentuan bahwa pembelian kembali saham disetujui oleh Bank Indonesia serta dilakukan dari waktu ke waktu selama 18 bulan terhitung sejak tanggal rapat tersebut, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak melebihi 1% dari jumlah seluruh saham yang telah diterbitkan oleh Bank hingga tanggal 27 April 2007 atau seluruhnya 123.275.050 saham dan jumlah dana untuk pembelian kembali saham tidak melebihi Rp678.013. Dengan surat No. 9/160/DPB 3/TPB 3-2 tanggal 11 Oktober 2007, Bank telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia terkait dengan Pembelian Kembali Saham Tahap II.

RUPSLB tanggal 28 November 2007 (notulen rapat dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H., dengan Akta No. 33), telah menyetujui pemecahan saham Bank (*stock split*) dari Rp125 (nilai penuh) per saham menjadi Rp62,50 (nilai penuh) per saham dan karenanya diputuskan pula perubahan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Pasal 4 Anggaran Dasar Bank. Perubahan Anggaran Dasar Bank dilakukan dengan Akta Notaris Hendra Karyadi, S.H., tanggal 11 Desember 2007 yang diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-0247 tanggal 3 Januari 2008.

Selain itu, RUPSLB tanggal 28 November 2007 memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Renaldo Hector Barros selaku Komisaris Independen Bank dan mengangkat Bapak Renaldo Hector Barros dan Bapak Henry Koenafi, setelah melepaskan jabatannya selaku Direktur Utama PT BCA Finance sebagai Direktur Bank, masing-masing berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Bank telah menerima surat persetujuan dari Bank Indonesia No. 10/19/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 8 Februari 2008 yang menyetujui pengangkatan:

- a. Bapak Renaldo Hector Barros selaku Direktur Bank, efektif sejak tanggal 8 Februari 2008, dan
- b. Bapak Henry Koenafi selaku Direktur Bank, efektif tanggal 13 Februari 2008, setelah Bank menyampaikan surat No. 080/DIR/2008 tanggal 12 Februari 2008 kepada Bank Indonesia mengenai pemberhentian dengan hormat Bapak Henry Koenafi selaku Direktur Utama PT BCA Finance.

RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2008 memutuskan untuk mengangkat Bapak Sigit Pramono selaku Komisaris Independen Bank, efektif sejak tanggal 20 Agustus 2008 setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat persetujuan No. 10/116/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 20 Agustus 2008.

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Surat No. 038/IQ-ECM/LTR/HFJ/XI/2008.TRIM, tanggal 26 November 2008, menyatakan bahwa aktivitas Pembelian Kembali Saham Tahap II periode 11 Februari 2008 sampai dengan 13 November 2008 telah selesai dilaksanakan dengan jumlah pembelian sejumlah 397.562 lot atau 198.781.000 lembar dengan rata-rata perolehan Rp3.106,88 (nilai penuh) per lembar saham. Sehingga jumlah pembelian kembali saham yang telah dilakukan sampai dengan 13 November 2008 sebanyak 289.767.000 lembar saham dengan nilai keseluruhan pembelian Rp808.585 (Catatan 20).

RUPSLB tanggal 18 Desember 2008 (notulen rapat dibuat oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., dengan Akta No. 114), telah menyetujui pengambilalihan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Bank UIB, berkedudukan di Jakarta Timur, sejumlah 42.500 saham, dengan harga pembelian akhir sebesar Rp248.257, sehingga Bank akan menjadi pemegang 99,99% saham PT Bank UIB, persetujuan mana termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan terhadap rancangan akuisisi, ringkasan rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi dalam rangka pengambilalihan tersebut, dimana untuk selanjutnya PT Bank UIB tersebut akan diubah kegiatan usahanya menjadi Bank Umum Syariah (Catatan 42), termasuk kemungkinan apabila Bank bermaksud untuk mengalihkan sebagian saham PT Bank UIB kepada pihak lain yang disetujui oleh Bank sebagai *strategic partner* dalam mengembangkan Bank Umum Syariah tersebut.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 187 tanggal 24 Oktober 2008, Bank telah menandatangani perjanjian pengikatan jual beli dengan pemilik PT Bank UIB dalam rangka akuisisi PT Bank UIB. Akuisisi tersebut telah mendapat persetujuan Bank Indonesia melalui surat persetujuan No. 11/64/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 22 Mei 2009 dan telah dituangkan dalam Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009.

Pada tanggal 11 Agustus 2009, Bank telah menyetorkan tambahan modal kepada PT Bank UIB sebesar Rp200.000.

RUPS Tahunan tanggal 18 Mei 2009 (notulen rapat dibuat oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., dengan Akta No. 118), memutuskan untuk mengangkat Bapak Armand Wahyudi Hartono selaku Direktur, efektif sejak tanggal 14 September 2009 setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat persetujuan No. 11/124/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 14 September 2009.

d. Susunan pengurus Bank pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	2009	2008
<u>Komisaris</u>		
Presiden Komisaris	Eugene Keith Galbraith	Eugene Keith Galbraith
Komisaris	Tonny Kusnadi Cyrillus Harinowo*) Raden Pardede*) Sigit Pramono*)	Tonny Kusnadi Cyrillus Harinowo*) Raden Pardede*) Sigit Pramono*)
<u>Direksi</u>		
Presiden Direktur	Djohan Emir Setijoso	Djohan Emir Setijoso
Wakil Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja	Jahja Setiaatmadja
Direktur	Dhalia Mansor Ariotedjo Anthony Brent Elam Suwignyo Budiman Tan Ho Hien/Subur Tan**) Renaldo Hector Barros Henry Koenafi Armand Wahyudi Hartono	Dhalia Mansor Ariotedjo Anthony Brent Elam Suwignyo Budiman Tan Ho Hien/Subur Tan**) Renaldo Hector Barros Henry Koenafi

*) Komisaris Independen

**) Direktur Kepatuhan

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

Per 31 Desember 2009 dan 2008, Komite Audit Bank terdiri dari:

Ketua	:	Cyrillus Harinowo
Anggota	:	Herman Yoseph Susmanto
Anggota	:	Rodulphus Aquaviva Supriyono
Anggota	:	Inawaty Suwardi

Pada tanggal 31 Desember 2009, susunan pengurus Bank berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 181, tanggal 18 September 2009, dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi.

Pada tanggal 31 Desember 2008, susunan pengurus Bank berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 87, tanggal 11 September 2008, dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi.

- e. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Bank mempekerjakan masing-masing 20.173 dan 20.303 karyawan tetap (tidak diaudit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya, Bank dan Anak Perusahaan menganut kebijakan akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang signifikan, yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, adalah sebagai berikut:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi Bank dan Anak Perusahaan telah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000) mengenai "Akuntansi Perbankan" dan prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta praktik-praktik akuntansi dan pedoman pelaporan dan akuntansi perbankan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam - LK).

Laporan keuangan konsolidasi telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk surat-surat berharga dan obligasi pemerintah yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual, tagihan dan kewajiban derivatif yang dicatat berdasarkan nilai wajar, penyertaan saham tertentu yang dicatat dengan metode akuntansi ekuitas. Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan metode akrual kecuali laporan arus kas dan tagihan bunga atas aset produktif *non-performing* yang dicatat pada saat kas diterima (*cash basis*).

Laporan arus kas konsolidasi disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas-aktivitas operasional, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas konsolidasi, yang termasuk setara kas adalah giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain.

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi meliputi laporan keuangan Bank dan Anak Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki atau dikendalikan oleh Bank. Suatu pengendalian atas suatu Anak Perusahaan lain dianggap ada bilamana Bank memiliki, baik secara langsung atau tidak langsung lebih dari lima puluh persen (50%) hak suara pada Anak Perusahaan, atau Bank dapat menentukan kebijakan keuangan dan operasi dari Anak Perusahaan, atau mempunyai kemampuan untuk memberhentikan atau menunjuk mayoritas anggota Direksi pada Anak Perusahaan, atau mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

Dalam mencatat akuisisi Anak Perusahaan digunakan metode pembelian. Biaya akuisisi diukur sebesar nilai wajar aset yang diserahkan, saham yang diterbitkan atau kewajiban yang diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berkaitan secara langsung dengan akuisisi. Kelebihan biaya akuisisi atas nilai wajar aset bersih Anak Perusahaan dicatat sebagai *goodwill*.

Goodwill merupakan selisih lebih antara harga perolehan investasi dan bagian Bank atas nilai wajar bersih Anak Perusahaan yang diakuisisi pada tanggal akuisisi. *Goodwill* diamortisasi dengan metode garis lurus selama 5 tahun dengan pertimbangan bahwa estimasi manfaat ekonomis atas *goodwill* tersebut adalah 5 tahun.

Seluruh transaksi dan saldo antar perusahaan yang signifikan telah dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi.

Persentase kepemilikan Anak Perusahaan, secara langsung dan tidak langsung, yang dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	2009	2008
PT BCA Finance	100,00	100,00
BCA Finance Limited	100,00	100,00
PT Bank UIB ⁾	100,00	-

⁾ Kepemilikan 0,01% telah dijual kepada PT BCA Finance, pada tanggal 16 Desember 2009, namun sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, penjualan ini masih menunggu persetujuan dari Bank Indonesia.

Jumlah aset semua Anak Perusahaan tersebut per 31 Desember 2009 dan 2008 (sebelum eliminasi) berjumlah Rp3.175.171 dan Rp1.988.537 atau 1,12% dan 0,81% dari jumlah aset konsolidasi.

PT BCA Finance, sebuah perusahaan yang berdomisili di Indonesia dan berlokasi di Wisma Milenia Lantai 1, Jalan MT Haryono 16, Jakarta, bergerak di bidang sewa guna usaha (*multifinance*) dan beroperasi sejak tahun 1995.

Berdasarkan Akta Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., tanggal 7 Maret 2005 No. 25, PT Central Sari Finance diubah namanya menjadi PT BCA Finance. Akta tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan No. C-08091 HT.01.04.TH.2005 tanggal 28 Maret 2005.

BCA Finance Limited ("BFL"), sebuah perusahaan yang berdomisili di Hong Kong dan berlokasi di Room 3211-3215, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong, bergerak di bidang *money lending* dan telah beroperasi sejak tahun 1975.

PT Bank UIB, sebuah perusahaan yang berdomisili di Indonesia dan berlokasi di Jalan Jatinegara Timur No. 72, Jakarta Timur, bergerak di bidang perbankan dan beroperasi sejak tahun 1991.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip konsolidasi (lanjutan)

Untuk tujuan konsolidasi, laporan keuangan dalam mata uang asing milik Anak Perusahaan luar negeri Bank dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan dasar sebagai berikut:

- (1) Aset dan kewajiban, komitmen dan kontinjensi - menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16:00 WIB pada tanggal neraca.
- (2) Pendapatan, beban, laba dan rugi - merupakan akumulasi dari laporan laba rugi bulanan selama tahun berjalan yang dijabarkan ke dalam Rupiah dengan rata-rata kurs tengah Reuters untuk bulan yang bersangkutan.
- (3) Akun ekuitas - menggunakan kurs historis.
- (4) Laporan arus kas menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16:00 WIB pada tanggal neraca, kecuali akun-akun laba rugi menggunakan kurs tengah rata-rata dan unsur-unsur ekuitas menggunakan kurs historis.

Selisih yang timbul dari proses penjabaran laporan keuangan tersebut disajikan sebagai "Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing" pada kelompok Ekuitas dalam neraca konsolidasi.

c. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Dalam laporan keuangan konsolidasi ini, istilah pihak yang mempunyai hubungan istimewa digunakan sesuai dengan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa", sebagai berikut:

- (i) perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (*intermediaries*), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies*, *subsidiaries* dan *fellow subsidiaries*);
- (ii) perusahaan asosiasi (*associated company*);
- (iii) perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor);
- (iv) karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut;
- (v) perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (iii) atau (iv), atau perusahaan di mana setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

Seluruh transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama maupun berbeda dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Penjabaran transaksi dalam valuta asing

Bank menyelenggarakan catatan akuntansinya dalam Rupiah. Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Saldo akhir tahun aset moneter dan kewajiban moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tengah Reuters pukul 16:00 WIB pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut (nilai penuh):

Valuta asing	2009	2008
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	9.395	10.900
1 Dolar Australia (AUD)	8.453	7.554
1 Dolar Singapura (SGD)	6.705	7.588
1 Dolar Hong Kong (HKD)	1.211	1.406
1 Poundsterling Inggris (GBP)	15.165	15.755
100 Yen Jepang (JPY)	10.219	12.065
1 EURO (EUR)	13.542	15.356

Laba (rugi) kurs, yang telah maupun yang belum direalisasi, dikreditkan (dibebankan) dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun yang bersangkutan.

e. Pendapatan dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui dengan menggunakan metode akrual. Diskonto dan premi diamortisasi dengan metode garis lurus dan dicatat sebagai penyesuaian atas bunga.

Pengakuan pendapatan bunga dari kredit dan aset produktif lainnya dihentikan pada saat kredit dan aset produktif lainnya tersebut diklasifikasikan sebagai *non-performing* (kurang lancar, diragukan dan macet). Pendapatan bunga dari kredit dan aset produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai *non-performing* dilaporkan sebagai tagihan kontinjensi dan diakui sebagai pendapatan pada saat pendapatan tersebut diterima (*cash basis*).

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit *non-performing*. Kredit *non-performing* terdiri dari kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih akan dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan sebagai *non-performing*.

Seluruh penerimaan kas yang berhubungan dengan kredit *non-performing* yang digolongkan sebagai diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan kas di atas pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun yang bersangkutan.

Pendapatan bunga dari kredit yang direstrukturisasi hanya dapat diakui apabila telah diterima secara tunai sebelum kualitas kredit menjadi lancar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi, termasuk yang berhubungan langsung dengan kegiatan pemberian kredit dan/atau mempunyai jangka waktu tertentu dan jumlahnya signifikan, diakui sebagai pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu kredit. Saldo pendapatan provisi dan komisi yang ditangguhkan dari kredit yang diselesaikan sebelum jatuh tempo, diakui sebagai pendapatan pada saat penyelesaian kredit. Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan langsung dengan jangka waktu tertentu diakui pada saat terjadinya transaksi.

g. Instrumen derivatif

Transaksi derivatif diakui sesuai dengan PSAK No. 55, "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai", yang mensyaratkan bahwa semua instrumen derivatif diakui dalam laporan keuangan konsolidasi pada nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar dan kurs tengah Reuters pada tanggal laporan. Untuk memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai, PSAK No. 55 mensyaratkan beberapa kriteria tertentu yang harus dipenuhi, termasuk adanya dokumentasi formal pada awal lindung nilai.

Perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun berjalan. Jika instrumen derivatif dirancang dan memenuhi syarat lindung nilai, perubahan nilai wajar yang berkaitan dengan lindung nilai diakui sebagai penyesuaian terhadap aset atau kewajiban yang dilindung nilai dalam laba rugi konsolidasi tahun berjalan atau disajikan dalam ekuitas, tergantung pada jenis transaksi dan efektivitas dari lindung nilai tersebut.

h. Akuntansi untuk transaksi sewa guna usaha

Efektif tanggal 1 Januari 2008, PSAK No. 30 (Revisi 2007), "Sewa", menggantikan PSAK No. 30 (1990) "Akuntansi Sewa Guna Usaha". Berdasarkan PSAK No. 30 (Revisi 2007), penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Menurut PSAK revisi ini, sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Selanjutnya, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset (Catatan 2s).

Berdasarkan PSAK No. 30 (Revisi 2007), dalam sewa pembiayaan, Anak Perusahaan mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di neraca konsolidasi sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan penghasilan pembiayaan. Pengakuan penghasilan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih Anak Perusahaan sebagai *lessor* dalam sewa pembiayaan.

Dalam sewa menyewa biasa, Anak Perusahaan mengakui aset untuk sewa operasi di neraca konsolidasi sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Pendapatan sewa kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Akuntansi untuk pembiayaan konsumen

Piutang pembiayaan konsumen disajikan sebesar jumlah angsuran yang belum dibayar dikurangi dengan pendapatan pembiayaan konsumen yang ditangguhkan dan penyisihan penghapusan. Pendapatan pembiayaan konsumen yang ditangguhkan merupakan selisih antara jumlah angsuran yang belum dibayar dengan nilai pokok pembiayaan dan diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu perjanjian berdasarkan tingkat pengembalian efektif.

j. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain.

k. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar saldo penempatan, dikurangi bunga diterima di muka. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan, dikurangi penyisihan penghapusan penempatan pada bank lain tersebut, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan evaluasi manajemen atas kolektibilitas masing-masing penempatan pada akhir tahun.

l. Surat-surat berharga dan obligasi pemerintah

Surat-surat berharga terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia, obligasi korporasi, obligasi konversi, obligasi sukuk, wesel tagih, *Medium Term Notes*, unit penyertaan di reksa dana, surat berharga pasar uang dan Surat Perbendaharaan Negara. Investasi dalam surat-surat berharga dan obligasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam salah satu dari kelompok berikut ini: diperdagangkan (*trading*), tersedia untuk dijual (*available-for-sale*), dan dimiliki hingga jatuh tempo (*held-to-maturity*).

Surat-surat berharga dan obligasi pemerintah yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo disajikan dalam neraca konsolidasi sebesar harga perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto. Penurunan nilai wajar di bawah harga perolehan (termasuk amortisasi premi dan diskonto) yang tidak bersifat sementara dicatat sebagai penurunan permanen nilai investasi dan dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun yang bersangkutan.

Surat-surat berharga dan obligasi pemerintah yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan tersedia untuk dijual dinilai dengan nilai wajar pada tanggal neraca. Laba atau rugi, yang telah maupun yang belum direalisasi akibat selisih antara nilai wajar dan harga perolehan surat-surat berharga dan obligasi pemerintah untuk tujuan diperdagangkan, diakui atau dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun yang bersangkutan. Selisih antara nilai wajar dan harga perolehan surat-surat berharga dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual, yang belum direalisasi, dicatat sebagai unsur ekuitas setelah pengaruh pajak tangguhan dan akan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi pada tahun dimana surat-surat berharga dan obligasi pemerintah tersebut dijual.

Untuk surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar keuangan yang terorganisasi, nilai wajar tersebut umumnya ditentukan dengan mengacu pada harga penawaran pasar yang terjadi di bursa efek pada tanggal yang terdekat dengan tanggal neraca, kemudian disesuaikan dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Untuk surat-surat berharga yang tidak mempunyai harga penawaran pasar, estimasi atas nilai wajar surat berharga ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya adalah sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih surat berharga tersebut. Penurunan nilai wajar permanen atas surat-surat berharga untuk dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual dibebankan pada laba rugi konsolidasi tahun berjalan.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Surat-surat berharga dan obligasi pemerintah (lanjutan)

Investasi dalam unit penyertaan di reksa dana dinilai berdasarkan Nilai Aset Bersih (*Net Asset Value*) pada tanggal neraca.

Labanya atau ruginya yang direalisasikan dari penjualan surat-surat berharga dan obligasi pemerintah diakui atau dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahunan yang bersangkutan berdasarkan metode identifikasi khusus.

m. Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dan surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali

Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) disajikan sebagai aset dalam neraca konsolidasi sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan (belum diamortisasi), dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak surat-surat berharga tersebut dibeli hingga dijual kembali.

Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*) disajikan sebagai kewajiban sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi beban bunga yang belum diamortisasi. Beban bunga yang belum diamortisasi merupakan selisih antara harga jual dan harga beli kembali yang disepakati tersebut dan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek dijual hingga dibeli kembali. Efek yang dijual tetap dicatat sebagai aset dalam neraca karena secara substansi kepemilikan efek tetap berada pada pihak Bank sebagai penjual.

n. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan disajikan sebesar jumlah pokok kredit dikurangi penyisihan penghapusan kredit yang diberikan. Jumlah bruto kredit yang direstrukturisasi mencakup pokok kredit, bunga, dan beban lainnya yang dikapitalisasi ke pokok kredit. Bunga yang dikapitalisasi ke pokok kredit tersebut diakui sebagai pendapatan bunga ditangguhkan.

Kredit sindikasi, kredit dalam rangka pembiayaan bersama (*joint financing*) dan kredit penerusan (*channeling loan*) diakui sebesar pokok kredit yang merupakan porsi kredit yang risikonya ditanggung oleh Bank.

o. Restrukturisasi kredit bermasalah

Selama tahun 2009 dan 2008, jenis restrukturisasi kredit bermasalah adalah dengan modifikasi persyaratan kredit dan konversi kredit menjadi instrumen keuangan lainnya.

Dalam hal restrukturisasi kredit bermasalah yang dilakukan hanya dengan modifikasi persyaratan kredit, dampak restrukturisasi tersebut dicatat secara prospektif dan tidak mengubah nilai tercatat kredit yang diberikan pada tanggal restrukturisasi, kecuali jika jumlahnya melebihi nilai tunai penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam persyaratan baru. Jika nilai tunai penerimaan kas masa depan sebagaimana ditentukan dalam persyaratan baru dari kredit yang diberikan tersebut lebih rendah daripada nilai tercatat kredit yang diberikan, saldo kredit yang diberikan harus dikurangi ke suatu jumlah yang sama dengan jumlah nilai tunai penerimaan kas masa depan. Jumlah pengurangan tersebut diakui sebagai kerugian dalam laporan laba rugi konsolidasi tahunan yang bersangkutan.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Tagihan dan kewajiban akseptasi

Tagihan dan kewajiban akseptasi dinyatakan sebesar nilai nominal *letters of credit* (L/C) atau nilai realisasi L/C yang diaksep oleh bank pengaksep (*accepting bank*). Tagihan akseptasi disajikan bersih setelah dikurangi dengan penyisihan penghapusan.

q. Penyisihan penghapusan aset dan estimasi kerugian atas transaksi rekening administratif

Bank membentuk penyisihan penghapusan aset produktif (terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga (kecuali Sertifikat Bank Indonesia, Surat Perbendaharaan Negara, dan obligasi pemerintah), tagihan derivatif, kredit yang diberikan, investasi dalam sewa guna usaha, piutang pembiayaan konsumen, tagihan akseptasi, dan penyertaan), penyisihan penghapusan aset non produktif (agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense account*), dan estimasi kerugian atas transaksi rekening administratif.

Penyisihan penghapusan aset dan estimasi kerugian ini dibentuk berdasarkan estimasi atas kerugian yang mungkin timbul. Jumlah penyisihan dan estimasi kerugian ini, yang menurut manajemen cukup untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya aset dan transaksi rekening administratif, didasarkan atas evaluasi kolektibilitas masing-masing aset dan transaksi rekening administratif. Evaluasi manajemen atas kolektibilitas masing-masing aset dan transaksi rekening administratif dilakukan berdasarkan sejumlah faktor subjektif, termasuk keadaan ekonomi/prospek usaha saat ini maupun yang diantisipasi untuk masa yang akan datang, kondisi keuangan, kemampuan membayar dan faktor-faktor lain yang relevan, dimana khusus untuk Bank, selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan perubahannya yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009, dan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan perubahannya yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, dan Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007.

Pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif dan estimasi kerugian atas transaksi rekening administratif yang diterapkan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

1. Penyisihan umum sekurang-kurangnya 1% dari saldo aset produktif dan transaksi rekening administratif dengan kualitas lancar.
2. Penyisihan khusus untuk aset dan transaksi rekening administratif dengan kualitas:

<u>Klasifikasi</u>	<u>Persentase minimum</u>
Dalam perhatian khusus	5%
Kurang lancar	15%
Diragukan	50%
Macet	100%

Penyisihan khusus untuk aset produktif dan transaksi rekening administratif dengan kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet dihitung atas jumlah pokok pinjaman setelah dikurangi dengan nilai agunan yang diperkenankan.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Penyisihan penghapusan aset dan estimasi kerugian atas transaksi rekening administratif (lanjutan)

Untuk kredit yang telah direstrukturisasi, evaluasi manajemen Bank atas kolektibilitas kredit selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan perubahannya yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009, dan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan perubahannya yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, dan Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007.

Penyesuaian atas penyisihan penghapusan aset dan estimasi kerugian atas transaksi rekening administratif dicatat dalam periode dimana penyesuaian tersebut diketahui atau dapat ditaksir secara wajar. Penyesuaian ini termasuk penambahan penyisihan penghapusan aset dan penambahan estimasi kerugian atas transaksi rekening administratif, maupun pemulihan aset dan transaksi rekening administratif yang telah dihapuskan sebelumnya.

Estimasi kerugian atas transaksi rekening administratif yang mempunyai risiko kredit disajikan di sisi kewajiban pada neraca konsolidasi.

Aset dan transaksi rekening administratif dihapuskan dengan mengurangi penyisihan penghapusan yang bersangkutan atau estimasi kerugian atas transaksi rekening administratif, apabila menurut manajemen aset dan transaksi rekening administratif tersebut tidak mungkin tertagih lagi.

r. Penyertaan

Penyertaan dalam saham dengan kepemilikan kurang dari 20% dicatat dengan metode biaya (*cost method*), sementara untuk kepemilikan antara 20% - 50% dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Penyertaan dengan kepemilikan lebih dari 50% dikonsolidasikan (Catatan 2b). Bagian laba (rugi) dari penyertaan yang dicatat dengan metode ekuitas dikreditkan (dibebankan) dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun yang bersangkutan. Penurunan nilai penyertaan di bawah harga perolehan yang tidak bersifat sementara dicatat sebagai penurunan nilai penyertaan dan dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun yang bersangkutan.

Perubahan nilai investasi pada Anak Perusahaan yang disebabkan terjadinya perubahan nilai ekuitas Anak Perusahaan yang bukan merupakan transaksi antara Bank dengan Anak Perusahaan, diakui sebagai bagian dari ekuitas sebagai "Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan". Akun ini akan diperhitungkan di dalam penentuan laba atau rugi Induk Perusahaan pada saat pelepasan investasi tersebut.

s. Aset tetap

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 384/KMK.04/1998 tanggal 14 Agustus 1998, Bank telah melakukan penilaian kembali aset tetap tertentu pada tanggal 31 Desember 1998 dan 31 Oktober 2000 (Catatan 2aa). Jumlah selisih penilaian kembali aset tetap sebesar Rp1.059.907 (Catatan 22) merupakan selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 1998 dan 31 Oktober 2000. Selisih penilaian kembali aset tetap disajikan sebagai akun terpisah di bagian ekuitas di neraca. Aset tetap yang telah dinilai kembali tersebut dicatat sebesar nilai wajar/nilai revaluasi dan disusutkan berdasarkan sisa umur aset.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Aset tetap (lanjutan)

Efektif tanggal 1 Januari 2008, Bank dan Anak Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2007), "Aset Tetap", yang menggantikan PSAK No. 16 (1994), "Aset Tetap dan Aset Lain-lain", dan PSAK No. 17 (1994), "Akuntansi Penyusutan". Bank telah melakukan revaluasi aset tetap sebelum penerapan PSAK No. 16 (Revisi 2007) dan memilih model biaya, maka nilai revaluasi aset tetap tersebut dianggap sebagai biaya perolehan (*deemed cost*) dan biaya perolehan tersebut adalah nilai pada saat PSAK 16 (Revisi 2007) diterbitkan. Seluruh saldo selisih penilaian kembali aset tetap yang masih dimiliki pada saat penerapan pertama kali PSAK No. 16 (Revisi 2007) yang disajikan sebagai bagian dari ekuitas dalam neraca konsolidasi telah direklasifikasi ke saldo laba konsolidasi pada tahun 2008 (Catatan 22).

Aset tetap (selain tanah) dan aset tetap yang telah dinilai kembali disajikan sebesar harga perolehan/nilai revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penilaian. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung sejak bulan aset yang bersangkutan digunakan, dengan metode garis lurus (*straight-line method*) untuk bangunan, dan metode saldo menurun ganda (*double-declining-balance method*) untuk aset tetap lainnya, berdasarkan estimasi masa manfaat sebagai berikut:

Bangunan	:	20 tahun
Peralatan kantor dan perabot	:	2 - 8 tahun
Kendaraan	:	4 - 8 tahun

Tanah disajikan sebesar harga perolehan/revaluasi dan tidak diamortisasi. Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Ketika aset dalam penyelesaian telah selesai dan siap digunakan, akumulasi biaya perolehan direklasifikasi ke akun aset tetap yang sebenarnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi konsolidasi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan di-*review*, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Efektif tanggal 1 Januari 2008, PSAK No. 30 (Revisi 2007), "Sewa", menggantikan PSAK No. 30 (1990), "Akuntansi Sewa Guna Usaha", (Catatan 2h). Berdasarkan PSAK No. 30 (Revisi 2007), dalam sewa pembiayaan, Bank sebagai lessor, mengakui aset dan kewajiban dalam neraca konsolidasi pada awal masa sewa, sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban sewa. Beban keuangan dialokasikan pada setiap periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo kewajiban. Beban sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya. Beban keuangan dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasi. Aset sewaan (disajikan sebagai bagian aset tetap) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Bank akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Aset tetap (lanjutan)

Dalam sewa operasi, Bank mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

PSAK No. 48 tentang "Penurunan Nilai Aset" mensyaratkan bahwa nilai tercatat aset tetap dikaji ulang setiap tanggal neraca untuk menilai apakah aset tetap tersebut nilai tercatatnya lebih tinggi dari jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) dari aset tetap tersebut. Jika nilai tercatat aset melebihi estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap tersebut, nilai tercatat aset tetap harus diturunkan menjadi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap tersebut.

t. Simpanan dari nasabah

Giro dinyatakan sebesar nilai kewajiban kepada pemegang giro.

Tabungan dinyatakan sebesar nilai kewajiban kepada pemilik tabungan.

Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

u. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari kewajiban terhadap bank lain, baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, *inter-bank call money* dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari atau 90 hari, dan deposito berjangka. Semuanya dinyatakan sesuai jumlah kewajiban terhadap bank lain.

v. Surat-surat berharga yang diterbitkan

Surat-surat berharga yang diterbitkan oleh Bank dan Anak Perusahaan termasuk *travelers' cheques* dan obligasi dicatat sebesar nilai nominal. Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan obligasi ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu obligasi. Saldo biaya emisi obligasi ditangguhkan dicatat sebagai pengurang terhadap saldo hutang obligasi.

w. Taksiran pajak penghasilan

Bank dan Anak Perusahaan menerapkan metode kewajiban (*liability method*) untuk menentukan beban pajak penghasilan. Menurut metode kewajiban, aset dan hutang pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai aset dan kewajiban yang tercatat di neraca dengan dasar pengenaan pajak atas aset dan kewajiban tersebut pada setiap tanggal pelaporan. Metode ini juga mensyaratkan adanya pengakuan manfaat pajak di masa datang seperti rugi menurut pajak yang belum digunakan apabila besar kemungkinan bahwa manfaat tersebut dapat direalisasikan di masa yang akan datang.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substansial berlaku pada tanggal neraca. Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Koreksi atas kewajiban pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan dan atau banding tersebut diterima.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

x. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung berdasarkan laba operasional bersih dan laba bersih dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar pada akhir tahun yang bersangkutan setelah memperhitungkan pembelian kembali saham. Saham yang diterbitkan untuk dijual secara kas diperhitungkan dalam jumlah rata-rata tertimbang saham beredar apabila kas telah diterima.

y. Kewajiban imbalan pasca-kerja

Jumlah estimasi kewajiban didasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 dan revisi atas PSAK No. 24 mengenai "Imbalan Kerja".

Bank menyelenggarakan program Dana Pensiun Iuran Pasti bagi pekerja menurut ketentuan Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan peraturan pelaksanaannya sejak tanggal 25 Januari 1995 melalui Surat Edaran No. SE/DIR/HRD/001/DPB/05/95 tanggal 3 Februari 1995 perihal Dana Pensiun BCA. Peserta Dana Pensiun Bank adalah karyawan atau karyawan tetap Bank dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.

Bank mengakui penyisihan uang penghargaan terhadap pegawai berdasarkan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 (UU No. 13/2003) tanggal 25 Maret 2003 terutama ketentuan yang mengatur mengenai penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Rugi di perusahaan.

Kewajiban Bank atas imbalan pasca-kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi jumlah kewajiban imbalan pasca-kerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar aset bersih dana pensiun. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan metode *projected unit-credit*. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial bersih yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut. Besarnya keuntungan atau kerugian aktuarial tersebut, diakui selama rata-rata sisa masa kerja dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu terjadi ketika Bank memperkenalkan program imbalan pasti atau mengubah imbalan terhutang pada program imbalan pasti yang ada. Biaya jasa lalu diakui selama periode sampai dengan imbalan tersebut menjadi hak pekerja atau *vested*.

z. Program kompensasi manajemen berbasis saham

Bank memberikan opsi saham kepada manajemen dan karyawan tertentu. Beban kompensasi dinilai pada tanggal pemberian opsi saham dengan menggunakan nilai wajar dari opsi saham tersebut dan diakui selama masa bakti karyawan hingga opsi saham tersebut menjadi hak karyawan (*vesting period*) (Catatan 21).

Nilai wajar dari opsi saham yang diberikan ditaksir dengan menggunakan metode penentuan harga opsi Binomial (*Binomial option pricing model*).

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Kuasi reorganisasi

Pada tanggal 31 Oktober 2000, Bank menerapkan PSAK No. 51, "Akuntansi Kuasi Reorganisasi", untuk mendapatkan laporan yang dimulai dari "awal yang baik" (*fresh start*). Pelaporan "*fresh start*" mengharuskan penilaian kembali seluruh aset dan kewajiban yang tercatat dengan menggunakan nilai wajarnya dan eliminasi atas saldo rugi (defisit). Dengan penerapan kuasi reorganisasi, saldo rugi Bank pada tanggal 31 Oktober 2000 sebesar Rp25.853.162 telah dieliminasi ke akun tambahan modal disetor. Penerapan kuasi reorganisasi ini telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui surat No. 3/165/DPwB2/IDWB2 tanggal 21 Februari 2001 dan oleh para pemegang saham di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 April 2001 (notulen rapat dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H., dalam Akta No. 25).

Nilai wajar dari aset dan kewajiban Bank ditentukan berdasarkan harga pasar. Apabila harga pasar tidak tersedia atau tidak mencerminkan ukuran yang relevan untuk nilai wajar, estimasi nilai wajar didasarkan pada nilai tunai atau diskonto penerimaan kas masa depan dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang dihadapi.

ab. Informasi segmen

Bank mengidentifikasi segmen operasi berdasarkan geografis (segmen primer) serta produk (segmen sekunder). Setiap segmen memberikan berbagai pelayanan jasa perbankan dan keuangan. Pendapatan dari setiap segmen diakui berdasarkan lokasi aset dan pelanggannya. Harga antar segmen ditentukan secara wajar (*arm's length basis*). Beban yang timbul akan dibebankan pada setiap segmen pada saat beban terjadi. Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh setiap segmen sama dengan yang dijelaskan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

ac. Modal saham diperoleh kembali (*treasury stock*)

Bank menetapkan metode biaya (*cost method*) dalam mencatat modal saham diperoleh kembali (*treasury stock*).

Modal saham diperoleh kembali dicatat sebesar harga perolehan kembali saham dan disajikan sebagai pengurang pada sisi ekuitas laporan keuangan konsolidasi.

ad. Penggunaan estimasi

Dalam penyajian laporan keuangan konsolidasi yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, manajemen telah menggunakan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Adanya unsur ketidakpastian yang melekat dalam melakukan estimasi dapat menyebabkan jumlah sesungguhnya yang dilaporkan pada periode yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

ae. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang telah dikeluarkan tetapi belum berlaku efektif

Standar Akuntansi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK - Ikatan Akuntan Indonesia) sampai dengan penyelesaian laporan keuangan Bank tetapi belum efektif di tahun 2009 adalah sebagai berikut:

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ae. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang telah dikeluarkan tetapi belum berlaku efektif (lanjutan)

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010:

- (1) PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan.
- (2) PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian dan penjualan *items* non-keuangan.
- (3) Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) No. 3, "Pencabutan PSAK No. 54: Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah", berlaku untuk semua entitas yang menerapkan PSAK 54.
- (4) PPSAK No. 4, "Pencabutan PSAK No. 31 (Revisi 2000): Akuntansi Perbankan, PSAK No. 42: Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK No. 49: Akuntansi Reksa Dana", berlaku untuk semua entitas yang menerapkan PSAK No. 31 (Revisi 2000), PSAK No. 42 dan PSAK No. 49.
- (5) PPSAK No. 5, "Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK No. 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing".

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011:

- (1) PSAK No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan", menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statements*) agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain.
- (2) PSAK No. 2 (Revisi 2009), "Laporan Arus Kas", memberikan pengaturan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan (*financing*) selama suatu periode.
- (3) PSAK No. 4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri", akan diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk dan dalam akuntansi untuk investasi pada entitas anak, pengendalian bersama entitas, dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.
- (4) PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi", informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas usaha yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.
- (5) PSAK 15 (Revisi 2009), "Investasi Pada Entitas Asosiasi", akan diterapkan untuk akuntansi investasi dalam entitas asosiasi. Menggantikan PSAK 15 (1994), "Akuntansi untuk Investasi Dalam Perusahaan Asosiasi", dan PSAK 40 (1997), "Akuntansi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi".

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ae. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang telah dikeluarkan tetapi belum berlaku efektif (lanjutan)

- (6) PSAK 25 (Revisi 2009), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan", menentukan kriteria untuk pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, bersama dengan perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan.
- (7) PSAK No. 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset", menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkan dan jika aset tersebut terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diakui.
- (8) PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi", bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memungkinkan para pengguna memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut.

Bank sedang mengevaluasi dampak dari Standar, Interpretasi dan Pencabutan Standar yang direvisi dan yang baru tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasinya.

3. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Perincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang tidak dikonsolidasikan pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

	2009		2008	
	Jumlah	Persentase dari jumlah	Jumlah	Persentase dari jumlah
Kredit yang diberikan (Catatan 12)	688.590	0,5558%	824.211	0,7308%
Aset lain-lain*)	344.679	10,2305%	358.007	10,8660%
Simpanan dari nasabah dan bank lain (Catatan 15)	49.125	0,0198%	41.489	0,0194%
Fasilitas L/C yang diberikan kepada nasabah (Catatan 23)	1.396	0,0480%	29.620	1,4680%
Bank garansi yang diberikan kepada nasabah (Catatan 23)	27.871	0,6871%	27.947	0,6658%
Pendapatan bunga (Catatan 24)	68.895	0,3120%	67.545	0,3628%
Beban bunga (Catatan 25)	1.330	0,0166%	1.116	0,0161%

*) Merupakan pembayaran sewa yang dibayar di muka dan uang jaminan sewa kepada PT Grand Indonesia (Catatan 39).

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS

	2009	2008
Rupiah	8.591.816	10.449.879
Valuta asing	273.335	349.042
	8.865.151	10.798.921

Saldo kas dalam mata uang Rupiah termasuk jumlah kas pada Anjungan Tunai mandiri (ATM) masing-masing sebesar Rp5.094.578 dan Rp5.168.127 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

	2009	2008
Rupiah	11.116.218	9.368.858
Valuta asing	395.060	299.750
	11.511.278	9.668.608

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia berupa GWM Utama dalam Rupiah dan valuta asing. Peraturan Bank Indonesia No. 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing menyatakan bahwa Giro Wajib Minimum (GWM) Utama dalam Rupiah sebesar 5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah dan GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 2,5% dari DPK dalam Rupiah (Catatan 38). Sementara menurut PBI No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing menyatakan bahwa GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing (Catatan 38).

Pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2009. GWM Utama Bank dalam Rupiah tahun 2009 adalah sebesar 5,16% (2008: 5,08%), GWM Sekunder dalam Rupiah adalah sebesar 47,18%, sedangkan GWM Utama dalam Dolar Amerika Serikat adalah sebesar 1,21% (2008: 1,05%).

6. GIRO PADA BANK LAIN

Pihak ketiga:

	2009	2008
Rupiah	283	1.508
Valuta asing	12.024.121	7.987.543
Jumlah giro pada bank lain, sebelum penyisihan penghapusan	12.024.404	7.989.051
Dikurangi: Penyisihan penghapusan		
Rupiah	(10)	(30)
Valuta asing	(120.549)	(79.615)
	(120.559)	(79.645)
Jumlah giro pada bank lain - bersih	11.903.845	7.909.406

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

Bank tidak memiliki giro pada bank lain yang mempunyai hubungan istimewa.

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, seluruh saldo giro pada bank lain diklasifikasikan sebagai "lancar".

Tingkat bunga rata-rata setahun:

	2009	2008
Rupiah	0,88%	0,36%
Valuta asing	0,03%	1,13%

Mutasi penyisihan penghapusan giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	2009		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
Saldo awal tahun	(30)	(79.615)	(79.645)
Saldo awal Anak Perusahaan yang diakuisi	(5)	-	(5)
Pemulihan (penambahan) penyisihan selama tahun berjalan	25	(54.163)	(54.138)
Selisih kurs yang timbul dari penyisihan penghapusan dalam valuta asing	-	13.229	13.229
Saldo akhir tahun	(10)	(120.549)	(120.559)
	2008		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
Saldo awal tahun	(13)	(3.215)	(3.228)
Penambahan penyisihan selama tahun berjalan	(17)	(76.498)	(76.515)
Selisih kurs yang timbul dari penyisihan penghapusan dalam valuta asing	-	98	98
Saldo akhir tahun	(30)	(79.615)	(79.645)

Manajemen yakin bahwa saldo penyisihan penghapusan yang telah dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya giro pada bank lain.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

	Jangka waktu	2009	2008
Pihak ketiga:			
Bank Indonesia			
Rupiah	Hingga 1 bulan	1.214.160	729.251
<i>Call money:</i>			
Rupiah	Hingga 1 bulan	150.000	-
	Lebih dari 1 bulan hingga 3 bulan	50.000	-
	Lebih dari 12 bulan	1.755.000	1.755.000
Valuta asing	Hingga 1 bulan	1.166.171	2.209.786
	Lebih dari 1 bulan hingga 3 bulan	-	7.090
	Lebih dari 6 bulan hingga 12 bulan	939.500	-
		<u>5.274.831</u>	<u>4.701.127</u>
Deposito:			
Rupiah	Hingga 1 bulan	-	5.933
	Lebih dari 1 bulan hingga 3 bulan	-	242.673
Valuta asing	Lebih dari 1 bulan hingga 3 bulan	9.395	-
	Lebih dari 12 bulan	15.969	28.224
		<u>25.364</u>	<u>276.830</u>
Jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, sebelum penyisihan penghapusan		5.300.195	4.977.957
Dikurangi: Penyisihan penghapusan			
Rupiah		(19.550)	(20.036)
Valuta asing		(21.310)	(21.513)
		<u>(40.860)</u>	<u>(41.549)</u>
Jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih		<u>5.259.335</u>	<u>4.936.408</u>

Bank tidak memiliki penempatan pada bank lain yang mempunyai hubungan istimewa.

Termasuk dalam deposito adalah penempatan pada bank lain sehubungan dengan jaminan atas sewa gedung masing-masing sebesar RpNihil dan Rp5.933 per 31 Desember 2009 dan 2008 dan penempatan kepada Bank of New York sehubungan dengan jaminan atas penggunaan jasa Visa dan Mastercard masing-masing sebesar Rp15.969 dan Rp14.160 per 31 Desember 2009 dan 2008.

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, seluruh saldo penempatan pada bank lain diklasifikasikan sebagai "lancar".

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

Mutasi penyisihan penghapusan penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut:

	2009		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
Saldo awal tahun	(20.036)	(21.513)	(41.549)
Pemulihan (penambahan) penyisihan selama tahun berjalan	486	(15.621)	(15.135)
Selisih kurs yang timbul dari penyisihan penghapusan dalam valuta asing	-	15.824	15.824
Saldo akhir tahun	(19.550)	(21.310)	(40.860)

	2008		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
Saldo awal tahun	(22.855)	(31.213)	(54.068)
Pemulihan penyisihan selama tahun berjalan	2.819	11.097	13.916
Selisih kurs yang timbul dari penyisihan penghapusan dalam valuta asing	-	(1.397)	(1.397)
Saldo akhir tahun	(20.036)	(21.513)	(41.549)

Manajemen yakin bahwa saldo penyisihan penghapusan yang telah dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya penempatan pada bank lain.

Per 31 Desember 2009 dan 2008, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang digunakan sebagai jaminan.

Tingkat bunga rata-rata setahun:

	2009	2008
Bank Indonesia dan <i>Call money</i> :		
Rupiah	7,12%	8,70%
Valuta asing	0,82%	2,43%
Deposito:		
Rupiah	7,88%	9,12%
Valuta asing	0,32%	3,10%

8. SURAT-SURAT BERTHARGA

Akun ini terdiri dari surat-surat berharga untuk tujuan diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo, sebagai berikut:

	2009		
	Harga perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto)	Laba (rugi) belum direalisasi	Nilai wajar
a. Surat-surat berharga untuk diperdagangkan:			
Rupiah:			
Sertifikat Bank Indonesia	46.630.989	27.524	46.658.513

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

	2009		
	Harga perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto)	Laba (rugi) belum direalisasi	Nilai wajar
Obligasi korporasi	27.200	-	27.200
Jumlah surat-surat berharga untuk diperdagangkan	46.658.189	27.524	46.685.713
b. Surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual:			
Rupiah:			
Sertifikat Bank Indonesia	11.759.889	6.902	11.766.791
Unit penyertaan di reksa dana	2.252.332	439.589	2.691.921
Surat Perbendaharaan Negara	2.063.032	2.971	2.066.003
Obligasi korporasi	650.000	(9.874)	640.126
Lainnya	23.149	(27)	23.122
Jumlah surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual	16.748.402	439.561	17.187.963
	2009		
	Harga perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto)	Penyisihan penurunan nilai permanen	Nilai buku
c. Surat-surat berharga untuk dimiliki hingga jatuh tempo:			
Rupiah:			
Obligasi korporasi	4.447.711	-	4.447.711
Medium Term Notes	325.000	-	325.000
Obligasi Konversi	175.279	-	175.279
Sertifikat Bank Indonesia	64.736	-	64.736
Wesel tagih	55.613	-	55.613
Surat Perbendaharaan Negara	18.078	-	18.078
Lainnya	92.575	-	92.575
	5.178.992	-	5.178.992
Valuta asing:			
Medium Term Notes	663.289	-	663.289
Wesel tagih	580.363	-	580.363
	1.243.652	-	1.243.652
Jumlah surat-surat berharga untuk dimiliki hingga jatuh tempo	6.422.644	-	6.422.644
Jumlah surat-surat berharga, sebelum penyisihan penghapusan			70.296.320
Dikurangi: Penyisihan penghapusan			
Rupiah			(569.846)
Valuta asing			(163.711)
			(733.557)
Jumlah surat-surat berharga - bersih			69.562.763

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

	2008		
	Harga perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto)	Laba (rugi) belum direalisasi	Nilai wajar
a. Surat-surat berharga untuk diperdagangkan:			
Rupiah:			
Sertifikat Bank Indonesia	38.182.638	-	38.182.638
b. Surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual:			
Rupiah:			
Obligasi korporasi	400.000	(32.654)	367.346
Unit penyertaan di reksa dana	2.417.314	229.441	2.646.755
Surat Perbendaharaan Negara	552.211	(6.514)	545.697
Jumlah surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual	3.369.525	190.273	3.559.798
	2008		
	Harga perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto)	Penyisihan penurunan nilai permanen	Nilai buku
c. Surat-surat berharga untuk dimiliki hingga jatuh tempo:			
Rupiah:			
Obligasi korporasi	3.954.905	-	3.954.905
Wesel tagih	362.810	-	362.810
<i>Medium Term Notes</i>	325.000	-	325.000
Surat Perbendaharaan Negara	620.192	-	620.192
	5.262.907	-	5.262.907
Valuta asing:			
Surat berharga pasar uang	1.635.000	-	1.635.000
<i>Medium Term Notes</i>	1.501.314	-	1.501.314
Wesel tagih	415.441	-	415.441
	3.551.755	-	3.551.755
Jumlah surat-surat berharga untuk dimiliki hingga jatuh tempo	8.814.662	-	8.814.662
Jumlah surat-surat berharga, sebelum penyisihan penghapusan			50.557.098
Dikurangi: Penyisihan penghapusan			
Rupiah			(388.116)
Valuta asing			(124.352)
			(512.468)
Jumlah surat-surat berharga - bersih			50.044.630

Bank tidak memiliki surat-surat berharga kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. SURAT-SURAT BERTHARGA (lanjutan)

Selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Bank melakukan reklasifikasi surat-surat berharga dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual masing-masing sebesar Rp2.290.486 dan Rp1.143.000. Reklasifikasi surat-surat berharga dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dilakukan untuk surat-surat berharga yang jatuh temponya kurang dari enam bulan.

Bank telah melakukan reklasifikasi surat berharga dari kelompok diperdagangkan ke kelompok tersedia untuk dijual dengan nilai wajar sebesar Rp469.824 sebelum reklasifikasi. Pada tanggal reklasifikasi, yaitu 9 Desember 2008, nilai pasar sebesar Rp534.359. Apabila surat berharga tersebut tetap sebagai kelompok diperdagangkan, pengaruh penurunan nilai pasar adalah sebesar Rp2.509.

Termasuk dalam surat-surat berharga pada tanggal 31 Desember 2008 adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan nilai tercatat sebesar Rp49.878 (nilai tunai sebesar Rp50.000), yang sesuai dengan perjanjian, pada tanggal 5 Januari 2009 Bank harus membeli kembali SBI tersebut dengan harga Rp49.946. Jumlah kewajiban pada nilai tercatat ("Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali") pada neraca konsolidasi sebesar Rp49.892 pada tanggal 31 Desember 2008.

Surat-surat berharga berdasarkan kolektibilitas:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
<u>Rupiah:</u>		
Lancar:		
Harga perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto)	68.485.583	46.715.070
Laba belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat-surat berharga untuk diperdagangkan dan yang tersedia untuk dijual	467.085	190.273
	<u>68.952.668</u>	<u>46.905.343</u>
Macet:		
Harga perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto)	100.000	100.000
<u>Valuta asing:</u>		
Lancar:		
Harga perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto)	1.142.341	3.550.653
Macet:		
Harga perolehan (setelah amortisasi premi/diskonto)	101.311	1.102
Jumlah surat-surat berharga, sebelum penyisihan penghapusan	70.296.320	50.557.098
Dikurangi: Penyisihan penghapusan		
Rupiah	(569.846)	(388.116)
Valuta asing	(163.711)	(124.352)
	<u>(733.557)</u>	<u>(512.468)</u>
Jumlah surat-surat berharga - bersih	<u>69.562.763</u>	<u>50.044.630</u>

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

Rincian surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual dan untuk dimiliki hingga jatuh tempo berdasarkan periode jatuh tempo:

	2009	2008
a. Surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual, nilai wajar:		
Hingga 1 tahun	16.524.715	3.192.452
Lebih dari 1 tahun hingga 5 tahun	413.248	367.346
Lebih dari 5 tahun	250.000	-
	17.187.963	3.559.798
b. Surat-surat berharga untuk dimiliki hingga jatuh tempo, nilai buku:		
Hingga 1 tahun	718.791	3.033.443
Lebih dari 1 tahun hingga 5 tahun	3.492.524	2.659.925
Lebih dari 5 tahun	2.211.329	3.121.294
	6.422.644	8.814.662

Tingkat bunga rata-rata setahun:

	2009	2008
Rupiah:		
Sertifikat Bank Indonesia	8,15%	8,96%
Obligasi korporasi	11,22%	11,29%
Surat Perbendaharaan Negara	9,67%	8,52%
<i>Medium Term Notes</i>	10,33%	10,44%
Valuta asing:		
Surat berharga pasar uang	-	4,31%
<i>Medium Term Notes</i>	8,68%	8,61%

Mutasi penyisihan penghapusan surat-surat berharga adalah sebagai berikut:

	2009		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
Saldo awal tahun	(388.116)	(124.352)	(512.468)
Penambahan penyisihan selama tahun berjalan	(181.730)	(61.933)	(243.663)
Selisih kurs yang timbul dari penyisihan penghapusan dalam valuta asing	-	22.574	22.574
Saldo akhir tahun	(569.846)	(163.711)	(733.557)

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. SURAT-SURAT BERTAHAP (lanjutan)

	2008		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
Saldo awal tahun	(88.384)	(14.687)	(103.071)
Penambahan penyisihan selama tahun berjalan	(299.732)	(104.837)	(404.569)
Selisih kurs yang timbul dari penyisihan penghapusan dalam valuta asing	-	(4.828)	(4.828)
Saldo akhir tahun	(388.116)	(124.352)	(512.468)

Manajemen yakin bahwa saldo penyisihan penghapusan yang telah dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya surat-surat berharga.

Berikut ini adalah ikhtisar peringkat efek yang dimiliki Bank berdasarkan laporan yang diperoleh dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo), PT Moody's Indonesia (dahulu PT Kasnic Credit Rating Indonesia), atau Standard & Poor's, masing-masing per 31 Desember 2009 dan 2008:

	2009	2008
BNI Securities	idBBB	idBBB+
Bank Jabar Banten	idA+	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (d/h Bank Ekspor Indonesia (Persero))	idAAA	idA+
Majapahit Holding BV	BB-	BB-
Mandiri Tunas Finance (d/h PT Tunas Financindo Sarana)	idA	idA
Perum Pegadaian	idAA+	idAA+
PT Arpeni Pratama Ocean Line	idBB	idA
PT Astra Sedaya Finance	idAA-	idAA-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idAA+	idA
PT Bank Mega Tbk	A(idn)	A(idn)
PT Bank OCBC NISP Tbk	idA+	idA+
PT Bank Pan Indonesia Tbk	idA+	idA+
PT Bank Resona Perdana	idAA-	Aa1.id
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	idAA-	idAA-
PT Bank UOB Buana Indonesia	-	idA+
PT Bentoel Internasional Investama Tbk	idAAA	idA
PT Berlian Laju Tanker Tbk	idA	idA+
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	idBBB+	A1.id
PT Excelcomindo Pratama Tbk	idA+	idAA-
PT Federal International Finance	idAA-	idAA-
PT HM Sampoerna Tbk	-	idAAA
PT Indo Kordsa Tbk (dahulu PT Branta Mulia Tbk)	-	idA-
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	idAA	idAA+
PT Indosat Tbk	idAA+	idAA+
PT Jasa Marga (Persero)	idAA-	idAA-
PT Lautan Luas Tbk	idA-	idA-
PT Medco Energi Internasional Tbk	idAA-	idAA-
PT Mobile-8 Telecom Tbk	-	idCCC
PT Oto Multi Artha	idAA-	idAA-
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	idA+	idA+
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	idAA-	idAA-
PT Perkebunan Nusantara VII	-	idA+
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	idAA-	idAA-

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. SURAT-SURAT BERHARGA (lanjutan)

	2009	2008
PT PGN Euro Finance	-	Baa2
PT Surya Citra Televisi	idA	idA

9. OBLIGASI PEMERINTAH

Akun ini terdiri dari obligasi rekapitalisasi pemerintah yang diperoleh dalam rangka rekapitalisasi Bank (Catatan 1b) dan yang dibeli dari pasar sekunder dan obligasi non-rekapitalisasi pemerintah. Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/18/DPM tanggal 31 Juli 2001 memperbolehkan seluruh obligasi pemerintah yang diterima dalam rangka rekapitalisasi bank untuk diperdagangkan di pasar sekunder.

Rincian obligasi pemerintah untuk tujuan diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	2009	2008
a. Diperdagangkan, nilai wajar:		
Rupiah:		
Obligasi non-rekapitalisasi pemerintah:		
Tingkat bunga tetap	13.960	139.272
b. Tersedia untuk dijual, nilai wajar:		
Rupiah:		
Obligasi rekapitalisasi pemerintah - rekapitalisasi Bank:		
Tingkat bunga tetap	-	2.079.719
Obligasi rekapitalisasi pemerintah - dari pasar sekunder:		
Tingkat bunga tetap	3.090.021	2.161.212
Tingkat bunga variabel	6.955.445	640.759
	10.045.466	2.801.971
Obligasi non-rekapitalisasi pemerintah:		
Tingkat bunga tetap	1.858.958	706.569
	11.904.424	5.588.259
Valuta asing:		
Obligasi non-rekapitalisasi pemerintah:		
Tingkat bunga tetap	1.049.192	-
Jumlah obligasi pemerintah tersedia untuk dijual	12.953.616	5.588.259

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
c. Dimiliki hingga jatuh tempo, harga perolehan setelah amortisasi premi/diskonto:		
Rupiah:		
Obligasi rekapitalisasi pemerintah - rekapitalisasi Bank:		
Tingkat bunga variabel	-	6.322.778
Obligasi rekapitalisasi pemerintah - dari pasar sekunder:		
Tingkat bunga tetap	6.182.601	8.289.859
Tingkat bunga variabel	8.817.629	8.765.374
	<u>15.000.230</u>	<u>17.055.233</u>
Obligasi non-rekapitalisasi pemerintah:		
Tingkat bunga tetap	13.010.572	9.656.503
	<u>28.010.802</u>	<u>33.034.514</u>
Valuta asing:		
Obligasi non-rekapitalisasi pemerintah:		
Tingkat bunga tetap	1.516.295	1.048.657
Jumlah obligasi pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo	<u>29.527.097</u>	<u>34.083.171</u>
Jumlah obligasi pemerintah	<u>42.494.673</u>	<u>39.810.702</u>
Rincian obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual dan untuk dimiliki hingga jatuh tempo berdasarkan periode jatuh tempo:		
	<u>2009</u>	<u>2008</u>
a. Tersedia untuk dijual, nilai wajar:		
Hingga 1 tahun	3.522.326	4.491.217
Lebih dari 1 tahun hingga 5 tahun	5.885.447	550.765
Lebih dari 5 tahun	3.545.843	546.277
	<u>12.953.616</u>	<u>5.588.259</u>
b. Dimiliki hingga jatuh tempo, harga perolehan setelah amortisasi premi/diskonto:		
Lebih dari 1 tahun hingga 5 tahun	11.803.762	9.190.260
Lebih dari 5 tahun	17.723.335	24.892.911
	<u>29.527.097</u>	<u>34.083.171</u>

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

Selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Bank melakukan reklasifikasi obligasi pemerintah dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual masing-masing sebesar Rp10.778.552 dan Rp16.885.820. Reklasifikasi obligasi pemerintah dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dilakukan untuk obligasi pemerintah yang jatuh temponya kurang dari enam bulan.

Tingkat bunga rata-rata setahun:

	2009	2008
Rupiah:		
Obligasi rekapitalisasi pemerintah - rekapitalisasi Bank	-	9,28%
Obligasi rekapitalisasi pemerintah - dari pasar sekunder	9,36%	10,19%
Obligasi non-rekapitalisasi pemerintah	10,97%	10,25%
Valuta asing:		
Obligasi non-rekapitalisasi pemerintah	7,71%	7,02%

Frekuensi pembayaran bunga atas obligasi pemerintah adalah setiap 6 bulan kecuali untuk obligasi pemerintah dengan tingkat bunga variabel adalah setiap 3 bulan dan Obligasi Ritel Indonesia adalah setiap 1 bulan.

10. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

Merupakan tagihan kepada Bank Indonesia atas pembelian surat-surat berharga dengan janji dijual kembali. Surat-surat berharga tersebut adalah sebagai berikut:

Jenis surat-surat berharga	Jangka waktu kontrak	Nilai jual kembali	Pendapatan bunga yang belum direalisasi	Nilai bersih
2009:				
Obligasi rekapitalisasi pemerintah, Rupiah	Hingga 1 bulan	200.711	(251)	200.460
Surat Perbendaharaan Negara, Rupiah	Hingga 1 bulan	469.462	(586)	468.876
		<u>670.173</u>	<u>(837)</u>	<u>669.336</u>

Tingkat bunga rata-rata setahun untuk surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali adalah 7,35%

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. TAGIHAN DAN KEWAJIBAN DERIVATIF

Ikhtisar transaksi derivatif adalah sebagai berikut:

Instrumen	31 Desember 2009		
	Jumlah notional (nilai penuh dalam mata uang asli)	Nilai wajar	
		Tagihan derivatif	Kewajiban derivatif
Terkait Nilai Tukar			
1. Kontrak berjangka - beli:			
USD	53.327.073	31	8.517
2. Kontrak berjangka - jual:			
USD	28.901.990	3.036	-
EUR	100.000	4	-
3. <i>Swap</i> mata uang asing - beli:			
USD	55.907.500	234	2.850
4. <i>Swap</i> mata uang asing - jual:			
USD	107.000.000	18.876	-
5. <i>Spot</i> mata uang asing - beli:			
USD	32.893.903	28	872
6. <i>Spot</i> mata uang asing - jual:			
USD	37.807.590	1.477	22
EUR	90.000	-	4
JPY	3.000.000	1	-
Jumlah		23.687	12.265
Dikurangi: Penyisihan penghapusan		(237)	-
Bersih		23.450	12.265
31 Desember 2008			
Instrumen	Jumlah notional (nilai penuh dalam mata uang asli)	Nilai wajar	
		Tagihan derivatif	Kewajiban derivatif
Terkait Nilai Tukar			
1. Kontrak berjangka - beli:			
USD	31.097.195	21	21.291
2. Kontrak berjangka - jual:			
USD	30.078.949	11.980	11.441
JPY	51.300.000	-	1.580
3. <i>Swap</i> mata uang asing - beli:			
USD	18.217.973	3.619	14.214
4. <i>Swap</i> mata uang asing - jual:			
USD	68.425.000	47.018	30.319
5. <i>Spot</i> mata uang asing - beli:			
USD	11.564.995	12	1.549
6. <i>Spot</i> mata uang asing - jual:			
USD	23.869.180	5.526	-
Jumlah		68.176	80.394
Dikurangi: Penyisihan penghapusan		(682)	-
Bersih		67.494	80.394

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. TAGIHAN DAN KEWAJIBAN DERIVATIF (lanjutan)

Bank menggunakan instrumen derivatif sebagaimana dimaksud diatas sebagai upaya melakukan pengelolaan dan mitigasi risiko nilai tukar, pembiayaan kredit dan penempatan untuk melindungi posisi terbuka valuta asing yang signifikan dan memitigasi eksposur risiko suku bunga.

Bank tidak memiliki transaksi derivatif dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, seluruh saldo tagihan derivatif diklasifikasikan sebagai "lancar".

Mutasi penyisihan penghapusan tagihan derivatif adalah sebagai berikut:

	2009	2008
Saldo awal tahun	(682)	(227)
Pemulihan (penambahan) penyisihan selama tahun berjalan	445	(455)
Saldo akhir tahun	(237)	(682)

Manajemen yakin bahwa saldo penyisihan penghapusan yang telah dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tagihan derivatif.

12. KREDIT YANG DIBERIKAN

Kredit yang diberikan menurut jenisnya:

	2009	2008
<u>Rupiah:</u>		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:		
Modal kerja	228.058	319.287
Investasi	293.948	373.785
Konsumen	155.773	122.637
Pinjaman karyawan	10.811	8.502
	<u>688.590</u>	<u>824.211</u>
Pihak ketiga:		
Modal kerja	58.927.563	58.392.121
Investasi	24.418.554	19.914.758
Konsumen	23.203.243	18.021.757
Kartu kredit	4.137.466	2.852.727
Pinjaman karyawan	1.168.649	1.126.786
	<u>111.855.475</u>	<u>100.308.149</u>
Jumlah Rupiah	<u>112.544.065</u>	<u>101.132.360</u>

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

Kredit yang diberikan menurut jenisnya:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
<u>Valuta asing:</u>		
Pihak ketiga:		
Modal kerja	7.653.560	6.290.720
Investasi	3.703.644	5.361.352
Jumlah valuta asing	<u>11.357.204</u>	<u>11.652.072</u>
Jumlah kredit yang diberikan	123.901.269	112.784.432
Dikurangi:		
Penyesuaian nilai wajar akibat restrukturisasi kredit	-	(96)
Jumlah kredit yang diberikan, sebelum penyisihan penghapusan		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	688.590	824.211
Pihak ketiga, setelah dikurangi penyesuaian nilai wajar akibat restrukturisasi kredit	<u>123.212.679</u>	<u>111.960.125</u>
	123.901.269	112.784.336
Dikurangi: Penyisihan penghapusan		
Rupiah	(3.752.934)	(2.325.543)
Valuta asing	(552.674)	(431.932)
	<u>(4.305.608)</u>	<u>(2.757.475)</u>
Jumlah kredit yang diberikan-bersih	<u>119.595.661</u>	<u>110.026.861</u>

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

Kredit yang diberikan menurut jenis industri:

	2009					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah:						
Manufaktur	20.665.506	244.214	8.484	729	127.006	21.045.939
Jasa bisnis	10.858.909	173.885	46.282	2.202	23.111	11.104.389
Perdagangan, restoran dan hotel	30.331.039	207.943	7.049	16.361	127.790	30.690.182
Pertanian dan sarana pertanian	3.688.383	20.692	1.047	259	18.503	3.728.884
Konstruksi	3.260.530	16.712	8.479	786	12.460	3.298.967
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	11.382.412	20.290	50.196	-	275	11.453.173
Jasa-jasa sosial/masyarakat	763.472	10.041	-	62	2.258	775.833
Pertambangan	653.315	163	-	-	906	654.384
Listrik, gas dan air	1.106.642	9.306	-	-	-	1.115.948
Lain-lain	27.324.365	1.034.803	57.346	76.654	183.198	28.676.366
Jumlah Rupiah	110.034.573	1.738.049	178.883	97.053	495.507	112.544.065
Valuta asing:						
Manufaktur	3.400.131	2.812	-	-	61.606	3.464.549
Jasa bisnis	324.992	-	-	-	-	324.992
Perdagangan, restoran dan hotel	1.324.112	11.122	-	-	70.009	1.405.243
Pertanian dan sarana pertanian	671.784	-	-	-	-	671.784
Konstruksi	304.016	-	-	-	-	304.016
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	490.450	21.045	-	-	-	511.495
Jasa-jasa sosial/masyarakat	3.692	-	-	-	-	3.692
Pertambangan	4.671.433	-	-	-	-	4.671.433
Jumlah valuta asing	11.190.610	34.979	-	-	131.615	11.357.204
Jumlah kredit yang diberikan sebelum penyisihan penghapusan	121.225.183	1.773.028	178.883	97.053	627.122	123.901.269
Dikurangi: Penyisihan penghapusan	(3.058.034)	(501.853)	(78.010)	(48.335)	(619.376)	(4.305.608)
Jumlah kredit yang diberikan - bersih	118.167.149	1.271.175	100.873	48.718	7.746	119.595.661

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

Kredit yang diberikan menurut jenis industri: (lanjutan)

	2008					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah:						
Manufaktur	22.532.655	584.202	3.005	1.533	107.426	23.228.821
Jasa bisnis	10.004.035	88.239	66.138	9.579	25.775	10.193.766
Perdagangan, restoran dan hotel	28.275.851	178.106	11.987	16.384	121.788	28.604.116
Pertanian dan sarana pertanian	3.254.095	7.541	19.301	723	2.194	3.283.854
Konstruksi	2.719.929	527.304	150	1.044	11.794	3.260.221
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	8.834.715	17.318	875	225	22.765	8.875.898
Jasa-jasa sosial/masyarakat	603.587	8.354	-	-	1.360	613.301
Pertambangan	168.763	1.134	-	4.659	6.761	181.317
Listrik, gas dan air	753.878	822	244	-	3.000	757.944
Lain-lain	20.987.551	943.376	33.221	44.814	124.160	22.133.122
Jumlah Rupiah	98.135.059	2.356.396	134.921	78.961	427.023	101.132.360
Valuta asing:						
Manufaktur	4.474.106	348.393	1.090	-	30.979	4.854.568
Jasa bisnis	446.266	-	-	-	-	446.266
Perdagangan, restoran dan hotel	2.049.081	2.740	-	-	1.795	2.053.616
Pertanian dan sarana pertanian	724.262	-	-	-	-	724.262
Konstruksi	17.796	-	-	-	-	17.796
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	416.009	-	-	-	-	416.009
Jasa-jasa sosial/masyarakat	8.675	-	-	-	-	8.675
Pertambangan	3.130.880	-	-	-	-	3.130.880
Jumlah valuta asing	11.267.075	351.133	1.090	-	32.774	11.652.072
Jumlah kredit yang diberikan sebelum penyisihan penghapusan	109.402.134	2.707.529	136.011	78.961	459.797	112.784.432
Dikurangi:						
Penyisihan penghapusan	(1.606.225)	(631.562)	(20.404)	(39.487)	(459.797)	(2.757.475)
Penyesuaian nilai wajar akibat restrukturisasi kredit	(96)	-	-	-	-	(96)
Jumlah kredit yang diberikan - bersih	107.795.813	2.075.967	115.607	39.474	-	110.026.861

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

Kredit yang diberikan menurut periode jatuh tempo berdasarkan perjanjian kredit:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Rupiah:		
Hingga 1 tahun	52.716.711	46.585.117
Lebih dari 1 tahun hingga 5 tahun	32.323.238	30.007.768
Lebih dari 5 tahun	27.504.116	24.539.475
Jumlah Rupiah	<u>112.544.065</u>	<u>101.132.360</u>
Valuta asing:		
Hingga 1 tahun	5.932.915	4.091.529
Lebih dari 1 tahun hingga 5 tahun	981.735	2.757.749
Lebih dari 5 tahun	4.442.554	4.802.794
Jumlah Valuta asing	<u>11.357.204</u>	<u>11.652.072</u>
Jumlah	<u>123.901.269</u>	<u>112.784.432</u>
Dikurangi:		
Penyesuaian nilai wajar akibat restrukturisasi kredit	-	(96)
Jumlah kredit yang diberikan, sebelum penyisihan penghapusan	<u>123.901.269</u>	<u>112.784.336</u>
Dikurangi: Penyisihan penghapusan	(4.305.608)	(2.757.475)
Jumlah kredit yang diberikan - bersih	<u>119.595.661</u>	<u>110.026.861</u>

Kredit yang diberikan menurut periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Rupiah:		
Hingga 1 tahun	59.607.351	55.888.513
Lebih dari 1 tahun hingga 5 tahun	37.884.797	33.093.983
Lebih dari 5 tahun	15.051.917	12.149.864
Jumlah Rupiah	<u>112.544.065</u>	<u>101.132.360</u>
Valuta asing:		
Hingga 1 tahun	6.428.531	5.511.937
Lebih dari 1 tahun hingga 5 tahun	3.155.100	4.487.663
Lebih dari 5 tahun	1.773.573	1.652.472
Jumlah Valuta asing	<u>11.357.204</u>	<u>11.652.072</u>
Jumlah	<u>123.901.269</u>	<u>112.784.432</u>
Dikurangi:		
Penyesuaian nilai wajar akibat restrukturisasi kredit	-	(96)
Jumlah kredit yang diberikan, sebelum penyisihan penghapusan	<u>123.901.269</u>	<u>112.784.336</u>
Dikurangi: Penyisihan penghapusan	(4.305.608)	(2.757.475)
Jumlah kredit yang diberikan - bersih	<u>119.595.661</u>	<u>110.026.861</u>

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

Kredit yang diberikan tersebut di atas merupakan kredit yang diberikan dalam Rupiah dan valuta asing dengan berbagai bentuk jaminan termasuk *real estate*, bangunan, aset berwujud lainnya, jaminan perusahaan dan pribadi.

Giro, tabungan dan deposito berjangka yang dijaminan untuk kredit yang diberikan masing-masing sebesar Rp5.709.308 dan Rp5.283.383 per 31 Desember 2009 dan 2008 (Catatan 15).

Tingkat bunga rata-rata setahun:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Rupiah	12,07%	11,40%
Valuta asing	6,58%	6,21%

Kredit yang diberikan kepada karyawan Bank terdiri dari kredit untuk pembelian kendaraan, rumah dan keperluan lainnya dengan berbagai jangka waktu dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan. Pinjaman Kendaraan Bermotor dan Pinjaman Perumahan diberikan dengan suku bunga efektif lima persen (5%) per tahun. Pinjaman untuk keperluan lainnya merupakan fasilitas pinjaman darurat sebesar maksimal Rp5 yang diberikan tanpa bunga.

Kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	293.948	373.785
PT Djarum	228.058	319.287
Lain-lain	166.584	131.139
	<u>688.590</u>	<u>824.211</u>

Dalam laporannya kepada Bank Indonesia, Bank menyatakan bahwa Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 telah memenuhi ketentuan BMPK, baik untuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa maupun pihak ketiga.

Rasio kredit usaha kecil terhadap jumlah kredit yang diberikan Bank per 31 Desember 2009 dan 2008 adalah masing-masing sebesar 0,60% dan 0,71%.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

Kredit sindikasi dengan pembagian risiko secara proporsional terhadap jumlah pendanaan Bank adalah sebagai berikut:

	2009	2008
Sebagai partisipan, partisipasi Bank berkisar antara 1,56% - 88,89% pada tahun 2009 dan 2008; saldo pada akhir tahun 2009: USD151.875.000 (nilai penuh) dan Rp2.578.287 (2008: USD75.155.221 (nilai penuh) dan Rp1.276.648)	4.005.153	2.095.840
Sebagai <i>arranger</i> , partisipasi Bank berkisar antara 22,50% - 72,02% pada tahun 2009 dan 2008; saldo pada akhir tahun 2009: USD31.203.501 (nilai penuh) dan Rp436.571 (2008: USD57.821.917 (nilai penuh) dan Rp338.611)	729.728	968.870
	4.734.881	3.064.710

Bank juga mengadakan perjanjian kerjasama pembiayaan konsumen dengan pihak ketiga, antara lain PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (telah berakhir pada tahun 2009), PT Federal International Finance, PT Indomobil Multifinance, dan PT Sinar Mitra Sepadan Finance untuk memberikan fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) kepada konsumen. Segala risiko atas kerugian yang timbul sehubungan dengan fasilitas kredit yang diberikan dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan bersama akan ditanggung secara bersama-sama oleh kedua belah pihak secara proporsional sesuai bagian pembiayaan (partisipasi) masing-masing pihak.

Kredit *non-performing* Bank (diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet) pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, setelah dikurangi penyesuaian nilai wajar akibat restrukturisasi kredit, masing-masing sebesar Rp895.491 dan Rp674.769 (0,73% dan 0,60% dari jumlah kredit yang diberikan Bank), dengan pendapatan bunga atas kredit *non-performing* masing-masing sebesar ekuivalen Rp85.673 dan Rp97.424, yang mana dari jumlah tersebut tidak ada yang merupakan kredit bermasalah yang masih dalam proses restrukturisasi.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, kredit Bank yang telah direstrukturisasi masing-masing sebesar Rp2.569.095 dan Rp68.536, dengan penyisihan penghapusan aset masing-masing sebesar Rp1.310.647 dan Rp16.038. Atas kredit yang telah direstrukturisasi tersebut, Bank tidak mempunyai komitmen untuk memberikan tambahan kredit. Berikut ini adalah jenis dan jumlah kredit yang telah direstrukturisasi selama tahun 2009 dan 2008:

	2009	2008
Perpanjangan jangka waktu kredit	1.374.802	26.536
Perpanjangan jangka waktu dan pengalihan fasilitas kredit	828.899	3.846
Pengalihan fasilitas kredit	190.918	38.154
Perpanjangan jangka waktu kredit dan skema restrukturisasi lain*)	174.476	-
	2.569.095	68.536

*) Skema restrukturisasi lain terutama terdiri dari penurunan tingkat suku bunga, pengurangan tunggakan bunga, pelunasan sebagian pokok pinjaman, perubahan angsuran, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi instrumen keuangan lainnya.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Bank tidak melakukan novasi kredit dalam rangka restrukturisasi kredit *non-performing*.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

Mutasi penyisihan penghapusan kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

	2009		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
Saldo awal tahun	(2.325.543)	(431.932)	(2.757.475)
Saldo awal Anak Perusahaan yang diakuisisi	(3.553)	-	(3.553)
Penambahan penyisihan selama tahun berjalan	(1.698.263)	(212.972)	(1.911.235)
Reklasifikasi mata uang	(1.827)	1.827	-
Selisih kurs yang timbul dari penyisihan penghapusan dalam valuta asing	-	82.100	82.100
Penghapusan kredit	337.546	8.303	345.849
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapuskan	(61.294)	-	(61.294)
Saldo akhir tahun	(3.752.934)	(552.674)	(4.305.608)

	2008		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
Saldo awal tahun	(1.479.926)	(206.226)	(1.686.152)
Penambahan penyisihan selama tahun berjalan	(980.203)	(173.237)	(1.153.440)
Selisih kurs yang timbul dari penyisihan penghapusan dalam valuta asing	-	(52.469)	(52.469)
Penghapusan kredit	147.592	-	147.592
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapuskan	(13.006)	-	(13.006)
Saldo akhir tahun	(2.325.543)	(431.932)	(2.757.475)

Manajemen yakin bahwa saldo penyisihan penghapusan yang telah dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

13. TAGIHAN AKSEPTASI

a. Berdasarkan jenis mata uang:

	2009	2008
Tagihan akseptasi kepada debitur, pihak ketiga:		
Rupiah		
Lancar	315.009	465.487
Dalam perhatian khusus	-	1.232
Valuta asing		
Lancar	2.779.889	3.538.460
Dalam perhatian khusus	131.248	84.106
Kurang lancar	409	-
Jumlah tagihan kepada debitur	3.226.555	4.089.285

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis mata uang: (lanjutan)

	2009	2008
Tagihan akseptasi kepada bank lain, pihak ketiga:		
Rupiah		
Lancar	19.933	9.930
Valuta asing		
Lancar	121.572	208.150
Jumlah tagihan akseptasi kepada bank lain	141.505	218.080
Jumlah tagihan akseptasi, sebelum penyisihan penghapusan	3.368.060	4.307.365
Dikurangi: Penyisihan penghapusan		
Rupiah	(86.904)	(4.816)
Valuta asing	(40.729)	(115.831)
	(127.633)	(120.647)
Jumlah tagihan akseptasi - bersih	3.240.427	4.186.718

b. Berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo:

	2009			2008		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
Hingga 1 bulan	39.287	897.634	936.921	76.061	1.309.906	1.385.967
Lebih dari 1 bulan - 3 bulan	183.526	1.340.204	1.523.730	232.328	1.738.171	1.970.499
Lebih dari 3 bulan - 6 bulan	112.129	659.353	771.482	168.260	752.695	920.955
Lebih dari 6 bulan - 12 bulan	-	135.927	135.927	-	29.944	29.944
	334.942	3.033.118	3.368.060	476.649	3.830.716	4.307.365

c. Mutasi penyisihan penghapusan tagihan akseptasi adalah sebagai berikut:

	2009		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
Saldo awal tahun	(4.816)	(115.831)	(120.647)
(Penambahan) pemulihan penyisihan selama tahun berjalan	(82.088)	77.344	(4.744)
Selisih kurs yang timbul dari penyisihan penghapusan dalam valuta asing	-	(2.242)	(2.242)
Saldo akhir tahun	(86.904)	(40.729)	(127.633)

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan)

c. Mutasi penyisihan penghapusan tagihan akseptasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2008		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
Saldo awal tahun	(4.034)	(20.219)	(24.253)
Penambahan penyisihan selama tahun berjalan	(782)	(99.514)	(100.296)
Selisih kurs yang timbul dari penyisihan penghapusan dalam valuta asing	-	3.902	3.902
Saldo akhir tahun	(4.816)	(115.831)	(120.647)

Manajemen yakin bahwa saldo penyisihan penghapusan yang telah dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya tagihan akseptasi.

14. ASET TETAP

Mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

	2009			
	Saldo Awal	Penambahan**)	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan/Revaluasi				
Pemilikan langsung				
Tanah*)	919.532	117.496	(4.849)	1.032.179
Bangunan*)	1.236.680	244.493	(37.503)	1.443.670
Perlengkapan dan peralatan kantor*)	2.835.893	444.874	(107.644)	3.173.123
Kendaraan bermotor	29.094	1.840	(3.118)	27.816
Aset dalam penyelesaian	125.771	220.173	(123.692)	222.252
Aset sewa guna usaha	15.283	-	(812)	14.471
Jumlah biaya perolehan/revaluasi	5.162.253	1.028.876	(277.618)	5.913.511
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi				
Pemilikan langsung				
Bangunan	464.536	75.057	(1.443)	538.150
Perlengkapan dan peralatan kantor	2.029.195	452.535	(104.852)	2.376.878
Kendaraan bermotor	22.689	2.083	(2.844)	21.928
Aset sewa guna usaha	1.048	4.739	(501)	5.286
Jumlah akumulasi penyusutan	2.517.468	534.414	(109.640)	2.942.242
Nilai buku bersih				
Pemilikan langsung				
Tanah				1.032.179
Bangunan				905.520
Perlengkapan dan peralatan kantor				796.245
Kendaraan bermotor				5.888
Aset dalam penyelesaian				222.252
				2.962.084
Aset sewa guna usaha				9.185
				2.971.269

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. ASET TETAP (lanjutan)

Mutasi aset tetap adalah sebagai berikut: (lanjutan)

*) Direvaluasi pada tahun 1998 dan 2000 (Catatan 22)

**) Termasuk dalam penambahan aset tetap adalah reklasifikasi dari aset dalam penyelesaian, dan saldo awal Anak Perusahaan yang diakuisisi (Biaya Perolehan sebesar Rp40.493 dan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp13.777).

2008				
	Saldo Awal	Penambahan**)	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan/Revaluasi				
Pemilikan langsung				
Tanah*)	842.186	83.701	(6.355)	919.532
Bangunan*)	1.046.495	360.046	(169.861)	1.236.680
Perlengkapan dan peralatan kantor*)	2.291.966	632.387	(88.460)	2.835.893
Kendaraan bermotor	37.030	7.891	(15.827)	29.094
Aset dalam penyelesaian	273.968	273.482	(421.679)	125.771
Aset sewa guna usaha	11.487	15.532	(11.736)	15.283
Jumlah biaya perolehan/revaluasi	4.503.132	1.373.039	(713.918)	5.162.253
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi				
Pemilikan langsung				
Bangunan	416.224	55.034	(6.722)	464.536
Perlengkapan dan peralatan kantor	1.782.935	309.356	(63.096)	2.029.195
Kendaraan bermotor	31.430	2.030	(10.771)	22.689
Aset sewa guna usaha	7.702	2.380	(9.034)	1.048
Jumlah akumulasi penyusutan	2.238.291	368.800	(89.623)	2.517.468
Nilai buku bersih				
Pemilikan langsung				
Tanah				919.532
Bangunan				772.144
Perlengkapan dan peralatan kantor				806.698
Kendaraan bermotor				6.405
Aset dalam penyelesaian				125.771
				2.630.550
Aset sewa guna usaha				14.235
				2.644.785

*) Direvaluasi pada tahun 1998 dan 2000 (Catatan 22)

**) Termasuk dalam penambahan aset tetap adalah reklasifikasi dari aset dalam penyelesaian.

Bank telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah) untuk menutupi kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian dan bencana alam dengan nilai pertanggungan asuransi per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebesar Rp2.455.389 dan USD227.871.746,46 (nilai penuh), dan per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.938.821 dan USD197.697.991,81 (nilai penuh). Manajemen yakin bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi atas aset tetap yang dipertanggungjawabkan.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. SIMPANAN DARI NASABAH DAN BANK LAIN

Simpanan dari nasabah:

	2009	2008
Giro:		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		
Rupiah	2.864	988
Valuta asing	1.210	10.403
	<u>4.074</u>	<u>11.391</u>
Pihak ketiga		
Rupiah	42.877.968	36.876.629
Valuta asing		
Giro	8.682.881	7.899.131
BCA Ekstra	75.678	596
	<u>51.636.527</u>	<u>44.776.356</u>
Jumlah giro dari nasabah	<u>51.640.601</u>	<u>44.787.747</u>
Tabungan:		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		
Rupiah	37.809	29.998
Valuta asing	7.140	-
	<u>44.949</u>	<u>29.998</u>
Pihak ketiga		
Rupiah		
Tahapan	114.220.475	100.128.614
Tapres	5.431.423	5.231.678
Valuta asing		
BCA Dollar	8.440.748	6.383.789
	<u>128.092.646</u>	<u>111.744.081</u>
Jumlah tabungan dari nasabah	<u>128.137.595</u>	<u>111.774.079</u>
Deposito berjangka:		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		
Rupiah	55	45
Valuta asing	47	55
	<u>102</u>	<u>100</u>
Pihak ketiga		
Rupiah	55.621.837	44.551.129
Valuta asing	9.739.811	8.415.866
	<u>65.361.648</u>	<u>52.966.995</u>
Jumlah deposito berjangka dari nasabah	<u>65.361.750</u>	<u>52.967.095</u>

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. SIMPANAN DARI NASABAH DAN BANK LAIN (lanjutan)

	2009	2008
Jumlah simpanan dari nasabah:		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	49.125	41.489
Pihak ketiga	245.090.821	209.487.432
Jumlah simpanan dari nasabah	245.139.946	209.528.921

Simpanan dari bank lain:

Giro:		
Pihak ketiga		
Rupiah	627.999	622.716
Valuta asing	398.856	1.743.375
Jumlah giro dari bank lain	1.026.855	2.366.091
Deposito berjangka:		
Pihak ketiga		
Rupiah	52.602	47.051
<i>Interbank call money:</i>		
Pihak ketiga		
Valuta asing	1.409.250	1.635.000
Jumlah simpanan dari bank lain	2.488.707	4.048.142

Deposito berjangka berdasarkan jangka waktu:

	2009			2008		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
1 bulan	29.301.105	8.161.375	37.462.480	27.599.648	7.688.841	35.288.489
3 bulan	16.869.074	1.067.624	17.936.698	5.820.828	325.113	6.145.941
6 bulan	6.807.320	311.675	7.118.995	8.047.500	200.213	8.247.713
12 bulan	2.696.995	199.184	2.896.179	3.130.249	201.754	3.332.003
	55.674.494	9.739.858	65.414.352	44.598.225	8.415.921	53.014.146

Deposito berjangka menurut periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo:

	2009			2008		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
Hingga 1 bulan	33.318.067	8.585.599	41.903.666	29.333.962	7.770.890	37.104.852
Lebih dari 1 bulan hingga 3 bulan	16.351.837	898.413	17.250.250	4.839.565	304.267	5.143.832
Lebih dari 3 bulan hingga 6 bulan	4.287.045	172.862	4.459.907	8.115.352	196.258	8.311.610
Lebih dari 6 bulan hingga 12 bulan	1.717.545	82.984	1.800.529	2.309.346	144.506	2.453.852
	55.674.494	9.739.858	65.414.352	44.598.225	8.415.921	53.014.146

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. SIMPANAN DARI NASABAH DAN BANK LAIN (lanjutan)

Tingkat bunga rata-rata setahun:

	2009		2008	
	Rupiah %	Valuta asing %	Rupiah %	Valuta asing %
Nasabah:				
Giro	1,81%	1,32%	1,87%	1,42%
Tabungan	2,79%	1,89%	2,84%	3,10%
Deposito berjangka	6,95%	2,28%	6,22%	3,27%
Bank lain:				
Giro	0,68%	0,28%	0,65%	0,72%
Deposito berjangka	6,73%	-	6,44%	-
Interbank call money	-	0,97%	8,79%	3,53%

Simpanan yang dijamin untuk kredit yang diberikan Bank pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 (Catatan 12) adalah sebagai berikut:

	2009	2008
Giro	61.886	24.042
Tabungan	816.026	438.781
Deposito berjangka	4.831.396	4.820.560
	5.709.308	5.283.383

16. KEWAJIBAN AKSEPTASI

a. Berdasarkan jenis mata uang dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga:

	2009	2008
Kewajiban kepada debitur, pihak ketiga:		
Rupiah	29.191	18.330
Valuta asing	124.551	211.869
Jumlah kewajiban kepada debitur	153.742	230.199
Kewajiban kepada bank lain, pihak ketiga:		
Rupiah	2.468	8.361
Valuta asing	1.875.302	2.870.822
Jumlah kewajiban kepada bank lain	1.877.770	2.879.183
	2.031.512	3.109.382

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. KEWAJIBAN AKSEPTASI (lanjutan)

b. Berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo:

	2009			2008		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
Hingga 1 bulan	14.975	713.800	728.775	17.846	1.167.022	1.184.868
Lebih dari 1 bulan - 3 bulan	9.444	837.688	847.132	8.845	1.479.131	1.487.976
Lebih dari 3 bulan - 6 bulan	7.240	312.438	319.678	-	406.594	406.594
Lebih dari 6 bulan - 12 bulan	-	135.927	135.927	-	29.944	29.944
	31.659	1.999.853	2.031.512	26.691	3.082.691	3.109.382

17. PAJAK PENGHASILAN

a. Hutang pajak

	2009	2008
Pajak penghasilan pasal 21	66.336	66.574
Pajak penghasilan pasal 23	132.221	132.622
Pajak penghasilan pasal 25/29	64.521	297.120
Pajak penghasilan pasal 26	1.113	2.120
Pajak pertambahan nilai (PPN)	4.684	3.900
Pajak lainnya	459	2.299
	269.334	504.635

b. Beban pajak

Pada September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya. Bank mencatat dampak perubahan tarif pajak tangguhan masing-masing sebesar Rp119.103 dan Rp78.075 pada tahun 2009 dan 2008 sebagai bagian dari beban pajak.

	2009	2008
Beban pajak - tahun berjalan:		
PT Bank Central Asia Tbk	2.395.021	2.257.862
Anak perusahaan	144.909	84.612
	2.539.930	2.342.474
Manfaat pajak - tangguhan:		
PT Bank Central Asia Tbk	(414.401)	(398.651)
Anak perusahaan	12.321	81
	(402.080)	(398.570)
	2.137.850	1.943.904

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

- c. Pajak penghasilan badan dihitung untuk setiap perusahaan sebagai suatu badan hukum yang terpisah (laporan keuangan konsolidasi tidak dapat diterapkan dalam perhitungan pajak penghasilan badan).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan pada tanggal 30 Desember 2008 dalam Pasal 2 memutuskan bahwa Wajib Pajak dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perpajakan.

Penurunan Tarif Pajak Penghasilan tersebut diberikan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) Pihak.
2. Masing-masing Pihak yang dimaksud di atas hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.
3. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan (183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Wajib Pajak harus melampirkan surat keterangan dari Biro Administrasi Efek pada Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan melampirkan formulir X.H.1-6 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam - LK) Nomor X.H.1 untuk setiap tahun pajak terkait.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008 dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Pada tanggal 11 Januari 2010 dan 19 Januari 2009, Bank telah mendapatkan surat keterangan dari Biro Administrasi Efek atas pemenuhan kriteria-kriteria di atas.

Rekonsiliasi dari laba akuntansi konsolidasi sebelum beban pajak ke laba fiskal Bank adalah sebagai berikut:

	2009	2008
Laba akuntansi konsolidasi sebelum beban pajak	8.945.092	7.720.043
Eliminasi	400.942	201.860
Sebelum eliminasi	9.346.034	7.921.903
Laba anak perusahaan sebelum beban pajak	(558.172)	(286.553)
Laba akuntansi sebelum beban pajak (Bank)	8.787.862	7.635.350
Beda permanen:		
Kesejahteraan karyawan	12.871	9.601
Pendapatan sewa yang dikenakan pajak final	(4.920)	(4.873)
Bagian laba anak perusahaan	(242.902)	(126.849)
Pendapatan lain yang tidak dapat ditambahkan/ dikurangkan untuk tujuan perhitungan pajak, bersih	(45.149)	(70.817)
	(280.100)	(192.938)

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

Rekonsiliasi dari laba akuntansi konsolidasi sebelum beban pajak ke laba fiskal Bank adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2009	2008
Beda temporer:		
Kewajiban imbalan pasca-kerja	598.156	161.414
Beban penyisihan penghapusan aset	1.531.616	1.242.337
Laba belum direalisasi dari surat-surat berharga dan obligasi pemerintah untuk tujuan diperdagangkan	(45.933)	(10.259)
(Pendapatan) beban lain yang tidak dapat ditambahkan/ dikurangkan untuk tujuan perhitungan pajak, bersih	(178.466)	195.593
	<u>1.905.373</u>	<u>1.589.085</u>
Laba kena pajak	<u>10.413.135</u>	<u>9.031.497</u>
d. Rekonsiliasi antara laba akuntansi konsolidasi sebelum pajak dikali tarif pajak maksimum yang berlaku dengan beban pajak adalah sebagai berikut:		
	2009	2008
Laba akuntansi konsolidasi sebelum pajak	8.945.092	7.720.043
Tarif pajak maksimum	28%	30%
	<u>2.504.626</u>	<u>2.316.013</u>
Perbedaan permanen dengan tarif pajak 28% (2008: 30%) :		
PT Bank Central Asia Tbk		
Kesejahteraan karyawan	3.604	2.880
Pendapatan sewa yang dikenakan pajak final	(1.378)	(1.462)
Bagian laba anak perusahaan	(68.012)	(38.055)
Pendapatan lain yang tidak dapat ditambahkan/dikurangkan untuk tujuan perhitungan pajak, bersih	(12.642)	(21.244)
	<u>2.426.198</u>	<u>2.258.132</u>
Beban pajak - Bank	113.205	59.285
Beban pajak - Anak Perusahaan	<u>2.539.403</u>	<u>2.317.417</u>
	-	(18)
Efek dari tarif pajak progresif	-	(18)
Penyesuaian tarif pajak penghasilan badan (Catatan 17c)	(520.656)	(451.570)
Penyesuaian tarif pajak tangguhan	119.103	78.075
	<u>2.137.850</u>	<u>1.943.904</u>
Beban pajak - konsolidasi	<u>2.137.850</u>	<u>1.943.904</u>
e. Perhitungan pajak kini dan hutang pajak adalah sebagai berikut:		
	2009	2008
Laba kena pajak:		
PT Bank Central Asia Tbk	10.413.135	9.031.497
Anak perusahaan	523.986	282.097
	<u>10.937.121</u>	<u>9.313.594</u>

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

e. Perhitungan pajak kini dan hutang pajak adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2009	2008
Pajak tahun berjalan:		
PT Bank Central Asia Tbk	2.395.021	2.257.862
Anak perusahaan	144.909	84.612
	<u>2.539.930</u>	<u>2.342.474</u>
Pajak dibayar di muka:		
PT Bank Central Asia Tbk	(2.384.317)	(1.988.860)
Anak perusahaan	(91.092)	(56.494)
	<u>(2.475.409)</u>	<u>(2.045.354)</u>
Hutang pajak:		
PT Bank Central Asia Tbk	10.704	269.002
Anak perusahaan	53.817	28.118
	<u>64.521</u>	<u>297.120</u>

f. Aset dan kewajiban pajak tangguhan yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	2009	2008
Induk perusahaan - PT Bank Central Asia Tbk:		
Aset pajak tangguhan:		
Penyisihan penghapusan aset produktif	806.418	474.335
Penerimaan dari kredit yang diberikan yang diklasifikasikan sebagai diragukan dan macet	1.227	1.293
Penyesuaian nilai wajar akibat kuasi reorganisasi	9.331	10.452
Pendapatan yang ditangguhkan atas restrukturisasi kredit	-	27
Biaya cadangan tantiem	18.686	17.131
Kewajiban imbalan pasca-kerja	347.690	199.861
Lainnya	-	53.833
	<u>1.183.352</u>	<u>756.932</u>
Kewajiban pajak tangguhan:		
Laba belum direalisasi atas surat-surat berharga dan obligasi pemerintah untuk tujuan diperdagangkan dan yang tersedia untuk dijual	(147.871)	(9.560)
Penyusutan aset tetap	(27)	(41)
	<u>(147.898)</u>	<u>(9.601)</u>
Aset pajak tangguhan, bersih - PT Bank Central Asia Tbk*	1.035.454	747.331

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

- f. Aset dan kewajiban pajak tangguhan yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2009	2008
Anak perusahaan		
BCA Finance Limited	4.747	7.595
PT BCA Finance	4.626	15.760
PT Bank UIB	1.912	-
Jumlah aset pajak tangguhan, bersih	1.046.739	770.686

*) Termasuk pengaruh pajak tangguhan atas laba belum direalisasi atas surat-surat berharga dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual yang dicatat di ekuitas, masing-masing sebesar Rp140.971 dan Rp14.693 per 31 Desember 2009 dan 2008.

- g. Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Bank dan Anak Perusahaannya di Indonesia melaporkan/menyetorkan pajak untuk setiap perusahaan sebagai suatu badan hukum yang terpisah (pelaporan pajak penghasilan konsolidasi tidak diperbolehkan) berdasarkan sistem *self assessment*. Kantor pajak dapat menetapkan/mengubah pajak-pajak tersebut dalam waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak untuk tahun 1995 hingga 2007. Ketentuan baru yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun selanjutnya menentukan bahwa Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak tersebut dalam batasan waktu lima tahun sejak saat terhutangnya pajak.
- h. Pajak-pajak Bank tahun 2003 telah diperiksa oleh kantor pajak dan ditetapkan kekurangan pajak yang seluruhnya berjumlah Rp160.803. Bank telah menyetorkan seluruh tambahan pajak tersebut dan mengajukan keberatan atas koreksi pajak-pajak tersebut di tahun 2006, namun keberatan tersebut ditolak oleh kantor pajak melalui surat keputusan No. Kep-041/WPJ.19/BD.05/2007 tanggal 6 Februari 2007. Pada tanggal 20 Februari 2007, Bank mengajukan permohonan banding atas hasil keberatan tersebut. Berdasarkan Keputusan Pengadilan Pajak No. 13603/PP/M.I/13/2008 tertanggal 2 April 2008, seluruh permohonan banding telah dikabulkan dan telah dikembalikan. Disamping itu, Bank mendapatkan tambahan berupa imbalan bunga sebesar Rp74.545. Namun atas Keputusan Pengadilan Pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak masih mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas imbalan bunga tersebut. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No. 10/B/PK/PJK/2009 tertanggal 20 Maret 2009, permohonan Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Pajak ditolak oleh Mahkamah Agung.
- i. Pada tahun 2006, kantor pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan pasal 26 untuk tahun 2002 dan 2004 sebesar Rp325.485 yang harus dibayar dalam 7 kali angsuran. Pada tanggal 31 Desember 2006, Bank telah membayar angsuran pertama sebesar Rp162.742, sisanya sebesar Rp162.743 dilunasi di tahun 2007. Pada tahun 2007, Bank telah melunasi tagihan pajak Bunga atas Pajak Penghasilan pasal 26 untuk tahun 2002 dan 2004 sebesar Rp5.967. Bank mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut di tahun 2007, namun keberatan tersebut ditolak oleh kantor pajak melalui surat keputusan No. KEP-545/WPJ.19/BD.05/2007 tanggal 22 November 2007, No. KEP-561/WPJ.19/BD.05/2007 tanggal 30 November 2007, dan No. KEP-565/WPJ.19/BD.05/2007 tanggal 3 Desember 2007. Pada tanggal 14 Februari 2008, Bank mengajukan permohonan banding atas hasil keberatan tersebut. Berdasarkan Keputusan Pengadilan Pajak tanggal 28 Juli 2008 dengan No. 14622/PP/M.I/13/2008, No. 14623/PP/M.I/13/2008 dan No. 14624/PP/M.I/13/2008, seluruh permohonan banding telah dikabulkan dan telah dikembalikan. Di samping itu, Bank mendapatkan tambahan berupa imbalan bunga sebesar Rp117.717. Namun atas Keputusan Pengadilan Pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak masih mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas imbalan bunga tersebut. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No. 11/B/PK/PJK/2009, No. 12/B/PK/PJK/2009, No. 13/B/PK/PJK/2009 tertanggal 20 Maret 2009, permohonan Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Pajak ditolak oleh Mahkamah Agung.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. PINJAMAN YANG DITERIMA

	Tingkat bunga rata-rata setahun		2009	2008
	2009 %	2008 %		
Rupiah:				
(1) Kredit Likuiditas dari Bank Indonesia:				
Kredit Usaha Tani (KUT), jatuh tempo 30 September 2000, masih dalam proses untuk penutupan perjanjian	-	-	583	583
Kredit Pemilikan Rumah (KPR/KPRS/KPRSS), jatuh tempo antara 30 Juni 2007 sampai 1 Januari 2013	3,27	3,28	224	313
			807	896
(2) Pinjaman dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya:				
PT Bank UOB Buana	11,85	12,09	150.000	70.000
PT Bank Chinatrust Indonesia	12,75	12,75	50.000	10.000
PT Bank OCBC Indonesia	11,80	13,06	35.000	10.000
The Development Bank of Singapore Ltd - Indonesia (Bank DBS)	11,28	-	30.000	-
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd - Indonesia (Bank HSBC)	10,23	-	100.000	-
PT Bank Permata Tbk	9,68	-	40.000	-
			405.000	90.000
(3) Pinjaman dua tahap (<i>two-step loans</i>):				
Pinjaman dari Japan Bank for International Cooperation	5,70	4,38	14.867	19.917
			420.674	110.813
Valuta asing:				
(4) Pinjaman dari bank lain	1,74	3,92	281.850	327.000
(5) Lain-lain			27.809	10.512
			309.659	337.512
			730.333	448.325

Bank tidak memiliki pinjaman yang diterima dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

(1) Kredit likuiditas Rupiah dari Bank Indonesia

Kredit likuiditas Rupiah dari Bank Indonesia merupakan fasilitas kredit yang diperoleh Bank sebagai bank swasta nasional di Indonesia, untuk disalurkan kepada debitur-debitur di Indonesia yang memenuhi persyaratan program fasilitas kredit yang bersangkutan.

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

18. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(2) Pinjaman dari bank lain

Merupakan pinjaman untuk modal kerja PT BCA Finance dari bank lain. Rincian fasilitas pinjaman yang diterima per 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

Bank	Jumlah fasilitas	Fasilitas tersedia sejak	Jatuh tempo fasilitas
PT Bank UOB Buana	150.000	8 September 2007	8 September 2010
PT Bank Chinatrust Indonesia	50.000	18 Februari 2009	18 Februari 2010 ^{*)}
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd, cabang Indonesia	USD20.000.000	30 April 2008	15 Juli 2010
PT Bank DBS Indonesia	100.000	10 Maret 2009	10 Maret 2011
PT Bank OCBC Indonesia	100.000	19 Agustus 2008	31 Mei 2010
PT Bank Permata Tbk	75.000	17 Februari 2009	17 Februari 2011

* Sedang dalam proses perpanjangan

Seluruh fasilitas pinjaman dijamin dengan tagihan sewa guna usaha dan piutang pembiayaan konsumen.

Perjanjian pinjaman di atas mewajibkan Anak Perusahaan menjaga rasio keuangan signifikan sebagai berikut:

- i. rasio hutang terhadap ekuitas adalah maksimum 10 kali kecuali PT Bank Chinatrust Indonesia yang mensyaratkan maksimum 8 kali.
- ii. rasio laba bersih sebelum pajak terhadap beban bunga dan rasio hutang terhadap modal yang dipersyaratkan oleh PT Bank UOB Buana masing-masing adalah maksimum 1,2 dan 7 kali.

(3) Pinjaman dua tahap (*two-step loans*)

Pinjaman dua tahap (*two-step loans*) merupakan pinjaman yang pada awalnya diberikan kepada Pemerintah Indonesia, yang kemudian disalurkan kepada debitur yang memenuhi persyaratan melalui bank-bank di Indonesia.

Fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada Bank adalah sebagai berikut:

a. Dari Overseas Economic Cooperation Fund (OECF-AJDF) (sekarang Japan Bank for International Cooperation):

- SSI (*Small Scale Industry*) Program, yang bertujuan untuk membiayai industri berskala kecil.
- PAE (*Polution Abatement Equipment*) Program, yang bertujuan untuk membiayai perusahaan-perusahaan yang bermaksud untuk membeli peralatan pencegah polusi.

Proyek-proyek yang terlibat di dalam *refinancing*, bidang umum dan administrasi, pajak dan cukai, kompensasi, dan pembelian tanah tidak diperkenankan untuk mendapatkan kredit dari program-program tersebut di atas.

b. Dari Export-Import Bank of Japan (sekarang Japan Bank for International Cooperation): AJDF, yang bertujuan untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan investasi, terutama untuk industri berskala kecil.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

(3) Pinjaman dua tahap (*two-step loans*) (lanjutan)

Persyaratan fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

Fasilitas pinjaman	Fasilitas tersedia sejak	Jatuh tempo angsuran pertama
Overseas Economic Cooperation Fund (OECF - AJDF) (sekarang Japan Bank for International Cooperation):		
SSI	JPY 435.322.797	1993
PAE	JPY 3.710.000.000	1993
Export-Import Bank of Japan (sekarang Japan Bank for International Cooperation):		
AJDF	JPY 905.000.000	1994

Dalam menyalurkan fasilitas pinjaman dua tahap (*two-step loans*) kepada debitur, Bank diharuskan untuk melakukan pengawasan bahwa proyek yang dibiayai tersebut:

- memperhatikan kepentingan umum dan nasional;
- menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Fasilitas-fasilitas pinjaman akan jatuh tempo dalam jangka waktu 15 tahun (kecuali untuk OECF-AJDF: 20 tahun) dengan tenggang waktu maksimum 3 tahun (kecuali untuk OECF-AJDF: 5 tahun), terhitung sejak tanggal penarikan pertama pinjaman, dan dibayar dalam 24 kali angsuran setengah-tahunan (kecuali untuk OECF-AJDF: 30 angsuran setengah-tahunan) terhitung sejak tanggal jatuh tempo angsuran pertama.

Walaupun jumlah fasilitas pinjaman dinyatakan dalam valuta asing, berdasarkan perjanjian pinjaman, saldo hutang Bank kepada Bank Indonesia/Pemerintah Republik Indonesia untuk fasilitas-fasilitas pinjaman ini akan dibayar dalam Rupiah (sejumlah ekuivalen Rupiah dari jumlah penarikan fasilitas pinjaman dengan menggunakan kurs pada tanggal penarikan pinjaman).

Tingkat bunga fasilitas tersebut di atas dihitung berdasarkan suku bunga rata-rata SBI tiga-bulanan selama enam bulan terakhir dengan penyesuaian tertentu, yang tidak boleh lebih rendah dari suku bunga pinjaman yang diterima Bank ditambah 1,75%.

(4) Pinjaman dari bank lain

Pinjaman dari bank lain merupakan pinjaman Bank dari Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, berdasarkan perjanjian fasilitas tanggal 3 September 2007, dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar USD80.000.000 yang terdiri dari *Tranche A* sebesar USD50.000.000 dan *Tranche B* sebesar USD30.000.000. Seluruh fasilitas telah ditarik oleh Bank dengan periode pinjaman untuk *Tranche A* adalah selama 1 tahun dan untuk *Tranche B* adalah selama 3 tahun sejak tanggal penarikan. Per tanggal 3 Oktober 2008 pinjaman Bank dari Standard Chartered Bank, cabang Jakarta untuk *Tranche A* telah dilunasi oleh Bank.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. ESTIMASI KERUGIAN ATAS TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF

Merupakan estimasi kerugian atas *Letters of Credit*, bank garansi yang diterbitkan dan transaksi rekening administratif lainnya. Mutasi estimasi kerugian atas transaksi rekening administratif selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	2009	2008
Saldo awal tahun	(54.233)	(61.853)
Saldo awal Anak Perusahaan yang diakuisi (Penambahan) pemulihan estimasi kerugian atas transaksi rekening administratif	(42)	-
Selisih kurs dari estimasi kerugian atas transaksi rekening administratif dalam valuta asing	(15.416)	13.516
	5.999	(5.896)
Saldo akhir tahun	(63.692)	(54.233)

Manajemen yakin bahwa saldo estimasi kerugian atas transaksi rekening administratif yang telah dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari transaksi rekening administratif.

20. MODAL SAHAM

Modal saham PT Bank Central Asia Tbk masing-masing per 31 Desember 2009 dan 2008 (setelah *stock split*, Catatan 1c) adalah sebagai berikut:

	2009		2008	
	Jumlah saham	Jumlah nilai nominal	Jumlah saham	Jumlah nilai nominal
Modal dasar dengan nilai nominal Rp62,50 (nilai penuh) per saham Belum ditempatkan	88.000.000.000 (63.344.990.000)	5.500.000 (3.959.062)	88.000.000.000 (63.344.990.000)	5.500.000 (3.959.062)
Ditempatkan dan disetor penuh Modal saham diperoleh kembali (<i>treasury stock</i>)***	24.655.010.000 (289.767.000)	1.540.938 (18.110)	24.655.010.000 (289.767.000)	1.540.938 (18.110)
Saham beredar	24.365.243.000	1.522.828	24.365.243.000	1.522.828

Komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

	2009		
	Jumlah saham	Jumlah nilai nominal	%
FarIndo Investments (Mauritius) Ltd. qualitate qua (qq) Sdr. Robert Budi Hartono dan Sdr. Bambang Hartono*)	11.625.990.000	726.624	47,15
Anthony Salim	434.079.976	27.130	1,76
Direksi:			
Djohan Emir Setijoso	31.200.000	1.950	0,13
Anthony Brent Elam	9.832.000	615	0,04
Jahja Setiaatmadja	9.800.000	613	0,04

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. MODAL SAHAM (lanjutan)

	2009 (lanjutan)		
	Jumlah saham	Jumlah nilai nominal	%
Direksi: (lanjutan)			
Subur Tan	7.061.000	441	0,03
Dhalia Mansor Ariotedjo	6.792.000	424	0,03
Suwignyo Budiman	6.500.000	406	0,02
Pemegang saham publik	12.233.988.024	764.625	49,62
	24.365.243.000	1.522.828	98,82
Modal saham diperoleh kembali (<i>treasury stock</i>)***)	289.767.000	18.110	1,18
	24.655.010.000	1.540.938	100,00
	2008		
	Jumlah saham	Jumlah nilai nominal	%
FarIndo Investments (Mauritius) Ltd. qq Farallon Capital Management LLC, Sdr. Bambang Hartono dan Sdr. Robert Budi Hartono**)	12.612.020.000	788.251	51,15
Anthony Salim	434.079.976	27.130	1,76
Direksi:			
Djohan Emir Setijoso	31.200.000	1.950	0,13
Jahja Setiaatmadja	11.857.000	741	0,05
Anthony Brent Elam	10.332.000	646	0,04
Subur Tan	9.061.000	566	0,04
Dhalia Mansor Ariotedjo	8.832.000	552	0,03
Suwignyo Budiman	7.000.000	438	0,03
Pemegang saham publik	11.240.861.024	702.554	45,59
	24.365.243.000	1.522.828	98,82
Modal saham diperoleh kembali (<i>treasury stock</i>)***)	289.767.000	18.110	1,18
	24.655.010.000	1.540.938	100,00

Menunjuk pada Buletin Akuntansi Staf BAPEPAM dan LK (BAS) No. 5, komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, adalah sebagai berikut:

	2009		
	Jumlah saham	Jumlah nilai nominal	%
FarIndo Investments (Mauritius) Ltd. qualitate qua (qq) Sdr. Robert Budi Hartono dan Sdr. Bambang Hartono*)	11.625.990.000	726.624	47,71
Anthony Salim	434.079.976	27.130	1,78
Direksi:			
Djohan Emir Setijoso	31.200.000	1.950	0,13
Anthony Brent Elam	9.832.000	615	0,04
Jahja Setiaatmadja	9.800.000	613	0,04

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 terdiri dari:

Tambahan modal disetor dari pembayaran modal saham	29.453.007
Eliminasi atas saldo rugi melalui kuasi reorganisasi tanggal 31 Oktober 2000 (Catatan 2aa)	(25.853.162)
	3.599.845
Tambahan modal disetor dari eksekusi opsi saham (Catatan 2z)	296.088
	3.895.933

22. SELISIH PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP

Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No. 384/KMK/04/1998 tanggal 14 Agustus 1998, Bank telah melakukan penilaian kembali aset tetap tertentu pada tanggal 31 Desember 1998. Penilaian kembali aset tetap tersebut berdasarkan laporan penilaian PT Ujatek Baru tanggal 24 Maret 1999 yang menggunakan pendekatan data pasar dan menghasilkan selisih penilaian kembali aset tetap sebagai berikut:

Nilai wajar	1.542.030
Nilai buku fiskal	(498.560)
Selisih penilaian kembali aset tetap, fiskal	1.043.470

Selisih penilaian kembali aset tetap, basis pajak, di atas telah disetujui oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tamansari dengan surat No. KEP-2111/WPJ.05/KP.09/1999 tanggal 3 Oktober 1999.

Pada tanggal 31 Oktober 2000, Bank melakukan penilaian kembali aset tetap tertentu sehubungan dengan kuasi reorganisasi (Catatan 2aa). Penilaian kembali aset tetap tersebut berdasarkan laporan penilaian PT Ujatek Baru tanggal 20 Desember 2000 yang menggunakan pendekatan data pasar, dan menghasilkan selisih penilaian kembali aset tetap sebagai berikut:

Selisih penilaian kembali aset tetap, fiskal (1999)	1.043.470
Nilai wajar	344.604
Nilai buku fiskal	(203.477)
Selisih penilaian kembali aset tetap, fiskal	141.127
Selisih penilaian kembali yang dialokasikan ke tambahan modal disetor akibat kuasi reorganisasi (Catatan 2aa)	(124.690)
Sisa selisih penilaian kembali aset tetap	16.437
Jumlah selisih penilaian kembali aset tetap	1.059.907

Selisih penilaian kembali aset tetap di atas sejumlah Rp141.127 telah disetujui oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa dengan surat No. KEP-04/WPJ.06/KP.0404/2001 tanggal 15 Juni 2001.

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2s atas laporan keuangan konsolidasi, Bank dan Anak Perusahaan telah memilih model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya sesuai dengan PSAK No. 16 (Revisi 2007), "Aset Tetap", dan mereklasifikasi seluruh saldo selisih penilaian kembali aset tetap sebesar Rp1.059.907 yang disajikan sebagai bagian dari ekuitas dalam neraca konsolidasi ke saldo laba konsolidasi pada tahun 2008.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, komitmen dan kontinjensi Bank adalah sebagai berikut:

	Jenis valuta	Jumlah dalam valuta asing (nilai penuh)		2009	2008
		2009	2008		
Komitmen					
<u>Tagihan komitmen:</u>					
Fasilitas kredit yang belum digunakan	Rupiah			10.000	90.000
<u>Kewajiban komitmen:</u>					
Fasilitas kredit yang belum digunakan nasabah	Rupiah			44.807.051	27.280.999
	USD	318.454.512	230.600.935	2.991.880	2.513.550
	Lainnya, ekuivalen USD	5.643.270	2.325.531	53.018	25.348
				<u>47.851.949</u>	<u>29.819.897</u>
Fasilitas L/C yang diberikan kepada nasabah*)	Rupiah			241.195	175.905
	USD	247.199.270	137.802.871	2.322.437	1.502.051
	Lainnya, ekuivalen USD	36.833.838	31.166.824	346.054	339.719
				<u>2.909.686</u>	<u>2.017.675</u>
				<u>50.761.635</u>	<u>31.837.572</u>
Kontinjensi					
<u>Tagihan kontinjensi:</u>					
Bank garansi yang diterima	Rupiah			5.113	5.245
	USD	97.762	13.949	918	152
	Lainnya, ekuivalen USD	5.485	-	52	-
				<u>6.083</u>	<u>5.397</u>
Pendapatan bunga atas kredit <i>non-performing</i>	Rupiah			78.762	94.949
	USD	895.258	227.027	8.411	2.475
				<u>87.173</u>	<u>97.424</u>
				<u>93.256</u>	<u>102.821</u>
<u>Kewajiban kontinjensi:</u>					
Bank garansi yang diberikan kepada nasabah**)	Rupiah			3.183.634	2.862.451
	USD	91.313.561	120.560.220	857.891	1.314.106
	Lainnya, ekuivalen USD	1.588.323	1.925.967	14.922	20.993
				<u>4.056.447</u>	<u>4.197.550</u>

*) Termasuk fasilitas L/C yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Bank masing-masing sebesar Rp1.396 dan Rp29.620 per 31 Desember 2009 dan 2008.

***) Termasuk fasilitas bank garansi yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Bank masing-masing sebesar Rp27.871 dan Rp27.947 per 31 Desember 2009 dan 2008.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. PENDAPATAN BUNGA

Pendapatan bunga meliputi bunga yang diperoleh dari:

	2009	2008
Kredit yang diberikan	12.703.957	10.138.875
Surat-surat berharga	4.788.198	3.114.489
Obligasi pemerintah	4.227.737	4.587.041
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	357.199	593.547
Lain-lain	2.829	182.216
	22.079.920	18.616.168

Termasuk dalam pendapatan bunga dari kredit yang diberikan adalah pendapatan bunga yang berasal dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp68.895 dan Rp67.545.

25. BEBAN BUNGA

Beban bunga meliputi bunga atas:

	2009	2008
Deposito berjangka	3.537.652	2.696.112
Tabungan	3.110.985	2.901.842
Giro	842.195	777.178
Premi penjaminan pemerintah	442.316	394.143
Pinjaman yang diterima	50.343	114.831
Lain-lain	45.742	56.239
	8.029.233	6.940.345

Termasuk dalam beban bunga atas giro, tabungan dan deposito berjangka adalah beban bunga atas pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp1.330 dan Rp1.116.

26. PROVISI DAN KOMISI LAINNYA

Merupakan provisi dan komisi sehubungan dengan:

	2009	2008
Simpanan dari nasabah	1.345.629	1.206.506
Penyelesaian pembayaran (<i>payment settlement</i>)	620.308	606.653
Kartu kredit	361.928	317.244
Pengiriman uang, kliring dan inkaso	224.825	220.950
Lain-lain	208.398	187.544
	2.761.088	2.538.897

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. BEBAN KARYAWAN

	2009	2008
Gaji dan upah	2.624.630	1.988.723
Kesejahteraan dan kompensasi karyawan	1.437.604	1.186.277
Pelatihan	124.383	108.965
	4.186.617	3.283.965

Kompensasi Direksi dan Komisaris Bank yang termasuk di dalam beban karyawan pada tahun 2009 dan 2008 adalah masing-masing sebesar Rp64.323 dan Rp62.158.

28. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2009	2008
Keperluan kantor	1.062.939	815.554
Sewa	679.329	593.631
Penyusutan dan amortisasi	535.046	368.800
Perbaikan dan pemeliharaan	495.751	367.555
Promosi	490.172	476.790
Komputer dan perangkat lunak	164.480	97.796
Komunikasi	156.752	127.414
Air, listrik dan bahan bakar	140.293	119.403
Jasa tenaga ahli	104.501	120.280
Keamanan	83.874	106.782
Pengangkutan	33.345	37.819
Asuransi	27.728	21.705
Pajak	9.769	13.976
Lainnya	82.037	64.871
	4.066.016	3.332.376

29. LABA PER SAHAM

Laba per saham dasar dihitung berdasarkan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan, sebagai berikut:

	Jumlah saham beredar (nilai penuh)	Rp
2009:		
Laba operasional		8.518.883
Laba bersih		6.807.242
Rata-rata tertimbang saham beredar Dasar	24.365.243.000	
Laba operasional Laba per saham dasar (nilai penuh)		350
Laba bersih Laba per saham dasar (nilai penuh)		279

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. LABA PER SAHAM (lanjutan)

	Jumlah saham beredar (nilai penuh)	Rp
2008:		
Laba operasional		7.667.907
Laba bersih		5.776.139
Rata-rata tertimbang saham beredar		
Dasar	24.427.309.406	
Laba operasional		
Laba per saham dasar (nilai penuh)		314
Laba bersih		
Laba per saham dasar (nilai penuh)		236

30. PENGGUNAAN LABA BERSIH

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank pada tanggal 18 Mei 2009 (notulen dibuat oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi., dengan Akta No. 118) memutuskan penggunaan laba bersih 2008 sebagai berikut:

- a. Laba bersih 2008 tidak disisihkan untuk dana cadangan dikarenakan dana cadangan Bank telah melebihi 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- b. Membagi dividen kas sejumlah Rp2.436.524 (Rp100 (nilai penuh), per saham), dengan perkiraan jumlah saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan Bank (tetapi tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali) yakni 24.365.243.000 saham; jumlah aktual dividen kas yang dibayarkan sebesar Rp1.583.741 (dividen interim tahun buku 2008 telah dibayarkan pada tanggal 30 Januari 2009 sebesar Rp852.784).
- c. Menetapkan tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat dalam tahun buku 2008 sebesar maksimal 1,25% dari laba bersih tahun 2008. Jumlah aktual tantiem yang dibayarkan sebesar Rp72.202.
- d. Menetapkan sisa laba bersih 2008 setelah dikurangi dividen sebagai laba ditahan.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank tanggal 18 Mei 2009 juga memutuskan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Bank, jika keadaan keuangan Bank mengizinkan, untuk membayar dividen interim tahun buku 2009.

Sesuai dengan Surat Keputusan Rapat Direksi tanggal 22 Oktober 2009 No. 170/SK/DIR/2009 tentang Pembagian Dividen Sementara (*Interim Dividend*) Tahun Buku 2009, Direksi menetapkan bahwa Bank akan membayarkan dividen sementara (*interim dividend*) kepada pemegang saham atas laba tahun 2009 sebesar Rp40 (nilai penuh) per saham. Jumlah aktual dividen interim yang dibayarkan sebesar Rp974.610.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank pada tanggal 22 Mei 2008 (notulen dibuat oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., dengan Akta No.109) memutuskan penggunaan laba bersih 2007 sebagai berikut:

- a. Laba bersih 2007 tidak disisihkan untuk dana cadangan dikarenakan dana cadangan Bank telah melebihi 20% dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor.
- b. Membagi dividen kas sejumlah Rp2.219.670 (Rp91 (nilai penuh), per saham), dengan perkiraan jumlah saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan Bank (tetapi tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali) yakni 24.564.024.000 saham; jumlah aktual dividen kas yang dibayarkan sebesar Rp1.549.623 (dividen interim tahun buku 2007 telah dibayarkan pada tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp675.510).

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. PENGGUNAAN LABA BERSIH (lanjutan)

- c. Menetapkan tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat dalam tahun buku 2007 sebesar maksimal 1,25% dari laba bersih tahun 2007. Jumlah aktual tantiem yang dibayarkan sebesar Rp56.113.
- d. Menetapkan sisa laba bersih 2007 setelah dikurangi dividen sebagai laba ditahan.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank tanggal 22 Mei 2008 juga memutuskan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Bank, jika keadaan keuangan Bank mengizinkan, untuk membayar dividen interim tahun buku 2008.

Sesuai dengan Surat Keputusan Rapat Direksi tanggal 18 Desember 2008 No. 181/SK/DIR/2008 tentang Pembagian Dividen Sementara (*Interim Dividend*) Tahun Buku 2008, Direksi menetapkan bahwa Bank akan membayarkan dividen sementara (*interim dividend*) kepada pemegang saham atas laba tahun 2008 sebesar Rp35 (nilai penuh) per saham. Jumlah aktual dividen interim yang dibayarkan sebesar Rp852.784.

31. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA-KERJA

Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Bank wajib memberikan imbalan pasca-kerja kepada karyawannya pada saat pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pasca-kerja ini diberikan berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau selesainya masa kerja.

Bank membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun PT Bank Central Asia Tbk, yang dimaksudkan sebagai wadah untuk mengelola aset, memberikan penghasilan investasi dan membayar imbalan pasca-kerja kepada karyawan. Iuran untuk dana pensiun dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji pokok karyawan. Dari jumlah iuran tersebut 3% ditanggung oleh karyawan, sedangkan 5% ditanggung oleh Bank. Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan, akumulasi iuran Bank kepada dana pensiun tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari kewajiban imbalan pasca-kerja.

Tabel berikut menyajikan kewajiban imbalan pasca-kerja yang tercatat di neraca konsolidasi, mutasi kewajiban imbalan pasca-kerja, dan beban yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008:

	2009	2008
Nilai kini kewajiban bersih imbalan pasca-kerja	1.667.403	1.181.319
Beban jasa lalu yang belum diakui, non-vested	(185.021)	(211.266)
Beban aktuarial yang belum diakui	(460.749)	(177.450)
Kewajiban imbalan pasca-kerja	1.021.633	792.603
Kewajiban imbalan pasca-kerja, awal tahun	792.603	631.189
Beban imbalan pasca-kerja selama tahun berjalan	276.420	225.854
Pembayaran imbalan pasca-kerja selama tahun berjalan	(47.390)	(64.440)
Kewajiban imbalan pasca-kerja, akhir tahun	1.021.633	792.603
Beban jasa kini	96.354	75.886
Beban bunga	141.758	110.550
Amortisasi beban jasa lalu dan beban aktuarial yang belum diakui	38.308	39.418
	276.420	225.854

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA-KERJA (lanjutan)

Masa Pensiun (MP)

MP adalah suatu masa di mana pekerja yang bersangkutan telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun sehingga dibebastugaskan dari tugas-tugas rutin sebagaimana pegawai aktif di mana pegawai tidak masuk kerja.

Bank juga memberikan kesempatan kepada pekerja yang berusia 50 (lima puluh) tahun ke atas untuk mengajukan pensiun dipercepat. Dengan pertimbangan tertentu, Bank berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan pensiun dipercepat dari pekerja.

Tabel berikut menyajikan kewajiban imbalan masa pensiun yang tercatat di neraca konsolidasi, mutasi kewajiban masa pensiun, dan beban yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2009:

	2009
Nilai kini kewajiban bersih imbalan masa pensiun	783.173
Beban jasa lalu yang belum diakui, non-vested	(287.784)
Beban aktuarial yang belum diakui	(126.263)
Kewajiban imbalan masa pensiun	369.126
Kewajiban imbalan masa pensiun, awal tahun	-
Beban imbalan masa pensiun selama tahun berjalan	437.407
Pembayaran imbalan masa pensiun selama tahun berjalan	(68.281)
Kewajiban imbalan masa pensiun, akhir tahun	369.126
Beban jasa kini	135.576
Beban bunga	199.629
Amortisasi beban jasa lalu dan beban aktuarial yang belum diakui	102.202
	437.407

Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaris independen adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat diskonto 11% per tahun (31 Desember 2008: 12% per tahun).
- b. Tingkat kenaikan gaji 8% per tahun (31 Desember 2008: 12% untuk tahun 2009 dan 8% untuk tahun-tahun selanjutnya).
- c. Tabel tingkat kematian yang digunakan *Indonesian Mortality Table 1999*
- d. Tingkat pengunduran diri tinggi pada usia muda dan mengalami penurunan hingga 0% pada usia yang mendekati pensiun normal.
- e. Metode aktuarial adalah *projected unit credit method*.
- f. Usia pensiun normal 55 tahun.
- g. Tingkat kecacatan 10% dari tingkat kematian.

Penilaian aktuarial atas imbalan pasca-kerja dan manfaat pensiun oleh aktuarial independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing adalah PT Sentra Jasa Aktuarial (Biro Pusat Aktuarial) dan oleh aktuarial independen lain, dengan laporan tertanggal 16 Februari 2010 dan 16 Januari 2009.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. JASA KUSTODIAN

Biro Jasa Kustodian Bank memperoleh izin untuk menyediakan jasa kustodian dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991.

Jasa-jasa yang diberikan oleh Biro Jasa Kustodian meliputi jasa penyimpanan, penyelesaian dan penanganan transaksi, penagihan pendapatan, *proxy*, *corporate action*, pengelolaan kas, pencatatan/ pelaporan investasi dan *tax reclamation*.

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, aset yang diadministrasikan oleh Biro Jasa Kustodian terdiri dari saham, obligasi, deposito berjangka, sertifikat deposito, surat berharga pasar modal dan pasar uang lainnya, masing-masing sejumlah Rp11.695.161 dan Rp10.923.086.

33. INFORMASI SEGMENT

Berdasarkan segmen geografis:

	2009					Jumlah
	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Indonesia bagian timur	Operasi luar negeri	
Pendapatan bunga	638.915	21.664.018	194.184	407.854	26.182	22.931.153
Beban bunga	(660.879)	(6.837.011)	(215.329)	(318.209)	-	(8.031.428)
Pendapatan (beban) bunga - bersih	(21.964)	14.827.007	(21.145)	89.645	26.182	14.899.725
Pendapatan operasional lainnya	217.178	3.912.606	63.472	147.069	8.017	4.348.342
Beban penyisihan penghapusan aset (Beban) pemulihan estimasi kerugian atas transaksi rekening administratif	(63.640)	(2.113.513)	(31.739)	(33.641)	-	(2.242.533)
Beban operasional lainnya	(1.342)	(13.889)	(436)	251	-	(15.416)
Beban operasional lainnya	(432.568)	(7.644.321)	(130.039)	(239.512)	(24.795)	(8.471.235)
Laba (rugi) operasional - bersih	(302.336)	8.967.890	(119.887)	(36.188)	9.404	8.518.883
Pendapatan (beban) non-operasional - bersih	883.522	(1.080.446)	275.858	347.278	(3)	426.209
Laba sebelum pajak penghasilan	581.186	7.887.444	155.971	311.090	9.401	8.945.092
Beban pajak penghasilan						(2.137.850)
Laba bersih						6.807.242
Aset	6.184.592	269.473.335	2.067.907	4.293.989	372.471	282.392.294
Kewajiban	6.184.603	241.981.659	2.067.770	4.293.997	7.572	254.535.601
Kredit yang diberikan - bersih	5.158.458	109.173.885	1.675.227	3.588.091	-	119.595.661
Simpanan dari nasabah	21.380.185	206.327.334	6.911.967	10.520.460	-	245.139.946

	2008					Jumlah
	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Indonesia bagian timur	Operasi luar negeri	
Pendapatan bunga	561.394	18.241.794	155.788	317.418	24.787	19.301.181
Beban bunga	(564.402)	(5.930.993)	(180.418)	(269.020)	-	(6.944.833)
Pendapatan (beban) bunga - bersih	(3.008)	12.310.801	(24.630)	48.398	24.787	12.356.348
Pendapatan operasional lainnya (Beban) pemulihan penyisihan penghapusan aset	197.062	3.491.453	55.224	129.928	4.385	3.878.052
	11.331	(1.761.888)	5	(3.597)	-	(1.754.149)

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Berdasarkan segmen geografis (lanjutan):

	2008					Jumlah
	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Indonesia bagian timur	Operasi luar negeri	
(Beban) pemulihan estimasi kerugian atas transaksi rekening administratif	(1.386)	16.464	(598)	(964)	-	13.516
Beban operasional lainnya	(376.006)	(6.118.902)	(106.871)	(203.645)	(20.436)	(6.825.860)
Laba (rugi) operasional - bersih	(172.007)	7.937.928	(76.870)	(29.880)	8.736	7.667.907
Pendapatan (beban) non-operasional - bersih	684.757	(1.124.430)	214.597	277.282	(70)	52.136
Laba sebelum pajak penghasilan	512.750	6.813.498	137.727	247.402	8.666	7.720.043
Beban pajak penghasilan						(1.943.904)
Laba bersih						5.776.139
Aset	18.634.457	211.884.808	5.810.827	8.802.514	437.250	245.569.856
Kewajiban	18.635.064	189.034.102	5.810.827	8.802.618	7.935	222.290.546
Kredit yang diberikan - bersih	5.280.445	100.063.223	1.518.722	3.164.471	-	110.026.861
Simpanan dari nasabah	18.530.406	176.459.050	5.786.129	8.753.336	-	209.528.921

Berdasarkan produk:

	2009			Jumlah
	Kredit	Tresuri	Lain-lain	
Aset	119.595.661	141.424.680	21.371.953	282.392.294
Kredit yang diberikan - bersih	119.595.661	-	-	119.595.661
Pendapatan bunga	12.703.957	9.375.963	-	22.079.920
Pendapatan <i>fee-based</i>	400.191	14.508	3.287.267	3.701.966
	2008			
	Kredit	Tresuri	Lain-lain	Jumlah
Aset	110.026.861	112.437.248	23.105.747	245.569.856
Kredit yang diberikan - bersih	110.026.861	-	-	110.026.861
Pendapatan bunga	10.138.875	8.477.293	-	18.616.168
Pendapatan <i>fee-based</i>	329.779	18.253	2.841.583	3.189.615

34. JATUH TEMPO ASET DAN KEWAJIBAN

Jatuh tempo aset dan kewajiban pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

	Hingga 1 bulan	>1 - 3 bulan	>3 bulan - 1 tahun	> 1 - 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Tanpa bunga	Jumlah
Aset:							
Kas	-	-	-	-	-	8.865.151	8.865.151
Giro pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	11.511.278	11.511.278
Giro pada bank lain - bersih	11.903.845	-	-	-	-	-	11.903.845
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih	2.532.979	988.906	-	1.737.450	-	-	5.259.335
Surat-surat berharga - bersih	62.732.978	230.200	1.527.748	3.356.770	1.715.067	-	69.562.763
Obligasi pemerintah	-	3.551.506	2.820.835	32.373.992	3.748.340	-	42.494.673

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. JATUH TEMPO ASET DAN KEWAJIBAN (lanjutan)

Jatuh tempo aset dan kewajiban pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	Hingga 1 bulan	>1 - 3 bulan	>3 bulan - 1 tahun	> 1 - 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Tanpa bunga	Jumlah
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	669.336	-	-	-	-	-	669.336
Tagihan derivatif - bersih	-	-	-	-	-	23.450	23.450
Kredit yang diberikan	9.514.887	10.435.398	46.085.597	41.039.897	16.825.490	-	123.901.269
Penyisihan penghapusan	-	-	-	-	-	(4.305.608)	(4.305.608)
Investasi dalam sewa guna usaha - bersih	15	-	650	1.287	-	-	1.952
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	11.519	-	1.036.753	853.990	-	-	1.902.262
Tagihan akseptasi - bersih	901.416	1.465.988	873.023	-	-	-	3.240.427
Penyertaan - bersih	-	-	-	-	-	18.502	18.502
Aset pajak tangguhan - bersih	-	-	-	-	-	1.046.739	1.046.739
Aset tetap - bersih	-	-	-	-	-	2.971.269	2.971.269
Aset lain-lain - bersih	-	-	-	-	-	3.325.651	3.325.651
	88.266.975	16.671.998	52.344.606	79.363.386	22.288.897	23.456.432	282.392.294
Kewajiban:							
Kewajiban segera	-	-	-	-	-	841.266	841.266
Simpanan dari nasabah	221.670.702	17.213.308	6.255.936	-	-	-	245.139.946
Simpanan dari bank lain	1.038.015	36.942	4.500	1.409.250	-	-	2.488.707
Kewajiban derivatif	-	-	-	-	-	12.265	12.265
Kewajiban akseptasi	728.775	847.132	455.605	-	-	-	2.031.512
Surat-surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	399.323	-	26.624	425.947
Pinjaman yang diterima	28.392	120.000	566.850	15.091	-	-	730.333
Estimasi kerugian atas transaksi rekening administratif	-	-	-	-	-	63.692	63.692
Hutang pajak	-	-	-	-	-	269.334	269.334
Beban yang masih harus dibayar	-	-	-	-	-	157.140	157.140
Kewajiban lain-lain	-	-	-	-	-	2.375.459	2.375.459
	223.465.884	18.217.382	7.282.891	1.823.664	-	3.745.780	254.535.601
Posisi neto	(135.198.909)	(1.545.384)	45.061.715	77.539.722	22.288.897	19.710.652	27.856.693

Jatuh tempo aset dan kewajiban pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

	Hingga 1 bulan	>1 - 3 bulan	>3 bulan - 1 tahun	> 1 - 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Tanpa bunga	Jumlah
Aset:							
Kas	-	-	-	-	-	10.798.921	10.798.921
Giro pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	9.668.608	9.668.608
Giro pada bank lain - bersih	7.909.406	-	-	-	-	-	7.909.406
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih	3.184.894	-	-	1.751.514	-	-	4.936.408
Surat-surat berharga - bersih	23.266.963	9.911.122	11.735.084	3.160.460	1.971.001	-	50.044.630
Obligasi pemerintah	-	-	11.788.529	19.700.179	8.321.994	-	39.810.702
Tagihan derivatif - bersih	-	-	-	-	-	67.494	67.494
Kredit yang diberikan	6.673.910	10.830.755	43.895.774	37.581.561	13.802.336	-	112.784.336
Penyisihan penghapusan	-	-	-	-	-	(2.757.475)	(2.757.475)
Investasi dalam sewa guna usaha - bersih	534	-	-	10.998	-	-	11.532
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	16.625	-	-	1.392.661	-	-	1.409.286
Tagihan akseptasi - bersih	1.347.147	1.915.306	924.265	-	-	-	4.186.718
Penyertaan - bersih	-	-	-	-	-	24.603	24.603

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. JATUH TEMPO ASET DAN KEWAJIBAN (lanjutan)

Jatuh tempo aset dan kewajiban pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	Hingga 1 bulan	>1 - 3 bulan	>3 bulan - 1 tahun	> 1 - 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Tanpa bunga	Jumlah
Aset pajak tangguhan							
- bersih	-	-	-	-	-	770.686	770.686
Aset tetap - bersih	-	-	-	-	-	2.644.785	2.644.785
Aset lain-lain - bersih	-	-	-	-	-	3.259.216	3.259.216
	42.399.479	22.657.183	68.343.652	63.597.373	24.095.331	24.476.838	245.569.856
Kewajiban:							
Kewajiban segera	-	-	-	-	-	1.121.603	1.121.603
Simpanan dari nasabah	193.662.021	5.120.938	10.745.962	-	-	-	209.528.921
Simpanan dari bank lain	2.370.748	22.894	19.500	1.635.000	-	-	4.048.142
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	49.892	-	-	-	-	-	49.892
Kewajiban derivatif	-	-	-	-	-	80.394	80.394
Kewajiban akseptasi	1.184.868	1.487.976	436.538	-	-	-	3.109.382
Surat-surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	498.088	-	37.654	535.742
Pinjaman yang diterima	81.095	20.000	802	346.428	-	-	448.325
Estimasi kerugian atas transaksi rekening administratif	-	-	-	-	-	54.233	54.233
Hutang pajak	-	-	-	-	-	504.635	504.635
Beban yang masih harus dibayar	-	-	-	-	-	144.577	144.577
Kewajiban lain-lain	12.955	-	-	-	-	2.651.745	2.664.700
	197.361.579	6.651.808	11.202.802	2.479.516	-	4.594.841	222.290.546
Posisi neto	(154.962.100)	16.005.375	57.140.850	61.117.857	24.095.331	19.881.997	23.279.310

35. POSISI DEvisa NETO

Posisi devisa neto ("PDN") Bank pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 dan perubahannya, Peraturan Bank Indonesia No. 6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 dan No. 7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, bank-bank diwajibkan untuk memelihara posisi devisa neto (termasuk semua kantor cabang dalam dan luar negeri) secara keseluruhan dan untuk neraca setinggi-tingginya 20% dari modal.

Posisi devisa neto secara keseluruhan merupakan angka penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari (i) selisih bersih aset dan kewajiban untuk setiap mata uang asing dan (ii) selisih bersih tagihan dan kewajiban, berupa komitmen dan kontinjensi di rekening administratif (transaksi rekening administratif) untuk setiap mata uang asing, yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah. Sedangkan posisi devisa neto untuk neraca, merupakan angka penjumlahan dari selisih bersih aset dan kewajiban dalam neraca untuk setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. POSISI DEvisa NETO (lanjutan)

Posisi devisa neto Bank pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	2009			2008		
	Posisi devisa neto untuk neraca (selisih bersih aset dan kewajiban)	Selisih bersih tagihan dan kewajiban di rekening administratif	Posisi devisa neto secara keseluruhan (nilai absolut)	Posisi devisa neto untuk neraca (selisih bersih aset dan kewajiban)	Selisih bersih tagihan dan kewajiban di rekening administratif	Posisi devisa neto secara keseluruhan (nilai absolut)
USD	365.985	(304.972)	61.013	661.441	(669.185)	7.744
SGD	(6.241)	7.071	830	10.041	(8.744)	1.297
JPY	(4.631)	5.263	632	(30.381)	30.312	69
EUR	(43.298)	45.097	1.799	29.984	(24.570)	5.414
AUD	23.003	(21.556)	1.447	26.403	(23.056)	3.347
GBP	(2.534)	3.033	499	3.765	(4.727)	962
HKD	354.185	(354.428)	243	3.792	(3.270)	522
CHF	1.662	(944)	718	950	2	952
DKK	862	-	862	(93)	1.091	998
CAD	1.215	-	1.215	(42)	1.095	1.053
SAR	714	-	714	342	-	342
SEK	251	-	251	504	-	504
MYR	(276)	-	276	(317)	-	317
CNY	3.734	-	3.734	-	-	-
Lain-lain	95	-	95	273	-	273
Jumlah	694.726	-	74.328	706.662	-	23.794
Jumlah modal (Catatan 36)	22.832.586	-	22.832.586	20.876.066	-	20.876.066
Persentase PDN terhadap modal	3,043%	-	0,326%	3,385%	-	0,114%

Rasio PDN per 31 Desember 2009 jika menggunakan modal bulan November 2009 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

Modal Bulan November 2009	22.871.263
Rasio PDN (Neraca)	3,038%
Rasio PDN (Keseluruhan)	0,325%

36. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008. Sedangkan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 sebagai perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/23/DPNP tanggal 29 September 2003.

Bank-bank diwajibkan untuk memenuhi rasio kewajiban modal minimum sebesar 8% sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, dan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Peraturan Bank Indonesia No. 9/13/PBI/2007 tanggal 1 November 2007 mewajibkan bank-bank di Indonesia dengan kualifikasi tertentu untuk memperhitungkan risiko pasar (*market risk*) dalam perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan wajib memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8% dengan memperhitungkan risiko pasar.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (lanjutan)

Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/27/DPNP tanggal 27 November 2006 mewajibkan bank-bank untuk memenuhi ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum untuk bank secara individual maupun secara konsolidasi. Perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum secara konsolidasi dilakukan dengan menghitung modal dan aset tertimbang menurut risiko dari laporan keuangan konsolidasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dengan memperhitungkan risiko pasar, adalah sebagai berikut:

	2009	2008
Modal:		
Modal inti	21.670.983	20.215.658
Modal pelengkap	1.161.603	1.677.006
Jumlah modal inti dan modal pelengkap	22.832.586	21.892.664
Dikurangi : Penyertaan	-	(1.016.598)
Jumlah modal untuk risiko kredit	22.832.586	20.876.066
Jumlah modal untuk risiko kredit dan risiko pasar	22.832.586	20.876.066
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit	148.874.972	134.160.482
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko pasar	93.007	(1.883.585)
Jumlah ATMR untuk risiko kredit dan risiko pasar	148.967.979	132.276.897
KPMM untuk risiko kredit	15,34%	15,56%
KPMM untuk risiko kredit dan risiko pasar	15,33%	15,78%
KPMM Minimum	8%	8%

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum Bank secara konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2009 dengan memperhitungkan risiko pasar adalah 16,02% dan tanpa memperhitungkan risiko pasar adalah 16,07%.

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum Bank secara konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008 dengan memperhitungkan risiko pasar adalah 16,27% dan tanpa memperhitungkan risiko pasar adalah 16,10%.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia di atas, rasio kewajiban penyediaan modal minimum harus dihitung tanpa memperhitungkan dampak dari pajak tangguhan.

37. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2008 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun-akun pada laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2009 sebagai berikut:

Deskripsi akun	Dilaporkan sebelumnya	Reklasifikasi	Dilaporkan saat ini
NERACA			
Kewajiban segera	1.158.323	(36.720)	1.121.603
Beban yang masih harus dibayar	107.857	36.720	144.577

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO

Bank menyadari bahwa dalam melaksanakan semua kegiatannya, selalu terdapat risiko yang melekat (inheren), yaitu dalam bentuk risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar atas nilai tukar valuta asing dan tingkat suku bunga, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.

Dalam rangka mengendalikan risiko tersebut, Bank telah mengimplementasikan suatu Kerangka Dasar Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) terpadu. Kerangka tersebut merupakan sarana untuk penentuan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman, serta infrastruktur yang sehingga dapat dipastikan bahwa semua risiko yang dihadapi Bank dapat dikenali, diukur, dikendalikan dan dilaporkan dengan baik.

Bank memiliki Komite Manajemen Risiko untuk merekomendasikan kebijakan dan membahas permasalahan risiko yang dihadapi Bank secara keseluruhan.

Selain komite diatas, Bank telah membentuk beberapa komite lain yang bertugas untuk menangani risiko-risiko secara lebih spesifik antara lain: Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Pemutus Kredit serta Komite Aset dan Pasiva (*Asset and Liability Committee - ALCO*).

Produk dan Aktivitas Baru

Setiap rencana penerbitan produk dan aktivitas baru senantiasa dilakukan kajian risiko menyeluruh sesuai jenis risiko yang terdapat pada PBI No. 5/8/PBI/2003, tanggal 19 Mei 2003 beserta perubahannya melalui PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009.

Manajemen aset dan pasiva

ALCO bertanggung jawab atas pengevaluasian, pengusulan dan penerapan strategi pendanaan dan investasi Bank. Ruang lingkup ALCO adalah mengelola risiko likuiditas, risiko tingkat suku bunga, dan risiko nilai tukar valuta asing; meminimalkan biaya pendanaan serta mempertahankan likuiditas pada saat yang bersamaan; dan mengoptimalkan perolehan pendapatan bunga Bank dengan mengalokasikan dana secara hati-hati pada aset produktif. ALCO diketuai oleh Presiden Direktur (merangkap anggota), dengan anggota lainnya terdiri dari enam orang direktur, Kepala Divisi Tresuri, Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi, Kepala Grup Bisnis Korporasi, Kepala Divisi Bisnis Kecil dan Menengah, Kepala Divisi Pengembangan Dana dan Jasa, Kepala Divisi Perbankan Internasional, Kepala Unit Bisnis Kredit Konsumer, Kepala Unit Bisnis Kartu Kredit dan Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko. Anggota ALCO mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Proses pengelolaan aset dan pasiva Bank dimulai dengan pengkajian parameter ekonomi yang mempengaruhi Bank, yang umumnya terdiri dari tingkat inflasi, likuiditas pasar, tingkat suku bunga SBI, nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap Rupiah dan faktor makro ekonomi lainnya. Risiko likuiditas, valuta asing dan tingkat suku bunga dikaji oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan dilaporkan kepada ALCO. ALCO kemudian menentukan strategi penetapan tingkat bunga simpanan dan kredit berdasarkan kondisi dan persaingan di pasar.

Manajemen risiko kredit

Organisasi perkreditan terus disempurnakan dengan berbasiskan kepada penerapan prinsip "empat mata" (*four eyes principle*) dimana keputusan kredit ditentukan oleh dua pihak yaitu sisi analisa risiko kredit dan sisi pengembangan bisnis.

Penyempurnaan kebijakan perkreditan Bank terus dilakukan sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia serta sesuai dengan "*International Best Practices*".

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen risiko kredit (lanjutan)

Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan dilakukan melalui pengembangan "*loan origination system*" atas alur kerja proses pengolahan kredit sehingga proses kredit yang efektif dan efisien dapat tercapai. Pengembangan sistem pengukuran profil risiko debitur terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara menyeluruh, demikian juga dengan proses pembangunan database terus dilakukan.

Komite Kebijakan Perkreditan bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan strategi perkreditan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, memantau penerapan kebijakan dan strategi perkreditan agar dapat terlaksana secara konsisten dan konsekuen, serta merumuskan pemecahan atas kendala penerapannya.

Komite Pemutus Kredit memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi dan memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas wewenangnya melalui Rapat Komite Pemutus Kredit atau Edaran Direksi. Komite juga akan memberikan pengarahan lebih lanjut apabila memerlukan analisa kredit yang lebih mendalam dan komprehensif karena menganggap informasi yang ada belum mencukupi sebagai bahan pengambilan keputusan. Melakukan koordinasi dengan ALCO dalam hal aspek pendanaan kredit. Melaksanakan tugasnya terutama yang berkaitan dengan pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran profesionalismenya secara jujur, objektif, cermat dan seksama, dan menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak-pihak penerima kredit saat memberikan persetujuan kredit sehingga persetujuan kredit tidak bersifat formalitas saja.

Bank juga telah mengembangkan sistem pemeringkat risiko debitur yang lebih dikenal dengan *Internal Credit Risk Rating System*. *Internal Credit Risk Rating* terdiri atas 11 kategori peringkat risiko dari yang paling baik, RR1, sampai dengan RR10 dan yang paling buruk, Loss. Pemberian peringkat kepada setiap debitur menjadi suatu masukan yang berharga karena dapat membantu pejabat yang berwenang dalam memutuskan suatu usulan perkreditan dengan lebih baik.

Dalam konteks manajemen risiko yang lebih luas, pengembangan database atas *Internal Credit Risk Rating* terus dilakukan karena *Internal Credit Risk Rating* merupakan salah satu komponen utama dalam pengukuran risiko yang dikaitkan dengan ketentuan permodalan yang disebutkan didalam *Basel Accord II* untuk metode IRB (*Internal Rating Based*) *Approach*. Selain itu hasil pengukuran risiko yang berbasis *rating* ini juga dapat menjadi sarana dalam pengembangan "*pricing*" yang lebih sesuai dengan tingkat risiko dari debitur sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 berkaitan dengan *risk-based pricing*, dan juga dalam rangka pengembangan portofolio perkreditan.

Dalam tahap awal, manajemen portofolio melakukan pengelolaan *risk concentration* dengan menentukan limit-limit antara lain sektor industri, mata uang valuta asing, jenis kredit tertentu serta exposure perseorangan dan grup usaha. Seiring dengan perkembangan *rating database*, teknologi, sumber daya manusia, tingkat kompleksitas bank, pasar, serta regulasi yang ada, manajemen portofolio akan dikembangkan secara lebih aktif dan dinamis yang diarahkan kepada optimalisasi alokasi dari modal Bank pada suatu tingkat risiko/*risk appetite* yang bisa diterima.

Bank juga telah mengembangkan pengelolaan risiko kredit dengan melakukan analisa *stress testing* terhadap portofolio kredit serta melakukan monitoring terhadap hasil *stress testing* tersebut. Sebagai respon atas kondisi perubahan pasar dan gejolak ekonomi yang masih terjadi saat ini, Bank melakukan analisa *stress testing* ini secara berkala. *Stress testing* bermanfaat sebagai alat Bank untuk memperkirakan besarnya dampak risiko pada "*stressful condition*" sehingga Bank dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan "*contingency plan*".

Bank telah mengembangkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang lebih baik yang bertujuan untuk mengakomodasi penerapan Basel sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen risiko likuiditas

Bank sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan ini dilakukan oleh ALCO dan secara operasional oleh Divisi Tresuri.

Bank menjaga likuiditas dengan mempertahankan jumlah aset likuid yang cukup untuk membayar simpanan para nasabah, dan menjaga agar jumlah aset yang jatuh tempo pada setiap periode dapat menutupi jumlah kewajiban yang jatuh tempo.

Aset likuid Bank terutama terdiri dari penempatan pada bank lain dan lembaga keuangan lainnya, SBI, giro pada Bank Indonesia dan kas. Apabila Bank memerlukan likuiditas, dengan segera Bank dapat menarik cadangan dana dalam giro pada Bank Indonesia, menjual putus SBI atau menjual SBI dengan perjanjian pembelian kembali atau mencari pinjaman di pasar uang antar bank di Indonesia. Cadangan utama Bank terdiri dari cadangan Giro Wajib Minimum dan kas di kantor-kantor cabang.

Saat ini Peraturan Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menjaga likuiditas (Giro Wajib Minimum) secara harian, sekurang-kurangnya sebesar 7,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) Rupiah, yang terdiri dari GWM Utama sebesar 5% dari DPK Rupiah dalam bentuk giro Rupiah pada Bank Indonesia dan GWM Sekunder sebesar 2,5% dari DPK Rupiah berupa SBI, SUN dan/atau *excess reserves*, serta GWM valuta asing sebesar 1% dari DPK valuta asing termasuk bank dalam bentuk giro valuta asing pada Bank Indonesia (Catatan 5).

Bank menentukan tingkat suku bunga simpanan berdasarkan kondisi pasar dan persaingan. Tingkat suku bunga pada umumnya bervariasi tergantung pada jangka waktu dan besarnya simpanan. Tingkat suku bunga giro dan tabungan bersifat mengambang dan ditinjau secara berkala sesuai dengan kondisi pasar, sedangkan tingkat suku bunga deposito berjangka bersifat tetap, sesuai dengan jangka waktunya.

Manajemen risiko nilai tukar valuta asing

Perdagangan valuta asing Bank diatur dalam ketentuan dan kebijakan internal dan peraturan Bank Indonesia mengenai posisi devisa neto (PDN). Bank Indonesia membatasi posisi devisa neto (gabungan cabang dalam dan luar negeri) untuk semua jenis valuta asing pada neraca maupun rekening administratif tidak boleh melebihi 20% dari modal bank.

Dalam mengelola risiko nilai tukar valuta asingnya, Bank memusatkan pengelolaan posisi devisa neto pada Divisi Tresuri, yang menggabungkan laporan posisi devisa neto harian dari semua cabang. Secara umum, setiap cabang diharuskan untuk menutup risiko nilai tukar valuta asingnya pada setiap akhir hari kerja, walaupun ada batas toleransi posisi devisa neto untuk setiap cabang tergantung pada besarnya aktivitas transaksi valuta asing di cabang tersebut. Bank membuat laporan posisi devisa neto harian yang menggabungkan posisi devisa neto dalam neraca maupun rekening administratif (*off-balance sheet accounts*).

Pendapatan Bank dari perdagangan valuta asing terutama diperoleh dari transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya. Saat ini, Bank pada umumnya tidak melakukan perdagangan untuk mencari keuntungan, meskipun memang ada kalanya Bank memiliki posisi devisa neto dalam jumlah terbatas, sesuai dengan ketentuan internal dan pandangan Bank terhadap pergerakan nilai tukar valuta asing.

Kewajiban Bank dalam valuta asing terutama terdiri dari simpanan dan pinjaman yang diterima dalam dolar (AS). Untuk memenuhi peraturan posisi devisa neto, Bank mempertahankan asetnya yang terdiri dari penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan dalam dolar (AS).

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen risiko tingkat suku bunga

Komponen utama kewajiban Bank yang sensitif terhadap pergerakan tingkat suku bunga adalah simpanan, sedangkan aset Bank yang sensitif adalah obligasi pemerintah, surat-surat berharga, dan kredit yang diberikan. ALCO secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga simpanan dan kredit yang diberikan.

Bank menggunakan "*earning approach*" dan "*economic value approach*" untuk mengukur risiko suku bunga pada *banking book*. Pengukuran risiko dilakukan terhadap mata uang Rupiah dan valuta asing (USD) untuk kemudian dilaporkan kepada ALCO. Sedangkan untuk pengukuran risiko suku bunga pada *trading book*, Bank menggunakan metode *Value at Risk* (VaR).

Bank menentukan tingkat suku bunga simpanan dengan memantau pergerakan tingkat suku bunga SBI dan mengkaji tingkat suku bunga simpanan yang ditawarkan oleh bank pesaing. Tingkat suku bunga kredit ditetapkan dengan menambahkan marjin tertentu atas biaya pendanaan Bank (termasuk biaya pendanaan giro wajib minimum).

Manajemen risiko operasional

Risk and Control Self Assessment (RCSA)

Basel Accord II mewajibkan Bank untuk memasukkan risiko operasional sebagai salah satu komponen di dalam perhitungan kecukupan modal suatu bank. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2002 Bank mulai melaksanakan *Risk Self Assessment* (RSA) tahap awal ke seluruh cabang/kanwil dan beberapa divisi di Kantor Pusat. Salah satu tujuan pelaksanaan RSA ini adalah untuk mensosialisasikan *risk culture* (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan *risk awareness* (kesadaran akan risiko) yang merupakan syarat utama dalam pengelolaan risiko. Dengan meningkatnya *risk culture* diharapkan akan mampu meningkatkan budaya kontrol risiko pada setiap karyawan dalam melaksanakan aktivitas usaha sehari-hari.

Dalam pelaksanaannya, RSA masih terus dilakukan dan disempurnakan dengan tujuan untuk lebih menanamkan *risk awareness* dalam pengelolaan risiko pada setiap unit kerja. Pada tahun 2006 program RSA telah disempurnakan dengan memasukkan unsur kontrol dalam penilaian risiko sehingga nama RSA diubah menjadi *Risk and Control Self Assessment* (RCSA). Tahun 2007 sampai dengan 2009, implementasi RCSA dilakukan dengan menggunakan metode sampling berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan berdiskusi langsung bersama unit kerja, dilanjutkan dengan penilaian risiko. Hal ini dinilai dapat lebih meningkatkan *risk awareness* bagi unit kerja yang bersangkutan.

Loss Event Database (LED)

Bank juga telah memiliki database kasus/kerugian-kerugian yang terjadi di seluruh unit kerja yang dikenal dengan nama metode *Loss Event Database* (LED). LED bertujuan untuk membantu Bank dalam mencatat dan menganalisa kasus atau permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan dan pencegahan atas kasus yang serupa. Tujuan akhir dari LED adalah agar risiko kerugian yang mungkin terjadi dapat diminimumkan. Selain itu LED juga merupakan sarana pengumpulan data kerugian risiko operasional yang digunakan Bank untuk memperhitungkan alokasi beban modal (*capital charge*) dan pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan risiko operasional dan kerugian operasional yang telah terjadi pada Bank. Saat ini LED telah diimplementasikan di seluruh Kantor Wilayah dan Cabang dan dalam tahap implementasi ke seluruh Unit Kerja Kantor Pusat.

Key Risk Indicator (KRI)

KRI adalah suatu metode yang digunakan untuk memberikan suatu indikator (*early warning sign*) atas kemungkinan terjadinya peningkatan risiko operasional di suatu unit kerja. Hingga akhir tahun 2008, hampir seluruh cabang telah menerapkan metode KRI ini. Pada awal tahun 2009 dilakukan penyempurnaan KRI dengan menambahkan 7 indikator baru. Penyempurnaan ini ditujukan untuk lebih meningkatkan *risk awareness*. Pada pertengahan tahun 2009, seluruh kanwil dan cabang telah menerapkan metode KRI.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Operational Risk Management Information System (ORMIS)

Merupakan aplikasi pendukung yang digunakan dalam implementasi RCSA, LED dan KRI.

Perhitungan Pencadangan Modal Risiko Operasional

Mulai tahun 2009 Bank telah menghitung kewajiban penyediaan modal minimum Bank untuk risiko operasional berdasarkan Pendekatan Indikator Dasar. Dengan demikian Bank telah siap untuk mengimplementasikan regulasi dari Bank Indonesia terkait dengan masuknya risiko operasional dalam perhitungan rasio kecukupan modal (CAR) selain untuk risiko kredit dan risiko pasar.

Manajemen risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Risiko hukum melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, operasional dan jasa, jasa pembiayaan perdagangan, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Risiko hukum inheren dinilai berdasarkan potensial kerugian atas kasus-kasus yang terjadi di Bank dan Perusahaan Anak Bank yang sedang dalam proses di pengadilan dibagi dengan modal Bank. Parameter yang digunakan untuk menghitung potensial kerugian atas kasus yang sedang dalam proses di pengadilan adalah dasar gugatan (kasus posisi), nilai perkara, dan dokumentasi hukum.

Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, maka Bank telah membentuk Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan (SKHK) di Kantor Pusat dan unit kerja hukum di beberapa Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.

Dalam rangka memitigasi risiko hukum, Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan telah melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a) Membuat standarisasi dokumen hukum (antara lain perjanjian kredit, pengikatan agunan, perjanjian kerjasama, perjanjian sewa menyewa, perjanjian *outsourcing*), menelaah kembali setiap perjanjian sebelum ditandatangani oleh pejabat Bank, dan memberikan pendapat hukum atas permasalahan hukum yang terjadi.
- b) Membuat manual kerja bagi staf hukum dan administrasi kredit di kanwil dan cabang.
- c) Mengadakan forum komunikasi secara periodik untuk meningkatkan kompetensi staf hukum kanwil dan cabang, mensosialisasikan modus operandi kasus yang pernah terjadi dan pedoman penanganan kasus secara hukum.
- d) Melakukan pembelaan hukum atas perkara perdata yang melibatkan Bank yang sedang dalam proses di pengadilan dan arbitrase, serta memonitor perkembangan kasusnya.
- e) Mendampingi pejabat/karyawan Bank sehubungan dengan proses hukum di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan instansi lainnya, untuk memberikan perlindungan hukum bagi Bank dan atau pejabat/karyawan Bank.
- f) Menyusun rencana strategi pengamanan kredit (bekerja sama dengan unit kerja lain, antara lain Biro Penyelesaian Kredit) sehubungan dengan permasalahan kredit macet.
- g) Mendaftarkan hak milik kekayaan intelektual atas produk-produk Bank pada instansi yang berwenang, dan mengamankan kepemilikan atas aset-aset Bank antara lain hak atas tanah dan bangunan Bank, memonitor dan melakukan tindakan hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual milik Bank.

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen risiko hukum (lanjutan)

- h) Meminta cabang membuat laporan hasil pengendalian risiko hukum secara periodik kepada SKHK.
- i) Meminta pendapat konsultan hukum independen atau pendapat dari instansi yang berwenang dalam hal terdapat peraturan yang tidak atau kurang jelas atau multi tafsir.
- j) Memonitor dan menganalisa perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang dihadapi oleh Bank dan Perusahaan Anak Bank.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003, Bank telah membuat Kebijakan Pengendalian Risiko Hukum yang telah diimplementasikan sejak tahun 2005, dan telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009.

Manajemen risiko reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.

Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti frekuensi keluhan dan publikasi negatif serta pencapaian penyelesaian keluhan. Penilaian tersebut disusun dalam laporan profil risiko reputasi setiap triwulan.

Organisasi pendukung yang secara khusus menangani risiko reputasi terdiri dari Sentra Operasi Perbankan Domestik (SOPD), Divisi Pengembangan dan Jasa (DPDJ), Divisi Pengembangan Operasi (DPO), Unit Bisnis Kartu Kredit (UBC), Kantor Cabang Utama dan Kantor Cabang Pembantu.

Untuk mengelola dan mengendalikan risiko reputasi, Bank didukung oleh fasilitas Halo BCA (layanan telepon 24 jam untuk informasi, saran dan keluhan).

Kebijakan/pedoman manajemen risiko reputasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 telah tercakup dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Bank tahun 2004 dan Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi. Di samping itu Bank juga telah mempunyai Pedoman Komunikasi dan Pedoman Penyelesaian Keluhan.

Manajemen risiko reputasi antara lain menyempurnakan pedoman yang ada dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, telah diimplementasikan secara internal.

Manajemen risiko strategis

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.

Parameter yang digunakan dalam menilai risiko strategis adalah realisasi kredit, *secondary reserves*, dana pihak ketiga dan *fee-based income*.

Risiko strategis inheren dapat timbul dari penerapan dan pelaksanaan strategi Bank pada aktivitas fungsional perkreditan, treasury dan investasi serta operasional dan jasa. Sistem pengendalian risiko strategis dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

- Dewan Komisaris dan Direksi turut aktif dalam pengawasan dan pemantauan atas penentuan dan pelaksanaan strategi usaha Bank.

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen risiko strategik (lanjutan)

- Bank memiliki Satuan Kerja Perencanaan Perusahaan (SKPNP) dengan misi mendukung dan meningkatkan kemantapan pertumbuhan Bank melalui perencanaan dan pengembangan riset.
- Adanya kebijakan, prosedur dan penetapan batas risiko strategik untuk mengukur kemajuan yang dicapai dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Pengelolaan dan pengendalian risiko strategik didukung dengan aplikasi pendukung seperti *financial model*, sumber-sumber data/informasi yang terpercaya, evaluasi dan analisa kinerja yang dilakukan secara bulanan, triwulanan, setengah tahunan dan tahunan.
- Pengembangan infrastruktur pendukung terus dilakukan dari waktu ke waktu, seperti telah diimplementasikannya penggunaan perangkat lunak "*Hyperion Budgeting Systems*" secara terintegrasi serta *on-line* dalam proses pembuatan anggaran Bank.

Rencana pengembangan manajemen risiko strategik adalah :

- Mempertajam perumusan arahan strategi bisnis untuk meningkatkan kinerja Bank.
- Meningkatkan cakupan dan kualitas analisa data-data internal dan eksternal dalam rangka memitigasi risiko strategik.

Manajemen risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah salah jenis risiko yang harus dikelola oleh Bank yang timbul karena Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan dan ketentuan lain yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bank telah mengangkat salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan yang berfungsi untuk mengkoordinasikan pengelolaan risiko kepatuhan Bank.

Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan, Bank telah membuat mekanisme untuk menjaga kepatuhan, yaitu antara lain dengan selalu menyesuaikan ketentuan internal dengan peraturan yang berlaku dan mengkomunikasikan ketentuan baru kepada karyawan terkait, melakukan kajian terhadap produk/aktivitas baru dan permohonan kredit besar, melakukan uji kepatuhan secara berkala, dan membuat laporan bulanan kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Bank juga telah mengimplementasikan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagai catatan, pada semester II/2009, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang menggantikan ketentuan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Ketentuan baru tersebut wajib mulai diterapkan oleh Bank paling lambat awal Juli 2010.

Selain itu, mengingat bahwa risiko yang terjadi di anak perusahaan dapat mempengaruhi profil risiko Bank selaku induk perusahaan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada awal tahun 2009 Bank sudah menerapkan manajemen risiko kepatuhan secara konsolidasi dengan anak perusahaan.

Profil Risiko

Sesuai dengan ketentuan pasal 24 Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank wajib menyampaikan laporan profil risiko atas delapan jenis risiko kepada Bank Indonesia. Laporan profil risiko tersebut memuat laporan tentang tingkat dan trend seluruh eksposur risiko yang relevan dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

Laporan profil risiko yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko kepada Bank Indonesia berisi substansi yang sama dengan laporan profil risiko yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Manajemen Risiko.

Secara umum risiko komposit Bank selama tahun 2008 adalah Rendah yang merupakan hasil penilaian dari risiko inheren Rendah dengan penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko Kuat. Sistem pengendalian risiko tersebut merupakan cerminan dari cakupan penerapan manajemen risiko yang tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR) Bank. Dari 8 (delapan) jenis risiko yang dinilai, risiko komposit Moderat berasal dari risiko kredit, risiko operasional, dan risiko reputasi, sedangkan risiko lainnya memiliki risiko komposit yang Rendah.

Stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan Indonesia pada Triwulan I tahun 2008 masih bertahan ditengah kondisi ekonomi global yang belum kondusif. Dilain pihak, kinerja perbankan tetap baik meskipun terdapat penurunan kredit dan Dana Pihak Ketiga.

Pada Triwulan II tahun 2008, dengan masih tingginya harga komoditas energi dan bahan pangan dunia serta dampak kenaikan harga BBM semakin memberikan tekanan atas inflasi, namun sektor perbankan masih menunjukkan kinerja dan ketahanan yang baik.

Pada Triwulan III tahun 2008, tekanan inflasi di dalam negeri masih kuat, terutama sebagai akibat dari permintaan agregat yang tumbuh cepat.

Krisis keuangan di Amerika Serikat (AS) masih terus berlanjut dan mengakibatkan kondisi makroekonomi di dalam negeri terancam mengalami krisis sebagai imbas gejala ekonomi global. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus melorot sepanjang September 2008 dan diikuti oleh anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

Kinerja perbankan terancam melambat seiring dengan ketatnya likuiditas perbankan dan berlanjutnya krisis ekonomi global yang akan berimbas pada kondisi makro-ekonomi Indonesia. Ketatnya likuiditas perbankan menyebabkan, bank-bank mulai menggunakan sumber dana lain untuk membiayai kreditnya.

Bank tetap mampu mengelola risiko pada seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*). Anjloknya IHSG juga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas portofolio aset Bank karena sesuai dengan peraturan yang terkait, Bank Indonesia tidak memperkenankan Bank memiliki aset produktif dalam bentuk saham dan atau surat berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (*underlying reference asset*) berbentuk saham.

Pada Triwulan IV tahun 2008, tekanan inflasi di Indonesia mulai mereda. Hal ini sejalan dengan mulai melambatnya perekonomian domestik sebagai dampak dari melemahnya perekonomian global dan menurunnya harga-harga komoditas internasional. Di tengah berbagai gejala tersebut, kondisi perbankan Indonesia secara fundamental masih dapat terjaga. Indikator utama perbankan menunjukkan ketahanan yang tetap baik dan mantap, seperti tercermin dari nilai CAR dan NPL. Sementara itu, kondisi likuiditas perbankan yang sempat mengalami keketatan, sudah mulai longgar kembali. Namun, perbankan terlihat mulai berhati-hati dalam menyalurkan kredit seiring dengan meningkatnya risiko ke depan sebagai dampak dari melemahnya perekonomian di sektor riil.

Tekanan terhadap kondisi perekonomian nasional ini dinilai kurang kondusif bagi dunia usaha dan perbankan, namun sampai dengan Triwulan IV tahun 2008 Bank tetap mampu mengelola risiko pada seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*).

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

Secara umum risiko komposit Bank selama tahun 2009 adalah Rendah yang merupakan hasil penilaian dari risiko inheren Rendah dengan penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko Kuat. Sistem pengendalian risiko tersebut merupakan cerminan dari cakupan penerapan manajemen risiko yang tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR) Bank. Dari 8 (delapan) jenis risiko yang dinilai, risiko komposit Moderat pada Triwulan I adalah risiko kredit, risiko operasional, dan risiko reputasi, sedangkan risiko lainnya memiliki risiko komposit yang Rendah. Pada Triwulan II, risiko komposit yang Moderat adalah risiko kredit dan risiko reputasi, sedangkan risiko lainnya tetap memiliki risiko komposit yang rendah. Selanjutnya pada Triwulan III dan IV, risiko komposit yang Moderat adalah risiko kredit, risiko operasional dan risiko reputasi, sedangkan risiko lainnya tetap memiliki risiko komposit yang rendah.

Pada Triwulan I tahun 2009, perkembangan ekonomi global menunjukkan perlambatan yang lebih dalam, hal ini tercermin dari melambatnya perekonomian negara-negara maju yang lebih besar dari perkiraan semula. Perlambatan kondisi ekonomi negara maju tersebut memicu penurunan kinerja ekspor Indonesia, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja perekonomian secara keseluruhan. Kondisi pasar keuangan global masih rapuh dengan semakin banyaknya laporan kerugian lembaga keuangan dunia. Memburuknya kondisi pasar keuangan global ini menimbulkan sentimen negatif terhadap negara-negara di *emerging market* yang masih berpotensi menekan perekonomian sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Pada Triwulan II tahun 2009, perekonomian Indonesia masih dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi pada perekonomian global, di mana terdapat perkembangan positif yang terjadi di pasar keuangan global sejak beberapa bulan terakhir. Hal ini tercermin pada membaiknya kondisi pasar saham internasional dan terus menurunnya indikator persepsi risiko di berbagai negara. Sementara itu, hasil "*stress test*" perbankan di Amerika Serikat menunjukkan hasil yang lebih baik dari perkiraan banyak pihak. Hal tersebut juga telah menambah optimisme terhadap membaiknya kondisi perekonomian global. Harapan perbaikan pada ekonomi global tersebut telah membangun sentimen positif pada para pelaku pasar, termasuk di Indonesia. Di pasar domestik, sentimen positif pada perekonomian dunia dan mulai berangsur membaiknya likuiditas di pasar keuangan global telah mendorong aliran modal masuk ke dalam negeri. Kondisi ini berdampak positif pada penguatan mata uang Rupiah, peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan perbaikan *yield* Surat Utang Negara (SUN). Arus modal masuk juga memperkuat cadangan devisa Indonesia sehingga dapat membiayai kebutuhan impor dan pembayaran Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah.

Meskipun kondisi perekonomian menunjukkan tanda-tanda perbaikan, namun secara umum perekonomian negara maju masih belum pulih sepenuhnya dan menunjukkan angka perlambatan. Risiko dan ketidakpastian ekonomi global terutama di negara maju, masih cukup tinggi. Berbagai indikator produksi juga masih menunjukkan penurunan. Hal ini ditunjukkan oleh belum stabilnya kondisi pasar tenaga kerja, seiring dengan masih terjadinya pemutusan hubungan kerja dan tingginya tingkat pengangguran. Di tengah tekanan dari perekonomian global tersebut, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan yang sama. Pertumbuhan yang lebih baik tersebut didukung oleh permintaan domestik yang masih cukup besar dan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya konsumsi rumah tangga juga didorong oleh maraknya aktivitas Pemilihan Umum (Pemilu) yang tampak dari pertumbuhan sektoral seperti pengeluaran subsektor jasa periklanan, komunikasi, industri makanan, hotel dan restoran, serta percetakan. Kondisi perbankan nasional relatif stabil. Berbagai indikator mendukung kondisi tersebut, antara lain modal perbankan secara nasional dan rasio kecukupan modal yang relatif tetap tinggi.

Sementara itu, rasio *gross Non Performing Loan* (NPL) tetap terkendali di bawah 5%. Likuiditas perbankan, termasuk likuiditas dalam pasar uang antar bank makin membaik dan penyaluran kredit mulai meningkat meski belum optimal.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

Pada Triwulan III tahun 2009, perkembangan perekonomian global terus menunjukkan pemulihan dan berdampak pada membaiknya ekonomi domestik. Proses pemulihan yang terjadi pada perekonomian global terus menunjukkan indikasi yang semakin menguat dan merata di berbagai negara. Perbaikan yang paling tampak adalah di negara-negara *emerging market* Asia, terutama China. Sementara di negara maju, kontraksi ekonomi mulai melambat. Dari berbagai indikator makro ekonomi global, terlihat optimisme pemulihan ekonomi global semakin menguat. Perkembangan penjualan eceran, utilisasi kapasitas, dan indeks produksi mulai meningkat baik di negara maju maupun di negara *emerging market*. Meski perekonomian global menunjukkan perbaikan, beberapa faktor risiko masih membayangi pemulihan ekonomi. Risiko tingkat pengangguran yang masih tinggi di negara-negara maju menjadi kendala bagi perbaikan kinerja perekonomian global lebih lanjut.

Di sisi domestik, perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang lebih baik seiring dengan terus membaiknya perekonomian global. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada Triwulan III tahun 2009 diperkirakan mencapai 4,2%, lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar 3,9%. Dari sisi permintaan, kinerja konsumsi meningkat ditopang oleh pendapatan dari penjualan ekspor yang meningkat, keyakinan konsumen yang lebih kuat, serta faktor musiman menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kinerja investasi diperkirakan sedikit membaik, meski masih tumbuh rendah. Dari sisi eksternal, pertumbuhan ekspor diperkirakan lebih tinggi sejalan dengan ekonomi negara mitra dagang yang semakin membaik, serta harga komoditas global yang meningkat. Sementara, pertumbuhan impor diperkirakan masih minimal. Di sisi penawaran, sektor industri pengolahan dan perdagangan, hotel dan restoran, tumbuh membaik pada Triwulan III tahun 2009 seiring dengan perayaan Idul Fitri.

Kondisi perekonomian global dan dalam negeri yang cukup kondusif memberikan ruang gerak bagi penguatan Rupiah. Masuknya dana asing akibat peningkatan optimisme investor akan pemulihan ekonomi dunia menyebabkan Rupiah secara rata-rata terapresiasi sebesar 5,55% ke level Rp9.973 (nilai penuh) per USD dari Rp10.578 (nilai penuh) per USD pada triwulan sebelumnya. Penguatan Rupiah ini juga disertai oleh pergerakan Rupiah yang relatif stabil.

Berbagai perkembangan di atas telah memberikan dampak positif pada kondisi sektor keuangan domestik. Secara umum, kinerja pasar keuangan meningkat dan transmisi kebijakan moneter terus membaik. Di pasar saham, perkembangan bursa efek selama Triwulan III tahun 2009 ditandai oleh peningkatan indeks harga saham gabungan (IHSG). Posisi IHSG pada akhir Triwulan ini meningkat dari akhir triwulan sebelumnya yaitu dari 2.026,78 menjadi 2.467,59 (meningkat sebesar 440,81 poin). Fundamental domestik yang membaik serta harga komoditas global yang meningkat merupakan faktor yang mendorong pembelian saham baik oleh investor asing maupun domestik yang signifikan. Di pasar obligasi, *yield* SUN menurun sejalan dengan penurunan BI Rate dan minat investor asing terhadap SUN yang meningkat. Namun demikian, *yield* SUN untuk tenor jangka panjang (di atas 15 tahun) masih cenderung tinggi terkait dengan persepsi risiko yang masih tinggi.

Kondisi perbankan nasional relatif stabil dan respon perbankan terhadap sinyal kebijakan moneter mulai membaik. Secara mikro, kondisi perbankan nasional tetap stabil, yang diindikasikan oleh masih terjaganya rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) per Agustus 2009 yang cukup tinggi mencapai level 17%. Sementara itu, rasio *Non Performing Loan* (NPL) gross perbankan nasional tetap terkendali di bawah 5% dengan rasio NPL neto di bawah 2%. Likuiditas perbankan cukup likuid tercermin dari simpanan perbankan pada instrumen moneter (SBI dan FASBI) yang meningkat, volume transaksi di pasar uang antar bank yang lebih besar, dan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) *overnight* yang menurun dan cenderung lebih rendah dari BI Rate.

Sementara itu, respon suku bunga perbankan terhadap kebijakan moneter terus membaik, terutama pada suku bunga simpanan. Sampai dengan pertengahan Triwulan III tahun 2009, rata-rata suku bunga kredit menurun sebesar 18 *basis points*. Namun demikian, perlambatan pertumbuhan kredit masih terus berlanjut, hal ini terutama terkait dengan masih lemahnya sektor riil dan perilaku bank yang lebih berhati-hati dalam penyaluran kredit.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

Pada Triwulan IV tahun 2009, perkembangan berbagai indikator ekonomi menjelang akhir tahun 2009 ditandai oleh terus berlanjutnya perbaikan kondisi makro ekonomi Indonesia. Perbaikan tersebut ditopang oleh peningkatan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi domestik dan global, serta terjaganya kestabilan makro ekonomi domestik.

Kondisi perekonomian dan pasar keuangan global secara umum terus mencatat perkembangan yang positif. Proses pemulihan ekonomi di negara maju terus berlangsung. Hal tersebut sejalan dengan membaiknya tingkat konsumsi dan produksi, serta kondisi pasar tenaga kerja yang mulai mengindikasikan perbaikan.

Sementara itu, ekonomi Asia yang memiliki peranan penting sebagai penggerak utama pemulihan ekonomi global juga tumbuh semakin kuat. Sejalan dengan itu, kinerja pasar keuangan global terus membaik. Meskipun sempat mengalami tekanan akibat kembali menurunnya kepercayaan investor terkait krisis utang Dubai World dan krisis fiskal Yunani, namun dampak kedua krisis tersebut berlangsung singkat dan dampaknya bersifat minimal terhadap pasar keuangan dunia.

Inflasi global tahun 2009 mulai meningkat sejalan dengan proses pemulihan ekonomi dunia, namun demikian masih lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2008. Kondisi tersebut memungkinkan sejumlah negara maju untuk cenderung mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif.

Di sektor keuangan, stabilitas sistem perbankan nasional tetap terjaga, namun penyesuaian suku bunga kredit belum seperti yang diharapkan. Penurunan suku bunga, khususnya suku bunga deposito perbankan, masih terus berlangsung. Namun demikian, transmisi kebijakan moneter melalui suku bunga sebagaimana tercermin pada penurunan suku bunga kredit masih relatif terbatas.

Kinerja sektor perbankan nasional selama tahun 2009 secara umum tetap baik. Beberapa indikator utama perbankan seperti rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio* – CAR), rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan* – NPL), *Net Interest Margin* (NIM) dan *Return On Asset* (ROA) tetap menunjukkan perkembangan yang cukup baik di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil. NPL *gross* tetap terjaga di bawah 5%, sedangkan CAR masih solid di level 17%, jauh berada di atas level minimum yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 8%.

Beberapa tindakan yang dilakukan oleh Bank dalam meningkatkan *awareness* sehubungan dengan masih adanya ancaman gejolak ekonomi global dan penurunan perekonomian Indonesia yang dapat berpengaruh buruk pada perbankan adalah:

- Melanjutkan peningkatan koordinasi antara Dewan Komisaris, Direksi, Kanwil dan Cabang.
- Mengkaji ulang strategi pelepasan kredit dan kebijakan di bidang operasional dan perkreditan untuk memantau dan mengendalikan peningkatan risiko terhadap eksposur yang mempunyai risiko di atas rata-rata.
- Meningkatkan monitoring terhadap portofolio kredit, terutama untuk kredit jumlah besar dan sektor ekonomi yang mempunyai risiko di atas rata-rata, baik untuk *cash loan* maupun *non cash loan*.
- Melakukan kaji ulang terhadap ketentuan kredit, antara lain mengenai prosedur, wewenang, dan agunan.
- Melakukan pemberian kredit baru dengan lebih selektif.

Sistem pengendalian risiko secara umum tetap kuat karena Bank akan terus meningkatkan penyesuaian pengelolaan manajemen risiko di semua aktivitas fungsionalnya sehingga Bank dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan setiap risiko yang ada.

Peringkat risiko komposit yang rendah dapat tercapai karena Bank telah menerapkan proses manajemen risiko secara cukup efektif dan efisien pada seluruh aktivitasnya. Tren risiko inheren Bank diperkirakan tetap rendah karena berdasarkan hasil proyeksi tidak akan terjadi perubahan risiko komposit yang cukup signifikan.

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen risiko Anak Perusahaan

Dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Anak Perusahaan maka Bank wajib melakukan penerapan manajemen risiko secara konsolidasi.

Penerapan manajemen risiko secara konsolidasi di Bank dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tersebut, yang mencakup :

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan
- Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Mengacu pada konsep penerapan manajemen risiko secara konsolidasi, maka penerapan kerangka kerja di Anak Perusahaan akan dipantau dan ditelaah secara tidak langsung oleh manajemen Bank.

Pada saat ini Anak Perusahaan sedang mempersiapkan diri untuk dapat menerapkan manajemen risiko yang sejalan dengan penerapan manajemen risiko di Bank. Penerapan manajemen risiko pada Anak Perusahaan bertujuan untuk meningkatkan daya saing, mengingat hal ini merupakan salah satu pemenuhan tingkat kepatuhan Bank terhadap standar internasional.

Di masa mendatang Bank juga akan menyempurnakan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Manajemen Risiko yang dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko usaha dari Bank dan Anak Perusahaan, agar dapat menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dengan efektif.

39. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PENTING

a. Perjanjian Sewa dengan PT Grand Indonesia

Pada tanggal 11 April 2006, Bank menandatangani perjanjian sewa-menyewa dengan PT Grand Indonesia (pihak yang mempunyai hubungan istimewa), dimana Bank akan menyewa secara jangka panjang dari PT Grand Indonesia ruangan kantor seluruhnya seluas 28.166,88 m² senilai USD35.631.103,20 (nilai penuh) termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dengan hak opsi untuk juga menyewa secara jangka panjang ruangan tambahan dengan luas 3.264,80 m² senilai USD4.129.972 (nilai penuh) termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Transaksi sewa-menyewa tersebut telah mendapat persetujuan dari Direksi dan Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank pada tanggal 25 November 2005 (notulen dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H., dengan Akta No. 11). Perjanjian sewa-menyewa tersebut dimulai sejak 1 Juli 2007 dan berakhir 30 Juni 2035.

Bank diwajibkan membayar uang muka pada tanggal 5 Desember 2005 sebesar USD3.244.092,50 (nilai penuh) termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan sepuluh kali cicilan masing-masing sebesar USD3.238.701,07 (nilai penuh) termasuk Pajak Pertambahan Nilai selama periode 15 April 2006 sampai dengan 31 Desember 2006. Pada tanggal 31 Desember 2006, Bank telah membayar sebesar USD32.392.402,13 (nilai penuh) termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dicatat sebagai aset lain-lain. Pada tanggal 2 Januari 2007, Bank melakukan pelunasan (pembayaran cicilan kesepuluh) sebesar USD3.238.701,07 (nilai penuh) termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

39. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PENTING (lanjutan)

a. Perjanjian Sewa dengan PT Grand Indonesia (lanjutan)

Pada tanggal 29 Juni 2007, Bank telah melakukan pembayaran untuk sewa ruangan tambahan lantai 28 dan 29 dengan luas 3.264,80 m² senilai USD4.129.972 (nilai penuh) termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Kesepakatan tersebut di atas telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 14 Notaris Hendra Karyadi, S.H., tanggal 11 April 2006.

Terhitung mulai periode Mei 2008, Bank telah melakukan amortisasi untuk sewa dibayar di muka tersebut. Per tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, total pembayaran sewa dibayar di muka yang telah diamortisasi masing-masing sebesar Rp21.691 dan Rp8.676, sehingga sisa saldo pembayaran sewa dibayar di muka kepada PT Grand Indonesia per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebesar Rp342.723 dan Rp355.738.

Pada tanggal 24 Oktober 2008, Bank telah melakukan pembayaran uang jaminan untuk sewa ruangan tambahan untuk lantai 30 dan 31 dengan luas 3.854,92 m² senilai USD208.165,68 (nilai penuh). Kesepakatan tersebut di atas telah diaktakan dengan Akta Notaris No.110 Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., tanggal 22 Mei 2008.

Pembayaran sewa untuk lantai 30 dan 31 telah di mulai pada tanggal 1 Agustus 2009, di mana sesuai dengan kesepakatan antara Bank dan PT Grand Indonesia, terhitung sejak tanggal pembayaran sewa pertama (1 Agustus 2009), maka Bank akan melakukan pembayaran sewa setiap tiga bulan sekali hingga masa sewa berakhir.

- b. Bank menghadapi beberapa tuntutan hukum, pengurusan administrasi dan klaim yang belum terselesaikan, yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank. Adalah tidak mungkin untuk memastikan apakah Bank akan memenangkan masalah atau tuntutan hukum tersebut, atau dampaknya jika Bank kalah. Namun demikian, manajemen Bank yakin bahwa hasil keputusan masalah atau tuntutan hukum tersebut tidak akan membawa dampak yang signifikan pada hasil usaha, posisi keuangan, atau likuiditas Bank.

40. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, efektif sejak tanggal 13 Oktober 2008, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula ditetapkan paling banyak Rp100 diubah menjadi paling banyak Rp2.000.

41. KONDISI EKONOMI

Kegiatan usaha Bank mungkin akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Indonesia di masa mendatang yang mungkin akan menyebabkan ketidakstabilan nilai tukar mata uang dan secara negatif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan tergantung pada beberapa faktor, seperti kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain, tindakan yang berada di luar kendali Bank.

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

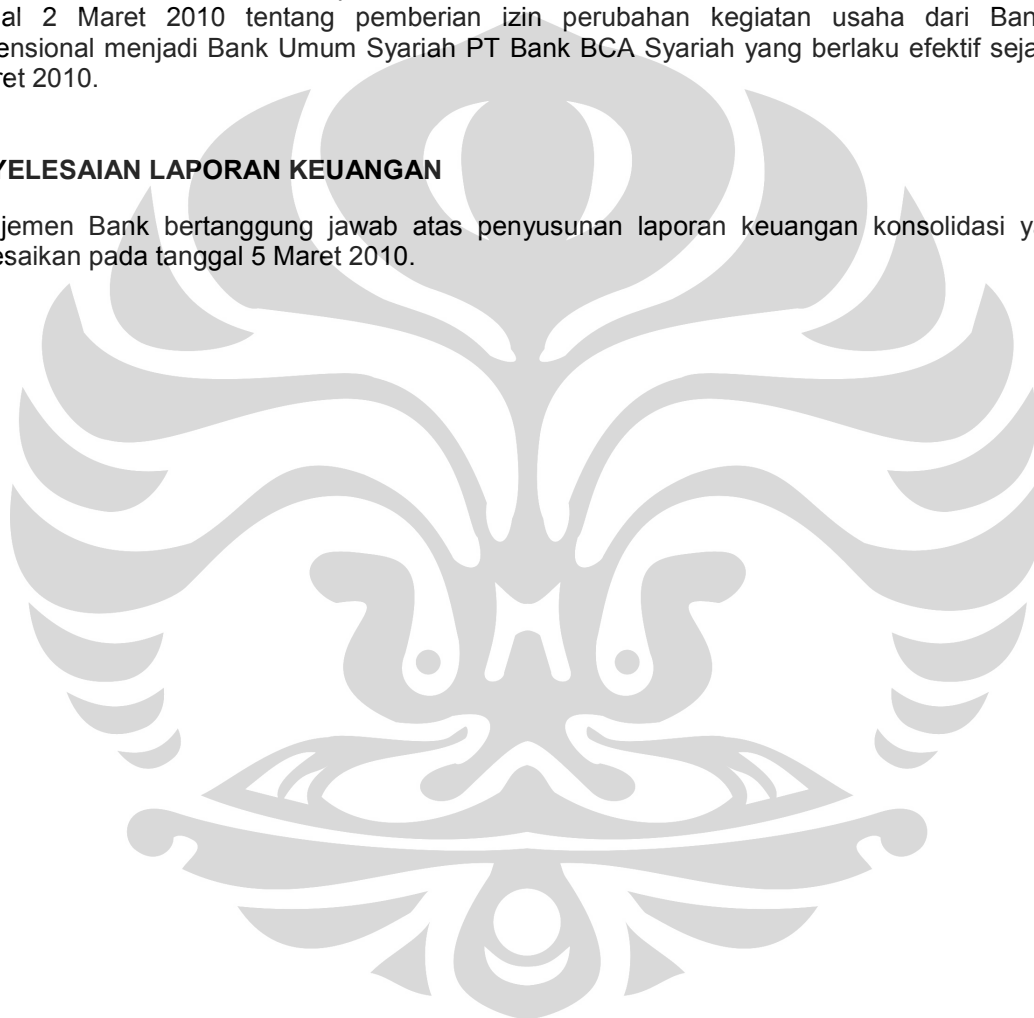
42. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Melalui Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No.49 tanggal 16 Desember 2009 dari Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati S.H., PT Bank UIB telah memutuskan untuk melakukan perubahan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan berubah nama menjadi PT Bank BCA Syariah.

Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No.AHU-01929.AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010 dan telah mendapat persetujuan Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No: 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank BCA Syariah yang berlaku efektif sejak tanggal 2 Maret 2010.

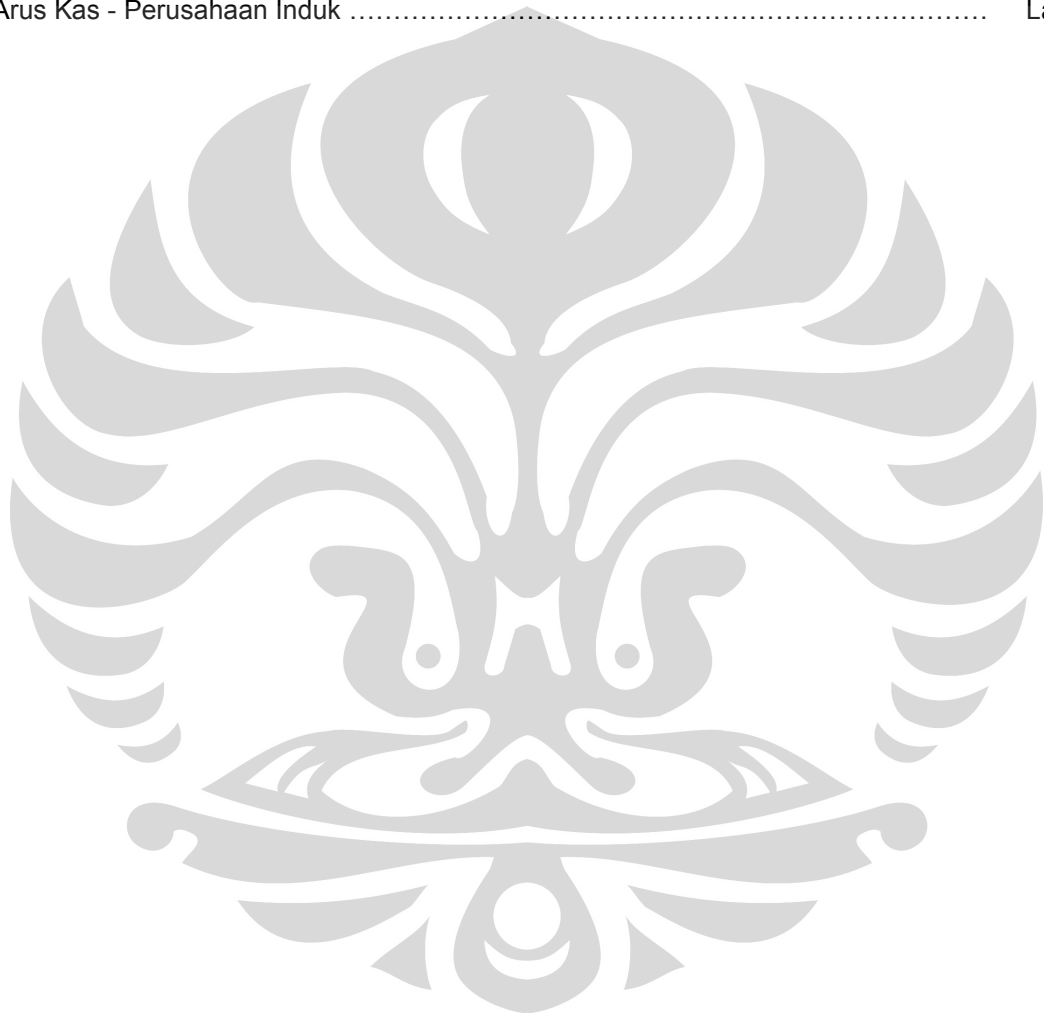
43. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang telah diselesaikan pada tanggal 5 Maret 2010.



**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
DAFTAR INFORMASI TAMBAHAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2009 DAN 2008**

Neraca - Perusahaan Induk.....	Lampiran 1
Laporan Laba Rugi - Perusahaan Induk	Lampiran 2
Laporan Perubahan Ekuitas - Perusahaan Induk	Lampiran 3
Laporan Arus Kas - Perusahaan Induk	Lampiran 4



PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
NERACA - PERUSAHAAN INDUK
31 Desember 2009 dan 2008
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2009	2008
ASET		
Kas	8.854.381	10.797.525
Giro pada Bank Indonesia	11.489.130	9.668.608
Giro pada bank lain - setelah dikurangi penyisihan penghapusan masing-masing sebesar Rp119.886 dan Rp79.645 per 31 Desember 2009 dan 2008	11.868.670	7.865.247
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - setelah dikurangi penyisihan penghapusan masing-masing sebesar Rp40.368 dan Rp41.549 per 31 Desember 2009 dan 2008	5.085.744	4.856.768
Surat-surat berharga - setelah dikurangi penyisihan penghapusan masing-masing sebesar Rp732.399 dan Rp512.468 per 31 Desember 2009 dan 2008	69.228.391	49.838.824
Obligasi Pemerintah	42.338.007	39.721.509
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	669.336	-
Tagihan derivatif - setelah dikurangi penyisihan penghapusan masing-masing sebesar Rp237 dan Rp682 per 31 Desember 2009 dan 2008	23.450	67.494
Kredit yang diberikan		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	759.479	890.845
Pihak ketiga	122.836.558	111.955.789
Jumlah kredit yang diberikan	123.596.037	112.846.634
Dikurangi: Penyisihan penghapusan	(4.301.297)	(2.757.310)
Jumlah kredit yang diberikan - bersih	119.294.740	110.089.324
Tagihan akseptasi - setelah dikurangi penyisihan penghapusan masing-masing sebesar Rp127.633 dan Rp120.647 per 31 Desember 2009 dan 2008	3.240.427	4.186.718
Penyertaan - setelah dikurangi penyisihan penghapusan masing-masing sebesar Rp18.306 dan Rp11.962 per 31 Desember 2009 dan 2008	1.634.497	1.006.434
Aset pajak tangguhan - bersih	1.035.454	747.331
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp2.905.442 dan Rp2.499.035 per 31 Desember 2009 dan 2008	2.924.586	2.626.206

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
NERACA - PERUSAHAAN INDUK (lanjutan)
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
ASET (lanjutan)		
Aset lain-lain - setelah dikurangi penyisihan penghapusan masing-masing sebesar Rp43.490 dan Rp35.526 per 31 Desember 2009 dan 2008	3.130.495	3.257.263
JUMLAH ASET	<u>280.817.308</u>	<u>244.729.251</u>



PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
NERACA - PERUSAHAAN INDUK (lanjutan)
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2009	2008
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN		
Kewajiban segera	700.680	943.935
Simpanan dari nasabah		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	52.683	47.427
Pihak ketiga	244.613.323	209.487.432
Jumlah simpanan dari nasabah	244.666.006	209.534.859
Simpanan dari bank lain	2.489.081	4.047.964
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	49.892
Kewajiban derivatif	12.265	80.394
Kewajiban akseptasi	2.031.512	3.156.877
Surat-surat berharga yang diterbitkan	26.624	37.654
Pinjaman yang diterima	325.333	358.325
Estimasi kerugian atas transaksi rekening administratif	63.690	54.233
Hutang pajak	209.730	474.510
Beban yang masih harus dibayar	151.659	138.829
Kewajiban lain-lain	2.279.608	2.568.042
JUMLAH KEWAJIBAN	252.956.188	221.445.514
EKUITAS		
Modal saham dengan nilai nominal		
Rp62,50 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar: 88.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh:		
24.655.010.000 saham	1.540.938	1.540.938
Tambahan modal disetor	3.895.933	3.895.933
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	214.425	273.356
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	3.786	1.494
Laba belum direalisasi atas surat-surat berharga dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan	422.913	37.782

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
NERACA - PERUSAHAAN INDUK (lanjutan)
31 Desember 2009 dan 2008
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS (lanjutan)		
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	4.427	4.427
Saldo laba*)		
Telah ditentukan penggunaannya	392.036	392.036
Belum ditentukan penggunaannya	22.195.247	17.946.356
Modal saham diperoleh kembali (<i>treasury stock</i>): 289.767.000 saham, harga perolehan	(808.585)	(808.585)
JUMLAH EKUITAS	27.861.120	23.283.737
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	280.817.308	244.729.251

*) Saldo rugi sebesar Rp25.853.162 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor pada saat kuasi reorganisasi Bank pada tanggal 31 Oktober 2000.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
LAPORAN LABA RUGI - PERUSAHAAN INDUK
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2009	2008
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga		
Pendapatan bunga	22.016.314	18.599.600
Provisi dan komisi	849.986	685.013
Jumlah pendapatan bunga	<u>22.866.300</u>	<u>19.284.613</u>
Beban bunga		
Beban bunga	(7.950.213)	(6.862.817)
Beban pendanaan lainnya	(1.006)	(4.097)
Jumlah beban bunga	<u>(7.951.219)</u>	<u>(6.866.914)</u>
PENDAPATAN BUNGA - BERSIH	<u>14.915.081</u>	<u>12.417.699</u>
Pendapatan operasional lainnya		
Provisi dan komisi lainnya	2.760.000	2.538.427
Laba selisih kurs - bersih	595.890	685.537
Keuntungan dari kenaikan nilai surat-surat berharga dan obligasi pemerintah	45.933	-
Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga dan obligasi pemerintah	-	1.441
Lain-lain	185.519	164.906
Jumlah pendapatan operasional lainnya	<u>3.587.342</u>	<u>3.390.311</u>
Beban penyisihan penghapusan aset	(2.239.895)	(1.746.053)
(Beban) pemulihan estimasi kerugian atas transaksi rekening administratif	(15.456)	13.516
Beban operasional lainnya		
Beban karyawan	(4.061.935)	(3.200.928)
Beban umum dan administrasi	(3.946.725)	(3.264.202)
Kerugian dari penjualan surat-surat berharga dan obligasi pemerintah	(16.543)	-
Kerugian dari penurunan nilai surat-surat berharga dan obligasi pemerintah	-	(15.870)
Lain-lain	(200.126)	(190.896)
Jumlah beban operasional lainnya	<u>(8.225.329)</u>	<u>(6.671.896)</u>
LABA OPERASIONAL	<u>8.021.743</u>	<u>7.403.577</u>

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
LAPORAN LABA RUGI - PERUSAHAAN INDUK (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - bersih		
Laba penjualan aset tetap	9.366	5.619
Pendapatan sewa	21.414	19.048
Lain-lain - bersih	352.924	5.564
Jumlah pendapatan non-operasional - bersih	<u>383.704</u>	<u>30.231</u>
Bagian laba anak perusahaan	<u>382.415</u>	<u>201.542</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	8.787.862	7.635.350
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN		
Pajak tahun berjalan	(2.395.021)	(2.257.862)
Pajak tangguhan	414.401	398.651
Jumlah beban pajak	<u>(1.980.620)</u>	<u>(1.859.211)</u>
LABA BERSIH	<u>6.807.242</u>	<u>5.776.139</u>
LABA PER SAHAM (nilai penuh):		
Laba operasional		
Dasar	329	303
Laba bersih		
Dasar	279	236

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - PERUSAHAAN INDUK
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahkan Modal Disetor	Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan	Laba Belum Direalisasi atas Surat-surat Berharga dan Obligasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan	Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Modal Saham Diperoleh Kembali (<i>Treasury Stock</i>)	Saldo Laba*)		Jumlah Ekuitas
									Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Saldo per 31 Desember 2007	1.540.938	3.895.933	207.498	1.385	22.313	1.059.907	4.427	(190.996)	392.036	13.512.717	20.446.158
Laba bersih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.776.139	5.776.139
Laba belum direalisasi atas surat-surat berharga dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan	-	-	-	-	15.469	-	-	-	-	-	15.469
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	65.858	-	-	-	-	-	-	-	65.858
Selisih karena penilaian kembali aset tetap	-	-	-	-	-	(1.059.907)	-	-	-	1.059.907	-
Dividen kas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.402.407)	(2.402.407)
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	-	-	-	109	-	-	-	-	-	-	109
Modal saham diperoleh kembali (<i>treasury stock</i>), harga perolehan	-	-	-	-	-	-	-	(617.589)	-	-	(617.589)
Saldo per 31 Desember 2008	1.540.938	3.895.933	273.356	1.494	37.782	-	4.427	(808.585)	392.036	17.946.356	23.283.737

*) Saldo rugi sebesar Rp25.853.162 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor pada saat kuasi-reorganisasi Bank pada tanggal 31 Oktober 2000.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - PERUSAHAAN INDUK (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahannya Modal Disetor	Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan	Laba Belum Direalisasi atas Surat-surat Berharga dan Obligasi Pemerintah yang Tersedia Untuk Dijual Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Modal Saham Diperoleh Kembali (<i>Treasury Stock</i>)	Saldo Laba*)		Jumlah Ekuitas
								Telah Ditetapkan Penggunaannya	Belum Ditetapkan Penggunaannya	
Saldo per 31 Desember 2008	1.540.938	3.895.933	273.356	1.494	37.782	4.427	(808.585)	392.036	17.946.356	23.283.737
Laba bersih	-	-	-	-	-	-	-	-	6.807.242	6.807.242
Laba belum direalisasi atas surat-surat berharga dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan	-	-	-	-	385.131	-	-	-	-	385.131
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	(58.931)	-	-	-	-	-	-	(58.931)
Dividen kas	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.558.351)	(2.558.351)
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	-	-	-	2.292	-	-	-	-	-	2.292
Saldo per 31 Desember 2009	1.540.938	3.895.933	214.425	3.786	422.913	4.427	(808.585)	392.036	22.195.247	27.861.120

*) Saldo rugi sebesar Rp25.853.162 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor pada saat kuasi-reorganisasi Bank pada tanggal 31 Oktober 2000.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
LAPORAN ARUS KAS - PERUSAHAAN INDUK
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2009	2008
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:		
Penerimaan bunga, provisi dan komisi	19.068.752	16.901.601
Pembayaran bunga, provisi dan komisi	(7.936.834)	(6.871.738)
Penerimaan dari (pembayaran untuk) transaksi valuta asing - bersih	7.501.669	(4.981.777)
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	2.948.770	2.709.880
Penerimaan dari pendapatan non-operasional	374.596	25.660
Pembayaran untuk beban operasional lainnya	(7.783.339)	(6.569.445)
Pembayaran pajak penghasilan	(2.653.319)	(2.164.177)
Kenaikan/penurunan lainnya yang mempengaruhi kas:		
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	(325.666)	1.397.874
Surat-surat berharga untuk tujuan diperdagangkan	(45.916.424)	(268.095)
Obligasi pemerintah untuk tujuan diperdagangkan	147.144	390.002
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	(669.336)	-
Kredit yang diberikan	(12.955.128)	(28.799.141)
Tagihan akseptasi	(186.060)	(520.851)
Aset lain-lain	278.860	561.262
Kewajiban segera	(243.255)	137.354
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	(49.892)	49.892
Simpanan dari nasabah	31.225.932	23.344.715
Simpanan dari bank lain	(1.848.500)	2.374.434
Surat-surat berharga yang diterbitkan	(11.030)	2.313
Kewajiban lain-lain	565.444	371.740
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(18.467.616)	(1.908.497)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:		
Perolehan aset tetap	(920.005)	(997.572)
Hasil penjualan aset tetap	9.231	7.840
Pembelian penyertaan saham	(448.256)	(22.250)
Pembelian obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual	(8.274.750)	(1.810.483)
yang dijual dan jatuh tempo selama tahun berjalan	11.826.802	17.821.531
Pembelian obligasi pemerintah untuk dimiliki hingga jatuh tempo	(6.454.876)	(9.403.737)
Pembelian surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual	(26.170.618)	(162.861)
Penerimaan dari surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual yang dijual dan jatuh tempo selama tahun berjalan	15.401.446	1.297.445
Pembelian surat-surat berharga untuk dimiliki hingga jatuh tempo	(153.478.609)	(6.198.960)
Penerimaan dari surat-surat berharga untuk dimiliki hingga jatuh tempo yang jatuh tempo selama tahun berjalan	194.275.001	3.691.802
Penerimaan dividen kas	139.621	74.744
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi	25.904.987	4.297.499

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
LAPORAN ARUS KAS - PERUSAHAAN INDUK (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:		
Pembayaran dividen kas	(3.411.135)	(1.549.623)
Pembayaran atas pinjaman yang diterima	(32.992)	(604.190)
Pembayaran tantiem Dewan Komisaris dan Direksi	(72.202)	(56.113)
Pembelian kembali saham beredar	-	(617.589)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(3.516.329)	(2.827.515)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	3.921.042	(438.513)
KAS DAN SETARA KAS, AWAL TAHUN	28.411.025	28.849.538
KAS DAN SETARA KAS, AKHIR TAHUN	32.332.067	28.411.025
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	8.854.381	10.797.525
Giro pada Bank Indonesia	11.489.130	9.668.608
Giro pada bank lain	11.988.556	7.944.892
	32.332.067	28.411.025
INFORMASI TAMBAHAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN YANG TIDAK MEMPENGARUHI KAS:		
Reklasifikasi obligasi pemerintah dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual	10.778.552	16.885.820
Reklasifikasi surat-surat berharga dari kelompok diperdagangkan ke kelompok tersedia untuk dijual	-	534.359
Reklasifikasi surat-surat berharga dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual	2.290.486	1.143.000
Penyisihan saldo laba untuk dividen interim	-	852.784

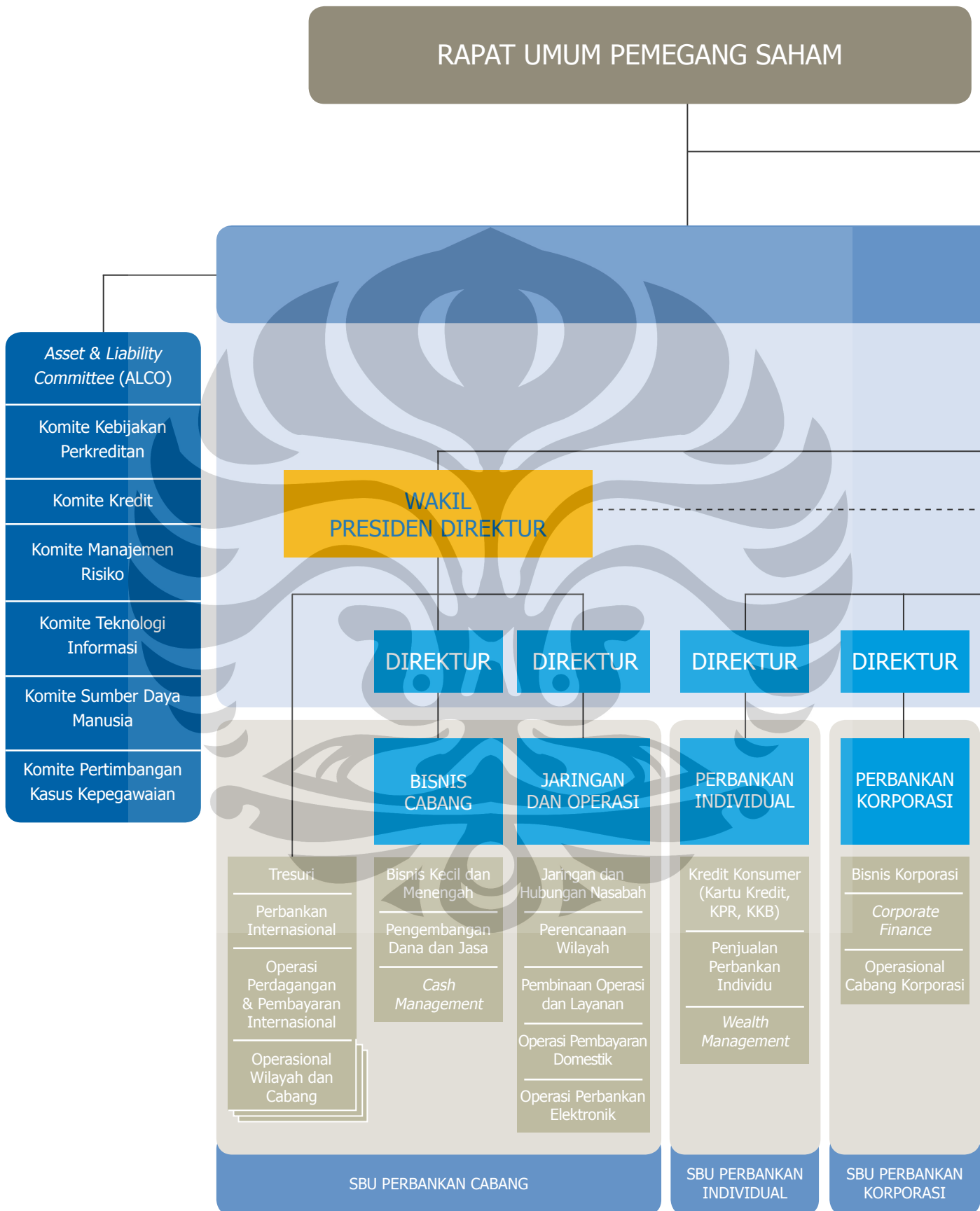


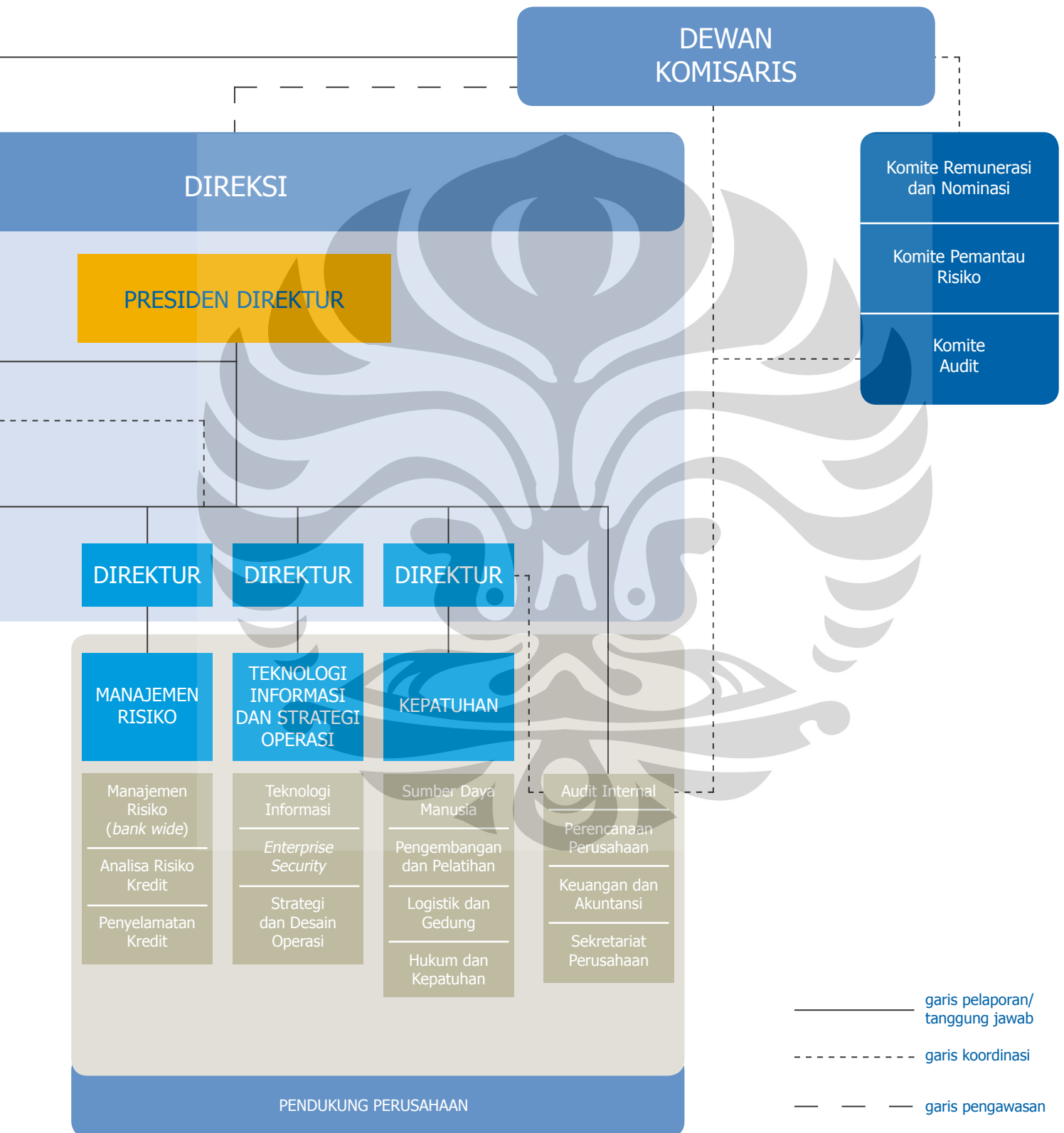
Data Perusahaan

- Struktur Organisasi
- Profil Dewan Komisaris
- Profil Direksi
- Profil Komite Audit
- Profil Komite Pemantau Risiko
- Profil Komite Remunerasi dan Nominasi
- Profil Sekretaris Perusahaan
- Pejabat Eksekutif
- Informasi Pemegang Saham
- Pemegang Saham
- Anak Perusahaan
- Produk dan Layanan
- Kantor Cabang
- Penghargaan

Struktur Organisasi

Per 31 Desember 2009







Eugene Keith Galbraith
Presiden Komisaris

Eugene Keith Galbraith

Eugene Keith Galbraith menjabat sebagai Presiden Komisaris BCA sejak 20 Mei 2002. Sebelum bergabung dengan BCA, beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Bank NISP Tbk (2000-2006), Chairman Asiawise.com dari 1999 sampai 2001, Managing Director ABN-AMRO Asia Securities (1996-1998) dan sebagai Presiden Direktur pada HG Asia Indonesia (1990-1996). Selain itu beliau juga pernah menjadi penasihat Departemen Keuangan (1988-1990) dan penasihat perencanaan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia (1984-1988). Beliau meraih gelar BA dibidang Filosofi (1974), gelar M. Phil dibidang Sejarah Ekonomi (1978) dan gelar PhD dibidang Antropologi (1983) dari Johns Hopkins University, Amerika Serikat.



Tonny Kusnadi
Komisaris

Tonny Kusnadi

Tonny Kusnadi menjabat sebagai Komisaris BCA sejak 25 Juni 2003. Sebelum bergabung dengan BCA, beliau menjabat sebagai Direktur di PT Cipta Karya Bumi Indah (2001-2002) setelah sebelumnya menempati posisi sebagai Komisaris. Selain itu, beliau pernah memangku berbagai jabatan manajerial di beberapa perusahaan lain, antara lain sebagai Presiden Direktur di PT Sarana Kencana Mulya (1999-2001), Chief Manager Corporate Banking di PT Bank Central Asia (1992-1998), General Manager di PT Tamara Indah (1988-1992) dan General Manager di PT Indomobil (1987). Beliau meraih gelar Insinyur dari Universitas Brawijaya, Malang, jurusan Teknik Mesin.



Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen

Cyrillus Harinowo

Cyrillus Harinowo menjabat sebagai Komisaris Independen BCA sejak 25 Juni 2003. Saat ini beliau juga menjadi Komisaris Independen di PT Unilever Indonesia sejak 2004. Sebelum bergabung dengan BCA, beliau berkarya di Bank Indonesia (BI) selama kurang lebih dua puluh lima tahun, antara lain sebagai Kepala Urusan Pasar Uang dan Giralisasi dan Urusan Operasi Pengendalian Moneter (1994-1998), pejabat setingkat Direktur. Selain itu beliau pernah menjadi Alternate Executive Director dan Technical Assistance Advisor di Monetary and Exchange Affairs Department di International Monetary Fund (IMF), Washington (1998-2003). Selama beberapa periode beliau menjadi anggota delegasi sidang Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) dan Consultative Group for Indonesia (CGI), serta sidang tahunan IMF dan Bank Dunia. Beliau juga pernah menjabat berbagai jabatan manajerial di pemerintahan dan nonpemerintahan, dan pernah menjabat sebagai Staf Menteri Perdagangan (1988-1989). Beliau aktif sebagai staf pengajar di beberapa universitas terkemuka di Jakarta, serta menjadi pembicara dan penulis artikel di seminar-seminar maupun forum-forum di dalam dan di luar negeri serta media massa. Beliau menulis buku tentang hutang publik Indonesia (2002), tentang IMF (2004) dan buku "Musim Semi Perekonomian Indonesia" (2005). Beliau menyandang gelar Doktorandus dibidang Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (1977). Beliau meraih gelar Master Development Economics, Center for Development Economics dari Williams College, Massachusetts (1981), dan Doktor Moneter dan Ekonomi Internasional (1985) dari Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika Serikat.



Raden Pardede
Komisaris Independen

Raden Pardede

Raden Pardede menjabat sebagai Komisaris Independen BCA sejak 15 Mei 2006. Beliau menjabat sebagai Komisaris BCA sejak 6 Mei 2004. Komisaris Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dari 2008 sampai 2009 setelah sebelumnya menjabat Wakil Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (2004-2008). Selain itu beliau pernah memegang berbagai jabatan di beberapa perusahaan dan pemerintahan, antara lain Ketua Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia (2004-2005), staf khusus Menko Perekonomian RI (2004-2005), Direktur Eksekutif PT Danareksa (2002-2004), Wakil Koordinator Tim Asistensi Menteri Keuangan RI (2000-2004), Chief Economist dan Kepala Divisi PT Danareksa (1995-2002), Pendiri Danareksa Research Institute (1995), konsultan di World Bank (1994-1995), konsultan di Asian Development Bank (2000-2001), Staf Perencanaan di Departemen Perindustrian RI (1985-1990), dan Process Engineer di PT Pupuk Kujang/Fertilizer Industry (1985). Beliau adalah pengajar tamu di Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia dan Prasetiya Mulya Business School. Beliau meraih gelar Insinyur dari ITB, Bandung, jurusan Teknik Kimia (1984) dan gelar PhD pada bidang Ekonomi (1995) diperoleh dari Boston University, Amerika Serikat.



Sigit Pramono
Komisaris Independen

Sigit Pramono

Sigit Pramono menjabat sebagai Komisaris Independen BCA sejak 20 Agustus 2008. Sebelum bergabung dengan BCA, beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Bank Negara Indonesia (2003-2008). Beliau juga pernah memegang berbagai posisi penting di beberapa bank dan lembaga keuangan lainnya, diantaranya sebagai Direktur Utama Bank Internasional Indonesia (2002-2003), Senior Vice President of Credit Recovery Bank Mandiri (1999-2002), Head of Loan Workout Division Bank Mandiri (1999), Head of Loan Remedial Division Bank Exim (1998-1999), Head of Loan Syndication Departement Bank Exim (1997-1998), Vice President Director Merincorp (Merchant Investment Corporation) (1992-1997), dan sebagai Direktur Exim Leasing (1988-1992). Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro (1983) dan MBA dalam bidang International Business Management dari Prasetiya Mulya Business School (1995).



Djohan Emir Setijoso
Presiden Direktur

Djohan Emir Setijoso

Djohan Emir Setijoso menjabat sebagai Presiden Direktur BCA sejak tanggal 29 Desember 1999. Beliau bertanggung jawab atas audit dan *corporate affairs* sekaligus menangani perencanaan dan pengendalian keuangan. Sebelum bergabung dengan BCA, beliau pernah memegang berbagai jabatan manajerial termasuk Direktur Pengelola pada Bank Rakyat Indonesia (1965-1998) dan Komisaris Utama pada Inter Pacific Bank (1993-1998). Beliau adalah lulusan Institut Pertanian Bogor.



Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur

Jahja Setiaatmadja

Jahja Setiaatmadja menjabat sebagai Direktur BCA sejak tanggal 29 Desember 1999 dan ditunjuk menjadi Wakil Presiden Direktur sejak tanggal 26 Mei 2005. Beliau bertanggung jawab atas Perbankan Cabang, Divisi Tresuri, Divisi Perbankan Internasional, dan kantor-kantor perwakilan di luar negeri. Beliau memegang berbagai jabatan manajerial di BCA sejak tahun 1990. Sebelum bergabung dengan BCA, beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan pada Indomobil (1989-1990) dan memegang berbagai jabatan manajerial sejak 1980 sebelum meninggalkan Grup Kalbe Farma pada tahun 1989 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Keuangan. Beliau memulai karir di tahun 1979 sebagai akuntan pada perusahaan akuntan (PriceWaterhouse). Beliau memperoleh gelar sarjana dalam bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia.



Dhalia Mansor Ariotedjo
Direktur

Dhalia Mansor Ariotedjo

Dhalia Mansor Ariotedjo menjabat sebagai Direktur BCA sejak 5 Juni 2001. Beliau bertanggung jawab atas Grup Bisnis Korporasi dan Corporate Finance. Sebelum bergabung dengan BCA, beliau memegang berbagai jabatan manajerial puncak di Citibank, N.A. di Kuala Lumpur dan Jakarta (1982-1992) dan di Chase Manhattan Bank, Jakarta (1992-2001), termasuk sebagai Vice President, Kepala Bagian Lembaga Keuangan, Sektor Pemerintah dan Corporate Trust pada Chase Manhattan Bank, Jakarta (1992-1996), Vice President – Corporate Banking Group pada bank yang sama (1996-1998), Vice President, Investment Banking Group, JP Morgan Chase, Jakarta (1998-2001). Beliau memperoleh gelar MBA dalam bidang Keuangan dari George Washington University, Washington DC, Amerika Serikat.



Anthony Brent Elam
Direktur

Anthony Brent Elam

Anthony Brent Elam menjabat sebagai Direktur BCA sejak 20 Mei 2002. Beliau bertanggung jawab atas Manajemen Risiko dan Penyelamatan Kredit. Sebelum bergabung dengan BCA, beliau menjabat sebagai Staf Ahli Ketua Badan Penyelesaian Perbankan Nasional (BPPN), sebagai advisor pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (1996-2001), sebagai Vice President pada Dieng Djaya (1994-1996), dan sebagai Vice President Citibank (1986-1994). Beliau adalah lulusan dari Georgetown University dan memperoleh gelar MBA bidang Keuangan dan Bisnis Internasional dari New York University, Amerika Serikat.



Suwignyo Budiman
Direktur

Suwignyo Budiman

Suwignyo Budiman menjabat sebagai Direktur BCA sejak 20 Mei 2002. Beliau bertanggung jawab atas Bisnis Perbankan Cabang yang meliputi Divisi Bisnis Kecil dan Menengah, Divisi Pengembangan Dana dan Jasa, dan Cash Management. Sebelum bergabung dengan BCA, beliau memulai karirnya sebagai Sistem Analis di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejak tahun 1975 dan kemudian memegang berbagai posisi manajerial termasuk Kepala Divisi Teknologi (1992-1995), Staf Khusus Direksi (1995-1996), Pemimpin Wilayah Palembang (1996-1998) dan Kepala Divisi Operasional (1998-2000). Jabatan terakhir beliau adalah Pemimpin Wilayah BRI Jawa Tengah. Selain itu beliau pernah ditugaskan sebagai anggota Tim Kuasa Direksi di BCA (Mei 1998-Juli 1998). Beliau meraih gelar MBA dari University of Arizona, Amerika Serikat.



Subur Tan
Direktur

Subur Tan

Subur Tan menjabat sebagai Direktur BCA sejak 20 Mei 2002. Beliau bertanggung jawab atas Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi Pelatihan dan Pengembangan, Divisi Logistik, serta Hukum dan Kepatuhan. Sejak bergabung dengan BCA di tahun 1986, beliau telah memegang beberapa jabatan manajerial termasuk sebagai Kepala Bidang Kredit Kantor Pusat Operasional (1991-1995), Kepala Biro Hukum (1995-1999) dan Wakil Kepala Divisi Hukum (1999-2000) dengan posisi terakhir sebagai Kepala Satuan Kerja Hukum. Beliau menyelesaikan pendidikan terakhirnya dalam program spesialisasi Notariat Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.



Renaldo Hector Barros
Direktur

Renaldo Hector Barros

Renaldo Hector Barros menjabat sebagai Direktur sejak 8 Februari 2008 setelah sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen BCA dari tahun 2003 hingga 2008. Beliau bertanggung jawab terhadap Strategi dan Desain Operasi, Teknologi Informasi dan Enterprise Security. Sebelumnya, beliau berprofesi sebagai Independent Consultant dengan spesialisasi dibidang sistem operasional perbankan dan teknologi informatika. Beliau pernah menangani proyek konsultasi sistem perbankan di BCA selama beberapa periode (1991-1997, 2000-2003). Proyek-proyek konsultasi lainnya adalah di Lighthouse Management Consulting (2000) dan di Bank of the Orient, San Francisco (1991). Beliau pernah memegang berbagai posisi manajerial antara lain sebagai Senior Vice President/Chief Operations Officer di United Savings Bank (1987-1990), Regional Vice President di Bank of California (1967-1984). Beliau memulai karir di Crocker National Bank, San Francisco setelah lulus terbaik pada program pelatihan Bank Officer. Setelah lulus dari San Jose State University tahun 1963, beliau meneruskan pendidikannya di berbagai institusi keuangan dan perbankan, terakhir di Pacific Coast Banking School, Seattle, WA, Amerika Serikat (1973).



Henry Koenafi
Direktur

Henry Koenafi

Henry Koenafi menjabat sebagai Direktur BCA sejak 13 Februari 2008 dan bertanggung jawab atas Individual Banking BCA yang terdiri dari Unit Bisnis Kredit Konsumer, Unit Bisnis Kartu Kredit, serta Wealth Management. Selain itu beliau juga mensupervisi anak perusahaan BCA yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor, PT BCA Finance. Sebelum bergabung dengan BCA, beliau pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT BCA Finance (2000-2008), Koordinator Tim Pengelola PT Bank Bali Tbk dan anggota Tim Pengelola Bank Jaya pada saat kedua bank tersebut diambil alih oleh BPPN (1999-2000). Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Executive Director PT Bank Ciputra (1998-1999) dan Commercial Banking Director pada Bank Tiara Asia Tbk (1997-1998). Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Katholik Parahyangan (1984) dan melanjutkan pendidikannya pada Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) pada tahun 2000. Selanjutnya beliau menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar MBA dari Monash University, Melbourne, Australia pada tahun 2001.



Armand Wahyudi Hartono
Direktur

Armand Wahyudi Hartono

Armand Wahyudi Hartono menjabat sebagai Direktur sejak 14 September 2009. Beliau bertanggung jawab atas Operasional dan Pengembangan Jaringan. Beliau menjabat sebagai Kepala Perencanaan dan Pembinaan Wilayah BCA dari tahun 2004 hingga 2009. Sebelum bergabung dengan BCA, beliau pernah memangku berbagai jabatan manajerial pada PT Djarum dari tahun 1998 hingga 2004 dengan beberapa posisi sebagai Direktur Keuangan, Deputy Purchasing Director dan Kepala Sumber Daya Manusia. Beliau pernah menjadi analis pada Global Credit Research and Investment Banking, JP Morgan Singapura dari tahun 1997 hingga 1998. Beliau adalah lulusan California University, San Diego (1996) dan meraih gelar Master of Science di bidang Engineering Economic-System and Operation Research (1997) dari Stanford University, Amerika Serikat.

Cyrillus Harinowo, Ketua

(lihat profil Dewan Komisaris)



Herman Yoseph Susmanto
Anggota

Herman Yoseph Susmanto

Herman Yoseph Susmanto menjabat sebagai Anggota Komite Audit BCA sejak 15 Juli 2004. Sebelum bergabung dengan BCA, beliau berkarya di Bank Indonesia (BI) selama kurang lebih dua puluh enam tahun, antara lain sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia London (1996-1998), Direktur Direktorat Pengedaran Uang (1998-2000) dengan posisi terakhir sebagai Staf Ahli Dewan Gubernur (2000-2004). Selain itu beliau juga pernah menjadi pembicara pada International Currency Conference, Venlo, The Netherlands (2000) dan International Polymer Symposium, Melbourne, Australia (1999). Beliau aktif sebagai pengajar di beberapa universitas di Jakarta (1986 - sekarang). Setelah menyelesaikan strata satu di jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1976), beliau meraih gelar Master of Business Management dari Asian Institute of Management, Manila, Filipina (1983).



Rodulphus Aquaviva Supriyono
Anggota

Rodulphus Aquaviva Supriyono

Rodulphus Aquaviva Supriyono menjabat sebagai Anggota Komite Audit BCA sejak 28 Juni 2007. Sejak tahun 1976 beliau menjadi Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) dengan jabatan terakhir sebagai Guru Besar (Profesor) Golongan IVD. Beliau juga menjadi Dosen pada Program Doktor dan Program Magister pada beberapa Perguruan Tinggi di Jakarta dan Yogyakarta. Beliau juga sebagai penulis buku di bidang Akuntansi Biaya, Akuntansi Manajemen, Sistem Pengendalian Manajemen, Manajemen Biaya, Manajemen Strategik, dan Akuntansi Keuangan serta beberapa kali memperoleh penghargaan sebagai penulis buku terbaik. Pengalamannya sebagai akuntan publik dimulai tahun 1976 sampai tahun 1990 dengan bekerja sebagai staf pada Kantor Akuntan Hadori & Co. Pengalamannya sebagai konsultan dimulai tahun 1976 sampai sekarang dengan menjadi staf pada Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) dan Pusat Pengembangan Manajemen (PPM) FEB UGM. Pengalamannya di bidang perbankan diperolehnya pada saat menjadi anggota Komite Audit dan anggota Dewan Pengawas pada suatu bank daerah. Beliau memperoleh gelar Doktorandus Ekonomi Jurusan Akuntansi dari FEB UGM (1976), Magister Ilmu Akuntansi dari Fakultas Pascasarjana UGM (1988), memperdalam Akuntansi Manajemen dan Auditing di the Ohio State University Amerika Serikat (1991), dan Doktor Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) (2003).



Inawaty Handoyo Suwardi
Anggota

Inawaty Handoyo Suwardi

Inawaty Handoyo Suwardi menjabat sebagai anggota Komite Audit BCA sejak 25 November 2008, setelah berkarya di Divisi Audit Internal selama 28 tahun sejak bergabung dengan BCA pada tahun 1980. Sebelumnya, beliau menjabat Kepala Keuangan di PT Naintex (1976-1980). Kontribusi beliau dalam pengembangan profesi audit internal di Indonesia antara lain diwujudkan melalui aktivitas sebagai pengurus di beberapa asosiasi auditor internal seperti Auditors Club Perbanas (1990-2000), Ikatan Auditor Perbankan Indonesia (2005-2008), dan Ikatan Auditor Intern Bank (2008-sekarang). Selain itu, beliau menjadi anggota Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (DS-QIA) periode 2007-2012 dan pengajar di beberapa perguruan tinggi, serta aktif sebagai pembicara pada berbagai kursus atau seminar/konperensi audit internal. Beliau memegang empat sertifikasi profesi dalam bidang auditing yaitu QIA (Qualified Internal Auditor), CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), dan CFSA (Certified Financial Services Auditor). Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung Jurusan Perusahaan/Manajemen (1976) dan Jurusan Akuntansi (1979) serta Magister Manajemen dari Prasetiya Mulya Business School Jakarta (2003).

Profil Komite Pemantau Risiko

Sigit Pramono, Ketua

(lihat profil Dewan Komisaris)



Andreas Eddy Susetyo
Anggota

Andreas Eddy Susetyo

Andreas Eddy Susetyo menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko BCA sejak 21 Juli 2008. Di awal karirnya, beliau bekerja di beberapa perusahaan di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi antara lain PT Daeng Brothers, PT Swadharna Duta Data, dan PT Mitra Info Konsultasi. Pada tahun 1995, beliau bergabung dengan Bank Niaga sebagai Group Head Information & Technology serta kemudian sebagai Direktur Operasional. Beliau kemudian berkarya di Bank Mandiri antara tahun 2000 dan 2006, berturut-turut menjabat sebagai Head of Information Technology, Executive Vice President (EVP) - Information Technology, dan Senior EVP - Chief Technology Officer. Sejak tahun 2006, beliau menjadi anggota The Asian Banker Technology Operation Council serta menjadi Senior Advisor di beberapa bank dan lembaga keuangan di Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya pada tahun 1984 dan meraih gelar magister di bidang Manajemen dari Prasetiya Mulya Business School, Jakarta, tahun 1994.



Endang Swasthika Wibowo
Anggota

Endang Swasthika Wibowo

Endang Swasthika Wibowo menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sejak 28 Juni 2007. Pengalaman beliau dalam bidang pengelolaan risiko sebelumnya adalah sebagai akademisi dan peneliti. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Program Magister Management Perbankan di ABFII, Perbanas, pelatih untuk Risk Management (Certified GARP – BSMR), Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perbanas (2000-2006), Staf ahli bidang Ekuinbank di Badan Legislasi DPR-RI (2000-2005), Komisaris PT Putera Lintas Kemas, Air Freight Forwarder Co (2000-2004), Ketua Jurusan Manajemen, STIE Perbanas (1990-1993). Beliau adalah lulusan Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta tahun 1985 dan meraih gelar Diploma dibidang Banking & Finance (1996) serta gelar Master dibidang Perbankan (1998) dari Monash University, Australia.

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Raden Pardede, Ketua

(lihat profil Dewan Komisaris)

Eugene Keith Galbraith, Anggota

(lihat profil Dewan Komisaris)



Lianawaty Suwono
Anggota

Lianawaty Suwono

Lianawaty Suwono menjabat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 28 Juni 2007. Karirnya di BCA dimulai pada tahun 1991 sebagai trainee dalam Program Pengembangan Manajemen BCA dan kemudian ditunjuk sebagai Business Analyst (1992 - 1996) di Divisi Sistem Informasi. Dalam perjalanan kariernya, beliau sempat menduduki berbagai macam posisi manajerial, seperti Kepala Urusan HR Operations Support (1996 - 1998), Kepala Biro HR Operation System and Support (1998-1999), Kepala Biro Management Development Program dan Kepala Biro Career Development (1999-2000), Kepala Biro HR Resourcing and Development (2000-2002), Wakil Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (2002-2006) dan sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (2006-sekarang). Beliau adalah lulusan Business Information Computing Systems, San Francisco State University, California, USA.

Profil Sekretaris Perusahaan



Raymon Yonarto
Sekretaris Perusahaan

Raymon Yonarto

Raymon Yonarto menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan BCA sejak 1 Januari 2007. Beliau bergabung dengan BCA pada tahun 2005 sebagai Kepala Investor Relations. Sebelumnya, beliau bekerja pada Komite Kebijakan Sektor Keuangan sebagai Vice President antara tahun 2002-2003. Beliau bekerja di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), menangani beberapa aktivitas restrukturisasi perbankan antara tahun 1998-2002, dengan posisi terakhir sebagai Vice President. Antara tahun 1996-1998, beliau bekerja sebagai banking analyst pada PT DBS Securities Indonesia dan bekerja di Departemen Akuntansi, Keuangan dan Audit Internal pada Modern Group antara tahun 1994-1996. Beliau meraih gelar MBA dari Strathclyde University, United Kingdom.

Pejabat Eksekutif

Per 31 Desember 2009

No	Nama	Jabatan
1	Dominicus Harsono Budihardjo	Kepala Kantor Wilayah I, Bandung
2	Antonius Widodo Mulyono	Kepala Kantor Wilayah II, Semarang
3	Joni Handriyanto	Kepala Kantor Wilayah III, Surabaya
4	Gunawan Budi Santoso	Kepala Kantor Wilayah IV, Denpasar
5	FX. Suyanto Sutjiadi	Kepala Kantor Wilayah V, Medan
6	Iwan Senjaya	Kepala Kantor Wilayah VI, Palembang
7	Jimmy Andries	Kepala Kantor Wilayah VII, Malang
8	Darmawan Soetedjo	Kepala Kantor Wilayah VIII, Wisma 46, Jakarta
9	Adhi Gunawan Budirahardjo	Kepala Kantor Wilayah IX, Matraman, Jakarta
10	Honggo Djojo	Kepala Kantor Wilayah X, KPO Asemka, Jakarta
11	Hariyanto Djumali	Kepala Kantor Wilayah XI, Balikpapan
12	Erwan Yuris Ang	Kepala Kantor Wilayah XII, Wisma Asia, Jakarta
13	Andy Untono	Kepala Unit Bisnis Wealth Management
14	Bernardus Rickyadi Widjaja	Kepala Grup Analisa Risiko Kredit
15	David H. Pangestu	Kepala Divisi Teknologi Informasi
16	Deddy Mulyadi Hendrawinata	Kepala Grup Analisa Risiko Kredit
17	Eva Agrayani Sumampouw	Kepala Divisi Perbankan Internasional
18	Gregorius Hariyanto	Kepala Unit Bisnis Kredit Konsumer
19	Haryono Wongsonegoro	Kepala Divisi Bisnis Kecil dan Menengah
20	Hermanto	Kepala Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan
21	Hisar P.H. Pasaribu	Kepala Sentra Operasi Pembayaran Domestik
22	Iwan Kusumobagio	Kepala Divisi Logistik dan Gedung
23	Jacobus Sindu Adisuwono	Kepala Divisi Audit Internal
24	Lena Setiawati	Kepala Divisi Pelatihan dan Pengembangan
25	Lianawaty Suwono	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
26	Linus Ekabranko Windoe	Kepala Divisi Tresuri
27	Ninik Herlani Masli R.	Senior Adviser Pengendalian Mutu dan Pengembangan Audit
28	Raymon Yonarto	Sekretaris Perusahaan
29	Ricki Immanuel	Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi
30	Roy R. F. Kemur	Senior Adviser Satuan Kerja Manajemen Risiko
31	Roy Sugihardja Wiradharma	Kepala Grup Bisnis Korporasi
32	Rudy Susanto	Kepala Grup Analisa Risiko Kredit
33	Santoso	Kepala Unit Bisnis Kartu Kredit
34	Subianto Rustandi	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko
35	Wira Chandra	Kepala Grup Bisnis Korporasi

PENGUMUMAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("Perseroan") - 18 Mei 2009

Pada tanggal 18 Mei 2009 di Grand Ballroom Kempinski, West Mall Grand Indonesia – 11th Floor, Jalan MH. Thamrin no. 1, Jakarta 10310, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT BANK CENTRAL ASIA TBK, suatu perseroan terbatas dan bank yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan").

Dalam Rapat telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

(A) Acara Pertama:

- I. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2008 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan dalam ringkasan penting (highlights) yang telah disampaikan dalam Rapat ini;
- II. Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diperiksa/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA di Jakarta (anggota ERNST & YOUNG GLOBAL) yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2008;
- III. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitt et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 serta dokumen pendukungnya.

(B) Acara Kedua:

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA di Jakarta (anggota ERNST & YOUNG GLOBAL), laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp. 5.776.138.664.596,- (lima trilyun tujuh ratus tujuh puluh enam milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus enampuluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam Rupiah) ("Laba Bersih 2008").
- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2008, yakni sebesar Rp. 5.776.138.664.596,- (lima trilyun tujuh ratus tujuh puluh enam milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam Rupiah), sebagai berikut:
 1. Laba Bersih 2008 tidak disisihkan untuk dana cadangan dikarenakan dana cadangan Perseroan telah melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dan karenanya kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah terpenuhi.
 2. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak berhak mendapat pembagian dividen yaitu treasury stock sejumlah 289.767.000 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu) lembar, dimana total jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan adalah 24.655.010.000 (dua puluh empat milyar enam ratus lima puluh lima juta sepuluh ribu) lembar, sehingga total saham yang berhak memperoleh dividen final yaitu 24.365.243.000 (dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu) lembar, selanjutnya menetapkan sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebesar total Rp 2.436.524.300.000,- (dua trilyun empat ratus tiga puluh enam milyar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah), atau yang merupakan 42,18% (empat puluh dua koma delapan belas persen) dari laba bersih, dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2008 kepada para pemegang saham;

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- (i) jumlah total dividen untuk tahun buku 2008 yang akan dibayar oleh Perseroan akan ditentukan berdasarkan jumlah saham pada tanggal pencatatan (recording date) yang disebut dalam butir (iii) dibawah ini dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (treasury stock);

- (ii) atas dividen tersebut akan diperhitungkan dengan dividen sementara (interim dividend) tahun buku 2008 sebesar Rp. 35,- (tiga puluh lima Rupiah) yang pada tanggal 30 Januari 2009 telah dibayarkan oleh Perseroan kepada para pemegang saham, sehingga sisa dividen untuk tahun buku 2008 yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 65,- (enam puluh lima Rupiah);
 - (iii) sisa dividen untuk tahun buku 2008 akan dibayarkan kepada setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi, tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (treasury stock);
 - (iv) atas sisa dividen tahun buku 2008 tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang menerima pembayaran dividen;
 - (v) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2008, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - (aa) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2008; dan
 - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2008, segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;
3. Dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum berikut perubahannya juncto pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pertimbangan dari Dewan Komisaris setelah memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan Nominasi, selanjutnya Rapat menetapkan maksimal sebesar Rp 72.201.733.307,- (tujuh puluh dua milyar dua ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh Rupiah), yang merupakan maksimal 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) dari Laba Bersih 2008 untuk dibayarkan sebagai tantieme kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2008.
- memberikan kuasa dan wewenang kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q.) FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC, Saudara BAMBANG HARTONO dan Saudara ROBERT BUDI HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menetapkan pembagian tantieme tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2008, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantieme tersebut, dengan ketentuan besarnya tantieme yang akan dibayar kepada Dewan Komisaris dan Direksi akan dilaporkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2009.
4. Sisa dari Laba Bersih 2008 ditetapkan sebagai laba ditahan.

III. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

(C) Acara Ketiga:

- I. Mengangkat Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO selaku Direktur Perseroan, berlaku efektif jika dan sejak tanggal Bank Indonesia memberi persetujuan terhadap pengangkatan tersebut.
- II. Menyatakan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sekarang menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : EUGENE KEITH GALBRAITH;
Komisaris : TONNY KUSNADI;
Komisaris Independen : CYRILLUS HARINOWO;
Komisaris Independen : Doktor RADEN PARDEDE;
Komisaris Independen : SIGIT PRAMONO;

Direksi

Presiden Direktur	: Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO;
Wakil Presiden Direktur	: JAHJA SETIAATMADJA;
Direktur	: DHALIA MANSOR ARIOTEDJO;
Direktur	: ANTHONY BRENT ELAM;
Direktur	: SUWIGNYO BUDIMAN;
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	: TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil SUBUR TAN;
Direktur	: RENALDO HECTOR BARROS;
Direktur	: HENRY KOENAIFI;
Direktur	: ARMAND WAHYUDI HARTONO

-dengan ketentuan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut tidak berubah, yaitu mulai dari tanggal pengangkatan mereka dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2011 (dua ribu sebelas);

Adapun pengangkatan Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO selaku Direktur, berlaku efektif terhitung sejak tanggal Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2011 (dua ribu sebelas);

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya Rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi.

- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diatas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- IV. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir III keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.

(D) Acara Keempat:

- I. (i) Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q.) FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC, saudara BAMBANG HARTONO dan saudara ROBERT BUDI HARTONO selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2009;
- (ii) Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2009.

Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut diatas :

- i. FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q) FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC, Saudara BAMBANG HARTONO dan Saudara ROBERT BUDI HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - ii. Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini;
- III. Besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2009 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2009.

(E) Acara Kelima:

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal.
- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

(F) Acara Keenam:

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara (dividen interim) untuk tahun buku 2009, dengan ketentuan, untuk memenuhi pasal 72 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen interim tersebut akan dibagikan maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2009, kepada para pemegang saham, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara (dividen interim) tersebut, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.

Jakarta, 20 Mei 2009
PT BANK CENTRAL ASIA TBK

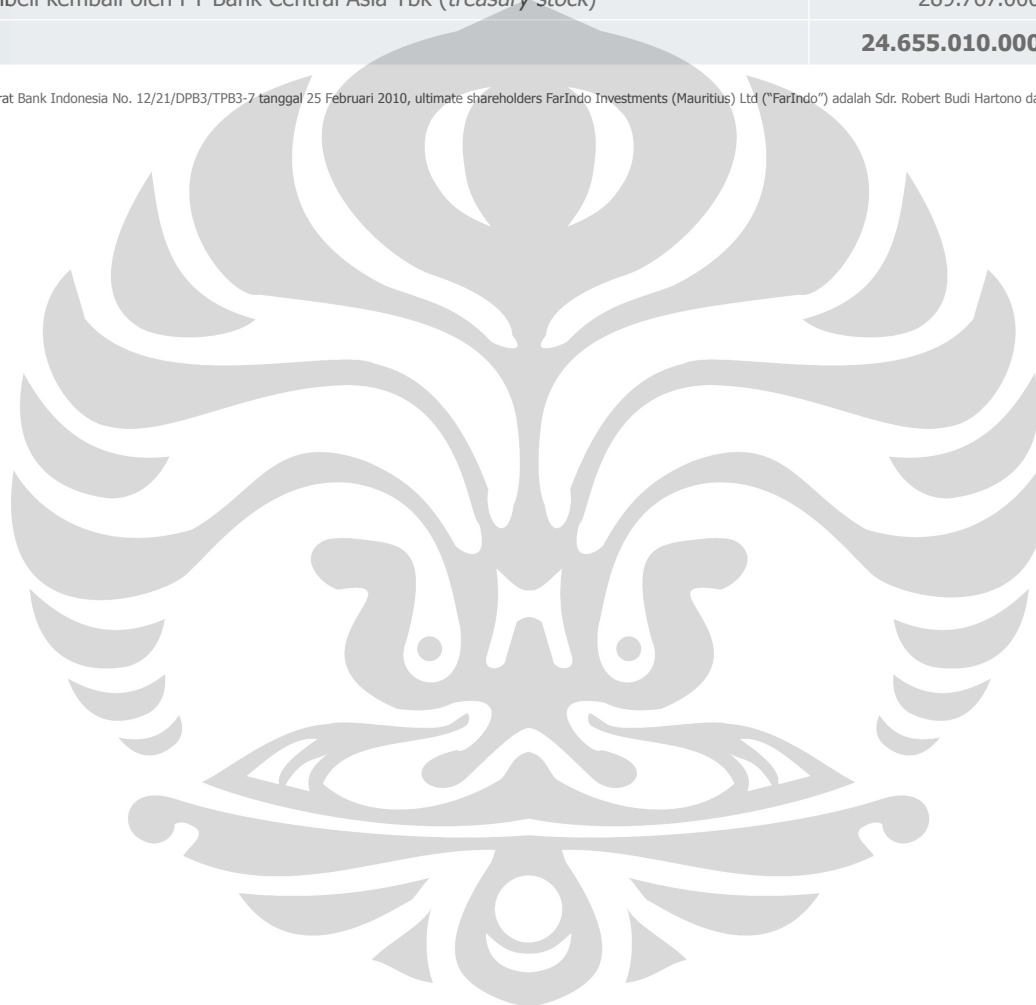
DIREKSI

Pemegang Saham

Per 31 Desember 2009

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
FarIndo Investments (Mauritius) Ltd qualitate qua (qq) Sdr. Robert Budi Hartono dan Sdr. Bambang Hartono*	11.625.990.000	47,15
Anthony Salim	434.079.976	1,76
Publik	12.305.173.024	49,91
Saham dibeli kembali oleh PT Bank Central Asia Tbk (<i>treasury stock</i>)	289.767.000	1,18
Total	24.655.010.000	100,00

* Sesuai dengan Surat Bank Indonesia No. 12/21/DPB3/TPB3-7 tanggal 25 Februari 2010, ultimate shareholders FarIndo Investments (Mauritius) Ltd ("FarIndo") adalah Sdr. Robert Budi Hartono dan Sdr. Bambang Hartono



Anak Perusahaan

Per 31 Desember 2009

Perusahaan	Kepemilikan BCA	Bidang Usaha
PT BCA Finance (dahulu PT Central Sari Finance)	100,00%	Pembiayaan
BCA Finance Limited	100,00%	Money Lender
PT Bank UIB	100,00%*	Bank
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	5,63%	Modal Ventura
PT Aplikanusa Lintasarta (penyertaan tidak langsung melalui Yayasan Perbanas)	0,20%	Komunikasi
PT Sarana Riau Ventura	13,80%	Modal Ventura
PT Sarana Yogya Ventura	8,71%	Modal Ventura
PT Sarana Bengkulu Ventura	6,92%	Modal Ventura
PT Sarana Irian Jaya Ventura	5,63%	Modal Ventura
PT Sarana Maluku Ventura	5,63%	Modal Ventura
PT Sarana NTT Ventura	6,83%	Modal Ventura
PT Sarana Kalbar Ventura	5,70%	Modal Ventura
PT Sarana Kalsel Ventura	2,94%	Modal Ventura
PT Sarana Sumbar Ventura	2,28%	Modal Ventura
PT Sarana Sumut Ventura	2,23%	Modal Ventura
PT Sarana Surakarta Ventura	1,75%	Modal Ventura
PT Bank DBS Indonesia	1,00%	Bank

* Kepemilikan 0,01% telah dijual kepada PT BCA Finance, pada tanggal 16 Desember 2009, namun sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, penjualan ini masih menunggu persetujuan dari Bank Indonesia

Produk dan Layanan

Produk	Keterangan
Produk Simpanan	Tahapan Tahapan Gold Giro Tapres Deposito Berjangka BCA Dollar BCA Ekstra
Bancassurance	Provisa Max / Provisa Platinum Max Optishield/Optishield Platinum Edusave / Edusave Platinum Pro Series Mediasave Plus
Kartu Kredit	BCA Card BCA MasterCard BCA VISA
Perbankan Elektronik	ATM BCA (multifungsi, non tunai dan setoran tunai) Debit BCA Tunai BCA Flazz and GazCard Self Service Passbook Printer (SSPP) EDCBIZZ Internet Banking (KlikBCA Individu dan KlikBCA Bisnis) Mobile Banking (m-BCA) Call Center (Halo BCA) Phone Banking (BCA by Phone Business dan BCA by Phone Priority) SMS Top Up SMS Push Notification
Layanan Transaksi Perbankan	Safe Deposit Box Transfer Remittance Collection and Clearing Bank Notes Travellers' Cheque Virtual Account Open Payment Auto Debit Payroll Services
Fasilitas Kredit	Kredit Pemilikan Rumah Kredit Kendaraan Bermotor Kredit Modal Kerja Kredit Sindikasi Kredit Ekspor Trust Receipt Kredit Investasi Distributor Financing Supplier Financing Dealer Financing Warehouse Financing
Bank Garansi	Bid Bond Performance Bond Advance Payment Bond Pusat Pengelolaan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk (P4BM)
Fasilitas Ekspor Impor	Letter of Credit (L/C) Negotiation Bankers Acceptance Bills Discounting Documentary Collections
Fasilitas Valuta Asing	Spot Forward Swap Produk Derivatif lainnya

Kantor Cabang

Per Desember 2009

KANWIL I 11 Kantor Cabang Utama dan 63 Kantor Cabang Pembantu 1 Kantor Kas Bandung Banjar Ciamis Cianjur Cirebon Garut Indramayu Karawang Kuningan Majalengka Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Tasikmalaya	Semarang Slawi Solo Sragen Sukoharjo Tegal Temanggung Ungaran Wonogiri Wonosari Wonosobo Yogyakarta	Parepare Praya Sanur Singaraja Sorong Tabanan Ternate	KANWIL VII 11 Kantor Cabang Utama dan 47 Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi Batu Blitar Bondowoso Jember Kediri Kertosono Lawang Lumajang Madiun Magetan Malang Nganjuk Ngawi Pare Pasuruan Ponorogo Probolinggo Situbondo Trenggalek Tulung Agung	KANWIL X 7 Kantor Cabang Utama dan 71 Kantor Cabang Pembantu 1 Kantor Kas Jakarta
KANWIL II 13 Kantor Cabang Utama dan 74 Kantor Cabang Pembantu 2 Kantor Kas Ambarawa Banjarnegara Batang Blora Boyolali Brebes Cepu Cilacap Gombong Jepara Karanganyar Kebumen Kendal Klaten Kudus Kutoarjo Magelang Muntilan Pati Pekalongan Pemalang Purbalingga Purwodadi Purwokerto Purworejo Rembang Salatiga	KANWIL III 13 Kantor Cabang Utama dan 81 Kantor Cabang Pembantu 2 Kantor Kas Bangkalan Bojonegoro Gresik Jombang Lamongan Mojokerto Pamekasan Sampang Sidoarjo Sumenep Surabaya Tuban	KANWIL V 13 Kantor Cabang Utama dan 42 Kantor Cabang Pembantu 2 Kantor Kas Banda Aceh Batam Batubara Bengkulu Binjai Bireuen Bukittinggi Dumai Karimun Kisaran Lhokseumawe Medan Padang Pekanbaru Pematang Siantar Tanjung Balai Tanjung Pinang Tebing Tinggi	KANWIL VIII 9 Kantor Cabang Utama dan 81 Kantor Cabang Pembantu 3 Kantor Kas 1 Payment Point Bekasi Cibinong Ciputat Depok Jakarta Sawangan Tangerang	KANWIL XI 7 Kantor Cabang Utama dan 18 Kantor Cabang Pembantu Balikpapan Banjarmasin Bontang Ketapang Palangkaraya Pontianak Samarinda Sambas Sampit Singkawang Tanjung Redeb Tarakan Tenggarong
KANWIL IV 12 Kantor Cabang Utama dan 42 Kantor Cabang Pembantu 2 Kantor Kas Ambon Badung Bitung Denpasar Gianyar Gorontalo Jayapura Kendari Klungkung Kupang Kuta Makassar Manado Mataram Negara Palopo Palu	KANWIL VI 7 Kantor Cabang Utama dan 25 Kantor Cabang Pembantu 1 Kantor Kas Bandar Lampung Bangka Banyuasin Baturaja Bengkulu Curup Jambi Kotabumi Lahat Lubuk Linggau Metro Lampung Muara Enim Palembang Pangkal Pinang Prabumulih Tanjungpandan	KANWIL IX 10 Kantor Cabang Utama dan 99 Kantor Cabang Pembantu 7 Kantor Kas Bekasi Bogor Cibinong Jakarta Karawang Pondok Gede	KANWIL XII 11 Kantor Cabang Utama dan 105 Kantor Cabang Pembantu 7 Kantor Kas Cilegon Jakarta Pandeglang Rangkasbitung Serang Tangerang	KANTOR NON WILAYAH 1 Kantor Cabang Utama Jakarta
				KANTOR PERWAKILAN Singapore Hong Kong

Asian Banking Finance and Informatic (ABFI) Award

- Bank dengan Kinerja Terbaik di Indonesia untuk tahun 2008

ABFI Institute Perbanas & Tempo

Alpha South East Asia Award 2009

- Bank Penyedia Layanan Cash Management Terbaik di Indonesia

Alpha South East Asia

AsiaMoney Polls Award 2009

- Cash Management Bank Lokal Terbaik di Indonesia
- Cash Management Bank Lokal Terbaik di Indonesia berdasarkan pilihan perusahaan menengah
- Cash Management Bank Lokal Terbaik di Indonesia berdasarkan pilihan perusahaan kecil

AsiaMoney

AsiaMoney Corporate Foreign Exchange (FX) Poll 2009

Best Domestic FX Providers

- Peringkat Pertama : Best Domestic Provider of FX Services 2009
- Peringkat Ketiga : Best for Innovative FX Products and Structured Ideas 2009
- Peringkat Ketiga : Best FX Prime Broking Services 2009
- Peringkat Pertama : Best Single-Bank Electronic Trading Platform

AsiaMoney

Indonesia's Most Admired Company (IMAC) 2009

- Bank Nasional Terbaik

Businessweek & Frontier Consulting Group

Banking Call Center Excellence Performance

- Banking Call Centre
- Credit Card Call Centre

Center for Customer Satisfaction & Loyalty (CCSL)

Tax Award 2008

Bank Swasta Umum Terfavorit

Direktorat Jenderal Pajak

Asia Pacific Telecom Deal of the Year 2008

Euromoney

Finance Asia Country Award

Bank Terbaik dan Bank Penyedia Layanan Foreign Exchange Terbaik di Indonesia

Finance Asia

Indonesia Contact Center Association (ICCA) Award

Contact Center Terbaik di Indonesia untuk tahun 2009

- Excellent Achievement Award

Indonesia Contact Center Association

GCG Award

Penerapan GCG Terbaik untuk kategori Lembaga Keuangan

Indonesia Institute for Corporate Directorship

InfoBank Award 2009

Golden Trophy untuk kategori Bank Nasional Papan Atas

InfoBank

The Indonesian Bank Loyalty Award (IBLA) 2009

- Peringkat Pertama "The Best of Indonesian Bank Loyalty Champion" untuk kategori Tabungan dan Bank Konvensional
- Peringkat Ketiga untuk kategori Kartu Kredit

InfoBank dan MarkPlus

Lafferty Cards Awards 2009

- Card Issuer Terbaik
- Card Issuer Paling Terpercaya
- Classic Card Terbaik : Kartu Kredit BCA/Visa Card
- Debit Card Terbaik : Kartu Paspor BCA
- Product Baru Terbaik : Kartu Flazz

Lafferty Group

Marketing Award

- Best Market Driving
- Inovasi Terbaik di Bidang Marketing
- Pengalaman Terbaik di Bidang Marketing

Majalah Marketing

Service Quality Award 2009

- The Diamond Grade untuk Priority Banking
- The Gold Grade untuk Domestic Regular Banking Service

Majalah Marketing & Center for Customer Satisfaction & Loyalty (CCSL)

Top Brand Award 2009

- Kategori Bank dan Lembaga Keuangan, untuk :
- Tahapan BCA sebagai Produk Tabungan Terbaik
 - Produk Deposito Terbaik
 - Produk Kartu Kredit Terbaik

Majalah Marketing & Frontier Consulting Group

4th Indonesia Property and Banking Award 2009

Bank Umum Berkinerja Terbaik

Majalah Property and Bank

Marketing Conference

Marketer Terbaik

MarkPlus

Banking Service Excellence Award

Kinerja Internet Banking Terbaik

MRI (Marketing Research Indonesia) dan InfoBank

Indonesian Customer Satisfaction Award (ICSA) 2009

- Tabungan (Tahapan BCA)
- Kartu Kredit

SWA & Frontier

Indonesia Best Brand Award (IBBA) 2009 untuk kategori

- Indonesia Golden Brand
- Kartu Kredit
- Tabungan

SWA & Lembaga Riset MARS

Word of Mouth Marketing Award 2009

- Tahapan BCA

SWA & OnBee Marketing Research

SWA 100 Wealth Creator Award 2009

- Wealth Creator Company untuk Pemegang Saham

SWA dan Stern Steward & Co

Asian Banker Excellence in Retail Financial Services Awards 2009

- Bank retail terbaik di Indonesia Tahun 2008
- Penghargaan prestisius enam tahun berturut-turut atas pertumbuhan yang kuat dalam *retail core funding* ditengah krisis yang didukung oleh kebijakan konservatif dan jangkauan jaringan yang luas
- Prestasi terbaik dalam program penyedia jasa keuangan retail

The Asian Banker

Visa International Most Successful Co-Brand Card in 2008

Performance and sales volume Kartu Visa Co-Brand BCA Carrefour

Visa International

CEO & Perusahaan Idaman 2009

- CEO Terbaik 2009 : Djohan Emir Setijoso
- Perusahaan Idaman 2009

Warta Ekonomi

Agen Penjual Obligasi Negara Ritel Terbaik Seri ORI006

Menteri Keuangan Republik Indonesia

2009

Laporan Tahunan



PT Bank Central Asia Tbk

Kantor Pusat
Menara BCA
Grand Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia
Tel. 62 21 235 88000
Fax. 62 21 235 88300

www.klikbca.com



KEBIJAKAN PRIVASI DAN PENGAMANAN

Berikut ini adalah kebijakan dan praktek yang dilakukan PT Bank Central Asia, Tbk (“BCA”) untuk menunjukkan komitmen BCA di dalam menjaga dan memelihara privasi dan keamanan Anda pada saat Anda mengunjungi situs dan internet banking BCA.

I. Kebijakan Privasi

BCA tidak menjual, menukar atau memperlihatkan segala informasi yang berkaitan dengan nasabah atau pengunjung situs dan internet banking BCA.

BCA tidak melacak pengunjung situs BCA.

Selama Anda login ke internet banking BCA, BCA akan menggunakan cookie yang akan berakhir pada saat Anda logout.

Semua transaksi perbankan Anda dan informasi rekening lainnya disimpan secara rahasia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta kebijakan internal BCA.

II. Pengamanan

1. Sistem Pengamanan

BCA menggunakan 3 (tiga) lapis sistem pengamanan untuk melindungi akses dan transaksi Anda di internet banking BCA yaitu :

a. Secure Socket Layer (“SSL”)

SSL adalah teknologi pengamanan yang ‘mengacak’ jalur komunikasi antar komputer sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak lain.

b. User ID dan Personal Identification Number (“PIN”)

c. One Time Password yang dihasilkan oleh KeyBCA

One-time Password adalah teknologi pengamanan yang selalu menghasilkan password yang berbeda setiap kali alat/token pengamannya digunakan.

Karena banyaknya variasi browser internet yang ada, sulit untuk menyediakan internet banking yang mengikuti keamanan masing-masing browser. Saat ini BCA hanya menyediakan sarana internet banking yang lebih cocok diakses dengan menggunakan Microsoft Internet Explorer versi 6 atau yang terbaru. BCA mohon maaf atas ketidaknyamanan ini.

2. Proteksi Komunikasi Internet Banking BCA

BCA menggunakan teknologi enkripsi Secure Socket Layer (SSL) 128 bit untuk memproteksi komunikasi antara komputer Anda dan server BCA selama Anda mengakses internet banking BCA.

Untuk memastikan proteksi komunikasi selama Anda mengakses internet banking BCA, Anda dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Periksa sertifikat SSL secara teratur untuk memastikan bahwa Anda menerima sertifikat SSL yang sah yang telah terdaftar untuk IBANK.KLIKBCA.COM.
- b. Apabila Anda menerima pesan yang menjelaskan bahwa sertifikat tidak sah, dimohon Anda tidak melanjutkan akses internet banking BCA.
- c. Pastikan bahwa Anda telah mengetik alamat yang benar yaitu **<https://ibank.klikbca.com>**.
- d. Pastikan bahwa pada browser Anda terdapat gambar gembok/kunci yang mengindikasikan bahwa halaman yang Anda akses saat ini dienkripsi dengan menggunakan SSL. Jika Anda tidak melihat gambar gembok/kunci, dimohon Anda untuk logout dan kemudian melakukan login kembali.
- e. Pastikan bahwa Anda telah logout saat meninggalkan komputer Anda meskipun hanya sesaat.

f. Sebaiknya Anda tidak mengakses internet banking BCA di warnet atau di jaringan yang tidak pasti keamanannya.

3. Proteksi Akses Internet Banking BCA

BCA mewajibkan Anda untuk memasukkan User ID dan PIN sebelum Anda dapat melakukan akses ke internet banking BCA.

Untuk memastikan proteksi bagi Anda dalam melakukan akses ke internet banking BCA, mohon lakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jagalah kerahasiaan User ID dan PIN Anda, jangan diberitahukan kepada orang lain, kecuali untuk melakukan transaksi-transaksi tertentu yang mengharuskan Anda untuk memberitahukan User ID milik Anda, antara lain untuk transaksi pembelian barang secara on-line, dan jangan disimpan dalam Internet Explorer Anda.
- b. Jangan memberitahukan PIN atau sebagian PIN Anda kepada orang lain, walaupun orang tersebut mengaku sebagai karyawan BCA. BCA tidak pernah menanyakan PIN Anda.
- c. Gantilah PIN Anda secara periodik di internet banking BCA pada menu Administrasi-Ganti PIN atau jika Anda tidak yakin terhadap kerahasiaan PIN Anda. Jangan menggunakan PIN yang mudah diterka seperti: 111111, 222222, 123456, 654321, tanggal lahir, nomor mobil, alamat dan lain-lain. Jangan menuliskan PIN Anda di tempat dimana orang lain dapat membacanya.
- d. Gunakan PIN internet banking BCA yang berbeda dengan PIN yang Anda gunakan untuk mengakses situs lain.
- e. Hubungi Halo BCA jika Anda lupa PIN atau PIN Anda terblokir. Ikuti instruksi mereka bagaimana cara untuk mengaktifkan fasilitas internet banking Anda kembali.

4. KeyBCA dan Proteksi KeyBCA

BCA mewajibkan Anda menggunakan security token yang dinamakan KeyBCA untuk menghasilkan One Time Password yang digunakan untuk mengotentikasi setiap transaksi finansial Anda dan sebagai tanda persetujuan Anda terhadap transaksi yang dilakukan.

Anda harus memasukkan One Time Password yang dihasilkan oleh KeyBCA jika Anda melakukan transaksi finansial seperti : transfer dana, pembelian dan pembayaran dan transaksi non finansial seperti : aktivasi KeyBCA, tambah koneksi, hapus koneksi dan registrasi inquiry tagihan kartu kredit BCA

Transaksi yang dapat dilakukan tanpa menggunakan KeyBCA adalah : informasi rekening, status transaksi, history transaksi, administrasi dan email

Untuk memastikan proteksi bagi KeyBCA Anda, mohon lakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. KeyBCA Anda diamankan dengan PINnya sendiri. Gantilah PIN KeyBCA Anda segera setelah Anda menerima KeyBCA, dan gantilah PIN KeyBCA secara periodik atau jika Anda tidak yakin terhadap kerahasiaan PIN Anda. Jangan menggunakan PIN yang mudah diterka seperti: 111111, 222222, 123456, 654321, tanggal lahir, nomor mobil, alamat dan lain-lain. Jangan menuliskan PIN Anda di tempat dimana orang lain dapat membacanya.
- b. Jangan meminjamkan KeyBCA Anda kepada orang lain.
- c. Jagalah kerahasiaan PIN KeyBCA Anda, jangan diberitahukan kepada orang lain.
- d. Jangan memberitahukan PIN atau sebagian dari PIN KeyBCA Anda kepada orang lain, walaupun orang tersebut mengaku sebagai karyawan BCA. BCA tidak pernah menanyakan PIN KeyBCA Anda.
- e. Hubungi Halo BCA jika KeyBCA Anda hilang, rusak atau terblokir. Ikuti instruksi mereka bagaimana mendapatkan KeyBCA baru atau mengaktifkan KeyBCA Anda kembali.

Cara menggunakan KeyBCA dapat dilihat pada petunjuk yang disertakan dengan KeyBCA yang Anda terima.

5. Alamat E-mail dan Proteksi Informasi Transaksi

BCA mewajibkan Anda untuk memberikan alamat e-mail Anda kepada BCA. BCA akan menggunakan alamat e-mail Anda untuk mengirimkan informasi atas transaksi finansial yang telah Anda lakukan melalui internet banking BCA dan beberapa transaksi non finansial yaitu saat login pertama kali, perubahan alamat e-mail, tambah koneksi, dan lain-lain. Selain itu BCA juga menggunakan alamat e-mail Anda untuk kepentingan promosi, undangan gathering dan informasi-informasi lainnya.

Untuk memastikan proteksi pengiriman informasi ke alamat e-mail Anda, mohon lakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berikan kepada BCA alamat e-mail pribadi Anda. Jangan menggunakan alamat e-mail palsu.
- b. Ubahlah segera alamat e-mail Anda di internet banking BCA jika Anda mengganti alamat e-mail Anda.

- c. Jika Anda menghubungi BCA melalui e-mail, jangan mengirimkan informasi rekening Anda yang sifatnya rahasia atau sensitif, termasuk PIN Anda.

6. Situs BCA

Di dalam situs BCA, BCA menyediakan URL link ke situs lain yang tidak dikontrol oleh BCA. BCA tidak bertanggung jawab atas isi dan keamanan dari situs tersebut. Jika Anda mengakses situs tersebut, silakan memeriksa kebijakan privasi dan pengamanan mereka.

Dalam hal Anda mengakses situs atau internet banking BCA melalui URL link dari situs lain, pastikan kebenaran alamat yang Anda akses yaitu **<http://www.klikbca.com>** atau **<https://ibank.klikbca.com>**.

BCA dapat mengubah kebijakan privasi dan informasi pengamanan ini setiap saat untuk tetap menyesuaikan dengan situasi dan teknologi terbaru. Anda selalu dapat meninjau informasi dan kebijakan privasi BCA yang terbaru di <https://ibank.klikbca.com/privacy.html> atau Anda dapat memintanya dengan mengirimkan email ke klikbca@bca.co.id.

Kiat-Kiat Menggunakan Internet Banking BCA Dengan Lebih Aman

Pada dasarnya sistem maupun jaringan internet banking BCA telah menggunakan pengamanan yang seoptimal mungkin. Kondisi pengamanan internet banking BCA selalu dipantau dan ditingkatkan sejalan dengan perkembangan teknologi dan ancaman yang ada.

Ancaman juga dialami oleh semua pengguna internet termasuk internet banking BCA. Oleh karena itu kami dari pihak BCA meminta perhatian Anda sebagai pengguna internet banking BCA atas beberapa jenis ancaman yang mungkin Anda temui ketika mengakses internet. Kiat-kiat pengamanan yang dapat dilakukan sewaktu Anda menggunakan internet banking BCA, adalah sebagai berikut :

1. Phising.

Phising adalah cara-cara penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi rahasia seorang nasabah seperti User ID dan PIN. Ada beberapa cara antara lain :

- Berpura-pura sebagai seseorang dari pihak bank dan meminta data-data nasabah dengan alasan-alasan tertentu
- Mengirim email yang berisi login screen dan meminta nasabah melakukan login dengan memasukkan User ID dan PIN.
- Mengirim URL link ke situs yang dibuat semirip mungkin dengan situs resmi milik bank namun ternyata palsu.

Kiat-kiat pengamanan:

- Perlu diketahui bahwa BCA tidak pernah mengirim email seperti yang dijelaskan diatas kepada nasabah. Apabila Anda menerima email semacam itu yang kelihatannya berasal dari BCA, Anda dapat langsung menghapus email tersebut.
- Apabila Anda terlanjur mengisi informasi yang diminta atau merasa bahwa User ID dan PIN Anda sudah tidak rahasia lagi, segera hubungi Halo BCA. Pastikan situs yang Anda kunjungi adalah <http://www.klikbca.com> dan <https://ibank.klikbca.com> dan pastikan juga bahwa gambar gembok/kunci pada browser Anda utuh ketika mengakses <https://ibank.klikbca.com>.

2. Virus / Worm

Virus Komputer adalah program-program komputer yang dibuat dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada umumnya virus merusak sistem operasi, aplikasi dan data di komputer yang terinfeksi. Virus dapat menyebar melalui banyak media, antara lain : e-mail, disket, CD, USB drive, Flash memory, program dari internet, maupun jaringan, dan juga dari halaman situs yang 'jahat'.

Beberapa contoh dampak dari infeksi virus:

- Komputer menjadi tidak stabil dan sering 'hang' (macet).
- Komputer menjadi lambat.
- Data di harddisk terhapus.
- Program aplikasi tidak dapat digunakan.

Yang mirip dengan virus adalah Worm yang dibuat untuk dapat menyebar dengan cepat ke banyak komputer. Walaupun umumnya worm tidak menimbulkan kerusakan seperti virus, namun worm dapat digunakan untuk membawa berbagai macam muatan/attachment termasuk yang berbahaya.

Kiat-kiat pengamanan:

- Gunakan anti-virus ter-update di komputer Anda, dan pastikan bahwa komputer Anda di-scan secara real-time.
- Banyak virus yang datang melalui e-mail yang diterima, sehingga Anda harus lebih hati-hati pada waktu menggunakan e-mail. Hapus e-mail yang mencurigakan atau yang datang dari pengirim yang tidak dikenal, dan scan e-mail attachment sebelum dibuka.
- Gunakan firewall pada sistem operasi di komputer Anda atau instal personal firewall dan pastikan bahwa pengaturan firewall yang terpasang dapat mengamankan PC Anda.
- Sebaiknya Anda tidak mengakses atau bahkan mendownload file/program-program di internet dari situs yang tidak dikenal/tidak dapat diyakini keabsahannya.
- Scan file-file yang berasal dari disket, CD maupun USB drive yang Anda terima.
- Pastikan bahwa sistem operasi maupun aplikasi di komputer Anda sudah dilindungi dengan sistem proteksi terkini.

3. Spyware

Spyware adalah sejenis komputer program yang diprogram untuk 'mencuri' informasi-informasi penting/pribadi dari komputer yang terinfeksi dan mengirimnya ke lokasi tertentu di internet untuk kemudian diambil oleh pembuatnya. Informasi yang menjadi target utama contohnya: nomor kartu kredit, User ID dan PIN/password, nomor rekening, alamat e-mail, dan lain-lain.

Spyware dapat terinstall melalui e-mail attachment, program yang diinstall dari sumber-sumber yang tidak jelas, ataupun oleh web site yang 'jahat'.

Virus dapat diprogram untuk menyebarkan spyware. Namun, berbeda dengan virus yang sifatnya lebih merusak, spyware bekerja secara diam-diam agar tidak terlacak sehingga lebih mudah mengumpulkan informasi yang diinginkan sang pembuat/penyebarkan spyware.

Kiat-kiat pengamanan:

Pengamanan terhadap spyware sama dengan pengamanan terhadap virus/worm.

4. Bot (roBot)

Bot adalah sejenis komputer program yang apabila terinstal di PC Anda, dapat menyebabkan PC Anda dikontrol oleh orang lain secara remote melalui jaringan. Sang pembuat/penyebarkan Bot akan dapat melakukan apa saja dengan PC Anda.

Umumnya PC-PC yang telah terkontrol (dikenal sebagai Botnet) digunakan untuk mengirim SPAM, Virus, Worm atau untuk menyerang komputer-komputer lain yang terkoneksi ke jaringan.

Kiat-kiat pengamanan:

Pengamanan terhadap spyware sama dengan pengamanan terhadap virus/worm.

ONLINE PRIVACY AND SECURITY

The policies and practices adopted by PT Bank Central Asia, Tbk (“BCA”) as the following reflect the commitment of BCA in keeping and maintaining your privacy and security once you access BCA websites and BCA internet banking.

I. Policy on privacy

BCA will neither sell, exchange nor disclose all information related to the customers or BCA website and internet banking visitors.

BCA does not trace BCA website visitors.

During your log in to the BCA internet banking, BCA will use cookie which will end once you log out.

All your banking transactions and information on other accounts are kept confidential in accordance with the regulations having the force of law applicable in Indonesia and BCA internal policies.

II. Security

1. Security System

BCA employs 3 (three) layer security systems in order to protect your access and transactions with BCA internet banking, namely:

- a. Secure Socket Layer (“SSL”)
SSL is a security technology that “encrypts” inter-computer communication channel in order to make it illegible by others.
- b. User ID and Personal Identification Number (“PIN”).
- c. One Time Password produced by KeyBCA.
One-time Password is a security technology which at all times produces different password once its security token is activated.

Due to the various types of internet browser available, it is difficult to provide internet banking that is in line with the security of each browser. BCA currently only provides internet banking facility which is more compatible if accessed by using Microsoft Internet Explorer version 6 or its most recent type. BCA apologizes for this inconvenience.

2. Protection of BCA Internet Banking Communication

BCA uses the encryption technology of Secure Socket Layer (SSL) 128 byte to protect the communication between your computer and the BCA server during your access to the BCA internet banking.

To ensure protection of communication during your access to the BCA internet banking, you can do as follows:

- a. Check the SSL certificate on regular basis to make sure that you have received the valid SSL certificate which has already been registered for

IBANK.KLIKBCA.COM.

b. Should you receive the message confirming invalidity of the certificate, please do not proceed access to BCA internet banking.

c. Make sure that you have typed the correct address of **<https://ibank.klikbca.com>**.

d. Make sure that your browser shows the image of a lock/key indicating that the page that you access has been currently encrypted by the use of SSL. Should you fail to view the lock/key image, please log out and repeat to log in.

e. Make sure you have logged out once you leave your computer even for a short while.

f. You are not advised to access the BCA internet banking at an internet stall (Warnet) or at such other network with insufficient security.

3. Protection of Access to the BCA Internet Banking

BCA requires you to enter User ID and PIN prior to access to the BCA internet banking.

To ensure protection of your access to the BCA internet banking, please do the following:

- a. Keep confidential your User ID and PIN, do not disclose to others, except for doing certain transaction in which required you to inform your personal User

ID, for instance, online shopping transaction, and do not save it in your Internet Explorer.

b. Never disclose your PIN or part of the PIN to other person even if such person admits that she/he is a BCA employee. BCA will never question your PIN.

c. Change periodically your PIN at the BCA internet banking under administration - PIN change menu or in case you are not sure about the confidentiality of your PIN. Never use PIN which is easy to guess such as: 111111, 222222, 123456, 654321, birthdays, license plate numbers, addresses and so forth. Never write down your PIN at such places that are easy for others to read.

d. Use PIN for the BCA internet banking that is different from that you use to access other websites.

e. Contact Halo BCA if you forget your PIN or in case it is blocked. Follow their instruction as to how to reactivate your internet banking facility.

4. KeyBCA and Protection of KeyBCA

BCA requires you to use security token called KeyBCA to produce One Time Password used to authenticate each of your financial transactions and as evidence of your consent for the completed transaction.

You should enter One Time Password produced by KeyBCA if you engage in financial transactions such as: fund transfer, purchase and payment and non-financial transaction such as: KeyBCA activation, add connection, delete connection and registration of the BCA credit card billing inquiry.

Transactions which can be completed without using KeyBCA include: account information, transaction status, transaction history, administration and e-mail.

To ensure protection of your KeyBCA, please do the following:

- a. Your KeyBCA is secured by its own PIN. Change your KeyBCA PIN immediately following receipt of your KeyBCA, and change the KeyBCA PIN periodically or in case you are not sure about the confidentiality of your PIN. Never use PIN which is easy to guess such as: 111111, 222222, 123456, 654321, birthdays, license plate numbers, addresses and so forth. Never write down your PIN at such places that are easy for others to read.
- b. Never lend your KeyBCA to others.
- c. Keep confidential your KeyBCA PIN, do not disclose to others.
- d. Never disclose your PIN or part of the KeyBCA PIN to other person even if such person admits that she/he is a BCA employee. BCA will never question your KeyBCA PIN.
- e. Contact Halo BCA if you forget your KeyBCA PIN or in case it is blocked. Follow their instruction as to how to get a new KeyBCA or to reactivate your KeyBCA.

Instruction to operate KeyBCA can be viewed in the guide furnished with the KeyBCA upon receipt.

5. E-mail Address and Protection of Transaction Information

BCA requires you to provide your e-mail address to BCA. BCA will use your e-

mail address to send information on financial transactions completed through the BCA internet banking and various non-financial transactions during first log in, change of e-mail address, add connection, and so forth. In addition, BCA also uses your e-mail address for the purpose of promotion, gathering invitation, and other information.

To ensure protection of transmission of information to your e-mail address, please do the following :

- Provide BCA with your personal e-mail address. Never use fake e-mail address.
- Should you change your e-mail address, change immediately your e-mail address with the BCA internet banking.
- If you contact BCA through e-mail, do not send information on your account which is confidential or sensitive in nature, including your PIN.

6. BCA Website

In the BCA website, BCA provides URL link to other websites which are not under the control of BCA. BCA is not responsible for the content and security of such websites. Should you access such websites, please check their privacy and security policies.

If you access the BCA website or internet banking through URL link from other websites, make sure that the address you access is correct, namely **<http://www.klikbca.com>** or **<https://ibank.klikbca.com>**.

BCA may at any time change this policy on privacy and security of information in order to make adjustment to the latest situation and technology. You may at all times view the BCA latest information and policy on privacy at <https://ibank.klikbca.com/privacy.html> or you

may request it by sending e-mail to klikbca@bca.co.id.

Tips for the Use of the BCA Internet Banking with Better Security

Basically, the BCA internet banking system or network has applied maximum security. The condition of the BCA internet banking security is at all times monitored and improved in line with the development of technology and the current threat.

The threat is also experienced by all internet users including those of the BCA internet banking. Therefore, BCA requests you as the BCA internet banking user to be on alert over the various types of threats which may occur when accessing internet. Tips for security when you access the BCA internet banking include as follows :

- **Phising.**
Phising deals with fraudulent means used by certain parties to obtain confidential information on a customer such as User ID and PIN. Those various means include :
 - Disguised as a bank staff asking for the customer's data for a particular purpose.
 - Sending e-mail containing log in screen and asking the customer to log in by entering User ID and PIN.
 - Sending URL link to a website that resembles the bank's official website which is allegedly fake.

Tips for security :

- Please be advised that BCA will never send such kind of e-mail as described above to the customer. Should you receive e-mail of that kind which seems to be originated from BCA, you can directly delete it.

- Should you have already filled in the information requested or feel that your User ID and PIN have no longer been confidential, immediately contact Halo BCA. Make sure that the website you access is **<http://www.klikbca.com>** and **<https://ibank.klikbca.com>** and also make sure that the lock/key image of your browser is intact during access to **<https://ibank.klikbca.com>**.

Virus / Worm

Computer Virus is computer programs made with certain purposes. Generally, virus damages the operation system, application and data in the infected computer. Virus may spread through various media such as : e-mail, disc, CD, USB drive, Flash memory, program from internet or network and also from “mean” website page.

Various instances of impacts from virus infection include :

- The computer becomes unstable and frequently “hang” (blocked).
- The computer becomes slow.
- The data in harddisk is deleted.
- The application program is not usable.

Worm which looks like a virus is made in order to be able to spread fast to many computers. Even though in general worm does not cause damages as the virus does, it may be used to carry various attachments including those of dangerous kind.

Tips for security :

- Use updated anti-virus in your computer and make sure that your computer is scanned at real-time.
- A lot of viruses emerge through received e-mail, accordingly you should be more cautious in using e-mail. Delete suspicious e-mail or e-mail coming from an unknown sender, and scan the e-mail attachment prior to opening.
- Use firewall on the operation system of your computer or install personal firewall and make sure that the configuration of the installed firewall is able to secure your

PC.

- You are not advised to access or download files/programs on the internet from unknown/allegedly illegal websites.
- Scan files originated from disc, CD or USB drive that you receive.
- Make sure that both the operation system and application in your computer has been protected by the most recent protection system.

3. Spyware

Spyware is a kind of computer program programmed to “steal” important/personal information from an infected computer and send it to a particular location in the internet to be afterwards taken by its maker. The information which becomes the main target includes: credit card number, User ID and PIN/password, account number, e-mail address and so forth.

Spyware may be installed through e-mail attachment, the program being installed from unclear sources or by “mean” website.

Virus may be programmed to spread spyware.

However, unlike virus which is more destructive in nature, spyware works silently so that it will not be traceable and thereby will be much easier to gather the information as desired by those making/spreading spyware.

Tips for security:

Security over spyware is similar to that over virus/worm.

4. Bot (roBot)

Bot is a kind of computer programs which may, if installed in your PC, cause your PC be remotely controlled by others through network. The Bot maker/ spreader may do unlimited actions with your PC.

In general, the controlled PCs (known as Botnet) are used to send SPAM, Virus,

Worm or attack other computers connected with the network.

Tips for security:

Security over spyware is similar to that over virus/worm.

Copyright © 2001  **BCA** All Rights Reserved



Berikut ini adalah jawaban atas permohonan data:

1. Sejak kapan BCA menggunakan KlikBCA?
Sejak bulan Agustus 2000.
2. Apa yang menjadi penyebab/pertimbangan BCA sehingga menggunakan KlikBCA?
BCA selalu memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan dan pada masa itu dibidang teknologi sudah meningkat, sehingga fasilitas internet pun semakin berkembang. Untuk itu BCA meluncurkan produk baru yaitu Internet Banking BCA, yang disebut KlikBCA. Dengan KlikBCA, nasabah BCA dapat melakukan transaksi perbankan (kecuali penarikan tunai), tanpa harus datang ke ATM BCA ataupun Kantor Cabang BCA serta dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja melalui internet.
3. Bagaimana sistem/mechanisme dan prosedur KlikBCA, termasuk syarat & ketentuan serta sistem pengamanannya?
Sistem KlikBCA menggunakan pengamanan internet SSL 128 bit encryption, mengenai prosedur KlikBCA dapat dilihat pada: <http://www.klikbca.individual/silver/product.html?s=11>
Syarat & Ketentuan dapat dilihat pada: <http://www.klikbca.com/individual/silver/product.html?pid=209>
4. Apa persamaan dan perbedaan klikBCA dibandingkan internet banking yang dipergunakan bank lain, seperti mandiri dan lain-lain?
Persamaannya transaksi perbankan yang dapat diakses via website dengan koneksi internet baik transaksi non finansial maupun finansial. Perbedaannya ada pada fitur-fitur internet banking yang cukup beragam, seperti pembayaran e-Commerce di KlikBCA sebagai contoh yang membedakannya. Selain itu perbedaan ada pada proteksi masing-masing bank, sebagai contoh di BCA menggunakan KeyBCA (hard token) sebagai pengamanan transaksi finansial, yang tidak diterapkan di semua bank di Indonesia.

Bersambung ke halaman berikutnya

Jawaban Permohonan Data a/n Sdri Dessi Syafri, Sambungan

Jawaban atas Permohonan Data
(sambungan)

5. Apa saja jenis-jenis gangguan yang pernah dialami KlikBCA selama ini, termasuk upaya-upaya menjebol atau merusak sistem KlikBCA?
 - *Problem jaringan, dimana nasabah tidak dapat akses ke KlikBCA*
 - *Sampai saat ini belum pernah ada hacker yang dapat menjebol sistem KlikBCA*

6. Apa saja keluhan-keluhan yang pernah disampaikan nasabah dalam menggunakan KlikBCA kepada BCA?

Keluhan2:

 - *Diharapkan mutasi lebih dari 31 hari*
 - *User Id KlikBCA dapat ditentukan sendiri*
 - *Permintaan penambahan fitur*
 - *Subjek notifikasi internet banking belum jelas*

7. Bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian masalah yang ditempuh BCA dan nasabah sehubungan dengan penggunaan KlikBCA?
 - *Bila ada keluhan disampaikan via Halo BCA setelah ditelusuri masalahnya kami sampaikan kembali kepada nasabah, sejauh ini nasabah menerima dengan baik.*
 - *Apabila masalah tersebut adalah kesalahan nasabah maka Halo BCA akan menjelaskan secara detail kepada nasabah.*
 - *Apabila masalah tersebut terkait dengan problem system KlikBCA, maka team KlikBCA akan menelusuri penyebab tersebut dan melakukan perbaikan sistem dan penyelesaian kepada nasabah pun akan ditangani dengan baik sesuai service level keluhan nasabah.*

8. Ada PBI yang mengatur risiko penggunaan TSI, internet banking, penyesuaian apa saja yang dilakukan KlikBCA sehubungan dengan adanya aturan tersebut?

KlikBCA dirancang untuk kenyamanan nasabah dan tentunya tidak menyimpang dari peraturan PBI, seperti:

 - * *Risiko operasional,*
 - * *2 faktor otentifikasi (user ID, KeyBCA, dan PIN),*
 - * *Meningkatkan pengamanan KlikBCA dengan menggunakan KeyBCA yang diberikan limit transaksi.*

9. Bagaimana pandangan BCA atas PBI itu, adakah kritik sebagai masukan guna penyempurnaannya?

PBI ini sangat baik untuk panduan operasional layanan perbankan di BCA, sejauh ini tidak ada kritik.

10. Didalam PBI baik Dewan Komisaris maupun Direksi diwajibkan mengawasi pelaksanaan internet banking. Bagaimana hal ini dilakukan di BCA?

Setiap ada perubahan fitur di KlikBCA, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh Direksi/ Komisaris, dan setiap bulan ada laporan mengenai yang diberikan kepada Direksi/Komisaris.

Bersambung ke halaman berikutnya



Jawaban Permohonan Data a/n Sdri Dessi Syafri, Sambungan

Jawaban atas Permohonan Data
(sambungan)

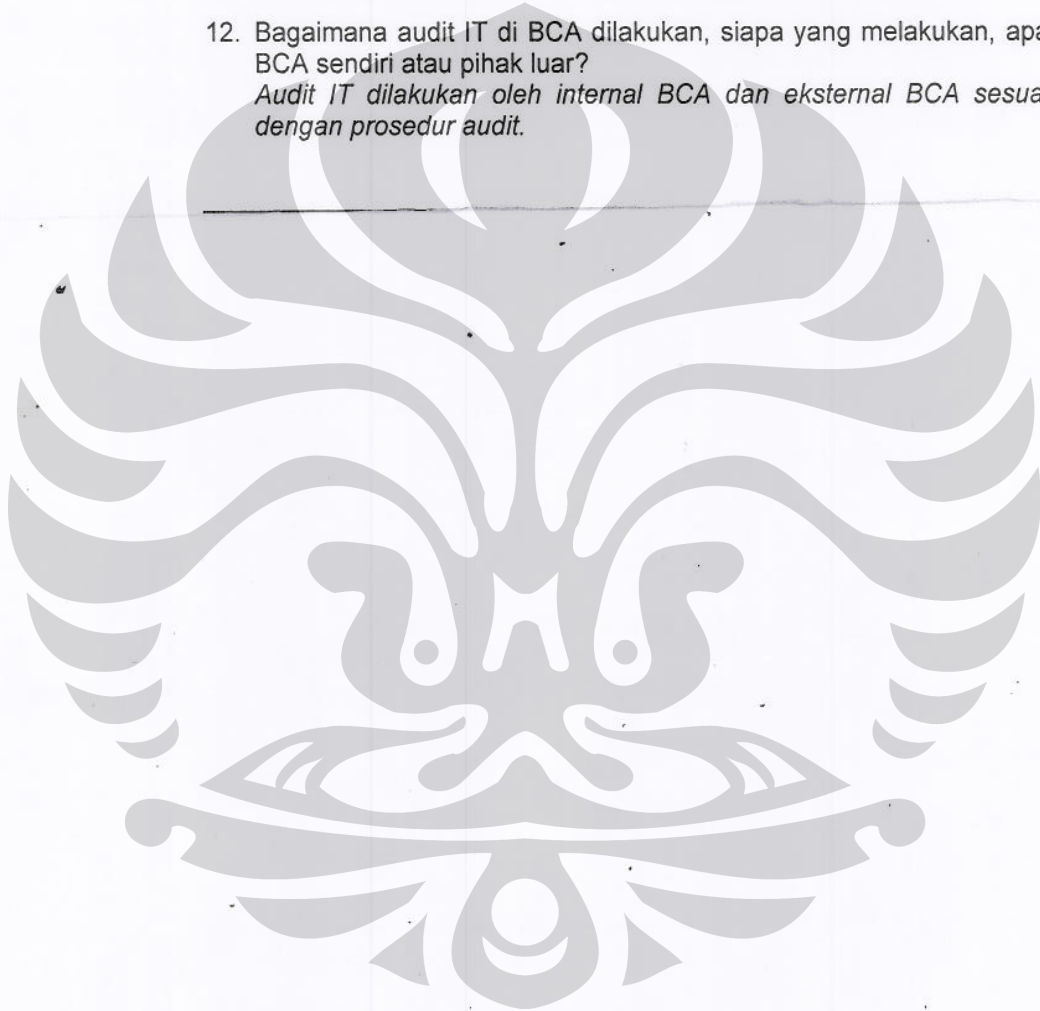
11. Sesuai PBI, di BCA harus ada Komite Pengarah IT, khususnya dalam menjalankan KlikBCA. Bagaimana Komite ini dibentuk di BCA, apa saja syarat dan prosedur untuk menjadi anggota komite itu?

Saat ini BCA telah memiliki komite pengarah IT yang disebut PMO (Project Management Office).

Anggota komite pengarah IT tersebut dari divisi- divisi yang terkait.

12. Bagaimana audit IT di BCA dilakukan, siapa yang melakukan, apa BCA sendiri atau pihak luar?

Audit IT dilakukan oleh internal BCA dan eksternal BCA sesuai dengan prosedur audit.





Klik BCA is secured with SSL 128 bit encryption.



INDIVIDUAL

USER ID dan PIN
Internet Banking dapat diperoleh pada saat Anda melakukan Registrasi Internet melalui ATM BCA. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Halo BCA 500888 atau (021) 500888 via ponsel.

HOW TO GET STARTED:
To start using BCA Internet Banking, You must first register through any BCA ATM. For further information, please contact Halo BCA 500888 or (021) 500888 via mobile phone.

Silakan memasukkan USER ID Anda

Please enter Your USER ID

Silakan memasukkan PIN Internet Banking Anda

Please enter Your Internet Banking PIN

LOGIN

Catatan : - Anda harus menggunakan '**KeyBCA**' setiap kali Anda melakukan transaksi finansial.
Situs ini hanya dapat ditampilkan dengan menggunakan Internet Explorer ver. 6.0 keatas.

Notes : - You have to use '**KeyBCA**' to do financial transaction.
- This site can be viewed only with Internet Explorer ver. 6.0 and

[PRIVACY POLICY]

Copyright © 2000  **BCA** All Rights Reserved

